



KEMENTERIAN
PERTANIAN

2024

LAPORAN

KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

**SEMESTER II TA 2024
AUDITED**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON : (021) 7806881/ 78832048 FAXIMILE (021) 7805880
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>
E-mail : hortikultura@pertanian.go.id / sekdhorti@pertanian.go.id

Jakarta, 5 Mei 2025

Nomor : B-242/KU.130/D/05/2025
Lampiran : -
Hal : Laporan Keuangan Semester II
TA 2024 Audited

Yth,
Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertanian
di
Tempat

Dalam rangka penyampaian Laporan Keuangan Semester II TA 2024 Audited Satker lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, terlampir disampaikan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Semester II TA 2024 Audited.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Pt. Direktur Jenderal,

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule M.Si
NIP 196809181993031002

Tembusan:

Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Hortikultura adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura Semester II Tahun Anggaran 2024 Audited mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Hortikultura. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 5 Mei 2025
Plt. Direktur Jenderal,

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule M.Si
NIP. 196809181993031002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	34
B.1. Pendapatan	34
B.2. Belanja	50
B.3. Belanja Pegawai	55
B.4. Belanja Barang	56
B.5. Belanja Modal	71
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	73
C.1. Aset Lancar	73
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	73
C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	73
C.1.3. Piutang Bukan Pajak	75
C.1.4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	78
C.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	80
C.1.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	82
C.1.7. Persediaan	84
C.2. Aset Tetap	86
C.2.1. Tanah	87
C.2.2. Peralatan dan Mesin	88
C.2.3. Gedung dan Bangunan	92
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	96

C.2.5. Aset Tetap Lainnya	97
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	98
C.3. Properti Invenstasi	99
C.3.1. Properti Invenstasi	99
C.3.2. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi.....	100
C.4. Piutang Jangka Panjang.....	101
C.4.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi.....	101
C.4.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.....	102
C.4.3. Piutang Jangka Panjang Lainnya.....	102
C.4.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Jangka Panjang Lainnya.....	103
C.5. Aset Lainnya	103
C.5.1. Aset Tak Berwujud	103
C.5.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	106
C.5.3. Aset Lain-lain	112
C.5.4. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	115
C.6. Kewajiban Jangka Pendek	115
C.6.1. Utang kepada Pihak Ketiga	116
C.6.2. Pendapatan di Terima di Muka.....	124
C.6.3. Uang Muka dari KPPN	125
C.7. Ekuitas	126
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	127
D.1. Kegiatan Operasional	127
D.2. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	127
D.3. Beban	129
D.4. Beban Pegawai	130
D.5. Beban Persediaan	131
D.6. Beban Barang dan Jasa	132
D.7. Beban Pemeliharaan	135
D.8. Beban Perjalanan Dinas	135
D.9. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	136
D.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi	138
D.11. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	139
D.12. Kegiatan Non Operasional	139

D.13. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	140
D.14. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	140
D.15. Beban Pelepasan Aset Non Lancar	141
D.16. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	143
D.17. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	143
D.18. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	145
D.19. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	146
D.20. Surplus/Defisit - LO	146
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	148
E.1. Ekuitas Awal	148
E.2. Surplus/Defisit-LO	148
E.3. Koreksi Nilai Persediaan	148
E.4. Koreksi Atas Reklasifikasi	149
E.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	149
E.6. Lain – Lain	150
E.7. Transaksi Antar Entitas	152
E.8. Ekuitas Akhir	163
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	164
F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	164
F.2. Pengungkapan Lain-lain	164
F.2.1. Likuidasi Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan	164
F.2.2. Temuan Dan Tindak Lanjut Temuan BPK	167
F.2.3. Monitoring Dan To Do List	170
F.2.4. Hibah Luar Negeri	185
F.2.5. Pinjaman Luar Negeri	188

Lampiran

Lampiran Laporan Keuangan (monsakti)

Lampiran Akrua Listrik dan Telepon

Lampiran SK Likuidasi

Lampiran Rekapitulasi Berita Acara Transfer TA 2024 dalam rangka Likuidasi

Lampiran Hibah

Lampiran Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA)

Lampiran Berita Acara Transfer Aset dalam rangka Menunjang Tugas dan Fungsi

Lampiran Pendapatan diterima di muka

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Pagu Anggaran dan Jumlah Satuan Kerja yang Terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Tahun 2024	13
Tabel 2 : Rincian Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2024	13
Tabel 3 : Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Direktorat Jenderal Hortikultura	19
Tabel 4 : Masa Manfaat Aset Tetap	26
Tabel 5 : Pendelegasian Kewenangan BMN	27
Tabel 6 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	31
Tabel 7 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Akun Pendapatan Per 31 Desember 2024	34
Tabel 8 : Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan (425112)	34
Tabel 9 : Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)	34
Tabel 10 : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131)	35
Tabel 11 : Rincian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024	35
Tabel 12 : Pendapatan Perizinan Pertanian (425252)	36
Tabel 13 : Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya (425289)	36
Tabel 14 : Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan(425691)	37
Tabel 15 : Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (425791)	38
Tabel 16 : Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga (425793)	38
Tabel 17 : Penjelasan Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga (425793)	38
Tabel 18 : Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811)	41
Tabel 19 : Penjelasan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811)	42
Tabel 20 : Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911)	43

Tabel 21	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912)	44
Tabel 22	: Penjelasan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912)	44
Tabel 23	: Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	50
Tabel 24	: Perubahan PAGU Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP)	50
Tabel 25	: Rincian Akun PAGU Anggaran Per 31 Desember Tahun 2024	54
Tabel 26	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024	54
Tabel 27	: Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	55
Tabel 28	: Jumlah pegawai Satker Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) s/d 31 Desember 2024	56
Tabel 29	: Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	56
Tabel 30	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang akun Detail untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024	56
Tabel 31	: Perbandingan Realisasi Belanja Barang akun Detail untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	57
Tabel 32	: Rincian Realisasi Belanja Barang Persediaan Konsumsi Per Satuan Kerja Periode 31 Desember 2024	58
Tabel 33	: Realisasi Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses Per 31 Desember 2024	59
Tabel 34	: Rincian Realisasi Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses Per Satuan Kerja Periode 31 Desember 2024	59
Tabel 35	: Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah per Kegiatan Per 31 Desember 2024	60
Tabel 36	: Rincian Akun Belanja Bantuan Pemerintah Per 31 Desember 2024	60
Tabel 37	: Rincian Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	65
Tabel 38	: Rincian Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Kegiatan Perlindungan Hortikultura	66

Tabel 39	: Rincian Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Kegiatan Perbenihan Hortikultura	68
Tabel 40	: Rincian Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	69
Tabel 41	: Rincian Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	70
Tabel 42	: Perbandingan Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	71
Tabel 43	: Perbandingan Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	73
Tabel 44	: Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan setara Kas Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	74
Tabel 45	: Penyelesaian Saldo Awal Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024	74
Tabel 46	: Perbandingan Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024	75
Tabel 47	: Perbandingan Saldo Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024	75
Tabel 48	: Rincian Piutang PNB	77
Tabel 49	: Rincian Saldo Piutang Lainnya	78
Tabel 50	: Mutasi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	79
Tabel 51	: Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2024	81
Tabel 52	: Penjelasan Koreksi	82
Tabel 53	: Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per 31 Desember 2024	82
Tabel 54	: Penjelasan Nilai Koreksi	84
Tabel 55	: Perbandingan Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024	84
Tabel 56	: Rincian Barang Konsumsi Per 31 Desember 2024	85
Tabel 57	: Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	87
Tabel 58	: Mutasi Tanah Per 31 Desember 2024	87

Tabel 59	: Rincian Tanah	87
Tabel 60	: Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember Tahun 2024	88
Tabel 61	: Penjelasan Atas Masing-Masing Mutasi Tambah Dan Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan Dan Mesin	89
Tabel 62	: Rincian Pencatatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	92
Tabel 63	: Rincian Satuan Kerja dengan Saldo Peralatan dan Mesin	92
Tabel 64	: Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Per 31 Desember Tahun 2024	93
Tabel 65	: Penjelasan atas masing-masing mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan	93
Tabel 66	: Rincian Pencatatan Belanja Modal Gedung Bangunan per 31 Desember 2024	96
Tabel 67	: Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024	96
Tabel 68	: Penjelasan atas masing-masing mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	97
Tabel 69	: Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember Tahun 2024	98
Tabel 70	: Penjelasan atas masing-masing mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya	98
Tabel 71	: Rincian Satuan Kerja dengan Saldo Aset Tetap Lainnya	98
Tabel 72	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	98
Tabel 73	: Rincian Aset Properti Investasi Per 31 Desember 2024	99
Tabel 74	: Perbandingan Aset Properti Investasi Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	100
Tabel 75	: Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	100
Tabel 76	: Rincian Aset Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi Per 31 Desember 2024	100
Tabel 77	: Mutasi Piutang Tagihan TP/TGR Per 31 Desember 2024	101
Tabel 78	: Mutasi Piutang Jangka Panjang Lainnya Per 31 Desember 2024	103
Tabel 79	: Rincian Software Per 31 Desember 2024	104
Tabel 80	: Rincian Mutasi Software Per 31 Desember Tahun 2024	106
Tabel 81	: Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya	106
Tabel 82	: Rincian kontrak pekerjaan	107
Tabel 83	: Rincian Satuan Kerja dengan Saldo Aset Tetap Henti Guna	115

Tabel 84	: Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024	116
Tabel 85	: Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	116
Tabel 86	: Rincian Utang kepada pihak ketiga Per 31 Desember Tahun 2024	116
Tabel 87	: Rincian Tunda Bayar Per 31 Desember 2024	118
Tabel 88	: Rincian RPATA Per 31 Desember 2023	118
Tabel 89	: Rincian Kontrak dengan Mekanisme RPATA Per 31 Desember 2024	119
Tabel 90	: Perbandingan Kegiatan Operasioanal Laporan Operasional (LO) periode 31 Desember 2024 dan 2023	127
Tabel 91	: Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Operasional (LO) Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	127
Tabel 92	: Selisih Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada LO dan LRA Per 31 Desember 2024	128
Tabel 93	: Rincian nilai Beban Tahun 2024 dan 2023	130
Tabel 94	: Perbandingan Beban Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	130
Tabel 95	: Perbandingan Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	131
Tabel 96	: Penjelasan Selisih	132
Tabel 97	: Perbandingan Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	132
Tabel 98	: Selisih Beban Barang dan Jasa pada LO dan LRA Per 31 Desember 2024	133
Tabel 99	: Perbandingan Beban Pemeliharaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	135
Tabel 100	: Perbandingan Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	136
Tabel 101	: Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	136
Tabel 102	: Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	138
Tabel 103	: Perbandingan perubahan saldo Penyusutan dan Amortisasi di Neraca dengan nilai Beban Penyusutan di LO	138

Tabel 104	: Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	139
Tabel 105	: Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023	140
Tabel 106	: Rincian Surplus/Defisit Pelepasan Aset NonLancar Tahun 2024	140
Tabel 107	: Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2024	142
Tabel 108	: Rincian Defisit dari Kegiatan NonOperasional Lainnya Tahun 2024	143
Tabel 109	: Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	144
Tabel 110	: Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional LO dan LRA Per 31 Desember 2024	144
Tabel 111	: Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	145
Tabel 112	: Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk Periode Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	146
Tabel 113	: Perhitungan nilai Surplus/Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023	147
Tabel 114	: Rincian Saldo Koreksi Nilai Persediaan Per 31 Desember 2024	148
Tabel 115	: Perbandingan Koreksi Nilai Persediaan Per Eselon I periode yang berakhir 31 Desember 2024	149
Tabel 116	: Perbandingan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Per Eselon I periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023	150
Tabel 117	: Rincian Koreksi Lainnya Per 31 Desember 2024	150
Tabel 118	: Penjelasan Koreksi Lain-lain periode yang berakhir 31 Desember 2024	151
Tabel 119	: Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	152
Tabel 120	: Penjelasan Selisih	153
Tabel 121	: Penjelasan terkait Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir smapai dengan 31 Desember 2024	162
Tabel 122	: Perhitungan Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023	163
Tabel 123	: Satuan Kerja Likuidasi Per 31 Desember 2024	164
Tabel 124	: Progress Tindak Lanjut LHP BPK atas LK TA 2023 Per 31 Desember 2024	167
Tabel 125	: Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Persediaan Per 31 Desember 2024	171

Tabel 126	: Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap Per 31 Desember 2024	172
Tabel 127	: Transfer Piutang PNBPN Per 31 Desember 2024	174
Tabel 128	: Transfer Persediaan Per 31 Desember 2024	176
Tabel 129	: Transfer Aset Tetap dalam rangka Menunjang Tugas dan Fungsi 31 Desember 2024	178
Tabel 130	: Transfer Aset Tetap dalam rangka Proses Likuidasi 31 Desember 2024	179
Tabel 131	: Transfer Piutang Jangka Panjang dalam rangka Proses Likuidasi 31 Desember 2024	182
Tabel 132	: Transfer Aset Lain – Lain 31 Desember 2024	185
Tabel 133	: Hibah Luar Negeri	185
Tabel 134	: Rincian Atas Pinjaman Luar Negeri	188
Tabel 135	: Rincian Alokasi Dana Pinjaman Luar Negeri	188



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON : (021) 7806881/ 78832048 FAXIMILE (021) 7805880
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>
E-mail : hortikultura@pertanian.go.id / sekidthorti@pertanian.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024 Audited sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jakarta, 5 Mei 2025
Ptt. Direktur Jenderal,

Dr. H. Muhammad Taufiq Ratule M.Si
NIP. 196809181993031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2,664,099,977.00 atau mencapai 317% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp839,797,000,00

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp382,133,111,712.00 atau mencapai 88% dari alokasi anggaran sebesar Rp433,499,771,000.00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset Per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp600,731,511,541.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp19,237,400,181.00 Aset Tetap (netto) sebesar Rp576,860,774,896.00 Propeti Investasi (netto) sebesar Rp1,701,783,783.00 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp2,931,552,681.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp6,289,423,077.00 dan Rp594,442,088,464.00

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp552,040,985.00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp399,438,894,570.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-398,886,853,585.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar

Biasa masing-masing sebesar deficit Rp-3,485,977,191.00 dan Rp0.00 Sehingga entitas mengalami Defisit – LO sebesar Rp-402,372,830,776.00

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp442,494,999,615.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-402,372,830,776.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi dan lain-lain senilai Rp-3,255,024,435.00 dan Rp-390,525,533.00 serta ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp557,574,944,060.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp594,442,088,464.00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk semester II Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	31-Dec-24		31-Dec-23	
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.664.099.977	1.824.302.977	68,48	2.182.382.035
Jumlah Pendapatan		2.664.099.977	1.824.302.977	68,48	2.182.382.035
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	26.231.736.000	6.174.025.069	23,54	23.316.874.440
Belanja Barang	B.3	397.390.580.000	350.189.818.543	88,12	851.566.868.217
Belanja Modal	B.4	9.877.455.000	5.769.268.100	58,41	7.571.777.653
Jumlah Belanja		433.499.771.000	382.133.111.712	88,15	882.455.520.310

Jakarta, 5 Mei 2025
Plt. Direktur Jenderal Hortikultura

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule M.Si.
NIP. 196809181993031002

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	31-Dec-24	31-Dec-23
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	650.500
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	-	17.957.672
Piutang Bukan Pajak	C.1.3	757.451.057	772.951.057
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.4	(237.667.328)	(243.120.621)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.5	520.352.936	529.830.436
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.6	4.554.768.024	4.636.951.194
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.7	(1.872.276.848)	(1.783.436.803)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	C.1.8	2.791.621.848	2.853.514.391
Persediaan	C.1.9	16.036.125.276	7.812.579.206
Jumlah Aset Lancar		19.237.400.181	11.214.532.205
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	462.052.652.000	307.675.861.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	94.296.555.296	103.568.051.864
Gedung dan Bangunan	C.2.3	122.100.621.945	120.521.908.440
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	5.509.746.350	6.982.215.729
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	15.191.850	52.169.850
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.2.6	(107.113.992.545)	(112.279.364.032)
Jumlah Aset Tetap		576.860.774.896	426.520.842.851
Properti Investasi			
Properti Investasi	C.3.1	2.153.825.283	2.153.825.283
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.3.2	(452.041.500)	(401.241.984)
JUMLAH Properti Investasi		1.701.783.783	1.752.583.299
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.5.1	4.353.140.125	4.353.140.125
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.5.2	771.806.733	1.286.012.000
Aset Lain-lain	C.5.3	4.743.936.239	8.678.274.487
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.5.4	(6.937.330.416)	(10.138.107.070)
Jumlah Aset Lainnya		2.931.552.681	4.179.319.542

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

Uraian	Catatan	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah Aset		600.731.511.541	443.667.277.897
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.6.1	6.130.079.078	1.084.384.448
Pendapatan Diterima Dimuka	C.6.2	159.343.999	87.243.334
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		6.289.423.077	1.172.278.282
Jumlah Kewajiban		6.289.423.077	1.172.278.282
Ekuitas			
Ekuitas	C.7.1	594.442.088.464	442.494.999.615
Jumlah Ekuitas		594.442.088.464	442.494.999.615
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		600.731.511.541	443.667.277.897

Jakarta, 5 Mei 2025
 Pkt. Direktur Jenderal Hortikultura



Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule M.Si.
 NIP. 196809181993031002

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	31-Dec-24	31-Dec-23
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	552.040.985	1.042.738.685
JUMLAH PENDAPATAN		552.040.985	1.042.738.685
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	26.174.025.069	23.316.874.440
Beban Persediaan	D.3	1.749.693.275	8.192.896.371
Beban Barang dan Jasa	D.4	76.081.010.386	107.602.240.030
Beban Pemeliharaan	D.5	3.583.400.811	3.298.674.674
Beban Perjalanan Dinas	D.6	85.550.650.259	123.569.233.657
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	196.715.037.163	643.777.418.621
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	9.553.483.964	10.279.703.610
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	31.593.643	(217.166.327)
JUMLAH BEBAN		399.438.894.570	919.819.875.076
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(398.886.853.585)	(918.777.136.391)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	(4.531.699.058)	(3.983.368.906)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	881.008.805	85.835.999
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	5.412.707.863	4.069.204.905
Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	1.045.721.867	612.318.762
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	1.319.639.173	880.441.767
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	273.917.306	268.123.005
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(3.485.977.191)	(3.371.050.144)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(402.372.830.776)	(922.148.186.535)
SURPLUS/DEFISIT - LO		(402.372.830.776)	(922.148.186.535)

Jakarta, 5 Mei 2025
Plt. Direktur Jenderal HortikulturaDr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule M.Si.
NIP. 196809181993031002

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

Uraian	Catatan	31-Dec-24	31-Dec-23
EKUITAS AWAL	E.1	442.494.999.615	484.148.170.978
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(402.372.830.776)	(922.148.186.535)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(3.255.024.435)	221.876.897
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	(2.960.427.677)	456.811.089
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.2	95.928.775	(224.043.750)
Lain-Lain	E.4	(390.525.533)	(10.890.442)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	557.574.944.060	880.273.138.275
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	151.947.088.849	(41.653.171.363)
EKUITAS AKHIR		594.442.088.464	442.494.999.615

Jakarta, 5 Mei 2024

Plt. Direktur Jenderal Hortikultura

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule M.Si.
NIP. 196809181993031002

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Hortikultura

Direktorat Jenderal Hortikultura didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah antara lain untuk :

- a. mengelola dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;
- b. memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura;
- c. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- d. meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;
- e. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha
- f. memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen hortikultura nasional;
- g. meningkatkan sumber devisa negara;
- h. meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.

Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Entitas berkedudukan di Jalan AUP No. 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan kebijakan, regulasi teknis, dan administrasi di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya hortikultura. Melalui peran tersebut diharapkan tujuan dari penyelenggaraan pembangunan hortikultura dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan baik dari sasaran produksi, produktivitas, mutu serta daya saing yang berkesinambungan.

Pada awal tahun 2020, Kementerian Keuangan menginisiasi perancangan kembali (restrukturisasi) sistem penganggaran dan program indikatif Kementerian/Lembaga yang mengakibatkan penyederhanaan program lingkup Kementerian Pertanian pada tahun 2021-2024 yang semula memiliki 12 program menjadi 5 program.

Restrukturisasi Program Kementerian Pertanian menyebabkan adanya restrukturisasi program pada Eselon I. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya perubahan program Direktorat Jenderal Hortikultura.

Berdasarkan Kerangka kebijakan dan strategi pembangunan pertanian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Revisi II di tahun 2021, maka program Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2020 – 2024 yang semula adalah “Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura” mengalami perubahan menjadi 3 (tiga) program. Adapun program Ditjen Hortikultura pada tahun 2021 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan
3. Program Dukungan Manajemen

Restrukturisasi program Direktorat Jenderal Hortikultura menyebabkan adanya penyesuaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2021-2024. Adapun Sasaran Program tersebut mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Pertanian, meliputi :

1. Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri.
2. Terkendalnya Serangan OPT dan Penanganan DPI pada Tanaman Hortikultura.
3. Tersedianya Sarana Hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Hortikultura.
5. Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Hortikultura.
6. Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang Efektif, Efisien, dan Terkelolanya Anggaran yang Akuntabel.

Untuk memastikan visi dan misi tercapai, Direktorat Jenderal Hortikultura juga mengalokasikan anggaran belanja pada kegiatan Bantuan Pemerintah. Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor:1442/Kpts/HK.320/0/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2024. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:

1. Bantuan Operasional, dapat diberikan kepada petani, pemuda tani, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah;
2. Bantuan Sarana/Prasarana, dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, kelompok petani/gabungan kelompok tani, gabungan kelompok tani bersama, siswa SMK-PP, brigade alsintan, Unit Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah, Brigade pengamat Organisme

- Pengganggu Tumbuhan/Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan/Brigade kebakaran lahan dan kebun (Karlabun);
3. Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/ Bangunan dapat diberikan kepada lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, kelompok petani/gabungan kelompok tani, gabungan kelompok tani bersama, brigade alsintan, Unit Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, Brigade pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan/Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan/Brigade kebakaran lahan dan kebun (Karlabun);
 4. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA, dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga non pemerintah, lembaga masyarakat desa hutan, regu pengendali OPT, rumah tangga miskin, siswa SMK-PP, mahasiswa, alumni mahasiswa, kelompok petani/gabungan kelompok tani, gabungan kelompok tani bersama, kelompok penangkar, kelompok usaha bersama, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan.

Direktorat Jenderal Hortikultura sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 – 2024 tujuan pembangunan hortikultura adalah:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani hortikultura
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing hortikultura.
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura

Sedangkan indikatornya adalah

1. Nilai Tukar Petani (NTP) Hortikultura
2. Pertumbuhan PDB Hortikultura
3. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan mengacu Cara Bertindak (CB) Kementerian Pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan daya saing produk pertanian dan mencapai tujuan pembangunan hortikultura, strategi pembangunan hortikultura yang menjadi fokus utama tahun 2021-2024 adalah:

Pengembangan Kampung Hortikultura (Sayuran, Tanaman Obat, Buah, dan Florikultura).

Fokus Pertama, Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka mewujudkan amanat Menteri Pertanian terkait CB I adalah dengan menerapkan strategi Pengembangan Kampung Hortikultura yang bertujuan untuk membangun Kawasan Hortikultura yang solid, dan tangguh dengan skala ekonomi yang mumpuni.

Kampung-kampung Hortikultura dibangun dalam 1 (satu) wilayah administratif desa dengan luasan 5 - 10 Ha bergantung pada komoditas yang dikembangkan pada kampung tersebut. Kampung Hortikultura mengusung konsep *one village one variety* dan komoditas unggulan yang dipilih berdasarkan permintaan pasar untuk menjamin pemasaran hasilnya. Selain itu, komoditas yang dikembangkan harus sesuai agroekosistem lokasi pengembangan, masyarakat sekitar antusias merawat pertanamannya serta adanya komitmen tinggi dari pemimpin daerah setempat. Hal ini merupakan fondasi utama dari pembentukan Kampung Hortikultura. Keberhasilan pengembangan Kampung Hortikultura sangat bergantung pada aspek ekonomi, sosial budaya serta dukungan dari pemerintah setempat.

Kawasan pada kampung-kampung ini akan difasilitasi bantuan secara terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilir, antara lain berupa benih bermutu, saprodi (pupuk organik, anorganik, kapur pertanian/dolomit, mulsa plastik, dan lain-lain), Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Ramah Lingkungan, Sarana dan Prasarana Pascapanen serta Pengolahan. Kampung Hortikultura akan diregistrasi dan produk yang dihasilkan akan disertifikasi dengan pengawalan dan pendampingan secara intensif. Diharapkan pengembangan hortikultura melalui pendekatan kampung ini dapat lebih memudahkan masuknya dukungan fasilitas lainnya seperti akses permodalan (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, pemasaran sehingga kedepan dapat mendukung pembentukan korporasi petani.

Sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia dalam hal Pengembangan Korporasi Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura telah menerjemahkannya dengan mewujudkan Kebijakan Pengembangan Kampung Hortikultura yang nantinya akan bertransformasi menjadi Korporasi Petani. Dalam program tersebut, pemerintah hadir dalam setiap siklus pertanian mulai dari persiapan lahan, pengelolaan tanaman, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani. Program pengembangan kampung-kampung hortikultura akan dilakukan secara berkesinambungan, sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak terbentuk kampung-kampung penghasil produk hortikultura bermutu yang seragam varietasnya guna pemenuhan konsumsi domestik, kebutuhan bahan baku industri hortikultura dan ekspor produk hortikultura segar maupun olahan. Kampung hortikultura menjadi lokus kegiatan terintegrasi dengan instansi/Lembaga lain sehingga terbentuk pengutuhan dukungan pengembangan yang mengarah kepada peningkatan daya saing yang berkelanjutan. Disamping fungsinya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi segar dan olahan, kampung hortikultura berpotensi menjadi lokasi agrowisata (agro-eduwisata) sehingga

dapat secara langsung memberi alternatif tujuan pariwisata daerah setempat dan turut mendorong pemasyarakatan hortikultura kepada masyarakat luas.

Kampung hortikultura terdiri dari komoditas buah, florikultura dan sayuran, dimana pemilihan varietas disesuaikan dengan kondisi agroklimat yang ada serta preferensi masyarakat didalam pemilihan varietasnya

Sedangkan untuk pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat akan menyesuaikan dengan kondisi lahan pengembangan kawasan didalam skala ekonomi seluas minimal 10 (sepuluh) hektar dalam satu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan sesuai dengan usulan dan penetapan Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) oleh Dinas Pertanian setempat serta mempertimbangkan pendekatan integrasi hulu-hilir dihitung menjadi 1 (satu) kampung.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Semester II Adited TA 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hortikultura. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor: S-3/PB/2025 tanggal 1 Januari 2025 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2024 (Audited) termasuk Direktorat Jenderal Hortikultura bahwa Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2024 (Audited) disusun berdasarkan data transaksi yang dihasilkan aplikasi SAKTI sampai dengan 31 Desember 2024 yang dibukukan menggunakan periode 14.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun TA 2024 (Audited) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Direktorat Jenderal Hortikultura termasuk didalamnya jenjang struktural dibawah Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

- a. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura disusun berdasarkan hasil laporan keuangan seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Aplikasi SAKTI dengan *cut off* tanggal 5 April 2025.
- b. Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-018.04-0/2024 tanggal 23 November 2023, pada Tahun Anggaran 2024 Direktorat Jenderal Hortikultura menerima

alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp1,006,491,086,000.00. Selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Hortikultura telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2024 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp433,499,771,000.00.

Tabel 1. Pagu Anggaran dan Jumlah Satuan Kerja yang Terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Tahun 2024

Tahun Anggaran	Jumlah Satker	Jenis Sumber Dana APBN (Rp)
2024	72	433,499,771,000.00

- c. Jumlah satuan kerja di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 sebanyak 72 satker (DIPA). Rincian Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Rincian Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2024

No	Kode Satker	Nama Satker	KP	DK	TP PROV	TP
1	019031	Dinas Kelautan Dan Pertanian Provinsi Dki Jakarta		√		
2	029027	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat		√		
3	029036	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kab.Cianjur				√
4	029160	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat			√	
5	039012	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah		√		
6	039152	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah			√	
7	049025	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Diy		√		
8	049088	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Diy			√	
9	059000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur		√		
10	059056	Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Banyuwangi				√
11	059179	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur			√	
12	069077	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh		√		
13	069133	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh			√	
14	079025	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara		√		
15	079125	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara			√	
16	089009	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat		√		
17	089131	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat			√	
18	099033	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau		√		

No	Kode Satker	Nama Satker	KP	DK	TP PROV	TP
19	099315	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau			√	
20	109005	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi		√		
21	109905	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi			√	
22	119000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan		√		
23	119130	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan			√	
24	129000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung		√		
25	129113	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung			√	
26	139030	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat		√		
27	139126	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat			√	
28	149000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah		√		
29	149115	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah			√	
30	159000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan		√		
31	159108	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan			√	
32	169025	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur		√		
33	169113	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur			√	
34	179021	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara		√		
35	179104	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara			√	
36	189016	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah		√		
37	189916	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah			√	
38	192135	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Kabupaten Enrekang				√
39	199026	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan		√		
40	199092	Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng				√
41	199126	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan			√	
42	209065	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara		√		
43	209108	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara			√	
44	219000	Dinas Pertanian Provinsi Maluku		√		
45	219091	Dinas Pertanian Provinsi Maluku			√	
46	229027	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali		√		
47	229049	Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan				√
48	229100	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali			√	
49	239009	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat		√		
50	239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat			√	

No	Kode Satker	Nama Satker	KP	DK	TP PROV	TP
51	249030	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur		√		
52	249159	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur			√	
53	259018	Dinas Pertanian Dan Pangan Provinsi Papua		√		
54	259098	Dinas Pertanian Dan Pangan Provinsi Papua			√	
55	269000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu		√		
56	269057	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Kepahiang				√
57	280151	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara			√	
58	289034	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara		√		
59	299005	Dinas Pertanian Provinsi Banten		√		
60	299381	Dinas Pertanian Provinsi Banten			√	
61	309032	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		√		
62	309901	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			√	
63	319002	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo		√		
64	319089	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo			√	
65	329026	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau		√		
66	339156	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat		√		
67	340056	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat		√		
68	340142	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat			√	
69	417673	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara		√		
70	417674	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara			√	
71	419022	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Sinjai				√
72	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	√			
JUMLAH			1	34	30	7

Berdasarkan DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2025 Nomor : DS:1757-6079-0670-3090 tanggal 2 Desember 2024, pada tahun anggaran 2025 tidak terdapat alokasi anggaran belanja pada satuan kerja dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, sehingga satuan kerja yang masih terdapat saldo asset lancar, asset tetap, piutang jangka panjang, serta asset lainnya dilakukan proses likuidasi pada Tahun Anggaran 2024. Adapun satuan kerja yang proses likuidasinya belum selesai di TA 2024 yaitu satuan kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (0218.04.059000DK) serta Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara (018.04.280151TP). Pengungkapan terkait proses likuidasi dijelaskan pada Pos Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Hortikultura menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 (Audited) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beban yang berasal dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (526) dan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dan jasa (57) diakui dan disajikan sebagai beban apabila sudah diterbitkan berita acara serah terima (BAST).

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Properti Investasi, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 2) Kas Lainnya di BLU digunakan menampung dana yang sepenuhnya belum mutlak menjadi penerimaan Satker BLU diantaranya adalah penerimaan penjualan layanan yang ada pada Satker BLU yang pada saat uang diterima oleh satker BLU namun pelanggan belum menerima secara penuh layanan dari satker BLU selain menampung penerimaan yang belum bisa diakui menjadi penerimaan satker BLU.
- 3) Kas pada Badan Layanan Umum merupakan rekening operasional yang berasal dari penerimaan satker BLU yang sudah mutlak menjadi penerimaan satker BLU. Kas BLU meliputi saldo uang tunai, saldo rekening dan deposito yang berada dibawah tanggung jawab bendahara BLU yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satker Badan Layanan Umum (BLU).
- 4) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- 5) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 6) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

**Tabel 3. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang
Direktorat Jenderal Hortikultura**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 7) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- 8) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Harga standar (kapitalisasi) apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP Sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Direktorat Jenderal Hortikultura sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Pada peraturan tersebut pada Pasal 12 Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

1. Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526111);
2. Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526112);
3. Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526113);
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526114);
5. Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526115);
6. Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemda (526211);
7. Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemda (526212); dan
8. Belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

Sedangkan pada Pasal 36 bahwa persediaan yang langsung diserahkan kepada pihak penerima, transaksi penyerahan/dijual kepada masyarakat/pemda dibuktikan dengan dokumen sumber pengeluaran persediaan untuk:

- a) Satuan Kerja Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dapat berupa:
 - a. BAST Persediaan antara pihak pelaksana pengadaan dengan penerima dan diketahui oleh satuan kerja;
 - b. BAST Persediaan antara kepala satuan kerja atau PPK dengan penerima;
 - c. BAST Persediaan antara Eselon I dengan penerima/SKPD; atau
 - d. Surat pernyataan persediaan telah diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah dari Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk.
- b) Kantor Pusat dan Kantor Daerah dapat berupa:
 - (1) Surat Keputusan Hibah;
 - (2) BAST Persediaan antara Eselon I dengan penerima/SKPD;

- (3) BAST Persediaan antara kepala satuan kerja/PPK dengan penerima;
- (4) BAST Persediaan antara pihak pelaksana pengadaan dengan penerima dan diketahui oleh satuan kerja; atau
- (5) Surat pernyataan persediaan telah diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah dari Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk.

Disamping itu, Pasal 43 menjelaskan bahwa seluruh pelaporan persediaan pada tanggal pelaporan dicatat berdasarkan *opname* fisik. Persediaan dilakukan untuk mengetahui jumlah Persediaan dan kondisi catatan dalam pembukuan pengelolaan Persediaan yang belum dipakai. *Opname* fisik Persediaan sebagaimana dimaksud dilakukan secara sensus per semester atau periode laporan.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-1984/PB/2017 Tanggal 21 Februari 2017 Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526) berupa uang yang meliputi:

- Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang (526121)
- Belanja Alsin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang (526122)
- Belanja Gedung & Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang (526123)
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang (526124)
- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah dalam bentuk uang (526312)

Hal ini dipertegas melalui Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-154/PB/2021 tentang Perubahan Kedua atas KEP-311/PB/2018 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2021 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2021 pada Pasal 15 menyebutkan, mekanisme pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah berupa uang yang meliputi:

- (1) Pencairan dana Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
- (2) Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan Kegiatan.
- (3) Pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme UP, TUP, dan LS ke rekening penerima bantuan.
- (4) Pencairan dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang yang nilai bantuannya di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a) Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana Bantuan Pemerintah setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; dan
 - b) Pembayaran Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana Bantuan Pemerintah, dapat dilakukan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen).
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dapat dilakukan apabila pertanggungjawaban pembayaran tahap I belum diinput ke dalam aplikasi Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sedangkan dalam Pasal 19, dinyatakan:

- (1) Penerima dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai dan paling lambat pada akhir tahun anggaran, meliputi:
 - a. Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
 1. Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 2. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 3. pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan
 - b. Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat *geo tagging*; dan

- c. memasukkan pertanggungjawaban bantuan uang ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi dokumen BAST, Surat Keputusan Penerima, rekening penerima, jenis barang, dan kuitansi pertanggungjawaban paling lambat 30 September 2024 atau paling lambat *audited*.
 - d. Dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan *remote area* yang tidak terdapat sinyal telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat tidak memuat *geo tagging*.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana sampai dengan akhir tahun anggaran (30 September 2024), penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK dan dilakukan input pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.
 - (3) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
 - (4) PPK mengesahkan berita acara serah terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Sedangkan dalam Pasal 17, mekanisme pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah berupa barang adalah :

- (1) Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan pertanggungjawaban.
- (2) Perencanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Satker yang mengelola DIPA Kegiatan.
- (3) Perencanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan penetapan CPCL.
- (4) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Satker yang mengelola DIPA kegiatan.
- (5) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh penyedia barang sampai ke titik bagi Bantuan Pemerintah sesuai dengan kontrak.

Selain itu dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa:

- (1) Pemeriksaan dan serah terima barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia barang dengan PPK dengan memperhatikan isi dokumen kontrak.
- (2) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK sebelum disalurkan ke titik bagi.
- (3) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan kontrak di titik bagi barang.
- (4) Hasil pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh PPK dan penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan spesifikasi teknis barang, meliputi merek, nomor seri barang, dan karakteristik barang lainnya;
 - a. dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - b. dibuatkan dokumen Berita Acara Penerimaan barang oleh PPK.

Pasal 19 menyatakan bahwa:

- (1) Penyedia barang melakukan input dokumen BAST yang dilengkapi dengan foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat *geo tagging* ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura pada saat Bantuan Pemerintah diserahkan di titik bagi.
- (2) Dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan remote area yang tidak terdapat sinyal telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak memuat *geo tagging*.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan termin, realisasi sisa pembayaran tahap akhir tidak dapat dilakukan apabila dokumen BAST belum diinput pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan sekaligus, pembayaran tidak dapat dilakukan apabila dokumen BAST belum diinput pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura.

b. Aset Tetap

- 1) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - 4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
 - 5) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
 - 6) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
 - 7) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan.
- c. Penyusutan Aset Tetap
- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK

Nomor 90/PMK.06/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Tabel 4. Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Direktorat Jenderal Hortikultura belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan BMN) telah diatur dalam

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 788/Kpts/PL.310/11/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang Kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura, sebagai berikut :

Tabel 5. Pendelegasian Kewenangan BMN

Kegiatan	Jenis dan Nilai BMN	Pengelola Barang		
		KPKNL	Kanwil DJKN	PKNSI
		Tanah dan Bangunan		
		sd 5 M	>5 sd 10 M	>10 sd 25 M
		Selain Tanah dan Bangunan		
		sd 2,5	>2,5 sd 5 M	>5 sd 10M
a.	Mendandatangani surat pernyataan, surat keterangan, dan naskah dinas lain terkait PSP BMN	Satker	Satker	Satker
b.	Mengusulkan sewa	Satker	Eselon I	Sekjen
c.	Penetapan pelaksana sewa dan penandatanganan perjanjian sewa	Satker	Satker	Satker
d.	Mengusulkan pinjam pakai	Satker	Eselon I	Sekjen
e.	Penandatanganan pinjam pakai	Eselon I	Eselon I	Eselon I
f.	Mengusulkan KSP	Satker	Eselon I	Sekjen
g.	Pemilihan Mitra KSP dan penandatanganan perjanjian Kerjasama	Satker	Satker	Satker

e. Properti Investasi

Pemerintah telah menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi (PSAP 17) yang penerapannya mulai berlaku efektif Tahun 2022. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

1) Identifikasi

Untuk menentukan apakah suatu BMN yang dicatat sebagai pos aset tetap tanah dan/atau pos aset tetap gedung dan bangunan memenuhi properti investasi. dapat dilakukan penilaian karakteristik kondisinya memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. BMN tanah yang intensi dalam jangka panjang (lebih dari 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan) untuk memperoleh kenaikan nilai. dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan untuk pelayanan kepada

masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar entitas pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah) dalam jangka pendek (dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan). Intensi ini dapat berdasarkan kepada dokumentasi formal penatausahaan BMN. asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan.

- b. BMN tanah namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan BMN. asersi manajemen atau informasi yang dipersamakan. BMN tanah yang oleh pengguna barang pada kementerian negara/lembaga belum ditentukan penggunaannya dalam jangka pendek. yaitu dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan. sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan untuk pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar entitas pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah).
- c. BMN gedung dan bangunan yang disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dipersamakan.
- d. BMN gedung dan bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi sesuai dengan dokumentasi formal penatausahaan BMN. asersi manajemen atau informasi yang dipersamakan
- e. BMN properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan BMN. asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan

Suatu BMN yang dicatat sebagai tanah dan/atau gedung dan bangunan tidak memenuhi kriteria properti investasi memperhatikan karakteristik kondisinya memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. BMN properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan untuk pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan untuk pelayanan kepada masyarakat. misalnya BMN properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan BMN. asersi manajemen dalam laporan keuangan

atau informasi yang dipersamakan.

- b. Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dipersamakan.
- c. BMN properti yang secara substansinya digunakan sendiri. termasuk property yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri. properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri. dan property yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan BMN. asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan.
- d. BMN properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian atau dokumen yang dipersamakan
- e. BMN properti yang dimiliki untuk bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar. misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar. Dalam hal ini. identifikasi tunggal terhadap BMN properti dengan tarif sewa di bawah harga pasar tidak menjadikan BMN properti tersebut tidak memenuhi kriteria property investasi.
- f. BMN properti yang dimiliki untuk tujuan strategis berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan BMN. asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan.
- g. BMN properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai tetapi sesekali disewakan kepada pihak lain berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan BMN. asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan. Misalkan pemerintah memiliki BMN properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- h. BMN Properti yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan BMN. asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan.
- i. Untuk BMN properti yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah jika :

- Masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual terpisah dan ditatausahakan BMN-nya tidak secara terpisah; atau
- Masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah dan ditatausahakan BMN-nya secara terpisah. namun tidak memenuhi kriteria signifikansi properti investasi yaitu :
 - ❖ Luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai kurang dari 3:4 ($< 75\%$) atau luasan area yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah lebih dari 1:4 ($> 25\%$); atau
 - ❖ Intensitas BMN yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari pihak eksternal dengan perbandingannya kurang dari 3:4 ($< 75\%$) atau intensitas BMN dengan perbandingan lebih dari 1:4 ($> 25\%$) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

2) Analisis

Berdasarkan hasil identifikasi karakteristik tanah dan/atau bangunan apakah memenuhi kriteria Properti Investasi atau tidak. didapatkan beberapa tanah dan/atau bangunan yang memenuhi kriteria Properti Investasi. Hal tersebut didasarkan pada penggunaan tanah dan/atau bangunan yang secara pemanfaatannya digunakan untuk mendapatkan pendapatan sewa. dengan luasan yang disewakan lebih dari 75% luasan dari masing-masing NUP tanah dan/atau bangunan tersebut. Tanah dan/atau bangunan tersebut juga tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tanah dan/atau bangunan tersebut juga tidak digunakan untuk bantuan sosial ataupun digunakan untuk tujuan strategis dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi.

3) Deklarasi

Sesuai dengan PMK Nomor 231/PMK.05/2022 properti yang diperoleh sebelum tahun 2022 dan memenuhi kriteria karakteristik pengakuan properti investasi. maka BMN properti dimaksud diakui sebagai properti investasi secara prospektif. yaitu nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/ atau pos Aset Lainnya. tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

f. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

g. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- 5) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

h. Aset Hewan Ternak dan Tanaman

- 1) Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan *Tahun 2023 (Audited)* masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.
- 2) Direktorat Jenderal Hortikultura berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman Yang Diperoleh Dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.
- 3) Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 (*Unaudited*), kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Hortikultura.

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1. PENDAPATAN**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 2.664.099.977,00 atau mencapai 317,23% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp839.797.000,00. Sedangkan realisasi pendapatan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2,182,382,035.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

**Tabel 7. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Berdasarkan Akun Pendapatan
Per 31 Desember 2024**

Kode Akun	Uraian	Nilai Anggaran 2024 (Rp)	Nilai Realisasi 2024 (Rp)	%	Nilai Realisasi 2023 (Rp)
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	519.650.000	1.015.279.341	195,38	567.655.499
4252	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	147.620.000	71.539.000	48,46	179.431.300
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	172.527.000	255.502.675	148,09	316.975.275
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	0	133.716.179	0	404.491.048
4258	Pendapatan Denda	0	38.949.552	0	157.999.694
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	1.149.113.230	0	555.829.219
Jumlah		839.797.000	2.664.099.977	317.23	2.182.382.035

Rincian Realisasi Pendapatan tersaji dibawah ini :

**Tabel 8. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian,
Perkebunan, Peternakan (425112)**

Kode Satker	Nama Satker	Nilai
239009	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	34.215.000,00
Jumlah		34.215.000,00

Pada Satker Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa penjualan benih dan Sertifikasi Peredaran Benih

Tabel 9. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)

Kode Satker	Nama Satker	Nama Barang	Nup	Nopol	Merek	Nilai Barang
625875KP	Direktorat Jenderal Hortikultura	Micro Bus	2	B 7051 SPA	Hino Dutro 130 MDL PS	113.187.000
		Micro Bus	4	B 7053 SPA	Hino Dutro 130 MDL PS	113.367.000
		Sedan	8	B 1904 GQ	Toyota Altis	37.294.000
		Jeep	22	B 1074 SQH	Suzuki Grand Vitara JLX	52.427.000
		Jeep	17	B 1571 MQ	Suzuki Grand Vitara JLX	59.637.000

Kode Satker	Nama Satker	Nama Barang	Nup	Nopol	Merek	Nilai Barang
		Jeep	21	B 1073 SQH	Suzuki Grand Vitara JLX	52.427.000
		Jeep	19	B 1075 SQH	Suzuki Grand Vitara JLX	62.434.000
		Jeep	26	B 1401 SQH	Mitsubishi Pajero Dakar	79.217.800
		Micro Bus	5	B 1570 WQ	Honda Stream	48.485.110
		Micro Bus	6	B 7106 QK	Mitsubishi Colt L300DIS	46.305.000
		Micro Bus	7	B 1178 MQ	Honda Stream	47.762.400
		Micro Bus	22	B 1896 FQ	Toyota Avanza	57.111.150
		Micro Bus	24	B 1854 FQ	Toyota Avanza	53.685.150
		Sepeda Motor	101	B 3386 SQB	Honda Tiger SHL	7.180.610
		Sepeda Motor	109	B 3435 SQB	Honda Tiger SHL	7.692.610
		Sepeda Motor	116	B 3389 SQB	Honda Mega Pro 150 W	4.189.525
		Inventaris Kantor			Barang Inventaris Kantor	38.606.450
JUMLAH						881.008.805

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berasal dari Satker Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp881.008.805,00 yaitu penjualan kendaraan bermotor roda 4 dengan nomor NTPN B773A48VVESSGC4TV sebesar Rp490.773.000,00 Penjualan kendaraan bermotor roda 4 dan Roda 2 dengan nomor NTPN AB75A7QLUPC2524N sebesar Rp 272.411.555,00 dan berupa Barang Inventaris Kantor sejumlah 124 dengan nomor NTPN 9622361QV3V1OLHR sebesar Rp38.606.450,00 dan penjualan kendaraan bermotor roda 4 dengan nomor NTPN 83A4F48VVF8FCRS2 sebesar Rp79.217.800,00

Tabel 10. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131)

Kode Satker	Nama Satker	Nilai
625875KP	Direktorat Jenderal Hortikultura	100.055.536,00
Jumlah		100.055.536,00

Pada tahun 2024, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berasal dari Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11. Rincian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian Pendapatan	Tanggal Bayar	NTPN	Nilai (Rp)
1	Pembayaran Sewa Ruang Koperasi Konsumen Direktorat Jenderal Hortikultura Seluas 43,20 M2 Periode 2 September 2022 sd 31 Agustus 2023	31-Mei-24	36B4055DF9CME034	13.572.049,00

No.	Uraian Pendapatan	Tanggal Bayar	NTPN	Nilai (Rp)
2	Pembayaran Sewa Ruang Koperasi Konsumen Direktorat Jenderal Hortikultura Seluas 43,20 M2 Periode 1 September 2023 sd 31 Mei 2024.	31-Mei-24	E536448VVEQA2AOE	10.179.037,00
3	Pembayaran Sewa Ruang Koperasi Konsumen Direktorat Jenderal Hortikultura Seluas 52,20 M2 Periode 1 Juni 2024 sd 31 Agustus 2024.	31-Mei-24	CC42F0NA04GODRG4	4.099.890,00
4	Pembayaran Sewa Ruang Koperasi Konsumen Direktorat Jenderal Hortikultura Seluas 52,20 M2 Periode 1 September 2024 sd 31 Agustus 2025.	31-Mei-24	DE2262G4VPLH8KC6	16.399.560,00
5	Pembayaran Sewa Tanah Gedung dan Bangunan ATM BRI Jangka Waktu 36 Bulan Terhitung Tanggal 01-01-2024 s/d 31-12-2026	27-Jun-24	B9C7D48VVET599C5	55.805.000,00
Jumlah				100.055.536,00

Tabel 12. Pendapatan Perizinan Pertanian (425252)

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)
019031	Dinas Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	1.550.000,00
029027	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	250.000,00
089009	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	4.400.000,00
119000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	550.000,00
149000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	350.000,00
159000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	50.000,00
340056	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat	650.000,00
Jumlah		7.800.000,00

Tabel 13. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya (425289)

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)
029027	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	22.570.000,00
049025	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan DIY	1.821.000,00
069077	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	500.000,00
079025	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	9.912.500,00
089009	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	2.259.500,00
099033	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	1.450.000,00
109005	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi	2.200.000,00

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)
119000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	450.000,00
149000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	100.000,00
159000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	50.000,00
179021	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	1.350.000,00
189016	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	10.850.000,00
199026	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	2.600.000,00
209065	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	1.150.000,00
229027	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	3.200.000,00
239009	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	900.000,00
249030	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	300.000,00
299005	Dinas Pertanian Provinsi Banten	1.020.000,00
319002	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	1.056.000,00
Jumlah		63.739.000,00

Tabel 14. Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan(425691)

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)
029027	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	58.202.095,00
049025	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan DIY	16.236.870,00
059000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	6.524.750,00
069077	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	1.615.380,00
079025	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	58.107.540,00
089009	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	6.891.715,00
099033	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	539.080,00
109005	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi	2.971.510,00
119000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	5.240.000,00
129000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung	2.030.000,00
139030	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	1.192.800,00
149000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	589.000,00
159000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	99.000,00
179021	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	471.250,00
189016	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	20.457.185,00
199026	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	48.194.740,00
209065	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	1.420.480,00
219000	Dinas Pertanian Provinsi Maluku	10.000.000,00
229027	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	266.830,00
239009	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	13.424.950,00
299005	Dinas Pertanian Provinsi Banten	120.000,00
319002	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	247.260,00

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)
340056	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat	660.240,00
Jumlah		255.502.675,00

Tabel 15. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (425791)

Kode Satker	Nama Satker	Nilai
219000	Dinas Pertanian Provinsi Maluku	3.000.000,00
Jumlah Total		3.000.000,00

Tabel 16. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga (425793)

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)
069133	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	6.825.000
099033	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	7.863.553
099315	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	309.120
119130	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	1.250.000
169113	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	32.206.003
179104	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	3.000.000
209108	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	4.000.000
239009	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	500.000
249030	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	720.000
269000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	16.000.000
299005	Dinas Pertanian Provinsi Banten	2.190.000
299381	Dinas Pertanian Provinsi Banten	3.448.453
319089	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	5.000.000
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	47.404.050
Jumlah		130.716.179

Tabel 17. Penjelasan Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga (425793)

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)	NTPN	Penjelasan
069133	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	6.825.000	43C8D48VVF2B3KF7	Setoran atas Menindaklanjuti hasil Audit Kinerja Itjen atas Kelebihan Pembayaran terhadap CV. Cahaya Bintang Energi pekerjaan Pengadaan Pupuk Hayati Cair dan Pupuk Organik Padat TA. 2023 .
099033	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	4.000.000	F9D4661QV3IT32RO	Angsuran Pembayaran Temuan Irjen Kementan terhadap Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Blok Fondasi (BF) Jeruk di BBI Hortikultura Padang Marpoyan TA 2022 (CV. Zafa Perkasa)
099033		3.863.550	2F70E0NA04RPUOD1	Pelunasan Pembayaran Temuan Irjen Kementan

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)	NTPN	Penjelasan
	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau			terhadap Kelembihan Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Blok Fondasi (BF) Jeruk di BBI Hortikultura Padang Marpoyan TA 2022 (CV. Zafa Perkasa)
099033	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	3	AE62F6U8EUTB7EVM	Kekurangan Pembayaran Pelunasan Temuan Irjen Kementan terhadap Kelembihan Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Blok Fondasi (BF) Jeruk di BBI Hortikultura Padang Marpoyan TA 2022 (CV. Zafa Perkasa)
099315	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	309.120	F455F7QLUP64507F	Angsuran kemahalan harga rein shelter CV. Widyha Karya (kab. Rokan Hilir) atas kerugian negara temuan tahun 2016
119130	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	1.250.000	94F452G4VPF98MTH	Pengembalian Ke Kas Negara Kemahalan Harga Benih Durian CV. Alam Hijau Lestari (1772.022.004.054.526311)
169113	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	1.200.000	852850NA04JE0NAJ	Keg.Dinas Pertanian & Perikanan Kab.MURATARA Keg.Tahun 2018
169113	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	2.293.500	3286955DF9FC1MQG	Pembayaran Kemahalan Harga Pengadaan POC merk Semok di Kabupaten PPU Oleh CV. ASRINDO KUSUMA
169113	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	5.630.393	8819261QV41OELR5	Pembayaran Kemahalan Harga pada produk herbisida merk bismilang dan poc merk semok CV.ASRINDO KUSUMA
169113	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	1.200.000	2B06248VVESVKMB2	Pembayaran Kemahalan Harga Pengadaan Sarana Pupuk Saprodi Pupuk POG merk Nutrizim oleh CV. BIMA AGUNG SEJAHTERA
169113	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	3.715.000	21B4261QV41ODQIQ	Pembayaran Kemahalan Harga Pengadaan Fasilitasi Sarana Pengolahan Hortikultura TA 2023 SPK kepada CV. Rezeki Jaya Abadi
169113	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	8.219.410	A735A6U8EUK4QT15	Pembayaran ketidaksesuaian Fisik dengan Kwitansi yang dipertanggungjawabkan KWT Karya Manunggal Pertiwi Desa Sumber Sari Kab. PPU
169113	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	9.947.700	832043CIFKAJ7LG4	Pengembalian Kelembihan Pembayaran CV. Bintang Maha Jaya atas pekerjaan Shading House
179104	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	1.000.000	E66BC7QLUP9J5H0R	Pembayaran TGR CV. Kuru Citra Jaya pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Kawasan Mangga Tahun 2019
179104	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	2.000.000	397CC0NA052FN5D8	untuk pembayaran TGR CV Kur
209108	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	1.000.000	88D9F0NA04UQG3IQ	Setoran kemahalan harga mulsa plastik sesuai LHP ltjen Kementan No Maret 2018 An. CV. PERAP

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)	NTPN	Penjelasan
209108	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	1.140.000	47ECB61QV4D4U38J	Setoran kemahalan biaya pemasangan listrik sesuai LHP Itjen Kementa Juni 2022 An. CV. BERDAYA MEDI
209108	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	860.000	5B44B48VVF8C44NV	Setoran kemahalan harga 1 unit tubin ventilator sesuai LHP Itjen Ke tanggal 2 Juni 2022 An. CV. BERDAYA
209108	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	1.000.000	46D3161QV4J3F9L4	Setoran kemahalan harga mulsa plastik sesuai LHP Itjen Kementan Nomor : R 71/PW.130/G.2/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 An. CV. PERAPI.
239009	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	500.000	6847C3CIFKDM541U	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Benih Sebar Manggis an. CV. Abjad Sesuai LHP No : R.40/PW.130/G.2/03/2023 Tgl Setoran TLT sesuai LHP No. R.80/PW.130/G.2/2021 Ttg. Kelebihan Bayar atas Honor Staf Pengelola Keuangan i UPT. Proteksi Seksi Pengendali OPT Keg. TA.2020 Thp.4 (04DK)
249030	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	720.000	22D6861QV4JFIMS5	Setoran Kemahalan Harga Saprodi Bawang Putih oleh CV. MANDIRI UTAMA Sesuai dengan LHP Nomor : R.250/PW.130/G2/09/2020
269000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	5.000.000	847DF1JNFUMV1J8B	Setoran Kemahalan Harga Saprodi Bawang Putih Oleh CV. MANDIRI UTAMA sesuai dengan LHP Nomor : R.250/PW.130/G2/09/2020, Tanggal 7 September 2020
269000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	11.000.000	E184748VVF1NAFQ	Pembayaran kerugian negara atas kemahalan harga pengadaan popma submersible 0,5 hp sebanyak 3 unit a.n. CV. Cahaya Madani
299005	Dinas Pertanian Provinsi Banten	2.190.000	EDCB755DF9CDQMCR	Pembayaran Kerugian Negara atas kelebihan pembayaran Pekerjaan Pemasaran Fasilitas 1 Unit Bangsal Pascapanen Hortikultura di Kota Cilegon a.n. CV. Nur Hikmah
299381	Dinas Pertanian Provinsi Banten	2.174.000	C38F96U8EUH6JJ6O	Pembayaran kerugian negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan fasilitas 1 unit prasarana pemasaran (rehabilitasi hortimart) a.n. CV. Ananda Pratama
299381	Dinas Pertanian Provinsi Banten	1.274.453	284F26U8EUH6KLKM	Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Benih Bawang Merah oleh CV.MultiJasa sesuai LHP Nomor :R.380/PW.130/G.2/12/2017
319089	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	5.000.000	20E2161QV47LAP75	Tgl 12 Desember 2017 (TGR ini oleh Kabupaten Gorontalo Satker in Aktif 419026
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	10.000.000	67E806U8EU868PBN	Cicilan Kelebihan Pembayaran Bawang Merah an. CV. Adila Selahtra TA. 2017 LHP NO. R.404/PW.130/G.2/10/2018 TGL 17 Oktober 2018

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)	NTPN	Penjelasan
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.000.000	242262G4VPNU2TV0	Pembayaran Kelebihan Pembayaran Kegiatan kawasan Bawang Merah di Kabupaten Maluku Tengah pada CV Alfian Indah NO.R.349/PW.130/G.2/11/2017 Tgl.20 November 2017
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.500.000	9D5B055DF0GNDN9N	Setoran Kemahalan harga Mulsa Plastik tahun 2017 sesuai LHP Itjen Kementan Nomor : R.71//PW.130/G.2/3/2018 tanggal 15 Maret 218 An, CV. PERAPI
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	3.000.000	3257F6U8EUJR1K96	Pembayaran Kemahalan Harga Fasilitas Sarana Produksi Kawasan Bawang Merah CV. Bintang Selatan Kab.Lombok Timur LHP NO.R144/ PW.130/ G.2/05/2019 Tgl.2 Mei 2019
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.000.000	242262G4VPNU2TV0	Pembayaran Kelebihan Pembayaran Kegiatan kawasan Bawang Merah di Kabupaten Maluku Tengah pada CV Alfian Indah NO.R.349/ PW.130/ G.2/11/2017 Tgl.20 November 2017
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	4.000.000	2E7582G4VPO4L03F	Pembayaran Kelebihan Pembayaran Kegiatan kawasan cabai di Kabupaten Maluku Tengah pada CV Berlian Indah NO.R.349/ PW.130/ G.2/11/2017 Tgl.20 November 2017
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	500.000	00F551JNFBV5QE4HT	Pembayaran Kemahalan harga fasilitas bantuan sarana produksi CV. Moris Nusa Kab. Lombok timur, LHP nomor R144/ PW.130/ G.2/05/2019
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	500.000	7FF136U8EUK4S46Q	Pembayaran Kekurangan volume Penyaluran bantuan benih fasilitas kawasan bawang merah kepala UPTPP Pringgasela a/n H. Amedan Kab. Lombok timur, LHP nomor R144/ PW.130/ G.2/05/2019
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	15.904.050	C3FEB0NA04MI1AEM	Kelebihan Pembayaran bawang merah CV.Adilla Sejahtera, kab. Bojonegoro Provinsi Jawa Timur TA 2017, LHP nomer R.404/PW.130/G.2/10/2018 tgl 17 Oktober 2018
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	10.000.000	C895E61QV4DQ0QS5	Cicilan kelebihan pembayaran bawang merah an. CV Adila Sejahtera T Tgl.17 Oktober 2018
Jumlah		130.716.179		

Tabel 18. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811)

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)
199026	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	2.500.000
239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	4.500.000
280151	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	5.277.031

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)
299005	Dinas Pertanian Provinsi Banten	1.000.000
339156	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	10.000.000
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	15.672.521
Jumlah		38.949.552

Tabel 19. Penjelasan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811)

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)	Ntpn	Penjelasan
199026	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	500.000	AD3C33CIFK1DR3S5	Setoran Temuan Lhp Audit Kinerja Itjen Kementan Ta.2022 Tgl.21/3/2023 Atas Denda Keterlambatan Penyaluran Benih Kegiatan Fasilitasi Benih Hortikultura Bawang Merah Oleh CV.Patallo Keynawa
199026	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	1.000.000	E36CA1JNFV8794FJ	Setoran Temuan Lhp Audit Kinerja Itjen Kementan Ta.2022 Tgl.21/3/2023 Atas Denda Keterlambatan Penyaluran Benih Kegiatan Fasilitasi Benih Hortikultura Bawang Merah Oleh CV.Patallo Keynawa
199026	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	1.000.000	481F22G4VQ6LC7F5	Setoran Temuan Lhp Audit Kinerja Itjen Kementan Ta.2022 Tgl Benih Kegiatan Fasilitasi Benih Hortikultura
239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	500.000	24C801JNFUSVRVML	Setoran denda keterlambatan pekerjaan pengadaan bibit manggis an. CV. UNWANUSSOROF Tahun 2019 Sesuai LHP No : R.254/PW.130/G.2/09/2020 Tgl 7 September 2020
239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	500.000	2ACC22G4VPKP7P5Q	Setoran denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan bibit manggis an. CV. UNWANNUSSOROF Tahun 2019 Sesuai LHP No : R.254/PW.130/G.2/09/2020 Tgl 7 September 2020
239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	500.000	A361B0NA04GFMKFM	Setoran denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Bibit manggis an. CV. UNWANNUSSOROF Tahun 2019 Sesuai LHP No : R.254/PW.130/G.2/09/2020 Tgl 7 September 2020
239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	500.000	2EFEA3CIFKD01KD5	Setoran Dendan Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Bibit Manggis an. CV. UNWANNUSSOROF Tahun 2019 Sesuai LHP No : R.254/PW.130.G.2/09/2020 Tgl 7 September 2020
239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	500.000	6FE8948VVF2HKGJI	Setoran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Bibit Manggis an. CV. UNWANNUSSOROF Tahun 2019 Sesuai LHP No : R.254/PW.130.G.2/09/2020 Tgl 7 September 2020
239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	500.000	B56901JNFVBV0PVP	Setoran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Bibit Manggis an. CV.UNWANNUSSOROF Tahun 2019 Sesuai LHP No : R.254/PW.130.G.2/09/2020 Tgl 7 September 2020

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)	Ntpn	Penjelasan
239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	500.000	E267B7QLUPFLDSM4	Setoran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Bibit Manggis an. CV.UNWANNUSSOROF Tahun 2019 Sesuai LHP No : R.254/PW.130.G.2/09/2020Tgl 7 September 2020
239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.000.000	E0F0E0NA055BQBOL	Setoran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Bibit Manggis an.CV.UNWANNUSSOROF Tahun 2019 Sesuai LHP No :R.254/PW.130.G.2/09/2020Tgl 7 September 2020
280151	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	5.277.031	35BB548VVF62V6RM	Pembayaran Denda Keterlambatan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 dari PNPB yang belum setor Kegiatan saprodi Benih Bawang Merah
299005	Dinas Pertanian Provinsi Banten	1.000.000	F06E31JNFVHPMHV3	Pembayaran Denda Keterlambatan Bantuan Benih Cabai Rawit CV. Antunai
339156	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	10.000.000	EA7208N3EJ9OCVAD	
Jumlah		23.277.031		

Pada satker Direktorat Jenderal Hortikultura (625875) pendapatan senilai Rp15.672.521,00 merupakan Denda Keterlambatan yang dipotong langsung dari Surat Perintah Membayar (SPM) :

1. SPM Nomor 00019A tanggal 16 Januari 2024 senilai Rp4.970.000,00 Penyediaan Benih bawang merah Umbi (Tahap 29)
2. SPM Nomor 00994A tanggal 21 Oktober 2024 senilai Rp13.530,00 Sewa Kendaraan Operasional Roda 4 Pimpinan termin VII
3. SPM Nomor 01078A tanggal 7 November 2024 senilai Rp9.819.375,00 Pengadaan sarana angkutan Hortikultura roda 3 Tahap 2 (24 unit)
4. SPM Nomor 01494A tanggal 23 Desember 2024 senilai Rp525.486,00 Sarana pemasaran hortikultura tahap II
5. SPM Nomor 01495A tanggal 23 Desember 2024 senilai Rp344.130,00 Sarana Pemasaran Hortikultura tahap III

Tabel 20. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911)

Kode Satker	Nama Satker	Nilai
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	36.391.050,00
Jumlah Total		36.391.050,00

Pada satker Direktorat Jenderal Hortikultura pendapatan senilai Rp36.391.050,00 merupakan Pengembalian Kelebihan Uang Makan PNS dan PPPK Direktorat Jenderal

Hortikultura Bulan Desember 2023 NTPN Nomor 2B59448VVEH7K9PA senilai Rp35.651.050,00 dan Pengembalian Tunjangan Umum Pegawai Tugas Belajar An. Agung Adi Nugraha Bulan Januari s/d April 2023 NTPN Nomor 03F090NA047M0AJ4 senilai Rp740.000,00

Tabel 21. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912)

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)
029027	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	25.127.800
049025	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan DIY	18.180.000
059000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	5.415.000
059179	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	4.560.000
079025	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	69.737.500
079125	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	32.960.335
099033	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	4.029.750
109005	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi	4.660.000
119000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	2.665.000
119130	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	28.416.696
139030	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	4.475.000
169025	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	5.870.000
169113	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	2.500.000
179021	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	4.526.000
199026	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	9.450.000
199126	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	30.780.000
239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	10.950.000
249159	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	5.000.000
319002	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	710.320
319089	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	5.070.544
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	819.680.563
Jumlah		1.094.764508

Tabel 22. Penjelasan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912)

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)	NTPN	Penjelasan
29027	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	10.000.000	7F5646U8E UK30966	Pengembalian denda Keterlambatan Pengadaan Planlet Pisang a.n CV Pratama PUTRA sesuai SPK No.1060/PT.03.01/BBH tgl 15 Agustus 2022 Hasil Temuan Itjen sesuai LHP No.R-275/PW.130/G.2/09/2023
29027	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	7.016.600	322370NA04 A3I6AV	Kemahalan Harga Pencetakan Label Sertifikasi Benih Buah a.n CV. DELAPAN BELAS (BBH) Dinas TPH Jabar 029027 DK Hasil Temuan Itjen sesuai LHP No. R275/PW.130/G.2/09/2023
29027	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	5.111.200	FAA4F61QV 4D86U1S	Pengembalian denda Keterlambatan Pengadaan Planlet Pisan No.1060/PT.03.01/BBH tgl 15 Agustus 2022 Hasil TemuanItjen se
29027	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	3.000.000	1F5771JNFV KMEPV0	Pengembalian denda Keterlambatan Pengadaan Planlet Pisang a.n CV Pr 2022 Hasil TemuanItjen sesuai LHP No.
49025	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan DIY	3.000.000	73D612CPQ 91JOR2M	Pengembalian Belanja Bahan Papan Nama Pohon Induk
49025	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan DIY	15.180.000	88F6O1GCA EF7BR39	Pengembalian Belanja Pembelian Entres Benih Klengkeng Tahun 2023
59000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	2.295.000	3182D7QLU P6H9GNL	Pengembalian belanja pembayaran Honorarium Narasumber Keg. PIP TA. 2023
59000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	3.120.000	84EF80NA04 JE1Q1M	Pengembalian belanja perjalanan dinas Keg. Sertifikasi Benih TA. 2023
59179	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	3.420.000	02E1661QV4 1OFBER	Pengembalian belanja perjalanan dinas Keg. Kawasan Bawang Merah TA. 2023

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)	NTPN	Penjelasan
59179	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	1.140.000	ED9F07QLU P6H9DII	Pengembalian belanja perjalanan dinas Keg. Kawasan Cabai TA. 2023
79025	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	39.050.000	F0C3561QV 3OJ788J	Pengembalian Ke Kas Negara Atas Kemahalan Harga Opt Hortikultura Pada Keg.Gerdal Ta.2023 Uptd Ptph Sumut Tlhp No.0066
79025	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	21.300.000	DCB330NA0 4A8P7E5	Pengembalian Ke Kas Negara Atas Kemahalan Harga Atas Pengadaan Stiker Barcode Sebanyak 150 Roll Oleh Ud.Suman Rona, Uptd Psbtph Sumut Tlhp No.0066
79025	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	3.600.000	581FE6U8E UAVK6TH	Pengembalian Ke Kas Negara Atas Kekurangan Volume Barang Sebanyak 45 Buku Oleh Cv.Maya, Uptd Psb Tph Sumut Tlhp No.0066
79025	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	3.612.000	FF28955DF9 66Q7S0	Pengembalian Ke Kas Negara Atas Kemahalan Harga Bahan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (Ppht) Ta.2023 Uptd Ptph Sumut Tlhp No.0066
79025	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	1.750.000	7189348VVE JQD5CB	Pengembalian Ke Kas Negara Atas Kelebihan Pembelian Batang Bawah Jeruk Sebanyak 500 Btg Uptd Bi Kutagadung Tlhp No.0066
79025	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	425.500	829B761QV3 OJ	Pengembalian Ke Kas Negara Atas Kemahalan Harga Bahan Pengendalian Opt Hortikultura Pada Kegiatan Klinik Pht Ta.2023 Uptd Ptph Sumut Tlhp No.0066
79125	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	11.240.035	5C2BA1JNF USL6AVB	Pengembalian Ke Kas Negara Atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Sarana Pengolahan Hortikultura Oleh Cv.Signer Jaya (Tlhp No.0067)
79125	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	21.720.300	B620A0NA0 4A8PCEB	Pengembalian Ke Kas Negara Atas Kelebihan Pembayaran Perkerjaan Sarana Pasca Panen Hortikultura Oleh Cv.Mindo Lestari Cemerlang (Tlhp No.0067)
99033	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	4.029.750	B301C61QV 3IFJ49N	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang lau pada kegiatan Perbanyakan Benih Tahun 2023 (Pembelian Entres Jeruk, Durian, Lengkeng) UPT. PSB TPH
109005	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi	4.660.000	3E4631JNFU V85PQA	Setoran Hasil Audit Tertentu Tentang Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Tahun 2022-2023
119000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	665.000	05AB97QLU P6KBFST	Pengembalian Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Harga Pasar (PIP)
119000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	1.000.000	8F3177QLU POMF9NR	Pengembalian Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penerapan GAP ke Kabupaten OKU TA. 2023.
119000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	1.000.000	B181E61QV 4JTL8RN	Pengembalian Perjalanan Dinas Monitoring & Evaluasi Harga Pasar (PIP) TA. 2023. (5887.BMA.030.053.524111).
119130	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	4.609.488	F18A855DF9 FF4A33	Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Bangunan Bangsal KT. Anugrah Tani Mandiri Kota Lubuk Linggau TA. 2023
119130	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	2.990.000	750F16U8E UK7U8TN	Pengembalian Perjalanan Dinas Pengawasan dan Pendampingan Sarana Pasca Panen Hortikultura TA. 2023
119130	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	750.000	0C9D66U8E UBDLUIN	Pengembalian ke kas Negara Sisa Dana Pada Rekening BPP Kab. Mura
119130	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	4.478	9BA641JNF UT380NP	Pengembalian ke kas Negara Sisa Dana Pada Rekening BPP Kota Pagar Alam
119130	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	8.721.455	17CB02G4V PQJDE18	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Bangunan Bangsal KWT Kaya Maju Kota Prabumulih Kegiatan TA. 2023.

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)	NTPN	Penjelasan
119130	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	5.000.000	9BB5E7QLU P8V98UD	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Bangunan Bangsal KT. Mari Berusaha Kabupaten Banyuasin TA.,2023
119130	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	5.341.275	C75176U8E V5PSD33	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Bangunan Bangsal KT. Mari Berusaha Kabupaten Banyuasin TA. 2023.
119130	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	1.000.000	FBBCB55DF 9QNGDUN	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Bangunan Bangsal KT. Berusaha Banyuasin TA. 2023
139030	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	4.475.000	18CAD48VV EMEHAH2	kelebihan pembayaran perjalanan dinas kegiatan mnitoring dan evaluasi harga pasar TA 2022 & 2023
169025	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	1.100.000	057053CIFK ACQ0BI	Pengembalian Pembelian batang bawah (biji alpukat)
169025	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	1.820.000	057053CIFK ACQ0BI	Pengembalian Pencetakan label
169025	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	2.950.000	14C37397A6 D42TL3	Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu Kegiatan Area Penangan DPI Hortikultura (Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Penanganan DPI)
169113	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	2.500.000	3F44A2G4V PO9RM9K	Pengembalian Belanja Konsumsi Koordinasi/Sosialisasi Kegiatan Kawasan di Kabupaten PPU
179021	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	1.350.000	DAFB72G4V PF1IK22	Kelebihan pertanggungjawaban kegiatan Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Klinik PH
179021	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	1.600.000	6BD237QLU OTC0J5D	Kelebihan pertanggungjawaban kegiatan Gerakan Pengendalian OPT
179021	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	1.576.000	C08030NA04 A8OJ8N	Kelebihan pembayaran pengadaan fasilitasi DPI
199026	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	4.950.000	D0EEB0NA0 4AE1CCK	Setoran Hasil Audit Itjen Kementan Sesuai Surat Tugas No.B.0070/Pw.130/G.2/02/2024 Tgl.27/2/2024 Atas Pertanggungjawaban Keuangan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Oleh Upt Bsmbtph Prov.Sulsel
199026	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	3.000.000	3ACE861QV 3OPH96Q	Setoran Hasil Temuan Audit Itjen Kementan Sesuai Surat Tugas No.B.0070/Pw.130/G.2/02/2024 Tgl.27/2/2024 Atas Pertanggungjawaban Keuangan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Oleh Upt Bbh Prov.Sulsel
199026	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	1.500.000	7808C1JNFV 8G57CV	Setoran Temuan Lhp Itjen Kementan No.R.63/Pw.1/G.2/03/2024 Tgl.19/3/2024 Atas Kemahalan Harga Pengadaan Bahan Pengendali Opt Ta.2023
199126	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	780.000	7D6BB55DF 98T7P0V	Setoran Temuan Hasil Audit Ketaatan Itjen Kementan No.B.0071/Pw.130/G.2/02/2024 Tgl.27/2/2024 Atas Kelebihan Pembayaran Ongkos Kirim Pada Pengadaan Mulsa Oleh Pt.Mutiara Cahaya Plastindo
199126	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	30.000.000	5703D6U8E V044SQ9	Pengembalian sebagian Belanja Barang Uang Muka 30% Produksi Baw tgl.16-10-2019 SP2D No.190541302020421
239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.200.000	726B53CIFK DEEEII	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengembawangan Kawasan Manggis Sesuai LHP No : R.57/PW.130/G.2/03/2024 Tgl 18 Maret 2024
239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.100.000	207681JNFV 8LKBPB	Pengembalian Belanja Konsumsi Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Alpukat Sesuai LHP No : R.57/PW.130/G.2/03/2024 Tgl 18 Maret
239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.800.000	560692G4VP R21ESF	Pengembalian Belanja Konusmsi Dalam Rangka Pengembangan Kawsan Aneka Cabai Sesuai LHP No : R.57/PW.130/G.2/03/2024 Tgl 18 Maret 2024

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)	NTPN	Penjelasan
239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	750.000	09EF461QV44JLAIJ	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sarana Pascapanen, Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura Sesuai LHP No : R.57/PW.130/G.2/03/2024 Tgl 18 Maret 2024
239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.000.000	200FE6U8EUN02GIN	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Kelengkeng Sesuai LHP No : R.57/PW.130/G.2/03/2024 Tgl 18 Maret 2024
239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.100.000	8D49B2G4VQ0RJ1GO	Pengembalian Belanja Konsumsi Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Mangga Sesuai LHP No : R.57/PW.130/G.2/03/2024 Tgl 18 Maret 2024
249159	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	5.000.000	FDF571JNFV871TLI	Setor kembali Kemahalan Harga Fasilitas Sarana Produksi Cabai Rawit di Kabupaten Malaka dan Flores Timur. an. CV. Fravent. Tahun 2023. (04TP)
319002	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	710.320	CF32655DF9F3BCN6	Kelebihan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas a.n Nurbaya Abd. Gani, Irma Abdul Rahman dan Sumiati Panigoro TA. 2023 di UPTD BPPSBP
319089	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	1.050.000	E03850NA044IG0FO	pembayaran Kemahalan Harga Pengadaan POC merk Semok di Kabupaten Berau Oleh CV. Sinar Dua Mitra
319089	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	1.008.000	08B4755DF9OG933S	Kelebihan Pembayaran pemasangan daya listrik pada prasarana pascapanen (bangsal) Kelompok Tani Nyiur Indah Desa Tunas Jaya Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango TA.2023
319089	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	802.100	E93287QLUPI26N8S	Kemahalan Harga Pengadaan Sarana Pengolahan Hortikultura di Kabup T.A.2023
319089	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	2.210.444	FD2E52G4VQ3NOKQF	Kemahalan Harga Pengadaan Sarana Pascapanen Hortikultura di Kabu 2023
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	407.201	1B6FE6U8EU4S0B5D	Pengembalian Perjadin an. Ali Syahban (04.018.04.1774.EBD.995.051.B.524111) SEKDIR
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	627.400	0BBE93CIFJRBNIIE9	Pembayaran Kelebihan Perjalanan Dinas an. Novida DKK ke Kab. Garut TA. 2023 (018.04.WA.1774.EBD.524111) SEKDIR
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.337.000	07CCE8N3EJ9M5HVP	Pembayaran Kelebihan Perjalanan Dinas an. Agung Sanusi ke Makasar TA. 2023 (018.04.WA.1774.EBD.524111) SEKDIR
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	110.000	0D05255DF905J7G9	Pembayaran Kelebihan Perjalanan Dinas an. Supardi, ST ke Jatisari Tgl 27-29 Desember 2023 (018.04.WA.1774.EBD.955.051.524111.E) SEKDIR
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	500.000	0D05255DF905J7G9	Pembayaran Kelebihan Perjalanan Dinas an. Yusbandi ke Jatisari Tgl 27-29 Desember 2023 (018.04.WA.1774.EBD.955.051.524111.E) SEKDIR
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	350.000	6C45D2G4VP90C6HI	Pembayaran Kelebihan Perjalanan Dinas an. Analia Purwitasari, SE ke Purwakarta Tgl 27-29 Desember 2023 (018.04.WA.1774.EBD.955.051.524111.E) SEKDIR
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	3.699.982	4AF0A3CIFJRKIGLL	Pengembalian Bantuan Smart Green House TA.2023 Kelompok Tani Jaya DS. Sembilawarang Kec. Waringkurung Kab. Serang (DIT. STO)
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.402.000	710450NA044C0JFM	Pengembalian Perjalanan Koordinasi, Konsultasi, Pengawasan dan Pembinaan Pengembangan Kawasan Florikultura dan Undangan Lainnya (04.03.018.04.07.5886.AEA.021.052.C.524111) DIT. BUFLO TA. 2023.
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	2.124.841	DA2E23CIFJRIBO3V	Pengembalian Pekerjaan Renovasi Kamar mandi Direktorat Perlindungan Hortikultura (I.PPK.1/SPK/PL/1130/VIII/2023) AN. CV. Ivade Karya Sejati TA.2023
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	706.416	D92496U8EU53VM6H	Pengembalian Pekerjaan Renovasi Kamar mandi Direktorat perbenihan (I.PPK.1/SPK/PL/544/VII/2023) AN. CV. Maju Bersama TA.2023
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	206.253.011	3D42D1JNFUN5189E	Pelunasan Kekurangan Volume Pekerjaan Kontruksi Fasilitas Agro Edu Wisata Hortikultura LHP BPK RI No.14.a/LHP/XVII/05/2023 tgl 23 Mei 2023 Kab. Purwakarta an. PT. Viona Kencana Permai TA. 2022

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)	NTPN	Penjelasan
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	50.000.000	BA8B73CIFJ U6QK7Q	Pengembalian anggaran Fasilitas Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari dengan No SPK : I.PPK.4/SPK/ P2L/841/X/2023 tanggal 29 September 2023, dengan nama Penerima: Kelompok PKK Pujitirto, Ds Pujitirto.
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	50.000.000	332F461QV3 LC1IP7	Pengembalian anggaran Fasilitas Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari dengan No SPK : I.PPK.4/SPK/ P2L/1080/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, dengan nama Penerima: Kelompok Tani Tunas Mandiri, Ds Jabon,.
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	7.058.627	8CB460NA0 477ROQK	Pengembalian Perjalanan Pimpinan Dalam Rangka Monev Kegiatan PPHH TA.2023 an. Hanang dkk. MAK 018.04.EC.5887.AEA.020.053.A524111
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	3.580.350	E99752G4V PC0LRPT	Pengembalian Perjalanan dinas biasa dalam rangka Promosi produk TA. 2023 an. Ofi Nidaussoleha dkk. MAK. 018.EC.5887.AEH.020.052.N.524111
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.900.000	E47D96U8E U7UN1IG	Pengembalian Perjalanan dalam rangka identifikasi/koordinasi/ persiapan/pembinaan sarana pascapanen TA.2023 an. Bambang Sugiharto dkk. MAK .018.04.EC.5887.RAG.010.051.524111
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	361.050	991C23CIFJ UD341E	Pengembalian Perjalanan dalam rangka Penilaian Kebun/ Surveillance TA.2023 an. Slamet Ari dkk. MAK. 018.04.EC.5887.ADA.010.052.A.524119
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	388.500	F7B076U8E U7UN72K	Pengembalian Monitoring registrasi kebun dan lahan usaha ke lokasi TA. 2023 an. Dina Martha dkk MAK. 018.04.EC.5887.ADA.010.053.A.524111
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	3.257.145	F278055DF9 35T6U8	Pengembalian Monitoring registrasi kebun dan lahan usaha ke lokasi TA. 2023 an. Slamet Ari dkk MAK. 018.04.EC.5887.ADA.010.053.A.524111
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.372.000	906876U8EU 7UN8QF	Pengembalian Perjalanan dinas biasa dalam rangka penilaian kebun / surveillance TA. 2023 an. Slamet Ari dkk MAK. 018.04.EC.5887.ADA.010.052.A.524111
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	40.000	4EF292G4V PC0MDK3	Pengembalian Monitoring registrasi kebun dan lahan usaha ke lokasi TA. 2023 an. Hotman Fajar dkk MAK. 018.04.EC.5887.ADA.010.053.A.524111
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	800.000	A001E3CIFJ UR6VU1	Pembayaran Kekurangan Volume Pekerjaan Kontruksi Fasilitas Agro Edu Wisata Hortikultura LHP BPK RI No.14.a/LHP/XVII/05/2023 tgl 23 Mei 2023 Kab. Purwakarta an. PT. Viona Kencana Permai TA. 2022
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	300.000	EF3CA61QV 3U7QP7M	Pengembalian belanja perjalanan dinas spby no. 07376/ PB/625875/2023 Rp. 300.000 atas KHP BPK audit LK TA 2023 Dit. Perlindungan
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	2.430.000	E666F48VV EPFOOPH	Pengembalian belanja perjalanan dinas spby no. 07841/ PB/625875/2023 Rp. 2.430.000 atas KHP BPK audit LK TA 2023 Dit. Sayuran dan Tanaman Obat
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	16.856.000	39DD55UFM UNA97B2/1	semula disetor sebagai pengembalian belanja tahun berjalan, namun dilakukan koreksi akun, karena merupakan pendapatan pengembalian belanja barang TAYL karena pekerjaan dilaksanakan di TA 2023 Belanja Barang Persediaan dalam Proses
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	16.856.000	8E9F51GC7 PRC8775/2	semula disetor sebagai pengembalian belanja tahun berjalan, namun dilakukan koreksi akun, karena merupakan pendapatan pengembalian belanja barang TAYL karena pekerjaan dilaksanakan di TA 2023 Belanja Barang Persediaan dalam Proses
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	16.856.000	F11E052274 4TS7CT/2	semula disetor sebagai pengembalian belanja tahun berjalan, namun dilakukan koreksi akun, karena merupakan pendapatan pengembalian belanja barang TAYL karena pekerjaan dilaksanakan di TA 2023 Belanja Barang Persediaan dalam Proses
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	6.003.022	2848E6U8E UQAIOIO	Pengembalian biaya pengiriman benih pada Pengadaan Benih Bawang Merah Umi Tahap 21 dengan nomor kontrak I.PPK.2/K/ekKTG/2688/X/2022
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	20.644.100	37BDB2G4V PUDPCB3	Kelebihan pembayaran pada Kegiatan Pengadaan Penyediaan Benih Bawang

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)	NTPN	Penjelasan
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	273.000.000	2451161QV4 AO5I5D	Pembayaran Fasilitas Bantuan Prasarana Smart Farming dengan penerima Kelompok Tani Makmu Beusare Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor. I.PPK.4/SPK/SF/1/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023 (Dit STO)
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.999.100	CD9681JNF VH80QTQ	Kelebihan Pembayaran Pengadaan Renovasi Ruang Sekretaris Ditje Pemeriksaan Belanja Non 526 (T
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	2.356.000	220CF48VV F8IREEA	Pembayaran Pengembalian sewa mobil Kegiatan Survey Investigasi Agroindustri Mangga di Kab.Gresik TA.2
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.000.000	FDBE07QLU PIHMEE8	Pengembalian Penyediaan benih Pisang melalui Swakelola TA.2022 Ke Perbenihan)
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	5.400.000	8E5DB55DF 9RBDMFP	Pengembalian Penyediaan Benih Bawang Putih Melalui Swakelola Tahu
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	9.750.000	835541JNFV HQT3I1	Pengembalian Penyediaan Benih Hortikultura(cabai) dan Benih Hortik Swakelola Ta.2022 PerkumpulanBakul Bibit Wonosobo da
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	2.500.000	8B1307QLU PKVRM7N	Pembayaran pengadaan publikasi kegiatan Perbenihan Hortikultura Tah
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	2.500.000	A9F0661QV 4G71NFI	Pembayaran Pengadaan Publikasi Kegiatan Perbenihan Hortikultura Perbenihan
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	3.325.000	9245948VVF BQHPCJ	Pengembalian Honor Moderator Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasi M.Maulana,Hendra Kusuma,Subandio,Abdul M
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.000.000	73B1355DF9 U6TDLD	Pengembalian Penyediaan Benih Alpukat melalui Swakelola
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	665.000	81C301JNFV KLAHIB	Pengembalian Honor Moderator Bimbingan Teknis Peningkatan Kapas Selatan (Dit.Perlindunga
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	200.000	886590NA05 4NUKNQ	Pengembalian Kemahalan Harga Sarana Penunjang Bimtek Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan SDM petani OPT Hotikultura TA.2023 (Dit. Perlindungan Hortikultura)
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	3.990.000	2102F48VVF E9IMD1	Pengembalian Honor Moderator Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petani/Pelaku Usaha Hortikultura TA.2022 di NTB an.Okny Army, Magetan an.Syamsul Huda, Maluku an.Siti Amanah (Dit.Perlindungan Horti
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	16.000.000	E94172G4V Q9GON5R	Pengembalian Kemahalan Harga Sarana Penunjang Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani/Pelaku Usaha Hortikultura TA.2023 (Dit.Perlindungan Hortikultura)
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	3.325.000	D4D511JNF VN4BHQB	Pengembalian Honor Moderator Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petani/Pelaku Usaha Hortikultura TA. 2023 di Banten an. Ameylia, Ganjar (Dit Perlindungan Hortikultura)
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	2.900.000	955612G4V Q9NF46F	Pengembalian Kelebihan uang perjalanan dinas Pembinaan oleh Pimpinan Dit Perlindungan Hortikultura TA.2023,an.Dr.Liferdi,Moch Amar,Dr.Jekvy Hendra,Rio Bernandes (1773.AEA.013.052.A.52411)
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.030.000	5DDF655DF A0SM4IB	Pengembalian Kelebihan uang perjalanan dinas Pembinaan oleh Pimpinan Dit Perlindungan Hortikultura TA.2023,AN. ALI SYAHBAN (1773.AEA.013.052.A.52411)
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	5.100.000	62B9A2G4V Q9QP1IG	Pengembalian Pembayaran Kelebihan ongkos Kirim Penyediaan Bawang Merah Umbi Tahap 5 TA. 2022 CV. Asyfa (Dit Perbenihan)
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	36.054.690	BE89C6U8E V5T8V2F	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tidak sesuai Ketentuan TA. 2022 Setditjen Hortikultura (1774.EBA.994.002.A.523121)
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.350.000	6656148VVF EQ6V9F	Pengembalian Kelebihan uang perjalanan dinas Jatisari an Ahmad Imron, Maryono, Tri, didah, (Purwakarta 24 agustus 2023) (Indramayu, 29-30

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)	NTPN	Penjelasan
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	150.000	30CA361QV 4JJ103Q	Agustus 2023), 1773.BMA.010.051.A.524111 (Dit.Perlindungan) Pengembalian Kelebihan uang perjalanan dinas an. Maryono Bogor 21-22 September 2023 (1773.BMA.010.052.B.524111) Dit. Perlindungan Hortikultura
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	47.822.800	5F3750NA05 5G5RVT	Pengembalian Pengadaan Penyediaan Umbi Bawang Merah Umbi Tahap 32 TA. 2022 oleh CV. Aurora 4581.RAI.010.052.526311) Dit Perbenihan Hortikultura
Jumlah		1.094.764.508		

Berikut ini disajikan perbandingan realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Pendapatan	Realisasi Pendapatan Bruto 31-Des-24 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Pendapatan Netto 31-Des-24 (Rp)	Realisasi Pendapatan Netto 31-Des-23 (Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan Pengelolaan BMN Iuran Badan Usaha	1.015.279.341	-	1.015.279.341	567.655.499	44,09
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	71.539.000	-	71.539.000	179.431.300	(150,82)
Pendapatan Jasa Lainnya	255.502.675	-	255.502.675	316.975.275	(24,06)
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan	133.716.179	-	133.716.179	404.491.048	(202,50)
Pendapatan Denda	38.949.552	-	38.949.552	157.999.694	(305,65)
Pendapatan Lain-Lain	1.149.113.230	-	1.149.113.230	555.829.219	51,63
Jumlah	2.664.099.977	0	2.664.099.977	2.182.382.035	18,08

B.2. BELANJA

Pada Tahun Anggaran 2024 PAGU Alokasi awal pada aplikasi SAKTI modul RKAKL sebesar Rp1.006.491.086.000 dan PAGU per 31 Desember 2024 sebesar Rp 433.499.771.000

Tabel 24. Perubahan PAGU Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP)

No	Eselon I	Pagu Alokasi (Rp000)	Automatic Adjustment (Rp000)	Reprioritasi Upsus Padi dan Jagung 7,7 T (Rp000)		Optimalisasi Belanja Pegawai (Rp000)		Pagu Eksisting (Rp000)
				Internal	Eksternal	Internal	Eksternal	
	TOTAL	1.006.491.086	40.281.266	25.000.000	(573.852.365)	0	861.050	433.499.771
1	(018.04) Direktorat Jenderal Hortikultura	1.006.491.086	40.281.266	25.000.000	(573.852.365)	0	861.050	433.499.771
Reprioritasi (+)								

Selama Tahun Anggaran 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat Revisi DIPA Sebanyak 24 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Revisi pertama

Tanggal 5 Januari 2024 berdasarkan Surat Mentan No B-01 tanggal 2 Januari 2024 perihal Reprioritasi Padi, Jagung Dan Oplah PAGU berkurang sebesar Rp 573.852.365.000,- menjadi Rp432.638.721.000 merubah nilai PAGU secara keseluruhan

2. Revisi ke-dua

Tanggal 16 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Mentan No B-06 tgl 2 Januari 2024 dan Permentan Banper No 41 perihal Buka Blokir Bimtek Padi-Jagung & 526 Ketersediaan tidak merubah nilai PAGU secara keseluruhan

3. Revisi ke-tiga

Tanggal 22 Januari 2024 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Automatic Adjustment tidak merubah nilai PAGU secara keseluruhan

4. Revisi ke-empat

Tanggal 2 Februari 2024 berdasarkan Surat Dirjen Hortikultura Nomor B-37/RC.110/D/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 perihal Buka Blokir Kode 2 tidak merubah nilai PAGU secara keseluruhan

5. Revisi ke-lima

Tanggal 13 Februari 2024 berdasarkan Arahan Ditjen Perbendaharaan terkait penilaian konsistensi IKPA perihal Revisi Halaman III DIPA RPD tidak merubah nilai PAGU secara keseluruhan

6. Revisi ke-enam

Tanggal 16 Februari 2024 berdasarkan surat Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Nomor B-56/RC.110/D/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Lingkup Ditjen Hortikultura TA 2024 perihal Buka Blokir Kode 3 (HDDAP) tidak merubah nilai PAGU secara keseluruhan

7. Revisi ke-tujuh

Tanggal 19 April 2024 berdasarkan surat Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Nomor B-120/RC.110/D/04/2024 tanggal 16 April 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Satker Ditjen Hortikultura TA 2024 perihal Pemutakhiran POK DAN RPD tidak merubah nilai PAGU secara keseluruhan

8. Revisi ke-delapan

Tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan surat Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Nomor B-183/RC.110/D/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Satker Ditjen Hortikultura TA 2024 perihal Pergeseran 526, Pemutakhiran POK DAN RPD tidak merubah nilai PAGU secara keseluruhan

9. Revisi ke – Sembilan

Tanggal 30 Mei 2024 berdasarkan surat Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Nomor B-159/RC.110/D/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Satker Ditjen Hortikultura TA 2024 perihal Buka Blokir Mantri Tani, Pergeseran Antar Program, Pergeseran 526 tidak merubah nilai PAGU secara keseluruhan

10. Revisi ke – sepuluh

Tanggal 15 Juli 2024 berdasarkan surat Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Nomor B-283/RC.110/D/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 Usulan Revisi Anggaran Satker Ditjen Hortikultura TA 2024 perihal Pemutakhiran POK Dan RPD, tidak merubah nilai PAGU secara keseluruhan

11. Revisi ke – sebelas

Tanggal 8 Agustus 2024 berdasarkan surat Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Nomor B-302/RC.110/D/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Satker Ditjen Hortikultura TA 2024 terkait revisi Belanja 526 dan Pergeseran Antar RO/KRO, tidak merubah nilai PAGU secara keseluruhan

12. Revisi ke - dua belas

Tanggal 2 September 2024 berdasarkan Surat Mentan B-155 tgl 28 Agustus 2024 tentang Usulan optimalisasi anggaran lingkup Kementan terkait revisi Belanja Pegawai dan Buka Blokir, PAGU bertambah sebesar Rp861.050.000 menjadi Rp 433.499.771.000 merubah nilai PAGU secara keseluruhan

13. Revisi ke - tiga belas

Tanggal 10 September 2024 berdasarkan surat Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) terkait revisi Pemutakhiran RPD, tidak merubah nilai PAGU secara keseluruhan

14. Revisi ke - empat belas

Tanggal 24 September 2024 berdasarkan surat Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) terkait revisi Pemutakhiran POK, tidak merubah nilai PAGU secara keseluruhan

15. Revisi ke - lima belas

Tanggal 29 September 2024 berdasarkan surat Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) terkait revisi Revisi Optimalisasi Kawasan Mangga pada Direktorat Buah dan Flori, tidak merubah nilai PAGU secara keseluruhan

16. Revisi ke - enam belas

Tanggal 16 Oktober 2024 berdasarkan Surat KPA No B-355/RC.110/D/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang usulan revisi penyesuaian halaman III DIPA, tidak merubah nilai PAGU secara keseluruhan

17. Revisi ke - tujuh belas

Tanggal 24 Oktober 2024 berdasarkan Surat KPA No B-384/RC.110/D/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang usulan revisi pemutakhiran POK, tidak merubah nilai PAGU secara keseluruhan

18. Revisi ke - delapan belas

Tanggal 5 November 2024 berdasarkan Surat Dirjen B-398/RC.110/D/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, tidak merubah nilai PAGU secara keseluruhan

19. Revisi ke - sembilan belas

Tanggal 9 November 2024 berdasarkan Surat KPA No B-1660/RC.110/D/11/2024 tanggal 8 November 2024 tentang usulan revisi pemutakhiran POK, tidak merubah nilai PAGU secara keseluruhan

20. Revisi ke – dua puluh

Tanggal 19 November 2024 berdasarkan Surat Dirjen B-374/RC.110/D/11/2024 tanggal 13 November 2024, tidak merubah nilai PAGU secara keseluruhan

21. Revisi ke – dua puluh satu

Tanggal 26 November 2024 berdasarkan Surat KPA No B-407/RC.110/D/11/2024 tanggal 26 November 2024 tentang usulan revisi pemutakhiran POK, tidak merubah nilai PAGU secara keseluruhan

22. Revisi ke – dua puluh dua

Tanggal 29 November 2024 berdasarkan Surat KPA No B-403/RC.110/D/11/2024 tanggal 25 November 2024 tentang usulan revisi pemutakhiran POK, tidak merubah nilai PAGU secara keseluruhan

23. Revisi ke – dua puluh tiga

Tanggal 20 Desember 2024 berdasarkan Surat KPA No B-268/RC.110/D/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang usulan revisi pemutakhiran POK, tidak merubah nilai PAGU secara keseluruhan

24. Revisi ke – dua puluh empat

Tanggal 27 Desember 2024 berdasarkan Surat KPA No B-277/RC.110/D/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang usulan revisi pemutakhiran POK, tidak merubah nilai PAGU secara keseluruhan

Selama Tahun Anggaran 2024 terdapat perubahan PAGU Anggaran signifikan pada pos-pos sebagai berikut :

Tabel 25. Rincian Akun PAGU Anggaran Per 31 Desember Tahun 2024

AKUN	URAIAN AKUN	PAGU AWAL	REVISI PAGU	PAGU AKHIR
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	10.743.190.000	5.278.454.000	(5.464.736.000)
521211	Belanja Bahan	39.699.484.000	23.190.613.000	(16.508.871.000)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	22.111.780.000	3.877.842.000	(18.233.938.000)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.868.413.000	2.223.350.000	(1.645.063.000)
521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	40.018.193.000	14.340.919.000	(25.677.274.000)
522151	Belanja Jasa Profesi	5.320.200.000	3.176.195.000	(2.144.005.000)
522191	Belanja Jasa Lainnya	15.221.186.000	7.780.243.000	(7.440.943.000)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80.802.270.000	72.063.968.000	(8.738.302.000)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.463.590.000	4.200.534.000	(4.263.056.000)
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.095.795.000	24.779.216.000	11.683.421.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37.824.186.000	13.066.882.000	(24.757.304.000)
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	36.484.663.000	30.545.113.000	(5.939.550.000)
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada	6.682.800.000	3.421.670.000	(3.261.130.000)
526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	51.064.850.000	41.919.750.000	(9.145.100.000)
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	465.408.586.000	97.344.839.000	(368.063.747.000)
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	102.505.000.000	15.075.500.000	(87.429.500.000)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000.000	3.234.600.000	1.234.600.000
JUMLAH		947.515.496.000	370.316.520.000	(577.198.976.000)

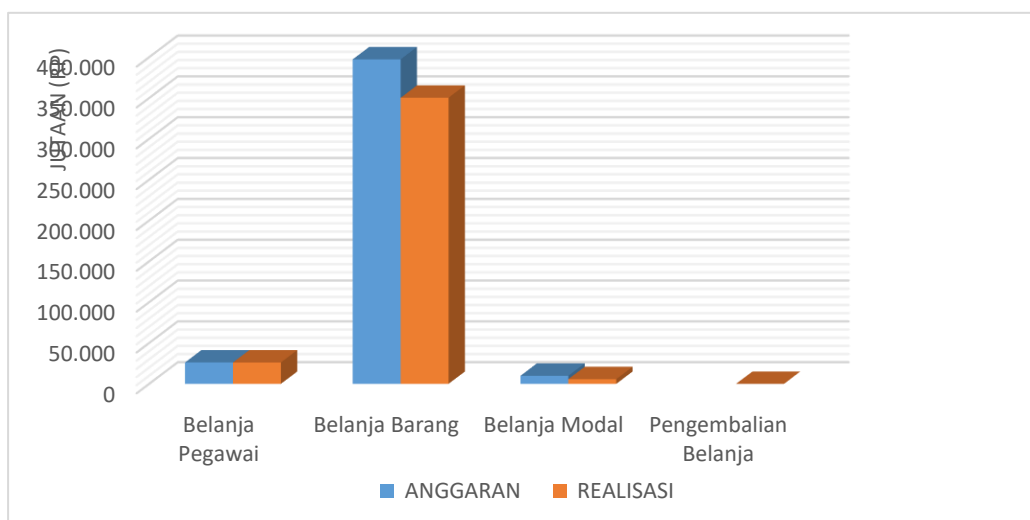
Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp382.133.111.712 atau 88,15% dari anggaran belanja sebesar Rp433.499.771.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024

Uraian	Periode yang berakhir 31 Desember 2024				
	Anggaran (Rp)	Realisasi bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	% Real Anggaran
Belanja Pegawai	26.231.736.000	26.181.051.708	7.026.639	26.174.025.069	99,78
Belanja Barang	397.390.580.000	350.368.810.612	178.992.069	350.189.818.543	88,12

Periode yang berakhir 31 Desember 2024					
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	% Real Anggaran
Belanja Modal	9.877.455.000	5.769.268.100	0	5.769.268.100	58,41
Jumlah	433.499.771.000	382.319.130.420	186.018.708	382.133.111.712	88,15

Komposisi anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Gambar B.1.



Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp382.133.111.712 apabila dibandingkan dengan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp882.455.520.310 mengalami penurunan sebesar Rp 500.322.408.598 atau 130,93%.

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Belanja	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2024 (Rp)	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Belanja Pegawai	26.231.736.000	26.174.025.069	23.327.399.000	23.316.874.440	10,92
Belanja Barang	397.390.580.000	350.189.818.543	875.965.781.000	851.566.868.217	(143,17)
Belanja Modal	9.877.455.000	5.769.268.100	7.864.775.000	7.571.777.653	(31,24)
Jumlah	433.499.771.000	382.133.111.712	907.157.955.000	882.455.520.310	(130,93)

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp26,174,025,069.00 dan

Rp3,316,874,440.00. Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2,904,337,000.00 atau 11,07% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2023.

**Tabel 28. Jumlah pegawai Satker Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP)
s/d 31 Desember 2024**

Nama Eselon I	Struktural	Pusat		PPPK	Jumlah
		Fungsional Khusus	Fungsional Umum		
Direktorat Jenderal Hortikultura	12	154	147	32	345
JUMLAH	12	154	147	32	345

**Tabel 29. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian Belanja Pegawai	Realisasi Bruto 31-Dec-24 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31-Dec-24 (Rp)	Realisasi Netto 31-Dec-23 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	24.332.704.779	7.026.639	24.325.678.140	23.096.531.144	5,05
Belanja Gaji & Tunjangan PPPK	1.848.346.929	0	1.848.346.929	220.343.296	88,08
Belanja Lembur	0	0	0	0	0,00
Jumlah	26.181.051.708	7.026.639	26.174.025.069	23.316.874.440	10,92

Realisasi Belanja Pegawai hanya berasal dari satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) Tahun 2024, terdapat penambahan pegawai dengan status PPPK sebanyak 16 orang, sedangkan jumlah pegawai pensiun sebanyak 5 orang, pegawai pindah sebanyak 4 orang serta pegawai meninggal dunia 3 orang.

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp350,189,818,543.0 dan Rp851,566,868,217.00

Berikut ini disajikan rincian anggaran dan realisasi belanja barang kelompok akun detail.

Tabel 30. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang akun Detail untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024

Uraian Belanja Barang	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	Realisasi %
Belanja Barang Operasional	16.756.563.000	16.631.738.774	99,26
Belanja Barang Non Operasional	29.602.828.000	26.712.056.524	90,23
Belanja Barang Persediaan	16.564.269.000	16.325.137.446	98,56

Uraian Belanja Barang	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	Realisasi %
Belanja Jasa	16.720.630.000	13.721.886.068	82,07
Belanja Pemeliharaan	3.599.245.000	3.551.893.181	98,68
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	114.110.600.000	84.784.143.696	74,30
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.706.503.000	706.337.855	41,39
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	85.902.103.000	75.381.630.200	87,75
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	7.500.000	7.320.000	100,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	112.420.339.000	112.367.674.799	99,95
Jumlah	397.390.580.000	350.189.818.543	88,12

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Belanja Barang akun Detail untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Belanja Barang	Realisasi Bruto 31-Dec-24 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31-Dec-24 (Rp)	Realisasi Netto 31-Dec-23 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Belanja Barang Operasional	16.676.557.574	44.818.800	16.631.738.774	24.557.929.359	(47,66)
Belanja Barang Non Operasional	26.748.010.274	35.953.750	26.712.056.524	58.876.914.310	(120,41)
Belanja Barang Persediaan	16.341.137.446	16.000.000	16.325.137.446	26.332.787.020	(61,30)
Belanja Jasa	13.723.014.068	1.128.000	13.721.886.068	24.168.185.817	(76,13)
Belanja Pemeliharaan	3.558.383.981	6.490.800	3.551.893.181	3.183.069.611	10,38
Belanja Perjalanan DN	84.803.794.415	19.650.719	84.784.143.696	121.215.698.550	(42,97)
Belanja Perjalanan LN	706.337.855	0	706.337.855	2.370.042.779	(235,54)
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	75.436.580.200	54.950.000	75.381.630.200	108.516.583.905	(43,96)
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	7.320.000	0	7.320.000	374.895.000	(5.021,52)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	112.367.674.799	0	112.367.674.799	481.970.761.866	(328,92)
Jumlah	350.368.810.612	178.992.069	350.189.818.543	851.566.868.217	(143,17)

Realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp501,377,049,674.00 atau 143,17% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2023.

B.4.1 Belanja Barang Persediaan

B.4.1.1 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

Anggaran dan realisasi Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) sampai dengan 31 Desember 2024 pagu sebesar Rp2,223,350,000.00 dan realisasi Rp2,000,221,446.00 dialokasikan untuk mendukung kegiatan Ditjen Hortikultura dengan rincian anggaran dan realisasi belanja berikut:

**Tabel 32. Rincian Realisasi Belanja Barang Persediaan Konsumsi
Per Satuan Kerja
Periode 31 Desember 2024**

Kode Satker	Uraian Satker	PAGU	REALISASI
029027 DK	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	3.500.000	3.500.000
029036 TP	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kab.Cianjur	10.500.000	10.497.000
029160 TP	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	7.532.000	7.532.000
049025 DK	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Diy	14.174.000	14.174.000
049088 TP	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Diy	14.640.000	14.600.795
059000 DK	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	18.570.000	18.532.500
059179 TP	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	8.140.000	7.874.620
069077 DK	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	13.100.000	12.839.000
069133 TP	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	8.300.000	8.294.800
079025 DK	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	20.779.000	20.630.700
079125 TP	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	38.170.000	38.152.400
119000 DK	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	38.275.000	37.619.500
119130 TP	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	12.250.000	12.247.000
129000 DK	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung	27.000.000	27.000.000
129113 TP	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung	12.248.000	12.248.000
139030 DK	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	15.426.000	15.426.000
139126 TP	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	8.410.000	8.410.000
149000 DK	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	9.040.000	9.040.000
149115 TP	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	20.000.000	20.000.000
169025 DK	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	3.760.000	3.760.000
179021 DK	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	11.910.000	11.910.000
179104 TP	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	1.500.000	1.500.000
192135 TP	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Kabupaten Enrekang	3.650.000	3.650.000
199026 DK	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	10.300.000	10.300.000
199092 TP	Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng	6.050.000	6.050.000
199126 TP	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	10.640.000	10.140.000
209065 DK	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	17.391.000	17.391.000
229027 DK	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	7.020.000	6.709.800
229100 TP	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	3.790.000	3.504.500
239009 DK	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	6.100.000	6.100.000
239127 TP	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	9.420.000	9.390.000
249030 DK	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	26.500.000	26.500.000
249159 TP	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	13.400.000	13.400.000
269000 DK	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	1.300.000	1.300.000
269057 TP	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Kepahiang	1.768.000	1.283.000
289034 DK	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	4.700.000	4.700.000
309032 DK	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.102.000	3.102.000
309901 TP	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7.730.000	7.730.000
319002 DK	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	5.710.000	5.447.400
319089 TP	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	7.660.000	7.646.900
340056 DK	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat	12.160.000	12.160.000
417673 DK	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	10.640.000	10.599.000
417674 TP	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	4.800.000	4.797.000
419022 TP	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Sinjai	5.800.000	5.800.000
625875 KP	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.726.495.000	1.506.732.531
Jumlah		2.223.350.000	2.000.221.446

B.4.1.2 Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses

Anggaran dan realisasi Belanja Barang Persediaan barang dalam proses (521822) sampai dengan 31 Desember 2024 pagu sebesar Rp14,340,916,000.00 dan realisasi

Rp14,324,916,000.00 dialokasikan untuk mendukung kegiatan Ditjen Hortikultura berupa pengembangan kawasan serta gerakan pengendalian OPT dengan rincian anggaran dan realisasi belanja berikut:

**Tabel 33. Realisasi Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses
Per 31 Desember 2024**

Kode kegiatan	Uraian Kegiatan	PAGU	REALISASI
1773	Perlindungan Hortikultura	5.040.000.000	5.006.722.000
4581	Perbenihan Hortikultura	9.334.194.000	9.318.194.000
Jumlah		14.374.194.000	11.429.618.450

Berikut ini disajikan rincian anggaran dan realisasi Barang Persediaan barang dalam proses (521822) per satuan kerja:

**Tabel 34. Rincian Realisasi Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses
Per Satuan Kerja
Periode 31 Desember 2024**

Kode Satker	Uraian Satker	PAGU	REALISASI
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	14.374.194.000	11.429.618.450
Jumlah		14.374.194.000	11.429.618.450

Belanja barang persediaan barang dalam proses dialokasikan untuk mendukung 2 kegiatan antara lain : Kegiatan Perlindungan dan Perbenihan Hortikultura.

a. Kegiatan Perlindungan Hortikultura

Anggaran dan realisasi belanja barang persediaan barang dalam proses sampai dengan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp5,040,000,000.00 dan Rp5,006,722,000.00 yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan Gerakan Pengendalian (Gerdal) OPT Hortikultura yang mendukung kegiatan kawasan hortikultura dengan peningkatan produksi bahan pengendali yang digunakan Gerdal OPT Hortikultura. Adapun bentuk POPT yang diproduksi antara lain : Agensi Hayati, Trichoderma, Likat Kuning, dan PGPR. Atas realisasi belanja tersebut, dicatat sebagai persediaan dalam proses, kemudian setelah siap salur, direklasifikasi ke akun barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja barang persediaan barang dalam proses terdapat pada satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP).

b. Kegiatan Perbenihan Hortikultura

Anggaran dan realisasi belanja barang persediaan barang dalam proses sampai dengan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp9,334,194,000.00 dan

Rp9,318,194,000.00 dialokasikan untuk mendukung penyediaan benih kawasan T+1. Hasil produksi benih tersebut disalurkan dibagikan kepada kelompok tani yang mendukung kegiatan pengembangan kawasan tersebut. Pada TA 2024, kawasan komoditas unggulan yang didukung penyediaan benih dari APBN yaitu kawasan Bawang Putih. Atas realisasi belanja tersebut, dicatat sebagai persediaan dalam proses, kemudian setelah siap salur, direklasifikasi ke akun hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja barang persediaan barang dalam proses terdapat pada satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP).

B.4.2 BELANJA BANTUAN PEMERINTAH

Direktorat Jenderal Hortikultura diamanatkan untuk melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional guna mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN1) yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Dalam bentuk upaya pencapaian target tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura mengalokasikan anggaran belanja bantuan pemerintah dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 melalui satuan kerja Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota dalam bentuk barang dan uang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 35. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah per Kegiatan Per 31 Desember 2024

Kegiatan	Jenis Bantuan	PAGU	REALISASI	%
Peningkatan Produksi Sayuran Dan Tanaman Obat	Barang	76.233.229.000	76.202.965.278	99,96
	Uang	14.305.000.000	14.305.000.000	100,00
Perlindungan Hortikultura	Barang	5.873.777.000	5.868.764.960	99,91
	Uang	0	0	0,00
Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Perbenihan Hortikultura	Barang	3.024.500.000	3.006.335.500	99,40
	Uang	770.500.000	770.500.000	100,00
Peningkatan Produksi Buah Dan Florikultura	Barang	16.345.043.000	16.341.108.711	99,98
	Uang	0	0	0,00
Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Barang	29.842.573.000	19.684.477.550	65,96
	Uang	51.935.320.000	51.577.473.000	99,31
Jumlah	Barang	131.319.122.000	121.103.651.999	92,22
	Uang	67.010.820.000	66.652.973.000	99,47
Total Keseluruhan		198.329.942.000	187.756.624.999	94,67

Tabel 36. Rincian Akun Belanja Bantuan Pemerintah Per 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian Akun	PAGU	REALISASI
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat / Pemda	30.545.113.000	20.382.493.550
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat / Pemda	3.421.670.000	3.421.663.650

Kode Akun	Uraian Akun	PAGU	REALISASI
526122	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat / Pemda dalam bentuk uang	10.015.570.000	9.904.897.000
526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat / Pemda dalam bentuk uang	41.919.750.000	41.672.576.000
526212	Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat / Pemda	7.500.000	7.320.000
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pemda	97.344.839.000	97.292.174.799
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	15.075.500.000	15.075.500.000
Total		198.329.942.000	187.756.624.999

Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura yang masuk ke dalam bantuan pemerintah terdiri dari :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas didukung oleh kegiatan:

- a. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat berupa :
 - Sarana pengembangan kawasan pada kawasan bawang merah, kawasan aneka cabai, kawasan bawang putih, kawasan kentang, kawasan sayuran lain, kawasan tanaman obat, dan kawasan jahe.
 - Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan lingkungan hidup dalam bentuk Prasarana Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat
- b. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura berupa :
 - Sarana pengembangan kawasan pada kawasan pisang, manggis, durian, mangga, kelengkeng, alpukat, jeruk, buah lain, kawasan krisan, anggrek, serta florikultura lain
 - Prasarana Bidang Pertanian, Kehutandn dan Lingkungan Hidup dalam bentuk Prasarana Budidaya Buah dan Florikultura
- c. Perbenihan Hortikultura berupa :
 - Sertifikasi produk dengan sertifikat benih hortikultura
 - Sarana pengembangan kawasan pada benih sumber batang hortikultura, benih sebar batang hortikultura, benih sebar umbi/rimpang, benih hortikultura lainnya.
 - Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan hidup dalam bentuk Prasarana Perbenihan Hortikultura
- d. Perlindungan Hortikultura berupa :
 - Sarana Pengembangan Kawasan Area Pengendalian OPT Hortikultura, Area Penanganan DPI Hortikultura, dan Sarana Perlindungan Hortikultura.

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri didukung oleh kegiatan :

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang terdiri dari :

- a. Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup antara lain sarana pascapanen hortikultura, sarana pengolahan hortikultura, sarana pemasaran hortikultura
- b. Prasarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup antara lain prasarana pascapanen hortikultura dan prasarana pengolahan hortikultura
- c. Promosi Produk Hortikultura
- d. Sarana Pengembangan Kawasan dengan *Horticulture Development of Drylands Area Project*

Jenis bantuan pemerintah pada kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi bantuan sarana/prasarana, rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan, bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan pengguna anggaran (PA).

Penjabaran bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah pada kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura untuk jenis Bantuan yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran) sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023 pada pasal 2 ayat 3 dan 4 meliputi:

1. Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Jenis bantuan pemerintah :

- Bantuan sarana/prasarana
- Bantuan rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/bangunan
- Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)

2. Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Jenis bantuan pemerintah :

- Bantuan sarana/prasarana
- Bantuan rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/bangunan
- Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)

3. Kegiatan Perbenihan Hortikultura

Jenis bantuan pemerintah :

- Bantuan sarana/prasarana
- Bantuan rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/bangunan

- Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)
4. Kegiatan Perlindungan Hortikultura
- Jenis bantuan pemerintah
- Bantuan sarana/prasarana
 - Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)
5. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Horyikultura
- Jenis bantuan pemerintah :
- Bantuan sarana/prasarana
 - Bantuan rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/bangunan
 - Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)
6. Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
- Jenis bantuan pemerintah : Pemberian penghargaan.
- Penjabaran bantuan lainnyayang memiliki karakteristik bantuan pemerintah pada kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura untuk jenis bantuan yang memeiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran) sebagaimana telah diatur dala Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kemnterian Pertanian Tahun 2024 pada pasal 2 ayat 4 dan 5 meliputi :
1. Bantuan benih dan bantuan budidaya tanaman dengan jenis bantuan :
 - a. Bantuan sarana produksi pengebangan Kawasan /kampung
 - b. Fasilitasi benih hortikultura dan sarana produksinya
 2. Bantuan perlindungan tanaman dan dampak perubahan iklim (DPI) dengan jenis bantuan :
 - a. Bantuan bahan pengendali OPT Hortikultura ramah lingkungan
 - b. Fasilitasi penangan DPI
 3. Bantuan Promosi dengan jenis bantuan dukungan penyerapan produk hortikultura

Sedangkan kegiatan bantuan pemerintah pada lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi :

1. Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat pada Tahun 2024 dilakukan melalui pendekatan kampung dan kawasan. Pendekatan kampung sayuran dan tanaman obat dilaksanakan dalam 1 (satu) wilayah administratif

desa/kampung yang sama dengan luasan minimal 5 (lima) dan/atau 10 (sepuluh) hektar sesuai kriteria teknis budidaya. Pengembangan kampung sayuran dan tanaman obat merupakan salah satu model pengembangan kawasan dengan pendekatan terintegrasi yang memperhatikan kesesuaian agroekosistem, masyarakat antusias merawat tanaman serta komitmen tinggi dari pimpinan daerah setempat sehingga dapat dibangun kawasan hortikultura skala ekonomi. Arah pengembangan kampung sayuran dan tanaman obat diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan produk segar maupun olahan dalam negeri dan ekspor. Pengembangan kampung dan kawasan untuk komoditas bawang merah dan bawang putih dilakukan melalui metode ekstensifikasi dan intensifikasi. Metode ekstensifikasi adalah budidaya bawang pada lahan baru atau secara intensifikasi di lahan eksisting melalui indeks peningkatan pertanaman.

Eksistensi Kampung STO ditandai dengan berbagai penciri diantaranya lahan budidaya yang terkonsolidasi dalam satu wilayah setingkat Desa/Kelurahan, tumbuh dan berkembangnya unit-unit usaha dalam kelembagaan Kampung STO salah satunya berbentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis produk sayuran dan tanaman obat, kelembagaan yang lebih kuat, modern dan profesional serta adanya penanda berupa papan nama identitas Kampung STO yang merupakan fasilitasi bantuan pemerintah dari Direktorat Jenderal Hortikultura.

Salah satu kegiatan bantuan pemerintah dari Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)/Pekarangan Hortikultura Lestari (PHL) merupakan pemberdayaan kelompok masyarakat untuk budidaya tanaman hortikultura melalui kegiatan perbenihan, demplot, pertanaman dan penanganan pascapanen. Kegiatan P2L/PHL dapat dilakukan pada lahan pekarangan / lahan tidur dan/ atau lahan kosong yang tidak produktif, dan/ atau lahan di sekitar rumah/ bangunan tempat tinggal/ fasilitas publik, serta lingkungan lainnya dengan batas kepemilikan yang jelas seperti asrama, pondok pesantren, rusun dan rumah ibadah, dan lainnya. Kegiatan P2L / PHL dilaksanakan dengan komponen kegiatan yang terdiri dari sarana perbenihan, demplot, pertanaman dan sarana pascapanen/pemasaran.

Pada periode Semester II TA 2024, realisasi belanja bantuan pemerintah pada kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat sebesar Rp. 90.507.965.278.00 atau 99,97% dari pagu anggaran sebesar Rp 90.538.229.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 37. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah
Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat**

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KEUANGAN		TARGET	FISIK		BENTUK BANTUAN
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI	SATUAN	
1771CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	11,000,000,000	11.000.000.000	220	220	Unit	Kawasan Sayuran lainnya : (Sayuran Daun dan Bawang Bombay) Benih bermutu, Pupuk anorganik, Pupuk organik, Pupuk hayati, Dolomit, Pembenah tanah, Mulsa Pekarangan Pangan Lestari / Pekarangan Hortikultura Lestari : Sarana Perbenihan, Demplot , Pertanaman, Sarana Pascapanen Kawasan Bawang Merah : Benih Bermutu, Pupuk anorganik, Pupuk organik, Pupuk hayati, Pembenah Tanah, Dolomit, Mulsa, Sungkup plastik, sungkup modern <u>Kemitraan Champion :</u> Pupuk Anorganik, Pupuk Organik, Pembenah Tanah, dolomit, mulsa, Soil Block , Sarana Pengendali Dampak Perubahan Iklim (Sungkup Plastik), Sungkup modern (rangka tunnel), Irigasi Sederhana, sprinkler) Kawasan Aneka Cabai : Benih bermutu, Mulsa, Pupuk organik, Pupuk anorganik, pupuk hayati, dolomit, Pembenah tanah, Soil block, ajir moren <u>Kemitraan Champion :</u> benih bermutu, mulsa, Pupuk Organik, Pupuk Anorganik, Pupuk hayati, dolomit, pembenah tanah, Soil block dan ajir modern, sarana oengendalu dampak perubhan iklim (Rain, Shelter, irigasi sederhana, sprinkler, pomp air), power sprayer/handsprayer elektrik kultivator Kawasan Tanaman Obat : Benih bermutu (Kunyit, kencur, Pupuk Organik, Pupuk Anorganik, Pupuk Hayati, Pembenah tanah Kawasan Jahe : Benih Bermutu, Pupuk Organik, Pupuk Anorganik, Pupuk Hayati, Pembenah tanah Kawasan Bawang Putih : Benih Bermutu, Pupuk anorganik, Pupuk organik, Pupuk hayati, Mulsa, Pembenah Tanah, Dolomit Kawasan Kentang : BEnih bermutu, Pupuk anorganik, Pupuk organik, Pupuk hayati, Dolomit, Pembenah Tanah, mulsa Kawasan Sayuran Lainnya : (Sayuran Daun, Bawang Bombay, Sayuranmendukung FE, Sayuran Mendukung Korporasi, Pekarangan Pangan Lestari)) Benih bermutu, Pupuk anorganik, Pupuk organik, Pupuk hayati, Dolomit, Pembenah tanah, Mulsa
1771RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	79.538.229.000	79.507.965.278	9.416	9.757	Unit	

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KEUANGAN		TARGET	FISIK		BENTUK BANTUAN
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI	SATUAN	
							Pekarangan Pangan Lestari (P2L) : Sarana perbenihan (rumah semai, plang nama dan peralatan pendukung), Demplot (Peralatan dan pengolahan demplot, peralatan pengairan, sarana produksi pupuk dan bahan pengendali OPT ramah lingkungan, media tanam dan peralatan kegiatan pertanaman), Sarana Pasca panen (Kontainer/keranjang, selotip kemasan, plastic, gunting panen serta alat pasca panen lainnya)
TOTAL		90.538.229.000	90.507.965.278	9.636	9.977		

2. Kegiatan Perlindungan Hortikultura

Kegiatan perlindungan hortikultura ditujukan untuk mengamankan produksi di area pengembangan kampung hortikultura, baik dari serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) maupun dampak perubahan iklim.

Komponen bantuan pemerintah kegiatan perlindungan hortikultura adalah sebagai berikut :

1. Area Pengendalian OPT Hortikultura berupa: Fasilitas Pengendalian OPT,
2. Area Penanganan DPI Hortikultura berupa: Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana Penanganan DPI
3. Sarana Perlindungan Hortikultura

Kegiatan Perlindungan Hortikultura memiliki alokasi pagu anggaran sebesar Rp 5.873.777.000,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 5.868.764.960,00 atau sekitar 99,91%.

Tabel 38. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Kegiatan Perlindungan Hortikultura

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KEUANGAN		TARGET	FISIK		BENTUK BANTUAN
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI	SATUAN	
1773 RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	5.873.777.000	5.868.764.960	2.750	2.750	Unit	Sarana Klinik PHT - Agens Pengendali Hayati - Pestisida nabati - Perangkat OPT atraktan feromon sex - Lampu Perangkat OPT - Handsprayer Mist blower - Drone

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KEUANGAN			FISIK		BENTUK BANTUAN
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET	REALISASI	SATUAN	
							- Sarana perlindungan hortikultura lainnya
TOTAL		5,895,000,000	2,136,920,520	2.750	2.750		

3. Kegiatan Perbenihan Hortikultura

Komponen Bantuan Pemerintah pada kegiatan Perbenihan Hortikultura antara lain :

1. Benih Sumber Batang Hortikultura berupa perbanyakan benih
2. Benih Sebar / Umbi Rimpang, Benih Sebar Batang, dan Benih Hortikultura Lainnya berupa penyediaan benih dan perbanyakan benih
3. Prasarana Perbenihan Hortikultura dengan komponen bantuan berupa Fasilitas Bantuan Prasarana dan sarana Perbenihan Hortikultura
4. Sertifikat benih hortikultura dengan komponen bantuan berupa pengembangan varietas.

Kegiatan berupa Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura, Benih Sebar Batang Hortikultura, Benih Hortikultura Lainnya, serta Prasarana Perbenihan Hortikultura. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura bekerjasama dengan BBH, Penangkar dibawah binaan BPSB, dan instansi terkait yang ditunjuk.

Penyediaan benih umbi/rimpang seperti benih bawang merah, bawang putih, kentang, dan sayuran lainnya dan tanaman obat diperlukan untuk peningkatan ketersediaan benih unggul bermutu. Sedangkan penyediaan benih batang dan benih hortikultura lainnya dalam mendukung pengembangan kawasan hortikultura diperlukan dalam jumlah cukup.

Produksi benih bermutu memerlukan prasarana yang tepat dan mampu menunjang proses produksi dan memperkuat produsen benih dalam menghasilkan benih unggul. Sedangkan fasilitas prasarana perbenihan hortikultura dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya proses produksi komoditas. Fasilitas ini ditargetkan kepada BBH dan penangkar/produsen benih yang memproduksi benih hortikultura.

Selain itu, pada tahun 2024 terdapat pla kegiatan pemeliharaan pohon induk pada rincian output benih sumber batang hortikultura.

Realisasi belanja bantuan pemerintah pada kegiatan perbenihan hortikultura per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.776.835.500.00 atau 99,52% dari pagu

anggaran sebesar Rp3.795.000.000,00 Bentuk bantuan pemerintah pada kegiatan perbenihan adalah sebagai berikut :

Tabel 39. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Kegiatan Perbenihan Hortikultura

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KEUANGAN		FISIK			BENTUK BANTUAN
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET	REALISASI	SATUAN	
4581CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	2.900.000.000	2.892.372.500	5	5	Unit	Benih Hortikultura Lainnya : Fasilitasi Benih Hortikultura
4581PDC	Sertifikasi Produk	895.000.000	884.463.000	200	200	Unit	
TOTAL		3.795.000.000	3.776.835.500	205	205		

4. Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Kegiatan peningkatan produksi buah dan florikultura dilaksanakan melalui pendekatan kampung buah dan florikultura. Pendekatan kampung buah dilaksanakan dalam 1 (satu) wilayah administratif desa dengan luasan :

- minimal 10 ha dalam hamparan dan atau kumulatif luasan lahan parsial antara lain untuk buah mangga, manggis, jeruk, durian, lengkeng, alpukat, pisang, dan salak;
- minimal 5 ha untuk buah nanas dan melon
- 1000 m² untukanggur dan stroberi
- 200 m² untuk florikultura yang dibudidayakan dalam Green House
- 5,000 m² untuk florikultura yang tidak dibudidayakan dalam Green House

Arah pengembangan kampung buah dan florikultura diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dalam negeri, ekspor dan mendukung kawasan agroeduwisata.

Selain kawasan tersebut, penyediaan benih dialokasikan pada Direktorat Perbenihan Hortikultura.

Sampai dengan periode Laporan Keuangan per 31 Desember 2024, realisasi belanja bantuan pemerintah pada kegiatan peningkatan produksi buah dan florikultura sebesar Rp16.341.108.711,00 atau 99,98% dari pagu anggaran sebesar Rp16.345.043.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 40. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah
Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura**

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KEUANGAN		TARGET	FISIK		BENTUK BANTUAN
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI	SATUAN	
5886CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	7.356.050.000	7.352.308.500	171	171	Unit	Kawasan Pisang : Benih bermutu, Pupuk Anorganik, Pupuk Organik, Pupuk Hayati yang mengandung trichoderma, Brongsong Kawasan Jeruk : Pupuk Organik, Pupuk Anorganik, Dolomit, Pupuk Hayati,, Pembenh Tanah, pupuk mikro Kawasan Buah Lain : (Melon, salak, Nanas, Stroberi, Anggur, Buah Naga, Buah Lain) Benih Bermutu,, Pupuk Organik, Pupuk Anorganik, dolomit, pupuk hayati, screen house, Pembenh Tanah Kawasan Florikultura : (Melati Ekstensifikasi dan Intensifikasi, Dracena Ekstensifikasi, Sedap malam Ekstensifikasi, Tanaman Hias Daun Ekstensifikasi dan Intensifikasi) Benih, Pupuk Anorganik, Mulsa, Shading House, rak, pot/polybag, Shading Net Kawasan Durian, Mangga, Kelengkeng, Alpukat, Manggis : Pupuk Organik, Dolomit, Pupuk Anorganik, Pupuk Hayati yang mengandung Trichoderma, Pembenh Tanah
5886RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	8.988.993.000	8.988.800.211	1.598	1.598	unit	Kawasan Krisan : Green House Besi/Galvanis, Sarana Pengairan, Sarana Penyinaran, Jaring Penyangga Kawasan Anggrek : Green House Besi/Galvanis, Rak, Shading Net
TOTAL		16.345.043.000	16.341.108.711	1.769	1.769		

5. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura diberikan dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing serta peningkatan pemasaran/akses pasar produk hortikultura. Komponen bantuan pemerintah pada kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terdapat pada Rincian Output Sarana Pascapanen, Sarana Pengolahan, sarana Pemasaran, Prasarana Pascapanen, Prasarana Pengolahan dan Horticulture Development of dryland areas Project (HDDAP).

Komponen bantuan pemerintah pada kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yaitu :

1. Fasilitas bantuan pada :
 - a. Sarana pascapanen hortikultura
 - b. Sarana pengolahan hortikultura
 - c. Sarana pemasaran hortikultura,
 - d. Prasarana pascapanen hortikultura
 - e. Prasarana pengolahan hortikultura
 - f. Horticulture Development of Dryland Areas Project (HDDAP)

Sampai dengan periode Laporan Keuangan per 31 Desember 2024, realisasi belanja bantuan pemerintah pada kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura sebesar Rp71.261.950.550,00 atau 87,20% dari pagu anggaran sebesar Rp81.723.093.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 41. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KEUANGAN		TARGET	FISIK		BENTUK BANTUAN
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI	SATUAN	
5887CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.300.000.000	1.278.996.500	30	30	unit	Sarana Pemasaran : Bantuan Sarana Pasar Lelang/Pasar Tani berupa Papan Nama, Mesin penghitung uang, Pengeras suara (TOA), Layar monitor informasi harga, Sealer packaging, Plastik wrapping, Tenda, meja dan kursi, serta pembelian produk hortikultura Sarana Pascapanen : Motor Roda 3, Keranjang Panen, Timbangan duduk digital, Sarana Pencucian, Meja peniris, Meja sortasi, Peralatan Grading, Roller conveyor, Blower. Catatan: Komponen peralatan disesuaikan dengan jenis komoditas yang ditangani
5887RAG	Sarana Bidang Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	35.455.573.000	25.262.608.050	820	820	unit	Sarana Pengolahan : a) Aneka Cabai: Mesin Penggiling Cabai kering, Mesin Penggiling bumbu, Mesin Pengering Tipe Rak, Deep Drying, Mesin Continuous Sealer, Timbangan digital, Freezer, Meja Stainless; b) Bawang: Mesin perajang bawang, Spinner, Mesin Pengupas bawang, Deep penggoreng bawang, Mesin Continuous Sealer, Timbangan digital, Freezer, Meja Stainless; c) Hortikultura lainnya: Mesin Vacuum Frying, Mesin Pengiris Multiguna, Mesin Continuous Sealer, Timbangan digital, Freezer, Meja Stainless
5887RBK	Prasarana Bidang Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	44.967.520.000	44.720.346.000	205	205	unit	Prasarana Pascapanen : Bangsal pascapanen; yang dilengkapi dengan identitas bangsal pascapanen (prasasti), Kamera CCTV, Pengemas, produk dan label/branding

KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KEUANGAN			FISIK		BENTUK BANTUAN
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET	REALISASI	SATUAN	
							Prasarana Pengolahan : Pengereng tenaga surya (solar dryer dome) dilengkapi dengan rak jemur berbahan food grade, lantai semen permanen, identitas bangunan (papan nama) dan CCTV
	TOTAL	81.723.093.000	71.261.950.550,00	1.055	1.055		

B.5 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5,769,268,100.00 dan Rp7,571,777,653.00.

Tabel 42. Perbandingan Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	Realisasi Netto	Naik (Turun) (%)
	31-Des-24 (Rp)		31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.429.861.600	0	2.429.861.600	3,499,444,127	-30.56
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.121.322.500	0	3.121.322.500	3,600,532,526	-13.31
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	218.084.000	0	218.084.000	372,301,000	-41.42
Belanja Modal Lainnya				99,500,000	-100.00
Jumlah	5.759.268.100	0	5.759.268.100	7,571,777,653	-23.94

Realisasi belanja modal tahun 2024 berasal dari:

1. Belanja modal Peralatan dan Mesin senilai Rp.2,429,861,600.00

Belanja modal peralatan mesin Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) senilai Rp2,336,721,347.00. Untuk pembelian Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Ruang Rapat Ditjen Hortikultura (Videotron, Kursi Rapat, Meja Rapat, AC Standing, Tablet PC), Fasilitas Sarana Kerja HDDAP (PMC & NPMU), sarana pelatihan pertanian (Alat Hidroponik, PLTS) dan inventaris kantor.

Sedangkan belanja senilai Rp93,140,253.00. dalam bentuk Pengembangan Nilai Aset (Langsung) untuk pengembangan Fasilitas Sarana Kerja HDDAP (PMC & NPMU). Pembiayaan pengadaan tersebut berasal dari pinjaman luar negeri dengan persentasi pembiayaan 68% menggunakan dana pinjaman ADB dan 32% menggunakan dana pinjaman IFAD.

2. Belanja modal Gedung dan bangunan senilai Rp.3,121,322,500.00 dan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan senilai Rp218,084,000.00.

Belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari belanja modal Gedung dan bangunan (533111) senilai Rp. 3.121.322.500 dan Belanja modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan (533115) Rp. 218.084.000. Rincian Belanja Modal tersebut yaitu :

- a. Pembelian Senilai 152,170,000.00
- Kesalahan input nilai SPM tidak sama dengan nilai kontrak Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja PMC (HDDAP) senilai Rp.400,000.00
 - Pembelian sarana pelatihan pertanian berupa screen house senilai Rp.151,770,000.00 sebanyak 1 Unit.
- b. Pengembangan Langsung Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp3,187,236,500.00:
- NUP 1 dengan rincian sebagai berikut :
- Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja PMC (HDDAP) senilai Rp.257.500.000,-
 - Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja NPMU (HDDAP) senilai Rp.269.854.600,-
 - Konsultan Perencana Pekerjaan Renovasi Gedung Rp.92.207.000,-
 - Konsultan Pengawas Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Rp.46.669.000,-
 - Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Rp.1.502.291.030,-
- NUP 5 dengan rincian sebagai berikut :
- Pekerjaan Perbaikan Toilet Pria dan Wanita Rp. 199.000.000.
 - Konsultan Perencana Pekerjaan Renovasi Laboratorium Direktorat Perlindungan Rp.49.150.000,-.
 - Pekerjaan Renovasi Laboratorium Direktorat Perlindungan Rp.740.906.870,
 - Konsultan Pengawas Pekerjaan Renovasi Laboratorium Direktorat Perlindungan Rp.30.058.000,-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**C.1 ASET LANCAR****C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp650.500 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 43. Perbandingan Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kas di Bendahara pengeluaran	0	650.500	(650.500)	100
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0	0	0
Jumlah	0	650.000	(650.500)	(100)

Saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran berasal dari satuan kerja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat (018.04.089009DK) sebesar Rp650,500.00 dan telah disetor ke kas negara tanggal 3 Januari 2024 dengan NTPN : D30C07NAP6H1NDSI.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.0.00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran TUP sebesar Rp0.00 yang terdiri dari satuan kerja berikut :

C.1.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas di Bendahara Pengeluaran yang bulan berasal dari UP. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Pada Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian TA 2024 ditemukan masih terdapat sisa kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas sebesar Rp17,957,672 pada satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP). Sisa kas tersebut merupakan sisa perjalanan dinas yang berasal dari TUP dan belum disetor ke kas negara sampai batas akhir pelaporan keuangan

tahun 2024 sehingga pada Laporan Keuangan Tahun 2024 (Audited) sisa kas tersebut disajikan sebagai saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp17,957,672 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 44. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan setara Kas
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	17,957,672	(17.957.672)	(100)
Jumlah	0	17,957,672	(17.957.672)	(100)

Adapun saldo awal Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran telah ditindaklanjuti dan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 45. Penyelesaian Saldo Awal Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2024**

No	Uraian	NTPN	Tanggal Bayar	Nilai (Rp)
1	Pengembalian perjalanan dalam rangka penilaian kebun / survailence TA 2023 an. Slamet Ari dkk	991C23CIFJUD341E	12 Februari 2024	361,050
2	Penerimaan monitoring registrasi kebun dan lahan usaha ke lokasi TA 2023 an. Slamet Ari dkk	F278055DF935T6U8	12 Februari 2024	3,257,145
3	Pengembalian perjalanan dinas biasa dalam rangka promosi produk TA 2023 an. Ofi Nidaussoleha dkk	E99752G4VPC0LRPT	12 Februari 2024	3,580,350
4	Pengembalian perjalanan dinas dalam rangka identifikasi / koordinasi / persiapan / pembinaan sarana pascapanen TA 2023 an. Bambang Sugiharto dkk	E47D96U8EU7UN1IG	12 Februari 2024	1,900,000
5	Pengembalian perjalanan pimpinan dalam rangka monev kegiatan PPHH TA 2023 an. Hanang dkk	8CB460NA0477ROQK	12 Februari 2024	7,058,627
6	Pengembalian monitoring registrasi kebun dan lahan usaha ke lokasi TA 2023 an. Dina Martha dkk	F7B076U8EU7UN72K	12 Februari 2024	388,500
7	Pengembalian perjalanan dinas biasa dalam rangka penilaian kebun / survailence TA 2023 an. Slamet Ari dkk	906876U8EU7UN8QF	12 Februari 2024	1,372,000
8	Pengembalian monitoring registrasi kebun dan lahan usaha ke lokasi TA 2023 an. Hotman Fajar dkk	4EF292G4VPC0MDK3	12 Februari 2024	40,000
Total				17,957,672

C.1.3 PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Saldo awal Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp772,951,057.00. Sedangkan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp757,451,057.00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 46. Perbandingan Piutang Bukan Pajak
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024**

Kode Akun	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	772,951,057	757,451,057
	Jumlah	772,951,057	757,451,057

C.1.3.1 PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tersaji pada Laporan Neraca per 31 Desember 2024 merupakan Piutang yang disebabkan karena denda keterlambatan pekerjaan yang belum disetor ke kas negara berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian serta nilai piutang yang disajikan atas kontrak pekerjaan yang tidak dilaksanakan (putus kontrak).

Adapun rincian satuan kerja dengan saldo Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut :

**Tabel 47. Perbandingan Saldo Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024**

No.	Kode Satker	Nama Satker	Akun	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Keterangan
1	199126	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	242.550.000	0	Transfer Keluar Ke 625875 lalu reklas ke akun Piutang Lainnya
2	209108	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	10.419.574	0	Transfer Keluar Ke 625875
3	239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	27.700.000	0	Setoran Piutang senilai Rp4.500.000, sisanya Rp23.200.000 Transfer Keluar Ke 625875
4	249159	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	10.423.124	0	Transfer Keluar Ke 625875
5	289034	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	16.279.000	0	Transfer Keluar Ke 625875

No.	Kode Satker	Nama Satker	Akun	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Keterangan
6	299005	Dinas Pertanian Provinsi Banten	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	30.875.000	0	Setoran Piutang senilai Rp1.000.000, sisanya Rp29.875.000 Transfer Keluar Ke 625875
7	319089	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	21.701.052	0	Transfer Keluar Ke 625875
8	339156	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	29.700.500	0	Setoran Piutang senilai Rp10.000.000, sisanya Rp19.700.500 Transfer Keluar Ke 625875
9	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	383.302.807	514.901.057	Saldo Rp131.598.250 Transfer masuk dari satker 209108, 239127, 249159, 289034, 299005, 319089 dan 339156
Jumlah				772.951.057	514.901.057	

Penyelesaian Piutang PNBPN sampai September 2024 yaitu diantaranya:

1. Pada satuan kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (018.04.239127) untuk temuan nomor R.254/PW.130/G.2/08/2020, senilai Total Rp 4,500,000.00. Setoran senilai Rp500,000.00 sebanyak 7 kali dengan NTPN 2ACC22G4VPPK7P5Q tanggal 7 Mei 2024, A361B0NA04GFMKFM tanggal 22 Mei 2024, 24C801JNFUSVRVML tanggal 25 Maret 2024, 2EFEA3CIFKD01KD5 tanggal 2 Juli 2024, B56901JNFVBV0PVP tanggal 27 Agustus 2024, 6FE8948VVF2HKGJI tanggal 15 Agustus 2024, E267B7QLUPFLDSM4 tanggal 30 September 2024 dan senilai Rp1,000,000.00 sesuai NTPN: E0F0E0NA055BQBOL tanggal 23 Desember 2024
2. Pada satuan kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten (018.04.299005) untuk temuan R.125/PW.130/G.2/06/2017 senilai Rp1,000,000.00 sesuai NTPN: F06E31JNFVHPMHV3 tanggal 30 Oktober 2024
3. Pada satuan kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (018.04.339156) untuk temuan nomor R.364/PW.130/G.2/09/2019 senilai Rp.10.000.000 dengan NTPN EA7208N3EJ9OCVAD tanggal 12 Januari 2024
4. Pada 31 Desember 2024 periode laporan 12 dilakukan transfer Piutang dari satuan kerja Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan ke Satker Pusat Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875).

Direktorat Jenderal Hortikultura melaksanakan rekonsiliasi nilai piutang yang tersaji di Laporan Neraca dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian secara berkala dalam menjalankan fungsi monitoring sebagai upaya dalam penyelesaian piutang negara.

Tabel 48. Rincian Piutang PNPB

Kode Satker	Nama Satker	Jenis Piutang PNPB	NO.LHP	Debitur	Sebelum TK/TM	31 Desember 2024
199126	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Sulsel	Piutang Karena Putus Kontrak Pengadaan 526xx Yang Tidak Terlaksana		IR.HJ.Suryani, M.SI/PPK	242.550.000	0
209108	Dinas Perkeb Dan Horti Provinsi Sulawesi Tenggara	Denda Keterlambatan	R.245/PW.130 /G.2/09/2020	Gunawan Laliasa S. TP	10.419.574	0
239127	Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat	Denda Keterlambatan	R.254/PW.130 /G.2/08/2020	MOH. Jaswadi Putra, SP, M.SI	24.200.000	0
249159	Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Denda Keterlambatan	R.254/PW.130 /G.2/08/2019	IR. Andreas Riwu	4.894.663	0
249159	Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Denda Keterlambatan	R67/PW.130/ G.2/04/2021	Joaz Bily Oemboe Wanda, SP/PPK	5.528.461	0
289034	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	Denda Keterlambatan	R.180/PW.130 /G.2/09/2016	JABIR IBRAHIM	16.279.000	0
299005	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Banten	Pnpb Terlambat Disetor Ke Kas Negara	R.125/PW.130 /G.2/06/2017	Zaenal Abidin (Kasie Perbenihan BBIH)	30.875.000	0
319089	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Gorontalo	Denda Keterlambatan	R.179/PW.130 /G.2/09/2016	IR.Nurlela N Musa, MM/ IR.Nurbaya A.Gani, M.SI	21.701.052	0
339156	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Papua Barat	Denda Keterlambatan	R.48/PW.130/ G.2/04/2016	Demas Felle, SP	6.680.000	0
339156	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Papua Barat	Denda Keterlambatan PINDAH DARI 339226	R.414/PW.130 /G.2/10/2018	Anthonid.F. Jenusy, S.ST	12.190.500	0
339156	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Papua Barat	Denda Keterlambatan PINDAH DARI 339226	R.364/PW.130 /G.2/09/2019	Anthonid.F. Jenusy, S.ST	830.000	0
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	Denda Keterlambatan	122/PW.130/H /A/4/2015	Eko Mardiyanto, SE / Adityo Utomo, SE	82.115.684	82.115.684
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	Denda Keterlambatan	R.89/PW.130/ H.2/12/2015	Asril Aminullah, SP/ Adityo Utomo, SE	21.156.400	21.156.400
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	Denda Keterlambatan	86/RC.240/H/ 11/2012	Asril Aminullah, SP	5.254.300	5.254.300
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	Denda Keterlambatan	R.164/PW.130 /G.2/08/2021	DR. Rudi Hartono, S.P, MP/PPK LITBANG	109.500.000	109.500.000
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	Denda Keterlambatan PINDAH DARI 059059	R.418/PW.130 /G.2/10/2018	IR. Bambang Pujoleksono	369.093	369.093
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	Denda Keterlambatan PINDAH DARI 179259	R.255/PW.130 /G.2/09/2020	Franki Pasia, SE, MS.I	6.149.100	6.149.100
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	Denda Keterlambatan	R144/PW.130/ G.2/05/2019	H.Badaruddin /PPK	158.758.230	158.758.230

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

Kode Satker	Nama Satker	Jenis Piutang PNB	NO.LHP	Debitur	Sebelum TK/TM	31 Desember 2024
		PINDAH DARI 239253				
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	Denda Keterlambatan	R.245/PW.130 /G.2/09/2020	Gunawan Laliasa S. TP	0	10.419.574
		PINDAH DARI 209108				
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	Denda Keterlambatan	R.254/PW.130 /G.2/08/2020	MOH. Jaswadi Putra, SP, M.SI	0	23.200.000
		PINDAH DARI 239127				
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	Denda Keterlambatan	R.254/PW.130 /G.2/08/2019	IR. Andreas Riwu	0	4.894.663
		PINDAH DARI 249159				
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	Denda Keterlambatan	R67/PW.130/ G.2/04/2021	Joaz Bily Oemboe Wanda, SP/PPK	0	5.528.461
		PINDAH DARI 249159				
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	Denda Keterlambatan	R.180/PW.130 /G.2/09/2016	JABIR IBRAHIM	0	16.279.000
		PINDAH DARI 289034				
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	Pnbp Terlambat Disetor Ke Kas Negara	R.125/PW.130 /G.2/06/2017	Zaenal Abidin (Kasie Perbenihan BBIH)	0	29.875.000
		PINDAH DARI 299005				
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	Denda Keterlambatan	R.179/PW.130 /G.2/09/2016	IR.Nurlela N Musa, MM/ IR.Nurbaya A.Gani, M.SI	0	21.701.052
		PINDAH DARI 319089				
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	Denda Keterlambatan	R.48/PW.130/ G.2/04/2016	Demas Felle, SP	0	6.680.000
		PINDAH DARI 339156				
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	Denda Keterlambatan	R.414/PW.130 /G.2/10/2018	Anthonid.F. Jenusy, S.ST	0	12.190.500
		PINDAH DARI 339156				
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	Denda Keterlambatan	R.364/PW.130 /G.2/09/2019	Anthonid.F. Jenusy, S.ST	0	830.000
		PINDAH DARI 339156				
Total Piutang Bukan Pajak						514.901.057

C.1.3.2 PIUTANG LAINNYA

Piutang Lainnya yang tersaji pada Laporan Neraca per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp242,550,000.00. Adapun rincian satuan kerja dengan saldo Piutang lainnya sebagai berikut :

Tabel 49. Rincian Saldo Piutang Lainnya

Kode Satker	Nama Satker	Jenis Piutang PNB	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Keterangan
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	Piutang Karena Putus Kontrak Pengadaan 526xx Yang Tidak Terlaksana	0	242.550.000	Transfer masuk dari 199126 lalu rekas ke akun Piutang Lainnya, Debitur "IR.HJ.Suryani,M.SI/PPK"

C.1.4 BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 4,554,768,023.00 dan Rp 4,636,951,194.00. Saldo awal Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi terdiri dari akun Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan 31 Desember 2023 sebesar Rp67,425,000.00 dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 31 Desember 2023 sebesar Rp4,569,526,194.00. Sedangkan saldo akhir Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi terdiri dari akun Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan 31 Desember 2024 sebesar Rp 4.490.343.024.00 dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp 64.425.000.00. Adapun rincian mutasi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersaji pada tabel berikut :

Tabel 50. Mutasi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Kode Satker	Uraian Satker	Saldo per 31 Desember 2023	Reklasifikasi keluar akun bagian lancar	Reklasifikasi masuk ke akun Piutang JK. Panjang	Penyelesaian Piutang Jgk Panjang Tahun 2024	Saldo Piutang JK Panjang yang di Transfer ke 625875	Saldo akhir Piutang JK Panjang yang di reklas ke Bagian Lancar	Saldo Akhir 31 Desember Di Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
1	069077	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	18,346,414	18,346,414	18,346,413		18,346,413	-	-
2	069133	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	102,876,854	102,876,854	102,876,854		102,876,854	-	-
3	099315	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	15,509,120	15,509,120	15,509,120	309,120	15,200,000	-	-
4	099033	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU			4,000,000	4,000,000	-	-	-
5	209065	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP SULAWESI TENGGARA	5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000	-	-
6	209108	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP SULAWESI TENGGARA	106,473,561	106,473,561	106,473,561	4,000,000	102,473,561	-	-
7	249159	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	35,754,113	35,754,113	35,754,113		35,754,113	-	-
8	249030	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	7,700,000	7,700,000	7,700,000	720,000	6,980,000	-	-
9	269000	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	787,575,450	787,575,450	787,575,450	16,000,000	771,575,450	-	-
10	289034	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	43,310,181	43,310,181	43,310,181		43,310,181	-	-
11	299005	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	15,500,000	15,500,000	15,500,000		15,500,000	-	-
12	299005	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN			2,190,000	2,190,000	-	-	-
13	299381	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	26,371,250	26,371,250	26,371,250		26,371,250	-	-
14	299381	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN			3,448,449	3,448,449	-	-	-

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

No	Kode Satker	Uraian Satker	Saldo per 31 Desember 2023	Reklasifikasi keluar akun bagian lancar	Reklasifikasi masuk ke akun Piutang JK. Panjang	Penyelesaian Piutang Jgk Panjang Tahun 2024	Saldo Piutang JK Panjang yang di Transfer ke 625875	Saldo akhir Piutang JK Panjang yang di reklas ke Bagian Lancar	Saldo Akhir 31 Desember Di Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
15	319002	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	30,985,675	30,985,675	30,985,675		30,985,675	-	-
16	319089	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	171,346,753	171,346,753	171,346,753	5,000,000	166,346,753	-	-
17	339156	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	777,286,000	777,286,000	777,286,000		777,286,000	-	-
18	119130	DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	34,546,000	34,546,000	34,546,000	1,250,000	33,296,000	-	-
19	179104	DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI UTARA	8,986,995	8,986,995	8,986,995	3,000,000	5,986,995	-	-
20	239009	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	4,991,000	4,991,000	4,991,000	500,000	4,491,000	-	-
21	169113	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			32,206,003	32,206,003	-	-	-
22	625875	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	2,376,966,828	2,376,966,828	2,376,966,828	48,404,050	2,328,562,778	2,328,562,778	2,328,562,778
23	625875	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	-	-	-	-	-	2,161,780,245	2,161,780,245
SALDO AKHIR BAGIAN LANCAR TAGIHAN TGR			4,569,526,194	4,569,526,194	4,611,370,645	121,027,622	4,490,343,023	4,490,343,023	4,490,343,023
24	219000	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	67,425,000	67,425,000	67,425,000	3,000,000	64,425,000	-	-
25	625875	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA						64,425,000	64,425,000
SALDO AKHIR BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP			67,425,000	67,425,000	67,425,000	3,000,000	64,425,000	64,425,000	64,425,000
SALDO AKHIR BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR			4,636,951,194	4,636,951,194	4,678,795,645	124,027,622	4,554,768,023	4,554,768,023	4,554,768,023

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa pada tahun berjalan, saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi direklasifikasi seluruhnya ke akun Piutang Jangka Panjang semester I dan semester II dilakukan transfer piutang dari satker DK dan TP ke kantor pusat 018.04.625875KP (proses likuidasi satker inaktif TA 2025), lalu direklasifikasi kembali ke Bagian Lancar. Hal ini disebabkan karena, penyelesaian nilai piutang tersebut hanya dapat dilakukan *settlement* secara otomatis dengan akun Piutang Jangka Panjang.

C.1.5 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG BUKAN PAJAK

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-243,120,621.00 dan Rp- 237.098.121.00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang

masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

**Tabel 51. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2024**

Kode Satker	Nama Satker	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan	Saldo Penyisihan 31 Desember 2024
199126	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulsel	242.550.000	Kurang Lancar	(24.255.000,00)	0
209108	Dinas Perkeb dan Horti Provinsi Sulawesi Tenggara	10.419.574	Lancar	(52.098)	0
239127	Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat	23.200.000	Lancar	(116.000,00)	0
249159	Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	4.894.663	Kurang Lancar	(489.466)	0
249159	Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	5.528.461	Lancar	(27.642)	0
289034	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	16.279.000	Macet	(16.279.000)	0
299005	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten	29.875.000	Macet	(29.875.000)	0
319089	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo	21.701.052	Macet	(21.701.052)	0
339156	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat	6.680.000	Macet	(6.680.000)	0
339156	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat	12.190.500	Macet	(12.190.500)	0
339156	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat	830.000	Diragukan	(415.000)	0
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	82.115.684	Macet	(82.115.684)	(82.115.684)
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	21.156.400	Macet	(21.156.400)	(21.156.400)
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	5.254.300	Macet	(5.254.300)	(5.254.300)
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	369.093	Kurang Lancar	(36.909)	(36.909)
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	158.758.230	Kurang Lancar	(15.875.823)	(15.875.823)
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	109.500.000	Lancar	(547.500)	(547.500)
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	6.149.100	Lancar	(30.746)	(30.746)
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	374,148,250		(112,080,758)	(112,080,758)
Total Piutang Bukan Pajak		757.451.057			(237.098.121)

Penyisihan piutang tidak tertagih-Piutang PNBPN pada neraca yaitu Rp.237.667.328, selisih ini terjadi karena terdapat to do list selisih TK-TM pada SAKTI yang disebabkan karena tidak terbacanya transfer masuk ke satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (625875), sedangkan nilai total penyisihan piutang telah sesuai dengan hasil rekonsiliasi dengan Inspektorat Jenderal. Untuk menindaklanjuti to do list tersebut maka satuan kerja melakukan jurnal koreksi manual. Berikut rincian selisih:

Tabel 52. Penjelasan Nilai Koreksi

Kode Satker	Kode Akun	Nama Akun	Nilai Koreksi	Keterangan
625875	116211	Penyisihan Piutang tidak tertagih-Piutang PNBPN	52,098	Koreksi pencatatan dengan jurnal manual hasil transfer masuk dari 209108
625875	116211	Penyisihan Piutang tidak tertagih-Piutang PNBPN	517,109	Koreksi pencatatan dengan jurnal manual hasil transfer masuk dari 249159
Total			569,207	

C.1.6 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp -1,783,436,803.00 dan Rp-1,763,146,176.00.

Penyisihan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Berikut Rincian Penyisihan Piutang tidak tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR :

**Tabel 53. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2024**

Kode Satker	Nama Satker	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan yang ditransfer	Saldo 31 Desember 2024	Keterangan
018.04.069077	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	18,346,413	Kurang Lancar	-1,834,642	0	Transfer ke 625875
018.04.069133	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	102,876,854	Kurang Lancar	-10,287,685	0	Transfer ke 625875
018.04.099315	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	15,200,000	Macet	-15,200,000	0	Transfer ke 625875
018.04.119130	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	33,296,000	Lancar	-166,480	0	Transfer ke 625875
018.04.179104	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	5,987,000	Lancar	-29,935	0	Transfer ke 625875
018.04.209065	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	5,000,000	Macet	-5,000,000	0	Transfer ke 625875
018.04.209108	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	85,530,435	Lancar	-427,652	0	Transfer ke 625875
018.04.209108	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	5,713,125	Diragukan,	2,856,563	0	Transfer ke 625875
018.04.209108	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	11,230,000	Macet	11,230,000	0	Transfer ke 625875
018.04.239009	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	4,491,000	Lancar	-22,455	0	Transfer ke 625875

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

Kode Satker	Nama Satker	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan yang ditransfer	Saldo 31 Desember 2024	Keterangan
018.04.249030	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	6,980,000	Lancar	-34,900	0	Transfer ke 625875
018.04.249159	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	35,754,113	Lancar	-1,315,370	0	Transfer ke 625875
018.04.269000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	747,774,250	Lancar	-3,738,871	0	Transfer ke 625875
018.04.269000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	8,989,200	Kurang Lancar	-898,920	0	Transfer ke 625875
018.04.269000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	14,812,000	Diragukan	7,406,000	0	Transfer ke 625875
018.04.289034	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	43,310,181	Macet	-43,310,181	0	Transfer ke 625875
018.04.299005	Dinas Pertanian Provinsi Banten	15,500,000	Macet	-15,500,000	0	Transfer ke 625875
018.04.299381	Dinas Pertanian Provinsi Banten	26,371,250	Macet	26,371,250	0	Transfer ke 625875
018.04.319002	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	30,985,675	Macet	-30,985,675	0	Transfer ke 625875
018.04.319089	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	166,346,753	Macet	-166,346,753	0	Transfer ke 625875
018.04.339156	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	425,000,000	Kurang Lancar.	-42,500,000	0	Transfer ke 625875
018.04.339156	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	352,286,000	Macet	-352,286,000	0	Transfer ke 625875
018.04.625876	Direktorat Jenderal Hortikultura	4,490,343,028		- 1,698,721,176	-1,698,721,176	Transfer masuk dari Satker DK TP 2024
PENYISIHAN BAGIAN LANCAR TAGIHAN TGR					-1,698,721,176	
018.04.219000	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	64,425,000	Macet	-64,425,000	0	Transfer ke 625875
018.04.625876	Direktorat Jenderal Hortikultura	64,425,000	Macet	-64,425,000	-64,425,000	Transfer masuk dari Satker maluku 2024
PENYISIHAN BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP					-64,425,000	
TOTAL PENYISIHAN BAGIAN LANCAR TP/TGR					-1,763,146,176	

Penyisihan piutang tidak tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada neraca yaitu Rp.-1.873.276.848.00, selisih ini terjadi karena terdapat to do list selisih TK-TM pada SAKTI yang disebabkan karena tidak terbacanya transfer masuk ke satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (625875), sedangkan nilai total penyisihan piutang telah sesuai dengan hasil rekonsiliasi dengan Inspektorat Jenderal. Untuk menindaklanjuti to do list tersebut maka satuan kerja melakukan jurnal koreksi penyisihan piutang tidak tertagih-piutang jangka panjang lainnya (156911), kemudian dilakukan penyisihan akhir tahun ke akun Penyisihan Piutang tidak tertagih - Bagian lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (116421). Berikut rincian selisihnya:

Tabel 54. Penjelasan Nilai Koreksi

Kode Satker	Kode Akun	Nama Akun	Nilai Koreksi	Keterangan
625875	156911	Penyisihan Piutang tidak tertagih-Piutang jangka panjang lainnya	10,287,685	Koreksi pencatatan dengan jurnal manual hasil transfer masuk dari 069133
625875	156911	Penyisihan Piutang tidak tertagih-Piutang jangka panjang lainnya	166,480	Koreksi pencatatan dengan jurnal manual hasil transfer masuk dari 119130
625875	156911	Penyisihan Piutang tidak tertagih-Piutang jangka panjang lainnya	71,034	Koreksi pencatatan dengan jurnal manual hasil transfer masuk dari 209108
625875	156911	Penyisihan Piutang tidak tertagih-Piutang jangka panjang lainnya	38,500	Koreksi pencatatan dengan jurnal manual hasil transfer masuk dari 249030
625875	156911	Penyisihan Piutang tidak tertagih-Piutang jangka panjang lainnya	14,385,542	Koreksi pencatatan dengan jurnal manual hasil transfer masuk dari 269000
625875	156911	Penyisihan Piutang tidak tertagih-Piutang jangka panjang lainnya	43,310,181	Koreksi pencatatan dengan jurnal manual hasil transfer masuk dari 289034
625875	156911	Penyisihan Piutang tidak tertagih-Piutang jangka panjang lainnya	15,500,000	Koreksi pencatatan dengan jurnal manual hasil transfer masuk dari 299005
625875	156911	Penyisihan Piutang tidak tertagih-Piutang jangka panjang lainnya	26,371,250	Koreksi pencatatan dengan jurnal manual hasil transfer masuk dari 299381
Total			110,130,672	

C.1.7 PERSEDIAAN

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp16,036,125,276.00. dan Rp7,812,579,206.00.

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini disajikan Perbandingan rincian persediaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 pada tabel berikut:

Tabel 55. Perbandingan Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Akun	Uraian akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023
117111	Barang Konsumsi	1.052.881.903	1.502.754.487
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	13.533.460	15.893.390
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.198.000.000	-
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	10.160.895.330	2.070.609.980
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	362.883.000	-
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	76.300.000
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	3.247.931.583	4.116.946.349
117131	Bahan Baku	-	30.075.000
Total		16.036.125.276	7.812.579.206

Adapun rincian saldo akhir barang konsumsi per 31 Desember 2024 tersaji pada tabel di bawah ini :

**Tabel 56. Rincian Barang Konsumsi
Per 31 Desember 2024**

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	11.580.000
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	107.100
1010301003	Penjepit Kertas	5.929.100
1010301004	Penghapus/Korektor	1.991.000
1010301005	Buku Tulis	3.327.500
1010301006	Ordner Dan Map	19.236.900
1010301007	Penggaris	281.500
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	2.319.500
1010301010	Alat Perekat	5.922.600
1010301012	Staples	1.206.000
1010301013	Isi Staples	1.348.700
1010301014	Barang Cetak	666.644.600
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	532.400
1010302001	Kertas HVS	54.282.500
1010302002	Berbagai Kertas	3.607.460
1010302004	Amplop	5.404.000
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	64.911.300
1010304004	Tinta/Toner Printer	92.848.400
1010304006	USB/Flash Disk	2.519.000
1010304010	Mouse	1.530.000
1010306001	Kabel Listrik	9.936.200
1010306002	Lampu Listrik	15.924.500
1010306003	Stop Kontak	3.155.200
1010306004	Saklar	1.038.000
1010306005	Stacker	6.607.000
1010306006	Balast	202.500
1010306007	Starter	4.723.650
1010306008	Vitting	840.000
1010306010	Batu Baterai	1.705.000
1010306999	Alat Listrik Lainnya	972.600
1010309003	Stempel	843.700
1010310001	Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran	6.707.770
1010310002	Persediaan Berupa Alat Penunjang Laboratorium	8.600.000
1010310003	Persediaan Berupa Alat Penunjang Studio Dan Komunikasi	5.150.000
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	1.352.800
1010311001	Persediaan Berupa Bahan Penunjang Kedokteran	4.376.478
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	3.730.855
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	19.284.164
1010314004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)	49.668

Kode	Uraian	Jumlah
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	2.604.298
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.547.960
Jumlah Barang Konsumsi		1.052.881.903
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	280.000
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	372.000
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	3.940.460
1010305012	Pengharum Ruangan	4.717.000
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	4.224.000
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		13.533.460
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
1010501002	Tanah dan Bangunan	1.198.000.000
Jumlah Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		1.198.000.000
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
1010501003	Hewan dan Tanaman	10.160.895.330
Jumlah Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		10.160.895.330
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
1010501004	Peralatan dan Mesin	362.883.000
Jumlah Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		362.883.000
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	
1010901006	Barang persediaan dalam proses	3.247.931.583
Jumlah Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses		3.247.931.583
TOTAL		16.036.125.276

Saldo Barang Persediaan Lainnya Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses yang tersaji per 31 Desember 2024 merupakan produksi benih yang masih dalam proses sertifikasi (belum terbit label / belum siap salur). Apabila benih yang diproduksi telah siap salur (berlabel), maka akan dilakukan reklasifikasi pencatatan ke akun Hewan dan Tanaman Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat.

C.2 ASET TETAP

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 setelah dikurangi akumulasi penyusutan adalah masing-masing sebesar Rp576,860,774,896.00 dan Rp426,520,842,851.00. Rincian Aset Tetap per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

Tabel 57. Rincian Aset Tetap
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tanah	462.052.652.000	307.675.861.000
Peralatan dan Mesin	94.296.555.296	103.568.051.864
Gedung dan Bangunan	122.100.621.945	120.521.908.440
Jalan Irigasi dan Jaringan	5.509.746.350	6.982.215.729
Aset Tetap Lainnya	15.191.850	52.169.850
Akumulasi Penyusutan	(107.113.992.545)	(112.279364.032)
Total Aset Tetap	576.860.774.896	426.520.842.851

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Hortikultura per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp462.052.652.000 dan Rp307.675.861.000. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 58. Mutasi Tanah
Per 31 Desember 2024

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	307.675.861.000
Mutasi Tambah :	0
- Transfer Masuk	154.376.791.000
Saldo per 31 Desember 2024	462.052.652.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-0.00
Nilai Buku per 31 Desember 2024	462.052.652.000

Mutasi tambah atas nilai Tanah senilai Rp154.376.791.000,- berasal dari :

* Transfer Masuk senilai Rp154.376.791.000,- pada Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) senilai Rp154.376.791.000,-. Berdasarkan BA Transfer Nomor : 1283/PL.130/A/04/2024 tanggal 29 April 2024 berupa Tanah yang terdapat Bangunan Gedung Toko Tani Indonesia (TTIC). Rincian Tanah adalah sebagai berikut :

Tabel 59. Rincian Tanah

No	Uraian	NUP	Lokasi	Luas	Nilai Tanah
Saldo Awal:					
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Jl. Ragunan No. 19	5.339 m ²	71.092.910.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	AUP No. 3 Pasar Minggu	10.573 m ²	149.851.769.000
3	Tanah Kebun Percobaan	1	Jagakarsa Raya No. 1	9.213 m ²	86.731.182.000

No	Uraian	NUP	Lokasi	Luas	Nilai Tanah
Tranfer Masuk :					
4	Tanah Bangunan Rumah Sakit	1	Jl. Ragunan Raya	6.370 m ²	154.376.791.000
TOTAL					462.052.652.000

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp94,296,555,296,00 dan Rp103,568,051,864,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp9,271,496,568 atau 9,83% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 60. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember Tahun 2024

Saldo 31 Desember 2023	103.568.051.864
Mutasi Tambah :	
Pembelian	2.240.185.905
Reklasifikasi Masuk	1.729.643.160
Transfer Masuk	1.733.582.148
Pengembangan nilai Aset (Langsung)	109.569.318
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	82.394.965
Mutasi Kurang :	
Hibah Keluar	(2.326.290.600)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(4.866.159.309)
Penghapusan	(4.481.785.609)
Reklasifikasi Keluar	(1.769.143.560)
Koreksi Pencatatan	(3.288.588)
Transfer Keluar	(1.720.204.398)
Saldo Akhir 31 Desember 2024	94.296.555.296

Penjelasan atas masing-masing mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 61. Penjelasan atas masing-masing mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin

URAIAN TRANSAKSI	NILAI	PENJELASAN
Total Mutasi Tambah	5,895,375,496	
Pembelian	2.240.185.905	Pembelian peralatan dan mesin berasal dari satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) senilai Rp2,240,185,905.00 berupa Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Ruang Rapat Ditjen Hortikultura (Videotron, Kursi Rapat, Meja Rapat, AC Standing, Tablet PC), Fasilitas Sarana Kerja HDDAP (PMC & NPMU), sarana pelatihan pertanian (Alat Hidroponik, PLTS) dan inventaris kantor.
Transfer Masuk	1,733,582,148	Transfer masuk berasal dari satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) senilai Rp1,733,582,148.00 berupa transfer aset dari satuan kerja yang akan dilikuidasi dan sudah tidak mendapatkan anggaran di tahun anggaran 2025
Reklasifikasi Masuk	1.729.643.160	Reklasifikasi masuk berasal dari satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) senilai Rp1,729,643,160.00 berupa koreksi atas kesalahan penginputan kode barang.
Pengembangan Nilai Aset	109,569,318	Pengembangan Nilai Aset (Langsung) berasal dari satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) senilai Rp109,569,318.00 berupa penggabungan nilai kontrak yang dibawah nilai kapitalisasi pengadaan sarana dan prasarana barang inventaris kantor untuk mendukung kegiatan HDDAP. Adapun realisasi Pengembangan Nilai Aset (Langsung) merupakan realiasi belanja modal sebesar Rp93,140,253.00 yang seluruhnya merupakan barang intrakomptabel (harga satuan di atas nilai kapitalisasi peralatan dan mesin). Realisasi belanja modal tersebut berasal dari pinjaman luar negeri dengan persentase pembiayaan 68% menggunakan dana pinjaman ADB dan 32% menggunakan dana pinjaman IFAD. Dengan adanya pembagian persentase pembiayaan, maka penginputan barang Aplikasi SAKTI menjadikan nilai satuan pada beberapa barang secara otomatis terbagi sehingga masuk ke dalam kategori barang ekstrakomptabel (harga satuan di bawah nilai kapitalisasi peralatan dan mesin). Kemudian atas barang – barang tersebut dilakukan koreksi pencatatan pada Pengembangan Nilai Aset (Langsung) dengan total Rp16,429,065.00 dengan rincian sebagai berikut :
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	82,394,965	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah berasal dari satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) senilai Rp82,394,965.00 berupa koreksi kode barang karena nilai kontraknya di bawah nilai kapitalisasi, pengadaan sarana dan prasarana barang inventaris kantor (HDDAP)
Total Mutasi Kurang		
Hibah Keluar	-2.326.290.600	1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi D.I Yogyakarta (018.04.049025DK) senilai Rp22,950,000.00

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

URAIAN TRANSAKSI	NILAI	PENJELASAN
		Berdasarkan SK Penghapusan dengan Hibah Nomor: 514//Kpts/PL.320/A/09/2024 tanggal 25 september 2024
		2. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi (018.04.059056TP) senilai Rp206,880,600.00 Berdasarkan SK Penghapusan dengan Hibah Nomor:956/Kpts/PL.320/A/12/2024 tanggal 31 Desember 2024
		3. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh (018.04.069077DK) senilai Rp291,530,000.00 berdasarkan SK Penghapusan dengan Hibah Nomor: 843/Kpts/PL.320/A/12/2024 tanggal 24 Desember 2024
		4. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara (018.04.209065DK) senilai Rp-14,950,000.00. Berdasarkan SK Penghapusan Nomor: B-205/KPTS/PL.320/A/03/2024 tanggal 13 Maret 2024
		5. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (018.04.339156DK) senilai Rp-216,000,000.00-. Berdasarkan SK Penghapusan Nomor : 96/KPTS/PL.320/A/01/2024 tanggal 25 Januari 2024
		6. Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat (018.04.340056DK) senilai Rp-1,280,556,000.00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor : 99/KPTS/PL.320/A/01/2024 tanggal 26 Januari 2024
		7. Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) senilai total Rp293,424,000.00 yaitu dengan rincian senilai Rp193,604,400.00 berdasarkan SK Penghapusan dengan Hibah Nomor: 145/KPTS/PL.320/A/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 dan senilai Rp99,820,000.00 berdasarkan SK Penghapusan dengan Hibah Nomor: 845/Kpts/PL.320/A/12/2024 tanggal 24 Desember 2024. Aset tersebut merupakan hasil transfer keluar dari satuan kerja Dinas Pertanian Kabupaten Donggala ke satuan kerja Pusat Direktorat Jenderal Hortikultura
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	--4,866,159,309	1. Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (018.04.019031DK) senilai Rp-139,183,000.00. Input penghentiaan penggunaan berdasarkan Berita Acara Inventarisasi Nomor: 3341/PT.04.01 tanggal 16 Juni 2023
		2. Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) senilai Rp-3,629,213,109.00 Penginputan ke dalam daftar barang henti guna BMN yang sudah terbit SK Penghapusannya atau dalam proses usulan penerbitan SK Penghapusan ke Biro Keuangan dan BMN
		3. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan DIY (018.04.049025DK) senilai Rp-770,403,600.00,-. Proses input Barang yang dalam proses usulan penghapusan, menunggu persetujuan, atau menunggu proses penerbitan SK Penghapusan
		4. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah (018.04.189016DK) senilai Rp-319,859,600.00. Input penghentiaan penggunaan berdasarkan Berita Acara

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

URAIAN TRANSAKSI	NILAI	PENJELASAN
		Inventarisasi Nomor:027/2123/XII/A.2.ek/2021 tanggal 17 Desember 2021
		5. Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat (018.04.340056DK) senilai Rp-7,500,000.00. Input penghentiaan penggunaan berdasarkan BA Inventarisasi Nomor:3803.00/2808/BA/IX/2023 tanggal 15 September 2024
Penghapusan	-4.481.785.609	1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat (018.04.029027DK) senilai Rp-1,633,760,000.00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor : 98/KPTS/PL.320/A/01/2024 tanggal 26 Januari 2024
		2. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan DIY (018.04.049025DK) senilai Rp-294,308,000.00. Berdasarkan SK Penghapusan Nomor : 526/KPTS/PL.320/A/09/2024 tanggal 25 September 2024 berupa penghapusan Sebab Lain alat laboratorium
		3. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh (018.04.069077DK) senilai Rp372,384,950.00 berdasarkan SK Penghapusan 857/Kpts/PL.320/A/12/2024 tanggal 24 Desember 2024
		4. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara (018.04.209065DK) senilai Rp-417,710,659 berdasarkan SK Penghapusan Nomor : 205/KPTS/PL.320/A/01/2024 tanggal 13 Maret 2024
		5. Dinas Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu (018.04.269000DK) senilai Rp1,011,169,000.00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor:842/Kpts/PL.320/A/12/2024 tanggal 24 Desember 2024
		6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (018.04.339156DK) senilai Rp-17,109,000.00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor : 52/KPTS/PL.320/A/01/2024 tanggal 22 Januari 2024
		7. Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) senilai Rp735,344,000.00 sesuai SK Penghapusan TA 2024
Reklasifikasi Keluar	-1,769,143,560	Reklasifikasi Keluar senilai Rp-1,769,143,560.00 berasal dari satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) senilai Rp-1,769,143,560.00 karena Kesalahan Penginputan Kode Barang antara lain : Meja kerja kayu, personal Komputer dan Sound System
Koreksi Pencatatan	-3,288,588	Koreksi Pencatatan senilai Rp-3,288,588.00 berasal dari satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) senilai Rp-3,288,588.00 koreksi pengadaan HDDAP karena nilainya dibawah nilai kapitalisasi
Transfer Keluar	1,720,204,398.	Transfer Keluar senilai Rp1,720,204,398.00

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp94,296,555,296 dan Rp.103,568,051,864

Berikut ini disajikan rincian pencatatan dari realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024.

Tabel 62. Rincian Pencatatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

Keterangan	Akun Belanja	Nilai
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	532111	2.429.861.600
Total Belanja		2.429.861.600
Pembelian		2,336,721,347
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)		93,140,253
Total di Catat		2.429.861.600
Selisih Kurang Catat		0

Adapun rincian satuan kerja dengan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 63. Rincian Satuan Kerja dengan Saldo Peralatan dan Mesin

Kode	Nama Satker	31 Desember 2024
018.04.059000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	333,641,950.
018.04.625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	92,962,913,346.
	Jumlah	94,296,555,296.

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp122,100,621,945.00 dan Rp120.521.908.440.00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1,578,713,505.00 atau 1.29% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 64. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024

Saldo 31 Desember 2023	120.521.908.440
Mutasi Tambah :	14.252.772.865
Transfer Masuk	10.761.596.365
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	3.187.236.500
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	400.000
Reklasifikasi Masuk	151.770.000
Pembelian	151.770.000
Mutasi Kurang :	(12,674,059,360)
Hibah Keluar	(5.721.493.800)
Penghapusan	(48.998.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(5.950.000)
Reklasifikasi Keluar	(151.770.000)
Transfer Keluar	(6.745.847.560)
Saldo Akhir 31 Desember 2024	122.100.621.945

Penjelasan atas masing-masing mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 65. Penjelasan atas masing-masing mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan

URAIAN TRANSAKSI	NILAI	PENJELASAN
Total Mutasi Tambah	14.252.772.865	
Pembelian	151.770.000	berasal dari Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP)
Transfer Masuk	10.761.596.365	a. Berdasarkan BA Transfer Nomor : 1283/PL.130/A/04/2024 tanggal 29 April 2024 senilai Rp.4.167.518.805,- berupa Gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen (4010112001) NUP 1 yaitu Bangunan Gedung Toko Tani Indonesia (TTI) dari Satker Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal (018.01.451005) kepada Ditjen Hortikultura senilai Rp3,579,221,805.00 dan Pagar Permanen TTIC (4040104001) NUP 9 senilai Rp588,296,000.00. b. Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (018.04.039012DK) ke kode anak satker Kantor Pusat (018.04.625875.051.KP) sebanyak 7 Unit berupa Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen (screen house) senilai Rp. 5,891,602,000.00 c. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim (018.04.059000DK) ke kode anak satker Kantor Pusat (018.04.625875.058.KP) berupa Bangunan Gedung tertutup semi permanen (4010102002) NUP 1 senilai Rp.278,901,560.00 dan Bangunan Gudang terbuka semi permanen (4010102005) NUP 1 senilai Rp24,992,000.00 d. Dinas Pertanian Propinsi Aceh (018.04.069077DK) ke kode anak satker Kantor Pusat (018.04.625875.109.KP) berupa Bangunan Gedung tempat kerja lainnya semi permanen (4010130002) NUP 1 senilai

URAIAN TRANSAKSI	NILAI	PENJELASAN
		Rp129,450,000.00 dan 2 unit Bangunan gudang lainnya (4010102999) NUP 1 senilai Rp94,800,000.00 dan NUP 2 senilai Rp99,800,000.00.
Reklasifikasi Masuk	151.770.000	Kesalahan input kode barang pada modul PPK sehingga harus mengubah kodefikasi barang sesuai fisik yaitu Bangunan Gedung Kantor Permanen ke bangunan Lainnya
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	3.187.236.500	Pengembangan Langsung Bangunan Gedung Kantor Permanen : a. NUP 1 dengan rincian sebagai berikut : - Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja PMC (HDDAP) senilai Rp.257,500,000.00 - Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja NPMU (HDDAP) senilai Rp.269,854,600.00 - Konsultan Perencana Pekerjaan Renovasi Gedung Rp.92,207,000.00 - Konsultan Pengawas Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Rp.46,669,000.00 - Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Rp.1,502,291,030.00 b. NUP 5 dengan rincian sebagai berikut : - Pekerjaan Perbaikan Toilet Pria dan Wanita Rp. 199,000,000.00 - Konsultan Perencana Pekerjaan Renovasi Laboratorium Direktorat Perlindungan Rp.49,150,000.00. - Pekerjaan Renovasi Laboratorium Direktorat Perlindungan Rp.740,906,870.00 - Konsultan Pengawas Pekerjaan Renovasi Laboratorium Direktorat Perlindungan Rp.30,058,000.00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	400.000	Berasal dari Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) senilai Rp400,000.00 atas kesalahan input nilai SPM tidak sama dengan nilai kontrak Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja PMC (HDDAP).
Total Mutasi Kurang	12,674,059,360	
Penghapusan	48.998.000	Penghapusan senilai Rp-48,998,000.00 berasal dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) senilai Rp-48.988.000,- Berdasarkan SK Penghapusan Nomor : 518/KPTS/PL.320/A/09/2024 tanggal 25 September 2024 berupa penghapusan Sebab Lain Bangunan Oceanarium, Bangunan Bagi dan Alat Laboratorium
Transfer Keluar	6.745.847.560	a. Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (018.04.039012DK) ke kode anak satker Kantor Pusat (018.04.625875.051.KP) sebanyak 7 Unit berupa Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen (screen house) senilai Rp. 5,891,602,000.00 b. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim (018.04.059000DK) ke kode anak satker Kantor Pusat (018.04.625875.058.KP) berupa Bangunan Gedung tertutup semi permanen (4010102002) NUP 1 senilai Rp.278,901,560.00 dan Bangunan Gudang terbuka semi

URAIAN TRANSAKSI	NILAI	PENJELASAN
		permanen (4010102005) NUP 1 senilai Rp24,992,000.00
		c. Dinas Pertanian Propinsi Aceh (018.04.069077DK) ke kode anak satker Kantor Pusat (018.04.625875.109.KP) berupa Bangunan Gedung tempat kerja lainnya semi permanen (4010130002) NUP 1 senilai Rp129,450,000.00 dan 2 unit Bangunan gudang lainnya (4010102999) NUP 1 senilai Rp94,800,000.00 dan NUP 2 senilai Rp99,800,000.00.
		d. Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah (018.04.189016DK) berupa Bangunan gudang tertutup permanen (4010102001) NUP 1 senilai Rp74,532,000.00
Hibah Keluar	5.721.493.800	a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (018.04.059000DK) senilai Rp-5,375,047,800.00 berdasarkan SK Nomor : 839/Kpts/PL.320/A/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
		b. Dinas Pertanian dan perkebunan provinsi Aceh (018.04.069077DK) senilai Rp163,182,000.00 berdasarkan SK nomor: 856/Kpts/PL.320/A/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 kepada Pemerintah Provinsi Aceh.
		c. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur (018.94.169113TP) senilai Rp84,264,000.00 berdasarkan SK nomor: 146/Kpts/PL.320/A/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
		d. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (018.04.339156DK) senilai Rp-99.000.000,-. Berdasarkan SK Nomor : 203/KPTS/PL.320/A/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Reklasifikasi Keluar	151.770.000	Reklasifikasi Keluar senilai Rp-151.770.000,- berasal dari kesalahan input kode barang pada modul PPK sehingga harus mengubah kodefikasi barang sesuai fisik yaitu Bangunan Gedung Kantor Permanen
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	5.950.000	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Rp-5.950.000.00 berasal dari satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP). Penghentiaan Aset dari Penggunaan dilakukan berdasarkan hasil dari inventarissi aset

Pada saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2024, terdapat 4 perkara gugatan Tanah yang diproses pengadilan dengan status: 3 perkara Kasasi, 1 perkara Banding.

Berikut ini disajikan rincian pencatatan dari realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024.

Tabel 66. Rincian Pencatatan Belanja Modal Gedung Bangunan per 31 Desember 2024

Keterangan	Akun Belanja	Nilai
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	533115	218,084,000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	533111	3,121,322,500
Total Belanja		3,339,406,500
Pembelian		152,170,000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)		3,187,236,500
Total di Catat		3,339,406,500
Selisih Kurang Catat		0

C.2.4 JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp5,509,746,350,00 dan Rp6,982,215,729,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1,472,469,379,00 atau 21.1% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 67. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2023	6.982.215.729
Mutasi Tambah:	1.763.120.550
Transfer Masuk	1.723.620.150
Reklasifikasi Masuk	39.500.400
Mutasi Kurang:	3.235.589.929
Transfer Keluar	1.763.120.550
Hibah Keluar	1.167.969.379
Penghapusan	304.500.000
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2024	5.509.746.350

Penjelasan atas masing-masing mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 68. Penjelasan atas masing-masing mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

URAIAN TRANSAKSI	NILAI	PENJELASAN
Total Mutasi Tambah	1.763.120.550	
Transfer Masuk	1.723.620.150	Pada Satker Kantor pusat yaitu: 1> Senilai Rp118.767.000 berasal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (049025DK) berupa Sumur Dengan Pompa sebanyak 10 unit dan Bangunan Bagi sebanyak 10 unit dengan nilai Rp490.000.000,00 2> Senilai Rp118.767.000,00 dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (059000DK) yang terdiri dari 2 Unit Sumur dengan Pompa dan Bangunan Sawah Irigasi sebanyak 3 unit Senilai Rp163.768.000,00 3> Senilai Rp 179.000.000,00 berasal dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah (189016DK) yang terdiri dari Bangunan Pelengkap Irigasi Lainnya sebanyak 6 Unit dan Bak Penampung sebanyak 1 unit senilai Rp13.581.000,00 4> Senilai Rp 10.000.000,00 berasal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (049025DK) berupa Instalasi Perkebunan sebanyak 1 unit dan Jaringan BBM Lainnya sebanyak 1 unit senilai Rp1.500.000,00 5> Senilai Rp441.468.035,00 berasal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (059000DK) berupa Instalasi Air sebanyak 7 Unit 6> Senilai Rp6.400.000,00 berasal dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah (189016DK) berupa Instalasi Air sebanyak 1 Unit
Reklasifikasi Masuk	39.500.400	Pada Satker Kantor pusat senilai Rp39.500.400,- berupa Instalasi PLTS Kapasitas Kecil sebanyak -1 unit
Total Mutasi Kurang	3.235.589.929	
Penghapusan	304.500.000	Pada Satker Kantor pusat senilai Rp304.500.000, berdasarkan SK Penghapusan Nomor : 515/KPTS/PL.320/A/09/2024 tanggal 25 September 2024
Transfer Keluar	1.177.931.550	1. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan DIY (049025DK) berupa transfer keluar senilai Rp573,689,000.00, ke kode anak satker Kantor Pusat (625875.031KP) yang terdiri dari Sumur Dengan Pompa sebanyak 10 unit dengan nilai Rp83,689,000.00 dan Bangunan Bagi sebanyak 10 Unit dengan nilai Rp490,000,000.00. 2. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur senilai Rp-497.082.115,00,- berupa 2 unit Sumur dengan Pompa, Bangunan Sawah Irigasi sebanyak 3 unit dan saluran induk sebanyak 1 unit 3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah (189016DK) yaitu transfer keluar senilai Rp193,481,000.00, ke kode anak satker Kantor Pusat (625875.233KP) yang terdiri Bangunan Pelengkap Irigasi Lainnya sebanyak 6 Unit senilai Rp179,900,000.00 dan Bak Penampung sebanyak 1 Unit senilai Rp13,581,000.00
Hibah Keluar	1.167.969.379	Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan Kab. Banyuwangi (059056TP) yaitu Hibah keluar senilai Rp43,046,000.00 Hibah Keluar senilai Rp892,988,349.00. dengan SK nomor : 840/Kpts/PL.320/A/12/2024 dan 839/Kpts/PL.320/A/12/2024 tanggal 24 Desember 2024,

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing sebesar Rp15,191,850.00 dan Rp52,169,850.00. Rincian mutasi aset tetap lainnya dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 69. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember Tahun 2024

Saldo 31 Desember 2023	52.169.850
Mutasi Kurang :	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	36.730.000
Penghapusan	248.000
Saldo Akhir 31 Desember 2024	15.191.850

Penjelasan atas masing-masing mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 70. Penjelasan atas masing-masing mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya

Total Mutasi Kurang	36.978.000	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	36.978.000	Mutasi kurang dari transaksi Penghentiaan Aset dari Penggunaan sebesar Rp36,730,000.00 yang terdapat pada satuan kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Diy (018.04.049025DK) dan
Penghapusan	248.000	transaksi Penghapusan yang terdapat pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh (018.04.069077DK) sebesar Rp248,000.00 berdasarkan SK Penghapusan nomor : 587/Kpts/PL.320/A/12/2024 Tanggal 24 Desember 2024 berupa 4 buah Buku Lainnya sehingga mengurangi saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Neraca Direktorat Jenderal Hortikultura Per 31 Desember 2024

Saldo Aset Tetap Lainnya terdapat pada satuan kerja :

Tabel 71. Rincian Satuan Kerja dengan Saldo Aset Tetap Lainnya

Kode	Nama Satker	31-Des-24
018.04.625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	15.191.850
Total		15.191.850

C.2.6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing - masing sebesar Rp-107,113,992,545.00 dan Rp-112,279,364,032.00

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 72. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	462.052.652.000	-	462.052.652.000
2	Peralatan dan Mesin	94.296.555.296	(83.490.176.332)	10.806.378.964

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
3	Gedung dan Bangunan	122.100.621.945	(20.278.915.181)	101.821.706.764
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.509.746.350	(3.344.901.032)	2.164.845.318
5	Aset Tetap Lainnya	15.191.850	-	15.191.850
JUMLAH		683.974.767.441	(107.113.992.545)	576.860.774.896

C.3 PROPERTI INVESTASI

C.3.1 PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Berdasarkan hasil identifikasi, tanah dan/atau bangunan yang memenuhi kriteria properti investasi terdapat pada 1 satuan kerja yaitu Direktorat Hortikultura (018.04.625875KP) berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan NUP 3 yang berlokasi di Jl. Ragunan No. 19, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bangunan tersebut disewakan kepada CV. Minaqu dan dimanfaatkan menjadi kedai makanan (Café) dengan nama dagang Pictum dengan luasan bangunan yang disewakan sebesar 81.65% dari keseluruhan luas bangunan. Pada Laporan Keuangan TA 2023 (Audited), penyajian saldo aset Properti Investasi berasal dari transaksi Reklasifikasi Masuk atas aset tetap Gedung dan Bangunan. Adapun rinciannya dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 73. Rincian Aset Properti Investasi
Per 31 Desember 2024**

Kode Satker	Uraian Satker	Nama Barang	Nup	Luas Bangunan (M ²)	Luas Yang Disewakan (M ²)	%	Nilai Perolehan (Rp)
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	384	313.53	81.65	2,153,825,283

Saldo Aset Properti Investasi Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing – masing sebesar Rp2,153,825,283.00 dan Rp2,153,825,283.00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 74. Perbandingan Aset Properti Investasi
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Kode Satker	Uraian Satker	31 Desember 2024	30 Desember 2023	% Kenaikan / Penurunan
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	2,153,825,283	2,153,825,283	0

C.3.2 AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Invetasi yang disajikan pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp452,041,500.00 dan Rp401,241,984.00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 75. Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Kode Satker	Uraian Satker	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Kenaikan / Penurunan
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	452.041.500	401.241.984	11,24

Adapun rincian aset Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Per 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut :

**Tabel 76. Rincian Aset Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi
Per 31 Desember 2024**

Kode Satker	Uraian Satker	Nama Barang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.153.825.283	(452.041.500)	1.701.783.783

Pada Laporan Keuangan TA 2023 (Audited), penyajian saldo aset Properti Investasi berasal dari transaksi Reklasifikasi Masuk atas akumulasi penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan.

C.4 PIUTANG JANGKA PANJANG**C.4.1 PIUTANG TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN / TUNTUTAN GANTI RUGI**

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0.00 dan Rp0.00. Piutang Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan yang akan datang.

**Tabel 77. Mutasi Piutang Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2024**

No	Kode Satker	Uraian Satker	Saldo per 31 Desember 2023	Reklasifikasi keluar akun bagian lancar	Reklasifikasi masuk ke akun Piutang JK. Panjang	Penyelesaian Piutang Jgk Panjang Tahun 2024	Saldo Piutang JK Panjang yang di Transfer ke 625875	Saldo akhir Piutang JK Panjang yang di reklas ke Bagian Lancar	Saldo Akhir 31 Desember Di Piutang Jk.Panjang
1	069077	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	18,346,414	18,346,414	18,346,413		18,346,413	-	-
2	069133	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	102,876,854	102,876,854	102,876,854		102,876,854	-	-
3	099315	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	15,509,120	15,509,120	15,509,120	309,120	15,200,000	-	-
4	099033	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU			4,000,000	4,000,000	-	-	-
5	209065	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP SULAWESI TENGGARA	5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000	-	-
6	209108	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP SULAWESI TENGGARA	106,473,561	106,473,561	106,473,561	4,000,000	102,473,561	-	-
7	249159	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	35,754,113	35,754,113	35,754,113		35,754,113	-	-
8	249030	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	7,700,000	7,700,000	7,700,000	720,000	6,980,000	-	-
9	269000	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	787,575,450	787,575,450	787,575,450	16,000,000	771,575,450	-	-
10	289034	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	43,310,181	43,310,181	43,310,181		43,310,181	-	-
11	299005	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	15,500,000	15,500,000	15,500,000		15,500,000	-	-
12	299005	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN			2,190,000	2,190,000	-	-	-
13	299381	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	26,371,250	26,371,250	26,371,250		26,371,250	-	-
14	299381	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN			3,448,449	3,448,449	-	-	-
15	319002	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	30,985,675	30,985,675	30,985,675		30,985,675	-	-
16	319089	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	171,346,753	171,346,753	171,346,753	5,000,000	166,346,753	-	-
17	339156	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	777,286,000	777,286,000	777,286,000		777,286,000	-	-

No	Kode Satker	Uraian Satker	Saldo per 31 Desember 2023	Reklasifikasi keluar akun bagian lancar	Reklasifikasi masuk ke akun Piutang JK. Panjang	Penyelesaian Piutang Jgk Panjang Tahun 2024	Saldo Piutang JK Panjang yang di Transfer ke 625875	Saldo akhir Piutang JK Panjang yang di reklas ke Bagian Lancar	Saldo Akhir 31 Desember Di Piutang Jk.Panjang
18	119130	DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	34,546,000	34,546,000	34,546,000	1,250,000	33,296,000	-	-
19	179104	DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI UTARA	8,986,995	8,986,995	8,986,995	3,000,000	5,986,995	-	-
20	239009	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	4,991,000	4,991,000	4,991,000	500,000	4,491,000	-	-
21	169113	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			32,206,003	32,206,003	-	-	-
22	625875	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	2,376,966,828	2,376,966,828	2,376,966,828	48,404,050	2,328,562,778	2,328,562,778	0
23	625875	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	-	-	-	-	-	2,161,780,245	0
SALDO AKHIR BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP			4,569,526,194	4,569,526,194	4,611,370,645	121,027,622	4,490,343,023	4,490,343,023	0

C.4.2 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-0.00 dan Rp-0.00. Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka panjang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

C.4.3 PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp00.00. Piutang Jangka Panjang Lainnya digunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Piutang Jangka Panjang Lainnya yang tersaji pada Laporan Neraca Direktorat Jenderal Hortikultura per 30 September 2024 berasal dari reklasifikasi saldo awal Bagian Lancar Tagihan TP/TGR serta piutang baru berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Adapun mutasi Piutang Jangka Panjang Lainnya disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 78. Mutasi Piutang Jangka Panjang Lainnya
Per 31 Desember 2024**

No	Kode Satker	Uraian Satker	Saldo per 31 Desember 2023	Reklasifikasi keluar akun bagian lancar	Reklasifikasi masuk ke akun Piutang JK. Panjang	Penyelesaian Piutang Jgk Panjang Tahun 2024	Saldo Piutang Piutang JK. Panjang lainnya di Transfer ke 625875	Saldo akhir Piutang Tagihan TP/TGR yang di Piutang JK. Panjang lainnya	Saldo Akhir 31 Desember Di Piutang JK. Panjang lainnya
1	219000	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	67,425,000	67,425,000	67,425,000	3,000,000	64,425,000	-	-
2	625875	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA						64,425,000	0
SALDO AKHIR BAGIAN LANCAR TAGIHAN TGR			67,425,000	67,425,000	67,425,000	3,000,000	64,425,000	64,425,000	0

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa :

1. Reklasifikasi dari Bagian Lancar Tagihan TP/TGR ke Piutang Jangka Panjang Lainnya dan Piutang Tagihan TP/TGR sebesar Rp4,569,526,194.00;
2. Piutang baru yang sudah tercatat pada modul piutang sebesar Rp41,844,452.00 berasal dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementan;
3. Pada periode 12 telah dilakukan Transfer keluar ke kantor Pusat 018.04.625875KP

C.4.4 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH –PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp- - 0.00 dan Rp0.00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang lainnya merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang perhitungan.

C.5 ASET LAINNYA

C.5.1 ASET TAK BERWUJUD

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4,353,140,125.00 dan Rp4,353,140,125.00. Aset Tak Berwujud terdiri dari Hak Cipta, Paten, Software, Lisensi, Hasil Kajian/Penelitian, dan Aset Tak Berwujud Lainnya. Pada Tahun 2024, Aset Tak Berwujud berupa Software dan hanya terdapat pada satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 79. Rincian Software
Per 31 Desember 2024**

No	Kode Barang	NUP	Uraian	Tahun	Nilai	Status
1	8010101001	5	Aplikasi Perencanaan	2015	267.990.000	Tidak dilanjutkan
2	8010101001	7	Redesign Website	2015	10.000.000	Dilanjutkan
3	8010101001	14	Penyempurnaan Aplikasi Sipedas	2017	58.000.000	Dilanjutkan
4	8010101001	16	Aplikasi RIPH	2017	138.194.000	Dilanjutkan
5	8010101001	18	website pascapanen	2016	59.604.500	Tidak dilanjutkan
6	8010101001	19	software kasir trans Pos 2011 Hortimart	2016	10.000.000	Tidak dilanjutkan
7	8010101001	20	Aplikasi Penataan Dok. Horti's Planning	2018	47.000.000	Tidak dilanjutkan
8	8010101001	21	Aplikasi Basis Wajib Tanam Pelaku Usaha	2018	23.250.000	Dilanjutkan
9	8010101001	22	Aplikasi Sistem Pembayaran	2018	96.195.000	Tidak diketahui
10	8010101001	23	Aplikasi "Sistem Pengawasan Peredaran'	2018	23.000.000	Tidak dilanjutkan
11	8010101001	24	Aplikasi Reg. Lahan Usaha Sayuran dan Tan. Obat	2018	82.395.000	Tidak dilanjutkan
12	8010101001	25	Aplikasi Penatausahaan BMN dan Pembantu Persediaan	2019	159.000.000	Tidak dilanjutkan
13	8010101001	26	Aplikasi Sistem Anggaran Terpadu Hortikultura (sat	2019	79.450.000	Tidak dilanjutkan
14	8010101001	27	Aplikasi Sistem Informasi Cabai	2019	43.043.000	Tidak dilanjutkan
15	8010101001	28	Aplikasi Software Database SIM DPI Hortikultura	2019	64.050.000	Tidak dilanjutkan
16	8010101001	30	Apl. Sistem Monitoring Tan. Hortikultura Strategis	2019	74.000.000	Dilanjutkan
17	8010101001	31	Aplikasi Manajemen Produksi Jamur Tiram	2019	27.000.000	Tidak dilanjutkan
18	8010101001	32	Aplikasi Manajemen Tanaman berbasis Android	2019	27.000.000	Tidak dilanjutkan
19	8010101001	33	Aplikasi Informasi Tanaman Obat	2019	27.000.000	Tidak dilanjutkan
20	8010101001	34	Aplikasi Berbasis Android	2020	87.900.000	Tidak dilanjutkan
21	8010101001	35	Aplikasi Dashboard	2020	196.900.000	Tidak dilanjutkan
22	8010101001	36	Sistem Monitoring Hortikultura Strategis (SIMETHRI	2020	97.000.000	Dilanjutkan
23	8010101001	37	Aplikasi Pusat Data Internal Dit. Buflo	2020	17.150.000	Tidak dilanjutkan
24	8010101001	38	Aplikasi Indo Fruits	2020	28.300.000	Tidak dilanjutkan
25	8010101001	39	Aplikasi Sistem Proyek Perubahan	2020	91.850.000	Tidak dilanjutkan
26	8010101001	40	APLIKASI DISAIN BLOCKCHAIN PRODUK HORTIKULTURA	2020	96.800.000	Dilanjutkan
27	8010101001	41	Website Direktorat Perlindungan	2020	51.700.000	Tidak dilanjutkan
28	8010101001	42	Aplikasi Registrasi Lahan Usaha Sayuran dan T.Obat	2020	90.750.000	Dilanjutkan
29	8010101001	43	APLIKASI REALISASI ANGGARAN SATKER	2021	48.414.000	Tidak dilanjutkan
30	8010101001	44	Aplikasi Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum	2021	53.746.000	Dilanjutkan
31	8010101001	45	SISTEM INFORMASI PERBENIHAN HORTIKUKULTURA	2021	53.900.000	Tidak dilanjutkan

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

No	Kode Barang	NUP	Uraian	Tahun	Nilai	Status
32	8010101001	46	APLIKASI SISTEM MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PEM	2021	34.000.000	Tidak dilanjutkan
33	8010101001	47	Aplikasi SI Banpem	2021	93.500.000	Tidak dilanjutkan
34	8010101001	48	Aplikasi Website Perbenihan Hortikultura	2021	32.323.500	Tidak dilanjutkan
35	8010101001	49	Indonesian Map of Fruits & Florikultura Center	2021	24.000.000	Tidak dilanjutkan
36	8010101001	50	Aplikasi Sistem Registrasi Kampung Sayuran dan TO	2021	78.300.000	Dilanjutkan
37	8010101001	51	APLIKASI SISTEM MONITORING TAN. SAYURAN & T. OBAT	2021	51.150.000	Dilanjutkan
38	8010101001	52	Aplikasi RIPH (Rekomendasi Impor Produk Hortikultu	2019	223.850.000	Dilanjutkan
39	8010101001	53	Software Sistem Pembenihan Hortikultura Tahap 1	2022	199.031.325	Dilanjutkan
40	8010101001	54	Pengembangan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Hortikultura untuk Indonesia (Simevi)	2022	188.448.000	Tidak dilanjutkan
41	8010101001	55	Aplikasi Kesatkeran	2022	17.753.000	Tidak dilanjutkan
42	8010101001	56	Aplikasi Stock Opname Warehouse Web	2022	58.563.600	Dilanjutkan
43	8010101001	57	Integrasi Data Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	2022	70.000.000	Dilanjutkan
44	8010101001	58	Aplikasi RIPH (Redesign)	2022	198.357.000	Dilanjutkan
45	8010101001	59	Aplikasi Perizinan Pemasukan & Pengeluaran Benih Tanaman	2022	37.740.000	Tidak dilanjutkan
46	8010101001	60	Sistem Registrasi Unit Usaha Hortikultura Segar Dan Olahan Versi 1.0	2022	60.000.000	Dilanjutkan
47	8010101001	61	Aplikasi Sistem Informasi Perlindungan Hortikultura	2022	198.712.200	Dilanjutkan
48	8010101001	62	Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kampung Buah florikultura	2022	81.000.000	Dilanjutkan
49	8010101001	63	Data Informasi Block Chain	2022	79.960.000	Dilanjutkan
50	8010101001	64	Aplikasi Sistem Monitoring Tanam Hortikultura Strategis (Simetrhris)	2022	99.012.000	Dilanjutkan
51	8010101001	65	Aplikasi Sistem Registrasi Kampung Sayuran dan Tanaman Obat Berdaya Saing (SRIKANDI) berbasis WEB	2022	98.679.000	Dilanjutkan
52	8010101001	66	Aplikasi Sistem Registrasi Kampung Sayuran dan Tanaman Obat Berdaya Saing (SRIKANDI) Mobile	2022	98.679.000	Dilanjutkan
53	8010101001	84	SISTEM INFORMASI PRODUK SEGAR DAN OLAHAN HORTIKULTURA	2023	99.500.000	Dilanjutkan
TOTAL NILAI SOFTWARE					4.353.140.125	

Adapun rincian mutasi Software Per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Tabel 80. Rincian Mutasi Software Per 31 Desember Tahun 2024

Saldo Awal	4,353,140,125
Mutasi Tambah :	
Pembelian	
Pengembangan	
Saldo Akhir	4,353,140,125

C.5.2 DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Dana yang Dibatasi Penggunaan merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu. Nilai Dana yang Dibatasi Penggunaannya Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing – masing sebesar Rp771,806,733,00 dan Rp1,286,012,000.00. Saldo Awal Dana yang Dibatasi Penggunaannya berasal dari satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) yang merupakan dana pada rekening penampungan akhir tahun (RPATA). Adapun rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebagai berikut :

Tabel 81. Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya

No	Supplier	Nomor	Uraian Kontrak	Akun	Nilai Kontrak	No SPM dan Tanggal PENAMPUNGAN	NO dan Tanggal SP2D PENAMPUNGAN
1	PT. GALANG INSAN PRATAMA	I.PPK.1/SPK/PL /1429/XII/202 3	Fasilitasi Keamanan Kantor dan Lingkungan (Jasa Security) bulan Desember 2023	521111	136,025,000	01502T/625875/2 023 12/21/2023	231390301000746 12/27/2023
2	PT. GALANG INSAN PRATAMA	I.PPK.1/SPK/ PL/1428/XII/ 2023	Pemeliharaan kebersihan gedung kantor, taman dan halaman (Cleaning Service) Bulan Desember 2023	521111	119,987,000	01503T/625875/2 023 12/21/2023	231390301000747 12/27/2023
3	CV. PATALLO KEYNAWA INDONESIA	I.PPK.2/K/ek TG/2902/XI/ 2023	Penyediaan Benih Bawang Merah Umbi (Tahap 29)	526311	1,030,000,000	01504T/625875/2 023 12/21/2023	231390301000851 12/27/2023
JUMLAH					1,286,012,000		

Atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran pada bulan Januari 2024 dengan penyelesaian pekerjaan mencapai 100% dan telah dilakukan jurnal balik pada akun utang yang belum diterima tagihannya pada TA 2024.

Pada TA 2024, terdapat kontrak pekerjaan dengan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) pada satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) dan Dinas Pertanian Provinsi

Maluku Utara (018.04.280151TP). Mekanisme tersebut merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang / jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

Adapun rincian kontrak pekerjaan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 82. Rincian kontrak pekerjaan

No	SATKER	PEKERJAAN	RPATA	SP2D Pembay aran RPATA Tahun 2024	Dana di Rekening Penampungan -Kementerian/ Lembaga	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (BAST di input tahun 2024)	BAST Tahun 2025	Gagal Kontrak	SP2D Pembayaran RPATA Tahun 2025	Total SP2D Pembayaran RPATA	Sisa (Penihilan)
1	625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTU RA	Pemeliharaan kebersihan gedung kantor, taman dan halaman (Cleaning Service) Bulan Desember 2024	150,168,000	-	150,168,000	150,168,000	-	-	150,168,000	150,168,000	-
2	625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTU RA	Fasilitasi Keamanan Kantor dan Lingkungan (Jasa Security) bulan Desember 2024	144,363,400	-	144,363,400	144,363,400	-	-	144,363,400	144,363,400	-
3	625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTU RA	Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PPHH	13,380,000	-	13,380,000	13,380,000	-	-	13,380,000	13,380,000	-
4	625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTU RA	AC Split dalam rangka pemeliharaan peralatan dan mesin	51,443,333	-	51,443,333	51,443,333	-	-	51,443,333	51,443,333	-
5	625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTU RA	Sewa Mobil Operasional Direktorat Perbenihan	18,550,000	-	18,550,000	18,550,000	-	-	18,550,000	18,550,000	-
6	625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTU RA	Sarana Pemasaran Hortikultura tahap IV	199,832,000	-	199,832,000	186,132,000	-	-	186,132,000	186,132,000	13,700,000
7	625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTU RA	Pemeliharaan Gedung Kantor Permanen Direktorat	118,571,000	-	118,571,000	118,571,000	-	-	118,571,000	118,571,000	-

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

No	SATKER	PEKERJAAN	RPATA	SP2D Pembay aran RPATA Tahun 2024	Dana di Rekening Penampungan -Kementerian/ Lembaga	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (BAST di input tahun 2024)	BAST Tahun 2025	Gagal Kontrak	SP2D Pembayaran RPATA Tahun 2025	Total SP2D Pembayaran RPATA	Sisa (Penihilan)
		Jenderal Hortikultura									
8	280151 Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	Pengadaan Sarana Angkutan Hortikultura Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara	75,499,000		75,499,000	75,499,000	-	-	75,499,000	75,499,000	-
TOTAL			771,806,733	-	771,806,733	758,106,733	-	-	758,106,733	758,106,733	13,700,000

Berdasarkan tabel di atas, nilai kontrak RPATA Tahun 2024 seluruhnya sebesar Rp771,806,733.00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, tidak terdapat pembayaran atas kontrak pekerjaan tersebut, sehingga pada Laporan Neraca per 31 Desember 2024 (Unaudited) terdapat saldo akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp771,806,733.00.

BAST yang diinput pada Aplikasi SAKTI – Modul Komitmen di Tahun 2024 dan belum dilakukan pembayaran di tahun tersebut, mengakibatkan tersajinya saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp758,056,733.00 pada Laporan Neraca per 31 Desember 2024 (Unaudited). Saldo utang tersebut telah selesai dibayarkan kepada masing – masing *supplier* pada bulan Januari 2025 senilai Rp682,607,733.00 dan bulan Februari 2025 senilai Rp75,499,000.00

1. Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor, Taman Dan Halaman (Cleaning Service) Bulan Desember 2024.

Kontrak pekerjaan nomor : I.PPK.1/K/eKTG/42/II/2024 tanggal 9 Januari 2024 dengan *supplier* PT. Galang Insan Pratama, merupakan pekerjaan jasa *cleaning service* pada kantor Direktorat Jenderal Hortikultura. Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atas kontrak kerja tersebut dibuat pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Nomor BAST : I.PPK.1/BAST/PL/1737/XII/2024 dengan tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 100%.

SPM-Pembayaran diajukan pada tanggal 6 Januari 2025 dengan Nomor : 00013T/625875/2025 senilai Rp150,168,000.00, dan SP2D-Pembayaran

diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2025 dengan Nomor : 259991302004934 senilai Rp147,825,460.00.

2. Fasilitas Keamanan Kantor Dan Lingkungan (Jasa Security) Bulan Desember 2024

Kontrak pekerjaan nomor : I.PPK.1/K/eKTG/41/II/2024 tanggal 9 Januari 2024 dengan *supplier* PT. Sinar Proteksindo, merupakan pekerjaan jasa *security* untuk pada kantor Direktorat Jenderal Hortikultura. Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atas kontrak kerja tersebut dibuat pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Nomor BAST : I.PPK.1/BAST/PL/1738/XII/2024 dengan tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 100%.

SPM-Pembayaran diajukan pada tanggal 6 Januari 2025 dengan Nomor : 00009T/625875/2025 senilai Rp144,363,400.00, dan SP2D-Pembayaran diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2025 dengan Nomor : 259991301003024 senilai Rp142,233,405.00.

3. Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PPHH

Kontrak pekerjaan nomor : I.PPK.6/SP/SEWA-PPHH/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 dengan *supplier* PT. Serasi Autoraya, merupakan pekerjaan jasa sewa kendaraan dalam rangka mendukung kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atas kontrak kerja tersebut dibuat pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Nomor BAST : I.PPK.6/BAST/SEWA-PPHH/T11/XII/2024 dengan tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 100%.

SPM-Pembayaran diajukan pada tanggal 13 Januari 2025 dengan Nomor : 00019T/625875/2025 senilai Rp13,380,000.00, dan SP2D-Pembayaran diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2025 dengan Nomor : 259991303002779 senilai Rp12,054,054.00

4. AC Split dalam rangka pemeliharaan peralatan dan mesin

Kontrak pekerjaan nomor : I.PPK.1/SPK/PL/281/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan *supplier* PT. Wai Buntara Cemerlang, merupakan pekerjaan pemeliharaan

peralatan dan mesin berupa AC Split pada Direktorat Jenderal Hortikultura. Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atas kontrak kerja tersebut dibuat pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Nomor BAST : I.PPK.1/BAST/PL/1739/XII/2024 dengan tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 100%.

SPM-Pembayaran diajukan pada tanggal 6 Januari 2025 dengan Nomor : 00010T/625875/2025 senilai Rp51,443,333.00, dan SP2D-Pembayaran diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2025 dengan Nomor : 259991302004889 senilai Rp45,418,438.00

5. Sewa Mobil Operasional Direktorat Perbenihan

Kontrak pekerjaan nomor : I.PPK.1/eKTG/270/IV/2024 tanggal 01 April 2024 dengan *supplier* PT. Serasi Autoraya, merupakan pekerjaan jasa sewa kendaraan dalam rangka mendukung kegiatan Perbenihan. Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024. Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atas kontrak kerja tersebut dibuat pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Nomor BAST : I.PPK.2/BAST/eKTG/1365/XII/2024 dengan tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 100%.

SPM-Pembayaran diajukan pada tanggal 8 Januari 2025 dengan Nomor : 00018T/625875/2025 senilai Rp18,550,000.00, dan SP2D-Pembayaran diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2025 dengan Nomor : 259991303002678 senilai Rp16,711,712.00

6. Sarana Pemasaran Hortikultura tahap IV

Kontrak pekerjaan nomor : I.PPK.6/SPK/5058/XI/2024 tanggal 01 November 2024 dengan *supplier* CV. Saga Utama, merupakan pekerjaan Sarana Pemasaran Hortikultura Tahap IV berupa. Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024. Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 09 Desember 2024. Namun pekerjaan baru dapat diselesaikan pada tanggal 30 Desember 2024. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atas kontrak kerja tersebut dibuat pada tanggal 30 Desember 2024 dengan Nomor BAST : I.PPK.6/BAST/5058/XII/2024 dengan tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 93.14%.

SPM-Pembayaran diajukan pada tanggal 13 Januari 2025 dengan Nomor : 00020T/625875/2025 senilai Rp186,132,000.00, dan SP2D-Pembayaran diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2025 dengan Nomor : 259991302005860 senilai Rp162,008,734.00

Sedangkan sisa pekerjaan yang tidak dibayarkan sebesar Rp13,700,000.00 telah diajukan SPM – Penihilan pada tanggal 13 Januari 2025 dengan Nomor : 00021T/625875/2025, dan SP2D – Penihilan diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2025 dengan Nomor : 251390301000035 senilai Rp0.00

7. Pemeliharaan Gedung Kantor Permanen Direktorat Jenderal Hortikultura

Kontrak pekerjaan nomor : I.PPK.1/SPK/PL/1679/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 dengan *supplier* CV. Abdi Pratama, merupakan pekerjaan pemeliharaan Gedung Kantor Permanen Direktorat Jenderal Hortikultura. Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 30 Desember 2024.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atas kontrak kerja tersebut dibuat pada tanggal 30 Desember 2024 dengan Nomor BAST : I.PPK.1/BAST/PL/1731/XII/2024 dengan tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 100%.

SPM-Pembayaran diajukan pada tanggal 06 Januari 2025 dengan Nomor : 00014T/625875/2025 senilai Rp118,571,000.00, dan SP2D-Pembayaran diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2025 dengan Nomor : 259991303002407 senilai Rp104,684,307.00

8. Pengadaan Sarana Angkutan Hortikultura Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara

Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara (018.04.280151TP) terdapat transaksi RPATA sebagai berikut :

- a. Pengadaan Sarana Angkutan Hortikultura berupa 1 (satu) unit motor roda tiga di Kabupaten Pulau Morotai dilaksanakan berdasarkan kontrak pekerjaan nomor : 11/TP.HORTI/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 dengan *supplier* PT. Ultra Kaya Mandiri. Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atas kontrak kerja tersebut dibuat pada tanggal 30 Desember 2024 dengan Nomor BAST : 074/UKM.BAST/XII/2024 dengan tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 100%.

SPM-Pembayaran diajukan pada tanggal 17 Februari 2025 dengan Nomor : 0003A senilai Rp37,749,500.00, dan SP2D-Pembayaran diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2025 dengan Nomor : 259991302006450 senilai Rp33,498,431.00. Pengajuan SPM – Pembayaran pada bulan Februari 2025 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-17/PB/PB.7/2025 tanggal 14 Februari 2025 perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Pesetujuan Pengajuan SPM Pembayaran RPATA Yang Melebihi Batas Waktu.

- b. Pengadaan Sarana Angkutan Hortikultura berupa 1 (satu) unit motor roda tiga di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan berdasarkan kontrak pekerjaan Nomor : 12/TP.HORTI/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 dengan *supplier* PT. Ultra Kaya Mandiri. Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atas kontrak kerja tersebut dibuat pada tanggal 30 Desember 2024 dengan Nomor BAST : 075/UKM.BAST/XII/2024 dengan tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 100%.

SPM-Pembayaran diajukan pada tanggal 17 Februari 2025 dengan Nomor : 0004A senilai Rp37,749,500.00, dan SP2D-Pembayaran diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2025 dengan Nomor : 259991302006449 senilai Rp33,498,431.00. Pengajuan SPM – Pembayaran pada bulan Februari 2025 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-17/PB/PB.7/2025 tanggal 14 Februari 2025 perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Pesetujuan Pengajuan SPM Pembayaran RPATA Yang Melebihi Batas Waktu.

C.5.3 ASET LAIN-LAIN

Saldo Aset Lain-lain Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4,743,936,239.00 dan Rp8,678,274,487.00 Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Hortikultura serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Saldo Aset lain – lain Per 31 Desember 2024 terdiri dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan sebesar Rp4,743,936,239.00.-

Mutasi kurang Aset Lain- Lain sebesar Rp12,644,523,098.00 yang terdiri dari :

- a. Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (019031DK) yaitu transfer keluar senilai Rp683,480,642.00, ke kode anak satker Kantor Pusat (625875.023KP) yang terdiri 19 Unit Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen senilai Rp661,633,542.00 dan 2 Unit Sumur Dengan Pompa senilai Rp21,847,100,00.
- b. Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (019031DK) yaitu Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan senilai Rp49,775,000.00 yang terdiri dari 1 Buah Shaker (Alat Laboratorium Pertanian) Nup 33 senilai Rp38,280,000.00 dan 1 Buah Mesin Gergaji Nup 52 dengan nilai Rp11,495,000.00
- c. Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (019031DK) yaitu Penghapusan dengan SK nomor : 50/KPTS/PL.320/A/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang terdiri dari 2 buah Alat Pengasapan, 1 buah Stiring Hot Plat, 1 Unit Alat Pendingin Lainnya, 1 buah Hotplate, 10 buah Fermentor dan 10 Unit Printer.
- d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (049025DK) yaitu Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan senilai Rp323,695,600.00 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin sebanyak 24 Unit
- e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (049025DK) yaitu Penghapusan dengan SK nomor : 526/Kpts/PL.320/A/09/2024 tanggal 25 September 2024, 517/Kpts/PL.320/A/09/2024 tanggal 25 September 2024 dan 514/Kpts/PL.320/A/09/2024 tanggal 25 September 2024 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp483,438,000.00
- f. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (059000DK) yaitu transfer keluar senilai Rp3,710,050,199.00, ke kode anak satker Kantor Pusat (625875.058KP)
- g. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (089009DK) yaitu transfer keluar senilai Rp75,114,700.00, ke kode anak satker Kantor Pusat (625875.129KP) yang terdiri dari 2 Unit Bangunan Gudang Terbuka Permanen
- h. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah (189016DK) yaitu Penghapusan dengan SK nomor : 100/KPTS/PL.320/A/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 senilai Rp319,859,600.00
- i. Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat (340056DK) yaitu Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan senilai Rp226,051,000.00
- j. Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat (340056DK) yaitu Penghapusan dengan SK nomor : 95/Kpst/PL.320/A/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 dengan nilai Rp230,981,000.00.

k. Satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (625875KP) yaitu Penghapusan dengan SK nomor :

- 207/KPTS/PL.320/A/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang berupa penghapusan Sebab Lain Alat Display Tanaman Hias.
- 522/KPTS/PL.320/A/09/2024 tanggal 25 September 2024 berupa penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 sebanyak 7 (tujuh) unit.
- 510/KPTS/PL.320/A/09/2024 tanggal 25 September 2024 berupa penghapusan barang inventaris kantor.
- 518/KPTS/PL.320/A/09/2024 tanggal 25 September 2024 berupa penghapusan Sebab Lain Alat Laboratorium dan Bangunan Bagi.
- 791/KPTS/PL.320/A/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 berupa Kendaraan dinas fungsional Jeep penjualan tanpa lelang.

l. Satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (625875KP) yaitu Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan senilai Rp-3.419.724.357,- Penginputan BMN yang sudah terbit SK Penghapusannya atau dalam proses usulan penerbitan SK Penghapusan ke Biro Keuangan dan BMN.

Mutasi Tambah Aset Lain- Lain sebesar Rp9,733,484,850 yang terdiri dari :

- a. Dinas Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (019031DK) yaitu Penghentian Aset Dari Penggunaan senilai Rp139,183,000.00.
- b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (049025DK) yaitu Penghentian Aset Dari Penggunaan senilai Rp807,133,600.00.
- c. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah (189016DK) yaitu Penghentian Aset Dari Penggunaan senilai Rp319,859,600.00.
- d. Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat (340056DK) yaitu Penghentian Aset Dari Penggunaan senilai Rp7,500,000.00.
- e. Satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (625875KP) yaitu Penghentian Aset Dari Penggunaan senilai Rp3,635,163,109.00, Dasar penginputan ke dalam daftar barang henti guna BMN yang sudah terbit SK Penghapusannya atau dalam proses usulan penerbitan SK Penghapusan ke Biro Keuangan dan BMN.
- f. Satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (625875KP) yaitu Transfer masuk senilai Rp4,468,645,541.00. yang terdiri dari :
 - Dinas Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (019031DK) terdiri dari 2 (Dua) Unit Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air) Senilai Rp.21.847.100. dan 19 (Sembilan belas) Unit Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen Senilai Rp.661.633.542.00
 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (059000DK) terdiri 1 Unit Truck + Attachment senilai Rp27,445,000.00, 1 buah HPLC Isocratic

System senilai Rp1,597,900,000.00, 1 Unit Tractor Lainnya senilai Rp278,839,000.00, 20 Unit Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air) senilai Rp97,105,000.00, 4 Unit Sumur Artetis senilai Rp595,000,000.00, 3 Unit Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah Teknis senilai Rp134,850,999.00, 1 Unit Bangunan Pelengkap Irigasi Lainnya senilai Rp49,441,850.00, 4 Unit Bangunan Pompa Air Buangan Pertanian senilai Rp199,488,400.00, 1 Unit Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya senilai Rp339,900,000.00 dan 6 Unit Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi) senilai Rp103,917,950.00

- Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat (089009DK) 2 Unit Bangunan Sawah Irigasi Tehnis senilai Rp286,162,000.00 dan 2 Unit Bangunan Gudang Terbuka Permanen senilai Rp75,114,700.00

Adapun rincian satuan kerja dengan Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 83. Rincian Satuan Kerja dengan Saldo Aset Tetap Henti Guna

Kode	Nama Satker	Nilai
018.04.059000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	226.692.698
018.04.625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	4.517.243.541
Jumlah		4.743.936.239

C.5.4 AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-6,937,330,416.00 dan Rp-10,138,107,070.00 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 terdiri dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan sebesar Rp- 3,198,243,909.00, Akumulasi Amortisasi Software sebesar Rp- 3,739,086,507.00.

C.6 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji sebesar Rp6,289,423,077.00 dan Rp1,172,278,282.00.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada di bawah ini :

**Tabel 84. Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2024**

URAIAN AKUN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Utang kepada Pihak Ketiga	6,130,079,078	1,084,384,448
Pendapatan Diterima Dimuka	159,343,999	87,243,334
Uang Muka dari KPPN	0	650,500
TOTAL	6,289,423,077	1,172,278,282

C.6.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6,130,079,078.00 dan Rp1,084,384,448.00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Pada Direktorat Jenderal Hortikultura, utang kepada pihak ketiga terdiri dari belanja pegawai yang masih harus dibayar, belanja barang yang masih harus dibayar, dan utang kepada pihak ketiga lainnya. Berikut ini disajikan Perbandingan Utang Pihak Ketiga pada tabel di bawah ini sebagai berikut.

**Tabel 85. Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	5,371,972,345	153.372.448
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	758,106,733	931.012.000
Jumlah	6,130,079,078	1.084.384.448

Berikut rincian Utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

**Tabel 86. Rincian Utang kepada pihak ketiga
Per 31 Desember Tahun 2024**

KodeSatker	Nama Satker	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya
018.04.280151	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	-	(75,499,000)
018.04.625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(5,371,972,345)	(682,607,733)
Jumlah		(5,371,972,345)	(758,106,733)

C.6.1.1 BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Belanja barang yang masih harus dibayar adalah tagihan pihak ketiga atau kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum dapat dibayarkan. Saldo belanja barang yang masih harus dibayar terdapat pada satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP).

Pada TA 2023, saldo belanja barang yang masih harus dibayar merupakan tagihan telepon dan listrik Desember 2023 yang dibayarkan di 2024. Nilai tersebut telah dijurnal balik pada TA 2024.

Pada TA 2024, saldo belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp5,371,972,345.00 terdiri dari :

- a) Tagihan Telepon bulan Desember 2024 sebesar Rp8,354,710.00. Tagihan tersebut telah dibayarkan di TA 2025 dengan SP2D Nomor : 251391301000204 tanggal 15 Januari 2025 sebesar Rp3,697,361.00 serta SP2D Nomor : tanggal 2025 sebesar Rp4,657,560.00
- b) Tagihan Listrik bulan Desember 2024 sebesar Rp127,508,146.00. Tagihan tersebut telah dibayarkan di TA 2025 dengan SP2D Nomor : 251391303000212 tanggal 15 Januari 2025 sebesar Rp124,686,926.00 serta SP2D Nomor : tanggal 2025 sebesar Rp2,821,220.00
- c) Tunda bayar atas kegiatan Pengadaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Merah dan Aneka Cabai TA 2023 di Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat. Nilai tunda bayar yang disajikan pada Laporan Keuangan 2024 Unaudited sesuai dengan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dari Inspektorat Jenderal dengan LHP Nomor : B.137/PW.120/G.6/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal tersebut, besaran belanja barang yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp7,395,755,422.00. Pada 2024, nilai tersebut telah ditindaklanjuti sebesar Rp2,159,855,378.00, sehingga per 31 Desember 2024 nilai belanja barang yang masih harus dibayar tersaji di Laporan Neraca sebesar Rp5,235,900,044.00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 87. Rincian Tunda Bayar
Per 31 Desember 2024**

KAWASAN	NAMA PENYEDIA	NILAI YANG BELUM DIBAYAR (Rp)
ANEKA CABAI	PT. TAKIRON INDONESIA	1,766,863,950
	PT. AGRO KIMIA ASIA	238,857,117
	PT. JENAWI SUBURINDO REJEKI	278,847,219
	SUBTOTAL ANEKA CABAI	2,284,568,286
BAWANG	PT. TAKIRON INDONESIA	1,365,639,099
	PT. AGRO KIMIA NIAGA	1,095,673,751
	PT. AGRO KIMIA ASIA	183,815,258
	PT. AGRI KEMIA NATURA	306,203,650
	SUBTOTAL BAWANG	2,951,331,758
	TOTAL	5,235,900,044

C.6.1.2 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA LAINNYA

Utang kepada pihak ketiga lainnya adalah utang jangka pendek kepada pihak ketiga yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Saldo Awal Utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp931,012,000.00 berasal dari satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) yang merupakan dana pada rekening penampungan akhir tahun (RPATA). Adapun rincian RPATA sebagai berikut :

**Tabel 88. Rincian RPATA
Per 31 Desember 2023**

No	Supplier	Nomor	Uraian Kontrak	Akun	Nilai Kontrak	No SPM dan Tanggal PENAMPUNGAN	NO dan Tanggal SP2D PENAMPUNGAN
1	PT. GALANG INSAN PRATAMA	I.PPK.1/SPK/PL/1429/XII/2023	Fasilitasi Keamanan Kantor dan Lingkungan (Jasa Security) bulan Desember 2023	521111	136,025,000	01502T/625875/2023 12/21/2023	231390301000746 12/27/2023
2	PT. GALANG INSAN PRATAMA	I.PPK.1/SPK/PL/1428/XII/2023	Pemeliharaan kebersihan gedung kantor, taman dan halaman (Cleaning Service) Bulan Desember 2023	521111	119,987,000	01503T/625875/2023 12/21/2023	231390301000747 12/27/2023
3	CV. PATALLO KEYNAWA INDONESIA	I.PPK.2/K/eKTG/2902/XI/2023	Penyediaan Benih Bawang Merah Umbi (Tahap 29)	526311	1,030,000,000	01504T/625875/2023 12/21/2023	231390301000851 12/27/2023
JUMLAH					1,286,012,000		

Atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran pada bulan Januari 2024 dengan penyelesaian pekerjaan mencapai 100% dan telah dilakukan jurnal balik pada akun utang yang belum diterima tagihannya pada TA 2024.

Pada TA 2024, terdapat pula kontrak pekerjaan dengan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) pada satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) dan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara (018.04.280151TP). Mekanisme tersebut merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang / jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

Adapun rincian kontrak pekerjaan dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 89. Rincian Kontrak dengan Mekanisme RPATA
Per 31 Desember 2024**

No	SATKER	PEKERJAAN	RPATA	SP2D Pembayar an RPATA Tahun 2024	Dana di Rekening Penampung an- Kementeria n/ Lembaga	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (BAST di input tahun 2024)	BAST Tahun 2025	Gagal Kontrak	SP2D Pembayaran RPATA Tahun 2025	Total SP2D Pembayaran RPATA	Sisa (Penihilan)
1	625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	Pemeliharaan kebersihan gedung kantor, taman dan halaman (Cleaning Service) Bulan Desember 2024	150,168,000	-	150,168,000	150,168,000	-	-	150,168,000	150,168,000	-
2	625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	Fasilitasi Keamanan Kantor dan Lingkungan (Jasa Security) bulan Desember 2024	144,363,400	-	144,363,400	144,363,400	-	-	144,363,400	144,363,400	-
3	625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PPHH	13,380,000	-	13,380,000	13,380,000	-	-	13,380,000	13,380,000	-
4	625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	AC Split dalam rangka pemeliharaan peralatan dan mesin	51,443,333	-	51,443,333	51,443,333	-	-	51,443,333	51,443,333	-

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

No	SATKER	PEKERJAAN	RPATA	SP2D Pembayar an RPATA Tahun 2024	Dana di Rekening Penampung an- Kementeria n/ Lembaga	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (BAST di input tahun 2024)	BAST Tahun 2025	Gagal Kontrak	SP2D Pembayaran RPATA Tahun 2025	Total SP2D Pembayaran RPATA	Sisa (Penihilan)
5	625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	Sewa Mobil Operasional Direktorat Perbenihan	18,550,000	-	18,550,000	18,550,000	-	-	18,550,000	18,550,000	-
6	625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	Sarana Pemasaran Hortikultura tahap IV	199,832,000	-	199,832,000	186,132,000	-	-	186,132,000	186,132,000	13,700,000
7	625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	Pemeliharaan Gedung Kantor Permanen Direktorat Jenderal Hortikultura	118,571,000	-	118,571,000	118,571,000	-	-	118,571,000	118,571,000	-
8	280151 Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	Pengadaan Sarana Angkutan Hortikultura Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara	75,499,000		75,499,000	75,499,000	-	-	75,499,000	75,499,000	-
TOTAL			771,806,733	-	771,806,733	758,106,733	-	-	758,106,733	758,106,733	13,700,000

Berdasarkan tabel di atas, nilai kontrak RPATA Tahun 2024 seluruhnya sebesar Rp771,806,733.00. BAST yang diinput pada Aplikasi SAKTI – Modul Komitmen di Tahun 2024 dan belum dilakukan pembayaran di tahun tersebut, mengakibatkan tersajinya saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp758,056,733.00 pada Laporan Neraca per 31 Desember 2024 (*Unaudited*). Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya yang tersaji sesuai dengan persentase penyelesaian pekerjaan. Saldo utang tersebut telah selesai dibayarkan kepada masing – masing *supplier* pada bulan Januari 2025 senilai Rp682,607,733.00 dan bulan Februari 2025 senilai Rp75,499,000.00

1. Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor, Taman Dan Halaman (Cleaning Service) Bulan Desember 2024.

Kontrak pekerjaan nomor : I.PPK.1/K/eKTG/42/II/2024 tanggal 9 Januari 2024 dengan *supplier* PT. Galang Insan Pratama, merupakan pekerjaan jasa *cleaning service* pada kantor Direktorat Jenderal Hortikultura. Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atas kontrak kerja tersebut dibuat pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Nomor BAST :

I.PPK.1/BAST/PL/1737/XII/2024 dengan tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 100%.

SPM-Pembayaran diajukan pada tanggal 6 Januari 2025 dengan Nomor : 00013T/625875/2025 senilai Rp150,168,000.00, dan SP2D-Pembayaran diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2025 dengan Nomor : 259991302004934 senilai Rp147,825,460.00.

2. Fasilitasi Keamanan Kantor Dan Lingkungan (Jasa Security) Bulan Desember 2024

Kontrak pekerjaan nomor : I.PPK.1/K/eKTG/41/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 dengan *supplier* PT. Sinar Proteksindo, merupakan pekerjaan jasa *security* untuk pada kantor Direktorat Jenderal Hortikultura. Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atas kontrak kerja tersebut dibuat pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Nomor BAST : I.PPK.1/BAST/PL/1738/XII/2024 dengan tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 100%.

SPM-Pembayaran diajukan pada tanggal 6 Januari 2025 dengan Nomor : 00009T/625875/2025 senilai Rp144,363,400.00, dan SP2D-Pembayaran diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2025 dengan Nomor : 259991301003024 senilai Rp142,233,405.00.

3. Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PPHH

Kontrak pekerjaan nomor : I.PPK.6/SP/SEWA-PPHH/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 dengan *supplier* PT. Serasi Autoraya, merupakan pekerjaan jasa sewa kendaraan dalam rangka mendukung kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atas kontrak kerja tersebut dibuat pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Nomor BAST : I.PPK.6/BAST/SEWA-PPHH/T11/XII/2024 dengan tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 100%.

SPM-Pembayaran diajukan pada tanggal 13 Januari 2025 dengan Nomor : 00019T/625875/2025 senilai Rp13,380,000.00, dan SP2D-Pembayaran diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2025 dengan Nomor : 259991303002779 senilai Rp12,054,054.00

4. AC Split dalam rangka pemeliharaan peralatan dan mesin

Kontrak pekerjaan nomor : I.PPK.1/SPK/PL/281/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan *supplier* PT. Wai Buntara Cemerlang, merupakan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin berupa AC Split pada Direktorat Jenderal Hortikultura. Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atas kontrak kerja tersebut dibuat pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Nomor BAST : I.PPK.1/BAST/PL/1739/XII/2024 dengan tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 100%.

SPM-Pembayaran diajukan pada tanggal 6 Januari 2025 dengan Nomor : 00010T/625875/2025 senilai Rp51,443,333.00, dan SP2D-Pembayaran diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2025 dengan Nomor : 259991302004889 senilai Rp45,418,438.00

5. Sewa Mobil Operasional Direktorat Perbenihan

Kontrak pekerjaan nomor : I.PPK.1/eKTG/270/IV/2024 tanggal 01 April 2024 dengan *supplier* PT. Serasi Autoraya, merupakan pekerjaan jasa sewa kendaraan dalam rangka mendukung kegiatan Perbenihan. Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024. Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atas kontrak kerja tersebut dibuat pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Nomor BAST : I.PPK.2/BAST/eKTG/1365/XII/2024 dengan tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 100%.

SPM-Pembayaran diajukan pada tanggal 8 Januari 2025 dengan Nomor : 00018T/625875/2025 senilai Rp18,550,000.00, dan SP2D-Pembayaran diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2025 dengan Nomor : 259991303002678 senilai Rp16,711,712.00

6. Sarana Pemasaran Hortikultura tahap IV

Kontrak pekerjaan nomor : I.PPK.6/SPK/5058/XI/2024 tanggal 01 November 2024 dengan *supplier* CV. Saga Utama, merupakan pekerjaan Sarana Pemasaran Hortikultura Tahap IV berupa. Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024. Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 09 Desember 2024. Namun pekerjaan baru dapat diselesaikan pada tanggal 30 Desember 2024.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atas kontrak kerja tersebut dibuat pada tanggal 30 Desember 2024 dengan Nomor BAST : I.PPK.6/BAST/5058/XII/2024 dengan tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 93.14%.

SPM-Pembayaran diajukan pada tanggal 13 Januari 2025 dengan Nomor : 00020T/625875/2025 senilai Rp186,132,000.00, dan SP2D-Pembayaran diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2025 dengan Nomor : 259991302005860 senilai Rp162,008,734.00

Sedangkan sisa pekerjaan yang tidak dibayarkan sebesar Rp13,700,000.00 telah diajukan SPM – Penihilan pada tanggal 13 Januari 2025 dengan Nomor : 00021T/625875/2025, dan SP2D – Penihilan diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2025 dengan Nomor : 251390301000035 senilai Rp0.00

7. Pemeliharaan Gedung Kantor Permanen Direktorat Jenderal Hortikultura

Kontrak pekerjaan nomor : I.PPK.1/SPK/PL/1679/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 dengan *supplier* CV. Abdi Pratama, merupakan pekerjaan pemeliharaan Gedung Kantor Permanen Direktorat Jenderal Hortikultura. Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 30 Desember 2024.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atas kontrak kerja tersebut dibuat pada tanggal 30 Desember 2024 dengan Nomor BAST : I.PPK.1/BAST/PL/1731/XII/2024 dengan tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 100%.

SPM-Pembayaran diajukan pada tanggal 06 Januari 2025 dengan Nomor : 00014T/625875/2025 senilai Rp118,571,000.00, dan SP2D-Pembayaran diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2025 dengan Nomor : 259991303002407 senilai Rp104,684,307.00

8. Pengadaan Sarana Angkutan Hortikultura Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara

Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara (018.04.280151TP) terdapat transaksi RPATA sebagai berikut :

- a. Pengadaan Sarana Angkutan Hortikultura berupa 1 (satu) unit motor roda tiga di Kabupaten Pulau Morotai dilaksanakan berdasarkan kontrak pekerjaan nomor : 11/TP.HORTI/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 dengan *supplier* PT. Ultra Kaya Mandiri. Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atas kontrak kerja tersebut dibuat pada tanggal 30 Desember 2024 dengan Nomor BAST : 074/UKM.BAST/XII/2024 dengan tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 100%.

SPM-Pembayaran diajukan pada tanggal 17 Februari 2025 dengan Nomor : 0003A senilai Rp37,749,500.00, dan SP2D-Pembayaran diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2025 dengan Nomor : 259991302006450 senilai Rp33,498,431.00. Pengajuan SPM – Pembayaran pada bulan Februari 2025 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-17/PB/PB.7/2025 tanggal 14 Februari 2025 perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Pesetujuan Pengajuan SPM Pembayaran RPATA Yang Melebihi Batas Waktu.

- b. Pengadaan Sarana Angkutan Hortikultura berupa 1 (satu) unit motor roda tiga di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan berdasarkan kontrak pekerjaan Nomor : 12/TP.HORTI/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 dengan *supplier* PT. Ultra Kaya Mandiri. Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan atas kontrak kerja tersebut dibuat pada tanggal 30 Desember 2024 dengan Nomor BAST : 075/UKM.BAST/XII/2024 dengan tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 100%.

SPM-Pembayaran diajukan pada tanggal 17 Februari 2025 dengan Nomor : 0004A senilai Rp37,749,500.00, dan SP2D-Pembayaran diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2025 dengan Nomor : 259991302006449 senilai Rp33,498,431.00. Pengajuan SPM – Pembayaran pada bulan Februari 2025 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-17/PB/PB.7/2025 tanggal 14 Februari 2025 perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Pesetujuan Pengajuan SPM Pembayaran RPATA Yang Melebihi Batas Waktu.

C.6.2 PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Saldo Pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing – masing sebesar Rp159,343,999.00 dan Rp87,243,334.00. Saldo awal Pendapatan diterima di muka berasal dari satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) yang merupakan pendapatan sewa bangunan yang diterima di muka dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sewa aset properti investasi untuk periode sewa 2024. Bangunan di sewa oleh Koperasi Konsumen Direktorat Jenderal Hortikultura, yang pada saat perjanjian dilakukan masih menggunakan nama Koperasi Hortina. Adapun nilai pendapatan sewa yang diterima pada tahun 2023 sebesar Rp314,076,000.00 untuk periode perjanjian selama 3 tahun terhitung dari Maret 2023 – Maret 2026. Pendapatan sewa yang diterima TA 2023 sebesar Rp314,076,000.00 dibagi 36 bulan (total masa sewa) yaitu sebesar Rp8,724,333.33/bulan. Masa sewa selama 2024 diakui selama 12 bulan terhitung sejak Januari 2024 – Desember 2024. Sehingga pendapatan sewa 2024 diakui sebesar Rp104,691,996.00.

Pada Laporan Keuangan TA 2023 Audited, terdapat kesalahan pencatatan nilai akrual atas pendapatan sewa aset properti investasi ini, di mana saldo audited tercatat sebesar Rp87,243,334.00. Seharusnya pada Laporan Keuangan Audited 2023, nilai akrual yang disajikan pada Pendapatan diterima di muka adalah nilai pendapatan sewa yang akan diakui pada tahun berikutnya sampai dengan akhir periode sewa yaitu sebesar Rp226,832,666.00. Sehingga atas transaksi tersebut dilakukan koreksi di periode Unaudited 2024 sebesar Rp139,589,332.00.

Sedangkan nilai akrual yang disajikan pada TA 2024 Unaudited sebesar Rp122,140,666 untuk masa sewa Januari 2025 – Februari 2026.

- b) Sewa ATM BRI untuk periode Januari 2024 – Desember 2026 dengan nilai pendapatan diterima di muka sebesar Rp55,805,000.00. Pendapatan sewa yang diterima TA 2024 sebesar Rp55,805,000.00 dibagi 36 bulan (total masa sewa) yaitu sebesar Rp1,550,138.89/bulan. Pendapatan sewa yang diakui tahun 2024 sebesar Rp18,601,667.00. Sehingga nilai akrual yang disajikan pada TA 2024 Unaudited sebesar Rp37,203,333.00 untuk masa sewa Januari 2025 – Desember 2026.
- c) Sewa ruang toko di kantor Direktorat Jenderal Hortikultura. Ruangan disewa oleh Koperasi Konsumen Direktorat Jenderal Hortikultura, yang pada saat perjanjian dilakukan masih menggunakan nama Koperasi Hortina. Pendapatan sewa yang dibayarkan di 2024 untuk periode 2 September 2022 sampai dengan 31 Agustus 2025 sebesar Rp44,205,535.00. Sehingga nilai akrual yang disajikan pada TA 2024 Unaudited sebesar Rp209,445.00 untuk masa sewa Januari 2025 – 31 Agustus 2025.

C.6.3 UANG MUKA DARI KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp650,500.00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang

Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Saldo awal Uang Muka dari KPPN berasal dari satuan kerja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat (018.04.089009DK) sebesar Rp650,500.00 dan telah disetor ke kas negara tanggal 3 Januari 2024 dengan NTPN : D30C07NAP6H1NDSI.

C.7 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp594,442.088.464.00 dan Rp442,494,999,615.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

D.1 KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran. Kegiatan Operasional ini dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel.90 Perbandingan Kegiatan Operasioanal Laporan Operasional (LO)
periode 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Jumlah Pendapatan	552.040.985	1.042.738.685	(490.697.700,00)	(88,89)
Jumlah Beban	399.438.894.570	919.819.875.076	(520.380.980.506,00)	(130,28)
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	-398.886.853.585	-918.777.136.391	519.890.282.806,00	(130,34)

D.2 PENDAPATAN BUKAN PAJAK LAINNYA

Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp552,040,985.00 dan Rp1,042,738,685.00

Tabel 91. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Operasional (LO)
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (dalam Rupiah)

Uraian Beban Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	31-Dec-24	31-Dec-23	% Naik/(Turun)
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan Peternakan	34.215.000	51.305.000	(49,95)
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	167.334.758	343.271.166	(105,14)
Pendapatan Perizinan Pertanian	7.800.000	9.250.000	(18,59)
Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standardisasi	63.739.000	170.181.300	(167,00)
Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	255.502.675	316.975.275	(24,06)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	23.449.552	151.755.944	(547,16)
Jumlah	552.040.985	1.042.738.685	(88,89)

Nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yang tersaji pada Laporan Operasional berbeda dengan nilai yang tersaji pada Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 92. Selisih Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada LO dan LRA
Per 31 Desember 2024**

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	LO	LRA	Selisih
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan Peternakan	34.215.000	34.215.000	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	881.008.805	881.008.805
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	167.334.758	100.055.536	67.279.222
Pendapatan Perizinan Pertanian	7.800.000	7.800.000	0
Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standardisasi	63.739.000	63.739.000	0
Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	255.502.675	255.502.675	0
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	23.449.552	38.949.552	15.500.000
Jumlah	552.040.985	1.381.270.568	829.229.583

Terdapat Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional LO dan LRA Per 31 Desember 2024 senilai Rp829,229.583.00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Selisih Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp881,008,005.00 yaitu karena pada Laporan Operasional, nilai tersebut tersaji pada pos pendapatan pelepasan aset non lancar,
2. Selisih Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp67,279,222.00 merupakan nilai akrual atas sewa tanah dan bangunan antara lain :
 - d) Sewa aset properti investasi untuk periode sewa 2024. Bangunan di sewa oleh Koperasi Konsumen Direktorat Jenderal Hortikultura, yang pada saat perjanjian dilakukan masih menggunakan nama Koperasi Hortina. Adapun nilai pendapatan sewa yang diterima pada tahun 2023 sebesar Rp314,076,000.00 untuk periode perjanjian selama 3 tahun terhitung dari Maret 2023 – Maret 2026. Pendapatan sewa yang diterima TA 2023 sebesar Rp314,076,000.00 dibagi 36 bulan (total masa sewa) yaitu sebesar Rp8,724,333.33/bulan. Masa sewa selama 2024 diakui selama 12 bulan terhitung sejak Januari 2024 – Desember 2024. Sehingga pendapatan sewa 2024 diakui sebesar Rp104,691,996.00.

Pada Laporan Keuangan TA 2023 Audited, terdapat kesalahan pencatatan nilai akrual atas pendapatan sewa aset properti investasi ini, di mana saldo audited tercatat sebesar Rp87,243,334.00. Seharusnya pada Laporan Keuangan Audited 2023, nilai akrual yang disajikan pada Pendapatan diterima

di muka adalah nilai pendapatan sewa yang akan diakui pada tahun berikutnya sampai dengan akhir periode sewa yaitu sebesar Rp226,832,666.00. Sehingga atas transaksi tersebut dilakukan koreksi di periode Unaudited 2024 sebesar Rp139,589,332.00.

Sedangkan nilai akrual yang disajikan pada TA 2024 Unaudited sebesar Rp122,140,666 untuk masa sewa Januari 2025 – Februari 2026.

- e) Sewa ATM BRI untuk periode Januari 2024 – Desember 2026 dengan nilai pendapatan diterima di muka sebesar Rp55,805,000.00. Pendapatan sewa yang diterima TA 2024 sebesar Rp55,805,000.00 dibagi 36 bulan (total masa sewa) yaitu sebesar Rp1,550,138.89/bulan. Pendapatan sewa yang diakui tahun 2024 sebesar Rp18,601,667.00. Sehingga nilai akrual yang disajikan pada TA 2024 Unaudited sebesar Rp37,203,333.00 untuk masa sewa Januari 2025 – Desember 2026.
 - f) Sewa ruang toko di kantor Direktorat Jenderal Hortikultura. Ruangan disewa oleh Koperasi Konsumen Direktorat Jenderal Hortikultura, yang pada saat perjanjian dilakukan masih menggunakan nama Koperasi Hortina. Pendapatan sewa yang dibayarkan di 2024 untuk periode 2 September 2022 sampai dengan 31 Agustus 2025 sebesar Rp44,205,535.00. Sehingga nilai akrual yang disajikan pada TA 2024 Unaudited sebesar Rp209,445.00 untuk masa sewa Januari 2025 – 31 Agustus 2025.
3. Selisih Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp15,500,00.00 yaitu berasal dari penyelesaian piutang terkait denda keterlambatan berdasarkan LHP Inspektorat Jenderal Hortikultura.

D.3 BEBAN

semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp399,438,894,570 dan Rp919,819,875,076. Nilai Beban Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp520,380,980,506 atau 130,28% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Tahun 2023. Rincian nilai Beban Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 93. Rincian nilai Beban Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Beban Pegawai	26.174.025.069	23.316.874.440	2.857.150.629
Beban Persediaan	1.753.089.775	8.192.896.371	-6.439.806.596
Beban Barang dan Jasa	76.081.010.386	107.602.240.030	-31.521.229.644
Beban Pemeliharaan	3.583.400.811	3.298.674.674	284.726.137
Beban Perjalanan Dinas	85.550.650.259	123.569.233.657	-38.018.583.398
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	196.711.640.663	643.777.418.621	-447.065.777.958
Beban Penyusutan dan Amortisasi	9.553.483.964	10.279.703.610	-726.219.646
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	31.593.643	-217.166.327	248.759.970
JUMLAH BEBAN	399.438.894.570	919.819.875.076	-520.380.980.506

D.4 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Saldo Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp26,174,025,069.00 dan Rp23,316,874,440.00 Rincian Beban Pegawai disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 94. Perbandingan Beban Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Beban Pegawai	31-Dec-24	31-Dec-23	% Naik/(Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	17.530.912.500	16.505.963.400	5,85
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(4.115.838)	241.761	105,87
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(8.898)	(21)	99,76
Beban Pembulatan Gaji PNS	242.439	0	100,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.251.162.340	1.185.814.250	5,22
Beban Tunj. Anak PNS	406.319.696	381.559.424	6,09
Beban Tunj. Struktural PNS	400.830.000	395.690.000	1,28
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.682.775.000	1.628.186.000	3,24
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	(2.800.000)	0	100,00
Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	(29.483)	0	100,00
Beban Tunj. PPh PNS	224.592.984	106.660.120	52,51

Uraian Beban Pegawai	31-Dec-24	31-Dec-23	% Naik/(Turun)
Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	(72.420)	0	100,00
Beban Tunj. Beras PNS	917.633.820	942.763.560	(2,74)
Beban Uang Makan PNS	1.511.186.000	1.499.678.000	0,76
Beban Tunjangan Umum PNS	407.050.000	449.975.000	(10,55)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	(350)	0,00
Beban Gaji Pokok PPPK	1.322.177.100		100,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	25.945	141.114.800	(543.799,79)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	0	3.640	0,00
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	65.793.340	8.178.480	87,57
Beban Tunjangan Anak PPPK	16.554.484	2.110.336	87,25
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	203.560.000	24.320.000	88,05
Beban Tunjangan Beras PPPK	64.671.060	8.111.040	87,46
Beban Uang Makan PPPK	175.565.000	36.505.000	79,21
Jumlah	26.174.025.069	23.316.874.440	10,92

D.5 BEBAN PERSEDIAAN

Saldo Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1,753,089,775.00 dan Rp8,192,896,371.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 95. Perbandingan Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Beban Persediaan	31-Dec-24	31-Dec-23	% Naik/(Turun)
Beban Persediaan konsumsi	1.740.339.775	5.418.300.971	(211,35)
Beban Persediaan bahan baku	12.750.000	1.158.521.400	(8.986,44)
Beban persediaan lainnya	0	1.615.744.000	0
Jumlah	1.753.089.775	8.192.566.371	(367,34)

Nilai Beban Persediaan sebesar Rp1,753,089,775.00 di LO dengan Realisasi Belanja Barang Persediaan sebesar Rp16,325,137,446.00 terdapat selisih sebesar Rp14,572,297,671.00 dengan penjelasan sebagai selisih sebagai berikut :

Realisasi belanja barang persediaan terdiri dari : Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) sebesar Rp2,000,221,446.00 serta Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses (521822) sebesar Rp14,324,916,000.00.

Tabel 96. Penjelasan Selisih

URAIAN	NILAI (Rp)
Belanja Persediaan	
Belanja Barang Persediaan Konsumsi	2,000,221,446
Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses	<u>14,324,916,000</u>
Total Belanja Barang Persediaan	16,325,137,446
Beban Persediaan	
Beban Persediaan Konsumsi	1,740,339,775
Beban Persediaan Bahan Baku	<u>12,750,000</u>
Total Beban Persediaan	1,753,089,775
SELISIH PENCATATAN	(14,572,047,671)
PENJELASAN SELISIH PENCATATAN	
Saldo awal	1,548,722,877
Reklasifikasi Masuk	5,594,000
Beban Pemeliharaan	(31,107,630)
Persediaan dalam Proses	(15,011,516,555)
Beban Pelepasan Aset	(17,325,000)
Saldo Akhir	<u>(1,066,415,363)</u>
SELISIH	(14,572,047,671)

D.6 BEBAN BARANG DAN JASA

Saldo Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp76,081,010,386.00 dan Rp107,602,240,030.00 Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 97. Perbandingan Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (dalam Rupiah)

Uraian Beban Barang dan Jasa	31-Dec-24	31-Dec-23	% Naik/(Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	10.990.775.723	11.412.097.359	(3,83)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	500.000	10.393.000	(1.978,60)
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	(44.818.800)	0	100,00

Uraian Beban Barang dan Jasa	31-Dec-24	31-Dec-23	% Naik/(Turun)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	5.278.157.000	12.661.016.000	(139,88)
Beban Barang Operasional Lainnya	469.124.851	474.423.000	(1,13)
Pengembalian Beban Bahan	(63.750)	0	100,00
Beban Bahan	20.717.781.355	32.977.776.507	(59,18)
Beban Honor Output Kegiatan	3.739.198.320	24.220.497.700	(547,75)
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(35.890.000)	0	100,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.236.030.599	1.521.535.103	31,95
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	(320.000)	0,00
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	0	156.000.000	0,00
Beban Langganan Listrik	1.715.046.677	1.742.266.055	(1,59)
Beban Langganan Telepon	238.129.355	286.070.839	(20,13)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	1.500.000	0,00
Beban Jasa Pos dan Giro	118.776.106	94.902.028	20,10
Pengembalian Beban Sewa	(198.000)	0	100,00
Beban Sewa	3.613.493.069	2.798.654.415	22,55
Beban Jasa Profesi	2.931.299.510	5.192.830.300	(77,15)
Pengembalian Beban Jasa Profesi	(930.000)	0	100,00
Beban Jasa Lainnya	24.018.062.929	14.049.898.724	41,50
Pengembalian Beban Jasa Lainnya	0	(476.000)	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	96.535.442	3.175.000	96,71
Jumlah	76.081.010.386	107.602.240.030	(41,43)

**Tabel 98. Selisih Beban Barang dan Jasa pada LO dan LRA
Per 31 Desember 2024**

Uraian Beban Barang dan Jasa	LO	LRA	Selisih (Rp)
Beban Keperluan Perkantoran	10.990.775.723	10.990.775.723	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	500.000	500.000	0
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	(44.818.800)	(44.818.800)	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	5.278.157.000	5.216.157.000	62.000.000
Beban Barang Operasional Lainnya	469.124.851	469.124.851	0
Pengembalian Beban Bahan	(63.750)	(63.750)	0
Beban Bahan	20.717.781.355	20.717.781.355	0
Beban Honor Output Kegiatan	3.739.198.320	3.794.198.320	55.000.000
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(35.890.000)	(35.890.000)	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.236.030.599	2.236.030.599	0
Beban Langganan Listrik	1.715.046.677	1.731.438.007	16.391.330
Beban Langganan Telepon	238.129.355	239.247.617	1.118.262
Beban Jasa Pos dan Giro	118.776.106	118.776.106	0
Pengembalian Beban Sewa	(198.000)	(198.000)	0
Beban Sewa	3.613.493.069	3.613.493.069	0

Uraian Beban Barang dan Jasa	LO	LRA	Selisih (Rp)
Beban Jasa Profesi	2.931.299.510	2.931.299.510	0
Pengembalian Beban Jasa Profesi	(930.000)	(930.000)	0
Beban Jasa Lainnya	24.018.062.929	5.088.759.759	18.929.303.170
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	96.535.442	0	96.535.442
Jumlah	76.081.010.386	57.065.681.366	19.015.329.020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Selisih beban honor operasional satuan kerja sebesar Rp62,000,000.00 terdapat pada satuan kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi (018.04.109005DK). Selisih tersebut disebabkan adanya koreksi SPM dari akun Belanja Honor Operasional Satuan Kerja ke akun Belanja Honor Output Kegiatan.
2. Selisih beban honor output kegiatan sebesar Rp55,000,000.00 terdapat pada satuan kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi (018.04.109005DK) sebesar Rp62,000,000.00 dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp7,000,000. Pada satuan kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi (018.04.109005DK) selisih tersebut disebabkan adanya koreksi SPM dari akun Belanja Honor Operasional Satuan Kerja ke akun Belanja Honor Output Kegiatan.
3. Selisih beban langganan Listrik sebesar Rp16,391,330.00 terdapat pada satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) yang merupakan selisih nilai akrual atas pencatatan beban langganan listrik.
4. Selisih beban langganan Telepon sebesar Rp1,118,262.00 terdapat pada satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) yang merupakan selisih nilai akrual atas pencatatan beban langganan telepon.
5. Selisih belanja jasa lainnya sebesar Rp18,929,303,170.00 berasal dari Pengesahan Hibah Luar Negeri yang terdapat pada satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) terdiri dari proyek hibah berikut :
 - a. *The Public - Private - Partnership Project For The Improvement Of The Agriculture Product Marketing And Distribution System (Phase II)* dari JICA sebesar Rp13.200.000.000,00
 - b. *Technical Support To Promote Policy Coherence For Safe, Reliable And Resilient Urban Food Systems In Post-Covid Environment* dari FAO sebesar Rp1.652.917.520,00

- c. *Technical Support On Exploring Bottlenecks And Pay-Offs Along The Value Chain In Reducing Food Loss And Waste In Perishable Commodities* dari FAO sebesar Rp1.340.525.645,00
- d. *Agriculture Promotion Through Agritourism Utilizing The Knowledge Of Roadside Stations Michi No Eki* dari JICA sebesar Rp2.735.860.005,00
6. Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin berasal dari pencatatan aset ekstrakomtabel pada modul aset tetap sebesar Rp96,535,442.00. Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin tersebut berasal dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin. Transaksi beban ini terdapat pada satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP).

D.7 BEBAN PEMELIHARAAN

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Saldo Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3,583,400,811.00 dan Rp3,298,674,674.00

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 99. Perbandingan Beban Pemeliharaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Beban Pemeliharaan	31-Dec-24	31-Dec-23	% Naik/ (Turun)
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(6.490.800)	0	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.945.576.484	1.169.567.730	39,89
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.612.807.497	1.943.202.881	(20,49)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	31.107.630	157.562.838	(406,51)
Beban Persediaan suku cadang	0	28.341.225	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	400.000	0	100,00
Jumlah	3.583.400.811	3.298.674.674	7,95

D.8 BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Saldo Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp85,550,650,259.00 dan Rp123,569,233,657.00 Rincian

Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 100. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Beban Perjalanan Dinas	31-Dec-24	31-Dec-23	% Naik/ (Turun)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	46.184.446.968,	72.563.807.756	(57,12)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	(18.166.719)	(2.397.369)	86,80
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.918.728.494	5.705.629.920	(45,60)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	(1.334.000)	0	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23.483.906.084	10.589.401.130	54,91
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(150.000)	0	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.276.881.577	32.342.749.441	(186,81)
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	706.337.855	2.370.042.779	(235,54)
Jumlah	85.550.650.259	123.569.233.657	(44,44)

D.9 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan uang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp196,711,640,663.00 dan Rp643,777,418,621.00.-

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat (bantuan pemerintah) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 101. Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	31-Dec-24	31-Dec-23	% Naik/ (Turun)
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	9.959.697.000	2.327.280	99,98
Pengembalian Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan	(54.800.000)	(2.327.280)	95,75
Pengembalian Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan	(150.000)	(907.330)	(504,89)
Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	41.672.726.000	45.299.464.540	(8,70)
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	15.075.500.000	86.847.512.800	(476,08)
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan	1.141.813.650	14.393.290.691	(1.160,56)

Uraian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	31-Dec-24	31-Dec-23	% Naik/ (Turun)
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau	14.499.000.404	192.968.186.777	(1.230,91)
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau	22.386.918.050	59.874.674.671	(167,45)
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada	112.497.000	5.741.848.589	(5.004,00)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	91.918.438.559	238.653.347.883	(159,64)
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	0	31.925.000	0,00
Pengembalian Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	0	(31.925.000)	0,00
Jumlah	196.711.640.663	643.777.418.621	(227,27)

Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai kebijakan akuntansi persediaan untuk menyajikan transaksi persediaan yang berasal dari realisasi Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses, antara lain penyajian nilai persediaan produksi (perbanyak) benih/bibit tanaman maupun POPT.

Penyajian saldo benih/bibit tanaman yang masih dalam proses produksi (perbanyak) disajikan sebagai saldo Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses dan belum menimbulkan beban atas transaksi tersebut. Sedangkan bagi benih/bibit tanaman hasil proses produksi (perbanyak) yang sudah siap salur direklasifikasi ke akun Hewan dan Tanaman Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda. Sehingga, transaksi penyaluran benih/bibit tanaman ke penerima bantuan menimbulkan beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dalam hal ini Beban Hewan dan Tanaman Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (593123).

Untuk bahan – bahan produksi POPT dalam proses produksi (perbanyak) disajikan sebagai saldo Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses dan belum menimbulkan beban atas transaksi tersebut. Sedangkan bagi POPT yang sudah jadi dan siap salur direklasifikasi ke akun Barang Persediaan Lainnya untuk Masyarakat / Pemda. Sehingga, transaksi penyaluran POPT ke penerima bantuan menimbulkan beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dalam hal ini Beban Barang Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (593128).

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat yang tersaji pada Laporan Operasional Per 31 Desember 2024 merupakan beban yang berasal dari saldo awal benih yang telah disalurkan, POPT yang telah disalurkan ke penerima bantuan, serta realisasi belanja 526xxx TA 2024 yang telah didukung dengan Berita Acara Serah Terima antara Eselon I dan SKPD.

D.10 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9,553,483,964.00 dan Rp10,279,703,610.00. Jika dibandingkan, terdapat penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebagai dampak koreksi atas penilaian kembali Barang Milik Negara, tidak terkait dengan terhadap penanganan pandemi COVID 19.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut.

**Tabel 102. Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	31-Dec-24	31-Dec-23	% Naik/ (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.315.099.574	5.914.776.822	(11,28)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.385.573.236	3.295.386.138	2,66
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	11.539.846	23.079.693	(100,00)
Beban Penyusutan Irigasi	67.972.100	77.169.882	(13,53)
Beban Penyusutan Jaringan	79.733.168	107.464.067	(34,78)
Beban Penyusutan Properti Investasi	50.799.516	0	100,00
Beban Amortisasi Software	579.552.572	797.304.971	(37,57)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	63.213.952	64.522.037	(2,07)
Jumlah	9.553.483.964	10.279.703.610	(7,60)

Perbandingan perubahan saldo Penyusutan dan Amortisasi di Neraca dengan nilai Beban Penyusutan di LO beserta penjelasan selisihnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 103. Perbandingan perubahan saldo Penyusutan dan Amortisasi di
Neraca dengan nilai Beban Penyusutan di LO**

Uraian	Laporan Operasional	Neraca	Selisih
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.315.099.574	5.315.099.574	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.385.573.236	3.385.573.236	0
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	11.539.846	11.539.846	0
Beban Penyusutan Irigasi	67.972.100	67.972.100	0
Beban Penyusutan Jaringan	79.733.168	79.733.168	0
Beban Penyusutan Properti Investasi	50.799.516	50.799.516	0

Uraian	Laporan Operasional	Neraca	Selisih
Beban Amortisasi Software	579.552.572	579.552.572	0
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	63.213.952	63.213.952	0
Jumlah	9.553.483.964	9.553.483.964	0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp31,593,643.00 dan Rp-217,166,327.00

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 104. Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	31-Dec-24	31-Dec-23	% Naik/ (Turun)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	(5.505.391)	(31.219)	99,43
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang –	(3.000.000)	(4.529.375)	(50,98)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang –	40.099.034	(212.605.733)	630,20
Jumlah	31.593.643	(217.166.327)	787,37

D.12 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 105. Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(3.983.368.906)	(4.531.699.058)
Pendapatan Pelepasan Aset	85.835.999	881.008.805
Beban Pelepasan Aset	4.069.204.905	5.412.707.863

D.13 Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar periode sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp-4,531,699,058.00. Surplus sebesar Rp548,330,152.00. atau 12,10 persen dari 31 Desember Tahun 2023 yaitu sebesar Rp-3,983,368,906.00. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp881,008,805.00 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp5,412,707,863.00

D.14 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar selama periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp881,008,805.00 Beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp795.172.806.00 atau 90,26 persen dibanding Tahun 2023 sebesar Rp85,835,999. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar terdapat pada satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) yang merupakan berasal dari realisasi pendapatan atas penjualan barang milik negara.

Rincian Surplus/Defisit Pelepasan Aset NonLancar Tahun 2024 disajikan pada table berikut.

Tabel 106. Rincian Surplus/Defisit Pelepasan Aset NonLancar Tahun 2024

Uraian	Nama Barang	Nup	Nopol	Merek	Nilai Perolehan (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pelepasan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Micro Bus	2	B 7051 SPA	Hino Dutro 130 MDL PS	113.187.000	113.187.000	0
	Micro Bus	4	B 7053 SPA	Hino Dutro 130 MDL PS	113.367.000	113.367.000	0
	Sedan	8	B 1904 GQ	Toyota Altis	37.294.000	37.294.000	0
	Jeep	22	B 1074 SQH	Suzuki Grand Vitara JLX	52.427.000	52.427.000	0
	Jeep	17	B 1571 MQ	Suzuki Grand Vitara JLX	59.637.000	59.637.000	0
	Jeep	21	B 1073 SQH	Suzuki Grand Vitara JLX	52.427.000	52.427.000	0
	Jeep	19	B 1075 SQH	Suzuki Grand Vitara JLX	62.434.000	62.434.000	0
	Jeep	26	B 1401 SQH	Mitsubishi Pajero Dakar	79.217.800	79.217.800	0
	Micro Bus	5	B 1570 WQ	Honda Stream	48.485.110	48.485.110	0

Uraian	Nama Barang	Nup	Nopol	Merek	Nilai Perolehan (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
	Micro Bus	6	B 7106 QK	Mitsubishi Colt L300DIS	46.305.000	46.305.000	0
	Micro Bus	7	B 1178 MQ	Honda Stream	47.762.400	47.762.400	0
	Micro Bus	22	B 1896 FQ	Toyota Avanza	57.111.150	57.111.150	0
	Micro Bus	24	B 1854 FQ	Toyota Avanza	53.685.150	53.685.150	0
	Sepeda Motor	101	B 3386 SQB	Honda Tiger SHL	7.180.610	7.180.610	0
	Sepeda Motor	109	B 3435 SQB	Honda Tiger SHL	7.692.610	7.692.610	0
	Sepeda Motor	116	B 3389 SQB	Honda Mega Pro 150 W	4.189.525	4.189.525	0
	Inventaris Kantor	-	-	Barang Inventaris Kantor	38.606.450	38.606.450	0
					881.008.805	881.008.805	0

D.15 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya), karena Satuan Kerja melakukan pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan Aset tersebut dapat berupa penghapusan, barang hilang dan barang rusak berat yang diusulkan dihapus.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar selama periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5,412,707,863.00. Beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp1,343,502,958.00 atau 24,82 persen dibanding Tahun 2023 sebesar Rp4,069,204,905.00

Pada satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura, Beban Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari akun Beban Pelepasan Aset yang terbentuk dari selisih nilai aset tetap dan akumulasi penyusutan atas aset tetap tersebut pada saat pencatatan transaksi pemindahtanganan maupun penghapusan. Adapun rincian satuan kerja dengan saldo Beban Pelepasan Aset Non Lancar adalah sebagai berikut :

**Tabel 107. Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Per 31 Desember 2024**

No.	Kode Satker	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	018.04.019031	Dinas Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	55,941,982
2	018.04.029027	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	457,668,083
3	018.04.049025	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Diy	36,730,000
4	018.04.059000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	3,705,620,801
5	018.04.059056	Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	33,333,632
6	018.04.069077	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	112,390,091
7	018.04.099033	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	115,635,620
8	018.04.109005	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi	95,208,006
9	018.04.169025	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	17,482,500
10	018.04.169113	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	71,131,944
11	018.04.179021	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	9,631,000
12	018.04.189016	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	35,232,850
13	018.04.199026	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	85,600,000
14	018.04.209065	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	65,406,000
15	018.04.229027	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	14,794,500
16	018.04.249030	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	40,811,000
17	018.04.309032	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	40,849,533
18	018.04.329026	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	2,280,000
19	018.04.339156	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	66,330,000
20	018.04.340056	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat	16,562,600
21	018.04.625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	334,067,721
Jumlah			5,412,707,863

D.16 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1,045,721,867.00. Nilai tersebut naik sebesar Rp433,403,105.00 atau 41,45 persen dibanding 31 Desember Tahun 2023 yaitu sebesar Rp612,318,762.00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2024 tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1,319,639,173.00 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp273,917,306.00.

Rincian Defisit dari Kegiatan NonOperasional Lainnya Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 108. Rincian Defisit dari Kegiatan NonOperasional Lainnya Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan dari Kegiatan NonOperasional Lainnya				
1	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	52.533.009	19.194.500	33.338.509
2	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	-	19.285.000	(19.285.000)
3	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	-	46.806.754	(46.806.754)
4	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	36.391.050	7.555.000	28.836.050
5	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.094.764.508	490.112.513	604.651.995
6	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	135.945.500	89.625.500	46.320.000
7	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	5.106	207.862.500	(207.857.394)
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan NonOperasional Lainnya		1.319.639.173	880.441.767	439.197.406
Beban dari Kegiatan NonOperasional Lainnya				-
1	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	17.624.806	110.925.500	(93.300.694)
2	Beban Persediaan Rusak/Usang	256.292.500	157.197.505	99.094.995
Jumlah Beban dari Kegiatan NonOperasional Lainnya		273.917.306	268.123.005	5.794.301
Defisit dari Kegiatan NonOperasional Lainnya		1.045.721.867	612.318.762	433.403.105

D.17 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1,319,639,173.00. Nilai tersebut naik sebesar Rp439,197,406.00 atau 33,28 persen dibanding 31 Desember Tahun 2023 sebesar

Rp880,441,767.00. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 109. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	31-Dec-24	31-Dec-23	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Non Bedahara	0	19.194.500	0,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	52.533.009	46.806.754	10,90
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	19.285.000	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	36.391.050	7.555.000	79,24
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.094.764.508	490.112.513	55,23
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	135.945.500	89.625.500	34,07
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	5.106	207.862.500	(4.070.845,95)
Jumlah	1.319.639.173	880.441.767	33,28

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang tersaji pada Laporan Operasional berbeda dengan nilai yang tersaji pada Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 110. Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional LO dan LRA
Per 31 Desember 2024**

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	LO	LRA	Selisih
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	3.000.000	
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Terhadap Pihak ke Tiga	52.533.009	130.716.179	78.183.170
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	36.391.050	36.391.050	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.094.764.508	1.112.722.180	17.957.672
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	135.945.500	0	135.945.500
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	5.106	0	5.106
Jumlah	1.319.639.173	1.282.829.409	36.809.764

Terdapat Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional LO dan LRA Per 31 Desember 2024 senilai Rp36,809,764.00 dengan rincian sebagai berikut :

Selisih Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai senilai Rp3,000,000.00 merupakan penyelesaian piutang TP/TGR, selisih Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak ke Tiga senilai Rp78,183,170.00 berasal dari penyelesaian Piutang kepada pihak ketiga, selisih

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp17,957,842.00 yaitu berasal dari penyelesaian hasil pemeriksaan BPK atas Kas Lainnya setara kas TA 2023.

Pendapatan Perolehan Aset Lainnya berasal dari pencatatan persediaan pada menu perolehan aset lainnya yang terdapat pada satuan kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat (018.04.029027DK) sebesar Rp127,793,000.00, serta Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur (018.04.169025DK) sebesar Rp8,152,500.00.

D.18 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp273,917,306.00. Beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp5,794,301.00. atau 2,12 persen dibandingkan pada periode yang sama 31 Desember Tahun 2023 yaitu sebesar Rp268,123,005.00 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada periode yang berakhir pada 30 September 2024 terdiri dari:

Tabel 111. Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Akun	Uraian	Jumlah
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	17.624.806
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	256.292.500
Jumlah		273.917.306

Pada Laporan Keuangan Semester II TA 2024 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan yang disajikan sebesar Rp17,624,806.00 terdapat pada 4 satker yaitu Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (019031DK), Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (069077DK), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi (199026DK), Direktorat Jenderal Hortikultura (625875KP).

Beban Persediaan Rusak/Usang yang disajikan sebesar Rp256,292,500.00 yaitu seluruhnya berupa benih yang tersebar pada 6 satker yaitu Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat (029027DK) berupa benih Mangga sebanyak 230 batang sebesar Rp1,725,000.00, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau (099033DK) berupa benih Kelengkeng dan Durian sebanyak 605 batang sebesar Rp3,254,011.00, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung (129000DK) berupa benih Alpukat sebanyak 5,059 batang sebesar Rp53,010,415.00, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (139030DK) berupa benih Durian dan Jeruk

sebanyak 10,005 batang sebesar Rp 88,006,074.00, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara (179021DK) berupa benih Durian, Mangga dan Jeruk sebanyak 2,750 batang sebesar Rp105,941,000.00 dan Dinas Pertanian Provinsi Maluku (219000DK) benih mangga sebanyak 400 batang sebesar Rp4,356,000.00.

D.19 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional periode sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 112. Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk Periode Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	31-Dec-24	31-Dec-23	% Naik/ (Turun)
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR	(4.531.699.058)	(3.983.368.906)	12,10
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	881.008.805	85.835.999	90,26
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	5.412.707.863	4.069.204.905	24,82
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	1.045.721.867	612.318.762	41,45
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.319.639.173	880.441.767	33,28
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	273.917.306	268.123.005	2,12
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(3.485.977.191)	(3.371.050.144)	3,30

D.20 SURPLUS/DEFISIT - LO

Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 mengalami defisit masing-masing sebesar (Rp402,372,830,776.00) dan (Rp922,148,186,53500). Nilai Defisit LO Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp519,775,355,759,00) atau 129,18% apabila dibandingkan dengan Defisit Tahun 2023.

Perhitungan nilai Surplus/Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada table berikut.

Tabel 113. Perhitungan nilai Surplus/Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian				Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
Surplus (Defisit)	dari	Kegiatan		-398.886.853.585	-918.777.136.391	519.890.282.806
Operasional						
Surplus (Defisit)	dari	Kegiatan		-3.485.977.191	-3.371.050.144	-114.927.047
NonOperasional						
Surplus (Defisit)	Sebelum	Pos Luar		-402.372.830.776	-922.148.186.535	519.775.355.759
Biasa						
Pos Luar Biasa				0	0	0
Surplus/Defisit - LO				-402.372.830.776	-922.148.186.535	519.775.355.759

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Saldo ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp442,494,999,615.00 dan Rp484,148,170,978.00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Saldo Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah sebesar Rp-402,372,830,776.00 dan Rp-922,148,186,535.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Tidak terdapat perbedaan angka pada saldo defisit Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

E.3 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Saldo Koreksi Nilai Persediaan untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-2.960.427.677.00 dan Rp456,811,089.00. Saldo Koreksi Nilai Persediaan berasal dari selisih nilai hasil koreksi barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses. Adapun rincian satuan kerja dengan saldo koreksi nilai persediaan Per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

**Tabel 114. Rincian Saldo Koreksi Nilai Persediaan
Per 31 Desember 2024**

Kode	Nama Satker	Nilai
018.04.019031	Dinas Kelautan Dan Pertanian Provinsi Dki Jakarta	(399)
018.04.059000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	(1.680)
018.04.069077	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	12.000.000
018.04.079025	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	2.400
018.04.099033	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	1.208.938
018.04.139030	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	(6.220)
018.04.189016	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	3.731.000
018.04.199026	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	7.500.000
018.04.149000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	11.344.320
018.04.625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(2.996.206.036)
Jumlah		(2.960.427.677)

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 yang disajikan sebesar (Rp2,960,427,677) terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp35,784,258.00 dan koreksi kurang sebesar (Rp2,996,206,677.00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 115. Perbandingan Koreksi Nilai Persediaan Per Eselon I periode yang berakhir 31 Desember 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	Eselon 1	Nilai (Rp)
MUTASI TAMBAH		
Selisih nilai hasil koreksi barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	Ditjen Horti	35.786.658
TOTAL MUTASI TAMBAH		35.786.658
MUTASI KURANG		
Selisih nilai hasil koreksi barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	Ditjen Horti	(8.299)
Koreksi nilai persediaan atas transaksi tunda bayar 2024	Ditjen Horti	(2.996.206.036)
TOTAL MUTASI KURANG		-2.996.214.335
TOTAL		-2.960.427.677

E.4 KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

Saldo Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00

E.5 KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp95,928,775.00 dan Rp-224,043,750.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Pada Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024, saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi terdapat pada satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) sebesar Rp95,928,775.00 yang berasal dari nilai buku aset tetap berupa sumur dengan pompa (bangunan pengambilan irigasi) atas transaksi pencatatan barang yang akan dihapuskan

Tabel 116. Perbandingan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Per Eselon I periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 (dalam Rupiah)

Uraian	Eselon 1	Nilai (Rp)
MUTASI TAMBAH		
	Ditjen Horti	0
TOTAL MUATASI TAMBAH		0
MUTASI KURANG		
Jalan , Irigasi dan Jaingan	Ditjen Horti	95.928.775
TOTAL MUTASI KURANG		95.928.775
TOTAL		95.928.775

E.6 LAIN - LAIN

Saldo pos Lain – Lain pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing - masing sebesar Rp-390,525,533.00 dan Rp-10,890,442).00.

Pos Lain – lain berasal dari pencatatan jurnal koreksi lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 117. Rincian Koreksi Lainnya Per 31 Desember 2024

Kode	Nama Satker	Nilai	Keterangan
018.04.069077	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	42.966.200	Koreksi Pencatatan nilai benih
018.04.069133	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	(10.287.685)	Koreksi Pencatatan nilai penyisihan piutang yang terbentuk dari transaksi transfer keluar yang tersaji sebagai saldo tidak normal
018.04.119130	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera	(25.000)	Koreksi Pencatatan nilai penyisihan piutang yang terbentuk dari transaksi transfer keluar yang tersaji sebagai saldo tidak normal
018.04.199026	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	35.000.000	Koreksi hasil stock opname persediaan benih
018.04.209108	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	(123.132)	Koreksi Pencatatan nilai penyisihan piutang yang terbentuk dari transaksi transfer keluar yang tersaji sebagai saldo tidak normal
018.04.249030	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	7.728.250	Koreksi Pencatatan nilai benih
018.04.269000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	(16.129.793)	Koreksi Pencatatan nilai penyisihan piutang yang terbentuk dari transaksi transfer keluar yang tersaji sebagai saldo tidak normal
018.04.289034	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	0	
018.04.299381	Dinas Pertanian Provinsi Banten	(26.371.250)	Koreksi Pencatatan nilai penyisihan piutang yang terbentuk dari transaksi

Kode	Nama Satker	Nilai	Keterangan
018.04.625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(423.283.123)	transfer keluar yang tersaji sebagai saldo tidak normal a. Koreksi atas setoran kerugian negara 2023 senilai Rp1,000,000.00 b. Koreksi Penyisihan piutang sebesar Rp10,631.00 c. Koreksi pencatatan kekurangan nilai RPATA yang terbentuk menjadi utang yang belum diterima tagihannya sebesar Rp282,831,292.00 d. Koreksi pencatatan pengakuan pendapatan sewa bangunan sebesar Rp139,589,332.00
Total		(390.525.533)	

Saldo Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar (Rp390,525,533.00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 118. Penjelasan Koreksi Lain-lain
periode yang berakhir 31 Desember 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	Eselon 1	Nilai (Rp)
MUTASI TAMBAH		
Koreksi Pencatatan nilai benih	Ditjen Horti	32.678.515
Koreksi hasil stock opname persediaan benih	Ditjen Horti	35.000.000
Koreksi Pencatatan nilai benih	Ditjen Horti	7.728.250
TOTAL MUTASI TAMBAH		75.406.765
MUTASI KURANG		
Koreksi Pencatatan nilai penyisihan piutang yang terbentuk dari transaksi transfer keluar yang tersaji sebagai saldo tidak normal	Ditjen Horti	(16.129.793)
Koreksi Pencatatan nilai penyisihan piutang yang terbentuk dari transaksi transfer keluar yang tersaji sebagai saldo tidak normal	Ditjen Horti	(26.371.250)
Koreksi atas setoran kerugian negara 2023	Ditjen Horti	(1.000.000)
Koreksi Penyisihan piutang	Ditjen Horti	(10.631)
Koreksi pencatatan kekurangan nilai RPATA yang terbentuk menjadi utang yang belum diterima tagihannya	Ditjen Horti	(282.831.292)
Koreksi pencatatan pengakuan pendapatan sewa bangunan	Ditjen Horti	(139.589.332)
TOTAL MUTASI KURANG		-465.932.298
TOTAL		-390.525.533

E.7 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Saldo Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp557,574,944,060.00 dan Rp880,273,138,275.00 Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 119. Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Akun	Uraian	2024	2023
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	382.133.111.712	882.455.520.310
313121	Diterima dari Entitas Lain	(2.664.099.977)	(2.182.382.035)
313211	Transfer Keluar	(11.070.772.516)	0
313221	Transfer Masuk	168.762.017.671	0
391131	Pengesahan Hibah Langsung	20.414.687.170	0
JUMLAH		557.574.944.060	880.273.138.275

E.7.1 DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN/DITERIMA DARI ENTITAS LAIN

Ditagihkan ke Entitas Lain/Diterima dari Entitas Lain (DKEL/DDEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai DKEL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp382.133.111.712,00. dan Rp882.455.520.310,00 Nilai DDEL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar (Rp2.664.099.977,00). dan (Rp2.182.382.035,00).

E.7.2 TRANSFER KELUAR/TRANSFER MASUK

Saldo transfer keluar dan transfer masuk yang tercatat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah transfer keluar sebesar (Rp11.070.772.516,00) dan transfer masuk sebesar Rp168.762.017.671,00. Transfer Keluar/Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L. antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN. Transfer Keluar dan Transfer Masuk terdapat selisih (Rp157.691.245.155,00). Selisih tersebut disebabkan adanya :

- Transfer masuk dari satuan kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (018.01.451005) berupa Tanah sebesar Rp154,376,791,000.00; Peralatan dan Mesin sebesar Rp69,765,750.00; Gedung dan Bangunan sebesar Rp4,167,518,805.00; Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp-

69,765,750.00; serta Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp-605,406,250.00.

- b. Transfer keluar ke satuan kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Malang – Jatim (018.10.239654) berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp56,388,000.00; Gedung dan Bangunan sebesar Rp151,770,000.00; serta Jaringan sebesar Rp39,500,400.00.

Tabel 120. Penjelasan Selisih

Uraian	Eselon 1	Nilai (Rp)
TRANSFER KELUAR		
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Ditjen Horti	683.480.642
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Ditjen Horti	(238.445.933)
Gedung dan Bangunan	Ditjen Horti	5.891.602.000
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Ditjen Horti	(1.031.030.350)
Irigasi	Ditjen Horti	573.689.000
Jaringan	Ditjen Horti	11.500.000
Akumulasi Penyusutan Irigasi	Ditjen Horti	(172.135.436)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	Ditjen Horti	(6.676.449)
Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	417.046.648
Gedung dan Bangunan	Ditjen Horti	303.893.560
Irigasi	Ditjen Horti	497.082.115
Jaringan	Ditjen Horti	441.468.035
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	(417.046.648)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Ditjen Horti	(81.511.528)
Akumulasi Penyusutan Irigasi	Ditjen Horti	(129.934.794)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	Ditjen Horti	(188.827.673)
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Ditjen Horti	3.710.050.199
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Ditjen Horti	(2.794.140.650)
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Horti	58.997.600
Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	482.042.000
Gedung dan Bangunan	Ditjen Horti	324.050.000
Aset Tetap Lainnya	Ditjen Horti	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	(482.042.000)

Uraian	Eselon 1	Nilai (Rp)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Ditjen Horti	(112.209.906)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	18.346.414
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(1.834.642)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	102.876.854
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(10.287.685)
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Horti	12.600.000
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Horti	76.500.000
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Horti	50.732.960
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Horti	359.231.520
Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	185.200.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	(185.200.000)
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Ditjen Horti	75.114.700
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Ditjen Horti	(27.792.439)
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Horti	32.799.981
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Horti	130.313.000
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	15.200.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(15.200.000)
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Horti	9.591.834
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Horti	80.250.000
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	33.296.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(166.480)
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Horti	116.975.267
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Horti	11.344.320
Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	195.944.375
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	(195.944.375)

Uraian	Eselon 1	Nilai (Rp)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	5.986.995
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(44.935)
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Horti	94.007.400
Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	289.052.375
Gedung dan Bangunan	Ditjen Horti	74.532.000
Irigasi	Ditjen Horti	193.481.000
Jaringan	Ditjen Horti	6.400.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	(289.052.375)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Ditjen Horti	(11.466.459)
Akumulasi Penyusutan Irigasi	Ditjen Horti	(69.329.563)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	Ditjen Horti	(3.839.997)
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Horti	16.650.000
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Horti	8.600.000
Piutang Lainnya	Ditjen Horti	242.550.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	Ditjen Horti	(24.255.000)
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Horti	34.796.500
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Horti	19.696.000
Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	68.031.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	(68.031.000)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	5.000.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(5.000.000)
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Ditjen Horti	10.419.574
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	Ditjen Horti	(52.098)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	102.473.561
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(14.519.917)
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	Ditjen Horti	64.425.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	Ditjen Horti	(66.425.000)
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Horti	5.597.500

Uraian	Eselon 1	Nilai (Rp)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	4.491.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(24.955)
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Ditjen Horti	23.200.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	Ditjen Horti	(131.000)
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat ? Dalam Proses	Ditjen Horti	93.129.000
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	6.980.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(38.500)
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Ditjen Horti	10.423.124
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	Ditjen Horti	(517.109)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	35.754.113
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(1.315.369)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	771.575.450
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(14.385.542)
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Ditjen Horti	16.279.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	Ditjen Horti	(16.279.000)
Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	26.500.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	(26.500.000)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	43.310.181
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(43.310.181)
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Ditjen Horti	29.875.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	Ditjen Horti	(30.875.000)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	15.500.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(15.500.000)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	26.371.250
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(26.371.250)
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Horti	8.189.307
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	30.985.675
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(30.985.675)

Uraian	Eselon 1	Nilai (Rp)
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Ditjen Horti	21.701.052
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	Ditjen Horti	(21.701.052)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	166.346.753
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(171.346.753)
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Horti	13.395.000
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Ditjen Horti	19.700.500
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ? Piutang PNB	Ditjen Horti	(24.285.500)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	777.286.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(394.786.000)
Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	56.388.000
Gedung dan Bangunan	Ditjen Horti	151.770.000
Jaringan	Ditjen Horti	39.500.400
TOTAL TRANSFER KELUAR		11.070.772.516
TRANSFER MASUK		
Tanah	Ditjen Horti	154.376.791.000
Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	69.765.750
Gedung dan Bangunan	Ditjen Horti	4.167.518.805
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	(69.765.750)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Ditjen Horti	(605.406.250)
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Ditjen Horti	683.480.642
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Ditjen Horti	(238.445.933)
Gedung dan Bangunan	Ditjen Horti	5.891.602.000
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Ditjen Horti	(1.031.030.350)
Irigasi	Ditjen Horti	573.689.000
Jaringan	Ditjen Horti	11.500.000
Akumulasi Penyusutan Irigasi	Ditjen Horti	(172.135.436)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	Ditjen Horti	(6.676.449)
Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	417.046.648
Gedung dan Bangunan	Ditjen Horti	303.893.560
Irigasi	Ditjen Horti	497.082.115
Jaringan	Ditjen Horti	441.468.035

Uraian	Eselon 1	Nilai (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	(417.046.648)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Ditjen Horti	(81.511.528)
Akumulasi Penyusutan Irigasi	Ditjen Horti	(129.934.794)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	Ditjen Horti	(188.827.673)
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Ditjen Horti	3.710.050.199
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Ditjen Horti	(2.794.140.650)
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Horti	58.997.600
Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	482.042.000
Gedung dan Bangunan	Ditjen Horti	324.050.000
Aset Tetap Lainnya	Ditjen Horti	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	(482.042.000)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Ditjen Horti	(112.209.906)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	18.346.414
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(1.834.642)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	102.876.854
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(10.287.685)
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Horti	12.600.000
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Horti	76.500.000
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Horti	50.732.960
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Horti	359.231.520
Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	185.200.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	(185.200.000)
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Ditjen Horti	75.114.700
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Ditjen Horti	(27.792.439)
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Horti	32.799.981
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat ? Dalam Proses	Ditjen Horti	130.313.000
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	15.200.000

Uraian	Eselon 1	Nilai (Rp)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(15.200.000)
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Horti	9.591.834
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Horti	80.250.000
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	33.296.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(166.480)
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Horti	116.975.267
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Horti	11.344.320
Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	195.944.375
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	(195.944.375)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	5.986.995
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(44.935)
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Horti	94.007.400
Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	289.052.375
Gedung dan Bangunan	Ditjen Horti	74.532.000
Irigasi	Ditjen Horti	193.481.000
Jaringan	Ditjen Horti	6.400.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	(289.052.375)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Ditjen Horti	(11.466.459)
Akumulasi Penyusutan Irigasi	Ditjen Horti	(69.329.563)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	Ditjen Horti	(3.839.997)
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Horti	16.650.000
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Horti	8.600.000
Piutang Lainnya	Ditjen Horti	242.550.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ? Piutang Lainnya	Ditjen Horti	(24.255.000)
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Horti	34.796.500
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Horti	19.696.000
Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	68.031.000

Uraian	Eselon 1	Nilai (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	(68.031.000)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	5.000.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(5.000.000)
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Ditjen Horti	10.419.574
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	Ditjen Horti	(52.098)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	102.473.561
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(14.519.917)
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	Ditjen Horti	64.425.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	Ditjen Horti	(66.425.000)
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Horti	5.597.500
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	4.491.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(24.955)
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Ditjen Horti	23.200.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	Ditjen Horti	(131.000)
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Horti	93.129.000
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	6.980.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(38.500)
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Ditjen Horti	10.423.124
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	Ditjen Horti	(517.109)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	35.754.113
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(1.315.369)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	771.575.450
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(14.385.542)
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Ditjen Horti	16.279.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	Ditjen Horti	(16.279.000)
Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	26.500.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Ditjen Horti	(26.500.000)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	43.310.181

Uraian	Eselon 1	Nilai (Rp)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(43.310.181)
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Ditjen Horti	29.875.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	Ditjen Horti	(30.875.000)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	15.500.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(15.500.000)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	26.371.250
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(26.371.250)
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	Ditjen Horti	8.189.307
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	30.985.675
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(30.985.675)
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Ditjen Horti	21.701.052
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	Ditjen Horti	(21.701.052)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	166.346.753
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(171.346.753)
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Ditjen Horti	13.395.000
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Ditjen Horti	19.700.500
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	Ditjen Horti	(24.285.500)
Piutang Jangka Panjang lainnya	Ditjen Horti	777.286.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	Ditjen Horti	(394.786.000)
TRANSFER MASUK		168.762.017.671
SELISIH		-157.691.245.155

E.7.3 PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DAN PENGEMBALIAN HIBAH LANGSUNG

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau

ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp20,414,687,170.00 dan Rp0.00. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penjelasan terkait Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 121. Penjelasan terkait Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)	Pemberi Hibah	Nomor Register	Project
018.04.625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	13.200.000.000	JICA	2G98B91A	The Public Private Partnership Project for the Improvement of the Agricultural Marketing and Distribution System Phase 2
		1.652.917.520	FAO	21N957AA	Technical Support to Promote Policy Coherence for Safe Reliable and Resilient Urban Food System in Post-COVID Environment TCP/RAS/3807
		1.340.525.645	FAO	2493MSCA	Technical Support on Exploring Bottlenecks and Pay-Offs Along the Value Chain in Reducing Food Loss and Waste in Perishable Commodities TCP/INS/3807/C5
		2.735.860.005	JICA	2RT4RZUA	Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations 'Michi no Eki'
		1.485.384.000	JICA	2RT4RZUA	Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations 'Michi no Eki'
TOTAL		20.414.687.170			

E.8 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp594,442,088,464.00 dan Rp442,494,999,615.00.

Perhitungan Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada table berikut.

Tabel 122. Perhitungan Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
EKUITAS AWAL	442.494.999.615	484.148.170.978	(41.653.171.363)	(8,6)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(402.372.830.776)	(922.148.186.535)	519.775.355.759	(56,37)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	-3.255.024.435	221.876.897	-3.476.901.332	1.567,04
Koreksi Nilai Persediaan	(2.960.427.677)	456.811.089	(3.417.238.766)	348,06
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	95.928.775	(224.043.750)	319.972.525	142,82
Lain-Lain	(390.525.533)	(10.890.442)	(379.635.091)	3.485,95
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	557,574,944,060	880.273.138.275	(322,698,194,215)	(36,66)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	151,947,088,849	(41.653.171.363)	193,600,260,212	464,79
EKUITAS AKHIR	594,442,088,464	442.494.999.615	151,947,088,849	34,534

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak Terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1. LIKUIDASI SATUAN KERJA DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2025 Nomor : DS:1757-6079-0670-3090 tanggal 2 Desember 2024, pada tahun anggaran 2025 tidak terdapat alokasi anggaran belanja pada satuan kerja dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, sehingga satuan kerja yang masih terdapat saldo asset lancar, asset tetap, piutang jangka panjang, serta aset lainnya dilakukan proses likuidasi pada Tahun Anggaran 2024.

Berikut satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura bersaldo yang dilakukan proses likuidasi pada TA 2024 :

**Tabel 123. Satuan Kerja Likuidasi
Per 31 Desember 2024**

No.	KODE SATKER	NAMA SATKER	TOTAL PIUTANG	TOTAL PERSEDIAAN	TOTAL ASET TETAP	TOTAL ASET LAIN - LAIN
1	019031	DK Dinas Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta		-	-	683,480,642
2	039012	DK Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah		-	5,891,602,000	-
3	049025	DK Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Diy	-	-	585,189,000	-
4	069077	DK Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	18,346,414	58,997,600	806,092,000	-
5	069133	TP Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	102,876,854	-	-	-
6	079025	DK Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	-	89,100,000	-	-
7	089009	DK Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	-	409,964,480	185,200,000	75,114,700
8	099033	DK Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	-	163,112,981	-	-
9	099315	TP Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	15,200,000	-	-	-
10	109005	DK Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi	-	9,591,834	-	-
11	119000	DK Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	-	80,250,000	-	-
12	119130	TP Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	33,296,000	-	-	-
13	139030	DK Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	-	116,975,267	-	-
14	149000	DK Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	-	11,344,320	-	-

No.	KODE SATKER	NAMA SATKER	TOTAL PIUTANG	TOTAL PERSEDIAAN	TOTAL ASET TETAP	TOTAL ASET LAIN - LAIN
15	169113	DK Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur		-	195,944,375	-
16	179104	TP Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	5,986,995	-	-	-
17	189016	DK Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	-	94,007,400	563,465,375	-
18	199026	DK Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	-	25,250,000	-	-
19	199126	TP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	242,550,000	-	-	-
20	209065	DK Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	5,000,000	54,492,500	68,031,000	-
21	209108	TP Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	112,893,135	-	-	-
22	219000	DK Dinas Pertanian Provinsi Maluku	64,425,000	-	-	-
23	239009	DK Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	4,491,000	5,597,500	-	-
24	239127	TP Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	23,200,000	-	-	-
25	249030	DK Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	6,980,000	93,129,000	-	-
26	249159	TP Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	46,177,237	-	-	-
27	269000	DK Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	771,575,450	-	-	-
28	289034	DK Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	59,589,181	-	26,500,000	-
29	299005	DK Dinas Pertanian Provinsi Banten	45,375,000	-	-	-
30	299381	TP Dinas Pertanian Provinsi Banten	26,371,250	-	-	-
31	309032	DK Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	8,189,307	-	-
32	319002	DK Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	30,985,675	-	-	-
33	319089	TP Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	188,047,805	-	-	-
34	329026	DK Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	-	13,395,000	-	-
35	339156	DK Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	796,986,500	-	-	-
Jumlah			2,600,353,496	1,233,397,189	2,430,421,750	75,114,700

Berdasarkan tabel di atas, piutang, persediaan, serta barang milik negara seluruhnya telah dilakukan transfer ke satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP). Detail akun yang dilakukan transaksi transfer tersaji dalam penjelasan Monitoring Transaksi Transfer pada point

Adapun satuan kerja yang proses likuidasinya belum selesai di TA 2024 yaitu satuan kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (0218.04.059000DK) serta Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara (018.04.280151TP).

Pada satuan kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (0218.04.059000DK) telah dilakukan transfer keluar ke satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2024 berupa Aset tetap sebesar Rp1,659,490,358.00 dan Aset Lain - Lain sebesar Rp3,710,050,199.00. Namun pada Laporan Neraca per 31 Desember 2024, masih tersaji aset tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp333,641,950.00; Jaringan sebesar Rp60,000,000.00; serta Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebesar Rp226,692,698.00. Atas Barang Milik Negara tersebut, akan dikeluarkan dari Laporan Neraca pada TA 2025 berdasarkan SK Penghapusan yang telah terbit di Januari 2025 sehingga proses likuidasi akan dilakukan pada periode penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2025. Pada satuan kerja Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara (018.04.280151TP) belum dapat dilakukan likuidasi pada TA 2024 karena terdapat transaksi RPATA. Penyelesaian RPATA baru dilakukan oleh satuan kerja pada Februari 2025. Pada Laporan Neraca per 31 Desember 2024, masih tersaji saldo Persediaan dari realisasi belanja dengan mekanisme RPATA sebesar Rp 75,499,000. Persediaan akan dinihilkan pada Februari 2025 sehingga proses likuidasi akan dilakukan pada periode penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2025.

F.2.2.TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Monitoring daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut atas temuan BPK Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 124. Progress Tindak Lanjut LHP BPK atas LK TA 2023
Per 31 Desember 2024**

No	Permasalahan	Rekomendasi/Strategi	Nilai Temuan Horti	Tindak lanjut
2.2b	Pelaksanaan Belanja Barang Selain MAK 526 Tidak Sesuai Ketentuan Pemborosan keuangan negara sebesar Rp1.853.848.700,00 pada : 3) Pembelian kaos yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional kantor pada Ditjen Hortikultura sebesar Rp51.984.000,00;	b. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Dirjen PSP, Dirjen TP, Kepala BPPSDMP, Dirjen Hortikultura, Dirjen PKH, Dirjen Perkebunan, serta Kepala BSIP untuk meningkatkan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi Belanja Barang Selain MAK 526 serta menginstruksikan: 1. PPK di lingkungan masing-masing eselon I yang terkait untuk memverifikasi dokumen pertanggungjawaban dan perhitungan rampung serta mengarsip dokumen pertanggungjawaban belanja mengikuti peraturan yang berlaku serta mencegah pemborosan keuangan negara di masa yang akan datang agar tidak terulang kembali kejadian pemborosan sebesar Rp1.853.848.700,00; 2. Bendahara Pengeluaran supaya menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang sesuai ketentuan yang berlaku, serta tidak merealisasikan pembayaran belanja barang yang tidak sesuai ketentuan 3. Pelaksana kegiatan mempedomani ketentuan yang berlaku mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan c. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian untuk mereviu hasil pengujian PPK atas bukti pertanggungjawaban belanja barang selain MAK 526 yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp232.936.333.323,00 (Rp226.614.431.677,00 + Rp406.605.000,00 + Rp2.862.159.486,00 + Rp3.053.137.160,00), menarik dan menyetorkan ke kas negara apabila pertanggungjawaban riil tidak sampaikan, serta menyampaikan hasil reviu tersebut kepada BPK	51,984,000.00	Surat instruksi Pejabat Eselon I kepada PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pelaksana Kegiatan Berita Acara Hasil Verifikasi Pertanggung jawaban dokumen non 526
2.2c	1) Realisasi Belanja Barang selain MAK 526 tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp226.614.431.677,00 (Ditjen PSP, BPPSDMP, Ditjen Horti, Ditjen Perkebunan, BSIP, BPSIP Sulsel)	1) Realisasi Belanja Barang selain MAK 526 yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp232.936.333.323,00 (Rp226.614.431.677,00 + Rp406.605.000,00 + Rp2.862.159.486,00 + Rp3.053.137.160,00), menarik dan menyetorkan ke kas negara apabila pertanggungjawaban riil tidak sampaikan, serta menyampaikan hasil reviu tersebut kepada BPK	371,204,893.00	Telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan Laporan Hasil Reviu Hasil Audit BPK Nomor : R.180/PW.180/G.2/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang menyatakan dokumen pertanggung jawaban telah sesuai

No	Permasalahan	Rekomendasi/Strategi	Nilai Temuan Horti	Tindak lanjut
2.2c	2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang menggunakan mekanisme DPR tidak dapat diyakini keterjadiannya sebesar Rp406.605.000,00	c. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian untuk mereviu hasil pengujian PPK atas bukti pertanggungjawaban belanja barang selain MAK 526 yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp232.936.333.323,00 (Rp226.614.431.677,00 + Rp406.605.000,00 + Rp2.862.159.486,00 + Rp3.053.137.160,00), menarik dan menyetorkan ke kas negara apabila pertanggungjawaban riil tidak sampaikan, serta menyampaikan hasil reviu tersebut kepada BPK	2,730,000.00	Telah disetor ke kas negara dengan rincian : 1. NTPN : E666F48VVEPF0OPH tanggal 03 MEI 2024 senilai Rp2.430.000,- 2. NTPN : EF3CA61QV3U7QP7M tanggal 03 MEI 2024 senilai Rp300.000,- Telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan Laporan Hasil Reviu Hasil Audit BPK Nomor : R.180/PW.180/G.2/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang menyatakan memberikan kesempatan kepada kelompok tani memanfaatkan dana yang masih ada di rekening sesuai RUK dengan batas waktu akhir Desember 2024 sehigga bangunan Smart Farming dapat dimanfaatkan secara optimal
2.4b	Pengendalian Pertanggungjawaban Belanja Barang MAK 526 melalui Aplikasi Pertanggungjawaban Belum Didukung Dokumen dan Verifikasi yang Memadai Serta Belum Dipertanggungjawabkan Secara Lengkap Belanja Barang MAK 526 Tahun 2023 pada Empat Ditjen Belum Didukung Bukti yang Lengkap Sebesar Rp139.655.567.605,00	4) Memerintahkan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan kegiatan reviu pertanggungjawaban bantuan kepada masyarakat dan melakukan kegiatan pemeriksaan atas bantuan kepada masyarakat yang belum lengkap bukti pertanggungjawaban pada Tahun 2023 sebesar Rp139.655.567.605,00 pada empat Ditjen dan sebelum Tahun 2023 pada Ditjen PSP sebesar Rp85.191.731.175,00 (Rp31.662.789.290,00 + Rp53.528.941.885,00), serta menyampaikan hasil reviu tersebut kepada BPK;	511,000,000.00	Setoran ke kas negara dari KT Makmur Beusare sebesar Rp273.000.000,- dengan NTPN : 2451161QV4AO5I5D tanggal 26 September 2024 KT. SUBUR BERKAH REZEKI sudah melampirkan kwitansi belanja senilai 117.176.000 Inspektorat Jenderal sudah melakukan review dokumen pertanggung jawaban tersebut pada Aplikasi BASTBANPEM 2023
2.4c6	Pertanggungjawaban Belanja Barang Belum Didukung Dokumen dan Verifikasi yang Memadai Catatan Reviu oleh Itjen pada Aplikasi BASTBanpem Belum Ditindaklanjuti oleh Ditjen Hortikultura	Memerintahkan Dirjen terkait selaku KPA untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK yang tidak optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak yang menjadi tanggung jawabnya; petugas verifikator pengadaan terkait pada masing-masing Ditjen yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas tagihan	950,000,000.00	Sudah ditindaklanjuti dengan melengkapi kekurangan dokumen pada Aplikasi BASTBANPEM dan status pada Aplikasi BASTBANPEM seluruhnya telah sesuai Surat Instruksi KPA kepada PPK

No	Permasalahan	Rekomendasi/Strategi	Nilai Temuan Horti	Tindak lanjut
		pembayaran kontrak belanja bantuan bentuk barang dan bukti pertanggungjawaban bantuan bentuk uang; serta penyedia pengadaan terkait yang tidak melaksanakan tanggung jawab penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;		
2.5	Kelemahan Pengendalian Pengujian Mutu Pupuk, Bantuan Benih dan Bantuan Saprodi yang Berasal dari Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2. Memerintahkan Dirjen PSP, Dirjen TP dan Dirjen Hortikultura supaya kedepannya meminta PPK melakukan pengujian mutu bantuan pemerintah yang dapat mewakili bantuan secara menyeluruh sebelum dilakukan pembayaran.		Surat Instruksi KPA kepada PPK
2.5a	Kegiatan Bantuan Benih dan Saprodi pada Ditjen Hortikultura Belum Dilengkapi Sertifikasi Benih dan Uji Mutu Saprodi Sebesar Rp7.631.747.000,00	1. Memerintahkan Irjen Kementerian Pertanian supaya melakukan reviu atas bantuan Pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat yang terindikasi tidak terjamin mutunya dan berpotensi tidak memberikan hasil yang optimal bagi penerima bantuan sesuai tujuan pada lingkup Ditjen PSP, Ditjen TP, dan Ditjen Hortikultura; dan	7,631,747,000.00	Telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan Laporan Hasil Reviu Hasil Audit BPK Nomor : R.180/PW.180/G.2/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang menyatakan dokumen pertanggung jawaban telah sesuai
2.7a5b	Pembayaran Ongkos Kirim Pengadaan Alsintan pada Ditjen Hortikultura Sebesar Rp400.107.670,00 Tidak Sesuai Kondisi yang Sebenarnya			
2.7a5b1	Dokumen Pembayaran Belum Dilengkapi dengan Invoice Ongkir Sebesar Rp272.094.070,00	1) Inspektur Jenderal mereviu kebenaran pembayaran ongkir sebesar Rp9.711.727.968,49 dan hasil reviu tersebut disampaikan kepada BPK, yang terdiri dari: a. Ditjen TP sebesar Rp9.311.620.298,49 b. Ditjen Hortikultura sebesar Rp400.107.670,00	272,094,070.00	Telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan Laporan Hasil Reviu Hasil Audit BPK Nomor : R.180/PW.180/G.2/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang menyatakan dokumen pertanggung jawaban telah sesuai
2.7a5b2	Invoice Ongkir Tidak Sesuai Keadaan Sebenarnya Sebesar Rp128.013.600,00	2) Masing-masing KPA menginstruksikan PPK supaya mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran ongkir dan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp2.742.061.568,94 yang terdiri dari: a. Ditjen TP sebesar Rp1.778.381.945,94 (Rp1.407.251.060,09 + Rp371.130.885,85); b. Ditjen PSP sebesar Rp963.679.623,00.	128,013,600.00	Surat Instruksi KPA kepada PPK
3.1a	Pemungutan dan Penyetoran Pajak pada Ditjen Perkebunan Tidak Dicatat pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Tidak	Dirjen PKH akan menginstruksikan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) agar memdomani ketentuan	-	Surat Teguran KPA ke bendahara Pengeluaran dan BPP

No	Permasalahan	Rekomendasi/Strategi	Nilai Temuan Horti	Tindak lanjut
	Dapat Ditelusuri Minimal Sebesar Rp1.321.209.918,00	pengelolaan kas dan perpajakan yang berlaku		
3.3a6	Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Kementerian Pertanian Belum Optimal Terdapat Aset Tetap yang Belum Dilakukan Inventarisasi pada Satker Dekon—TP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (018.04.059000) sebesar Rp679.415.950,00	Inspektur Jenderal dan satuan kerja terkait untuk melakukan penelusuran atas Aset Tetap dan Aset Lainnya pada satker pusat maupun daerah Kementerian Pertanian yang tidak diketahui keberadaannya.	679,415,950.00	Telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan Catatan atas Hasil Reviu atas Tindak Lanjut LHP BPK atas Laporan Keuangan Kementan TA 2023 terkait Penatausahaan Aset Tetap pada Kementan tanggal 30 Agustus 2024 Berita Acara Inventarisasi ada Telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan Catatan atas Hasil Reviu atas Tindak Lanjut LHP BPK atas Laporan Keuangan Kementan TA 2023 terkait Penatausahaan Aset Tetap pada Kementan tanggal 30 Agustus 2024
3.3a8	Terdapat Aset Tetap yang Sudah Terbit Persetujuan Hibah Sebesar Rp6.499.971.179,00 pada Satker Dekon – TP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (018.04.059000), Namun Belum Terdapat Naskah Hibahnya		6,499,971,179.00	Naskah Hibah dan SK Hibah ada. Pada Laporan Keuangan TA 2024 telah dilakukan transaksi hibah keluar berdasarkan SK Hibah. Telah dilakukan identifikasi atas aset properti investasi tanggal 19 Januari 2024
3.4	Kementerian Pertanian Belum Melaporkan Semua Aset Tetap yang Memenuhi Kriteria Properti Investasi dalam Neraca Per 31 Desember 2023	BPK merekomendasikan Menteri Pertanian agar memerintahkan para Kuasa Pengguna Barang pada masing-masing Eselon I, untuk melaksanakan identifikasi, analisis, dan deklarasi BMN yang memenuhi kriteria properti investasi sesuai dengan Petunjuk Teknis Akuntansi 09 Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi	2,153,825,283.00	Telah dilakukan pencatatan pada Laporan Neraca Audited 2023 atas Properti Investasi Ditjen Hortikultura sebesar Rp2.153.825.283,00

F.2.3. MONITORING DAN TO DO LIST

Sampai dengan proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA 2024 terdapat beberapa informasi yang perlu disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain :

1. KETIDAKSESUAIAN AKUN VS KODE BARANG PERSEDIAAN

Ketidaksesuaian akun dan kode barang aset tetap terdapat pada satuan kerja Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara (018.04.209108TP) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 125. Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Persediaan
Per 31 Desember 2024**

No	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Keterangan	Kode Barang	Qty	Harga Satuan	Harga Total
1	209108	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	16-07-2024	526123	Fasilitas Bantuan Prasarana Pascapanen Hortikultura (Bangsal Pascapanen)	1010501002	1	158,550,000	158,550,000
2	209108	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	16-07-2024	526122	Fasilitas Bantuan Sarana Pascapanen Hortikultura	1010501004	1	54,800,000	54,800,000
3	209108	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	17-07-2024	526123	Fasilitas Bantuan Prasarana Pascapanen Hortikultura (Bangsal Pascapanen)	1010501002	1	158,550,000	158,550,000
4	209108	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	17-07-2024	526122	Fasilitas Bantuan Sarana Pascapanen Hortikultura	1010501004	1	54,800,000	54,800,000
5	209108	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	30-07-2024	526123	Fasilitas Bantuan Prasarana Pascapanen Hortikultura (Bangsal Pascapanen)	1010501002	1	158,550,000	158,550,000
6	209108	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	30-07-2024	526122	Fasilitas Bantuan Sarana Pascapanen Hortikultura	1010501002	1	54,800,000	54,800,000
TOTAL									640,050,000

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Satuan kerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara (018.04.209108TP) merealisasikan alokasi belanja bantuan pemerintah dalam bentuk uang dengan total sebesar Rp640,050,000.00 namun dicatat pada modul komitmen Aplikasi SAKTI sebagai barang persediaan. Atas transaksi tersebut, telah dilakukan pendetailan serta koreksi pencatatan di modul Persediaan, kemudian dilakukan perbaikan dengan jurnal manual pada GLP untuk pengakuan beban barang untuk diserahkan / dijual kepada masyarakat dalam bentuk uang.

2. KETIDAKSESUAIAN AKUN VS KODE BARANG ASET TETAP/ATB

Ketidaksesuaian akun dan kode barang aset tetap terdapat pada satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 126. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap
Per 31 Desember 2024**

No	Kode	Nama Satker	Akun	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total
1	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	532111	3070104108	2	500,000	1,000,000
2	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	533111	4010101001	1	400,000	400,000
3	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	532111	3050104001	5	895,642	4,478,210
4	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	532111	3050104005	3	716,442	2,149,326
5	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	532111	3070104108	7	608,922	4,262,454
6	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	532111	3050105010	2	773,786	1,547,572
7	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	532111	3070104108	22	322,202	7,088,444
8	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	532111	3050201002	22	573,082	12,607,804
9	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	532111	3050206036	1	696,371	696,371
10	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	532111	3070104108	12	322,202	3,866,424
11	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	532111	3070104108	12	684,678	8,216,136
12	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	532111	3070104108	22	684,678	15,062,916
13	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	532111	3050104001	4	895,642	3,582,568
14	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	532111	3050206036	1	696,371	696,371
15	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	532111	3070104108	11	322,202	3,544,222
16	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	532111	3050201002	11	573,082	6,303,902

No	Kode	Nama Satker	Akun	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total
17	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	532111	3050104005	6	716,442	4,298,652
18	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	532111	3050105010	2	773,786	1,547,572
19	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	532111	3070104108	8	322,202	2,577,616
20	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	532111	3070104108	8	684,678	5,477,424
21	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	532111	3070104108	11	684,678	7,531,458
TOTAL							96,935,442

Ketidaksesuaian akun merupakan realisasi belanja modal atas aset tetap ekstrakomptabel. Adapun barang – barang tersebut sudah disajikan sebagai aset tetap ekstrakomptabel pada Laporan Barang Milik Negara Per 31 Desember 2024 .

3. MONITORING TRANSFER KELUAR/TRANSFER MASUK SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN 13

Pada TA 2024, terdapat transaksi transfer aset baik antar UAPPA-E1 maupun antar UAKPA. Aset yang ditransfer dalam rangka menunjang tugas dan fungsi satuan kerja penerima, maupun dalam rangka proses likuidasi satuan kerja dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Aset yang dilakukan transaksi transfer berupa aset lancar berupa Piutang PNB dan Persediaan; Aset Tetap; Piutang Jangka Panjang; serta Aset Lain - Lain dengan rincian sebagai berikut :

A. PIUTANG PNB

Transaksi transfer atas aset lancar berupa Piutang PNB terdiri dari Piutang PNB dan Piutang Lainnya dalam rangka proses likuidasi satuan kerja inaktif lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Terdapat 8 satuan kerja dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang melakukan transaksi transfer keluar untuk dibukukan pada Laporan Neraca satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 127. Transfer Piutang PNB
Per 31 Desember 2024

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
1	01804	199126	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	115212	Piutang Lainnya	242,550,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	242,550,000	-
2	01804	199126	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	(24,255,000)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(24,255,000)	-
3	01804	209108	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	10,419,574	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	10,419,574	-
4	01804	209108	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	(52,098)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	-	(52,098)
5	01804	239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	23,200,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	23,200,000	-
6	01804	239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	(131,000)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(131,000)	-
7	01804	249159	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	10,423,124	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	10,423,124	-
8	01804	249159	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	(517,109)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	-	(517,109)
9	01804	289034	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	16,279,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	16,279,000	-
10	01804	289034	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	(16,279,000)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(16,279,000)	-
11	01804	299005	Dinas Pertanian Provinsi Banten	115211	Piutang Penerimaan Negara	29,875,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	29,875,000	-

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
					Bukan Pajak						
12	01804	299005	Dinas Pertanian Provinsi Banten	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	(30,875,000)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(30,875,000)	-
13	01804	319089	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	21,701,052	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	21,701,052	-
14	01804	319089	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	(21,701,052)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(21,701,052)	-
15	01804	339156	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	19,700,500	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	19,700,500	-
16	01804	339156	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	(24,285,500)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(24,285,500)	-

Proses transfer nilai Piutang PNB dilakukan pada periode 12 bersamaan dengan perbaikan Aplikasi SAKTI dan MonSAKTI. Proses transfer masuk nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB dari satuan kerja Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara (018.04.209108TP) dan satuan kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (018.04.249159TP) tidak sempurna. Selisih nilai transfer keluar dan masuk pada Monitoring Transfer Keluar/Transfer Masuk dari Aplikasi Monsakti baru terbentuk setelah dilakukan proses tutup permanen periode 13 (*Unaudited*). Sehingga perbaikan atas transaksi tersebut baru dapat dilakukan pada periode Laporan Keuangan Audited 2024.

B. Persediaan

Transaksi transfer atas aset lancar berupa Persediaan terdiri dari Hewan dan Tanaman Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda serta Barang Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses dalam rangka proses likuidasi satuan kerja inaktif lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Barang persediaan yang dilakukan transfer pencatatannya berupa stock benih yang siap salur dan stock benih

yang masih dalam proses sertifikasi maupun menunggu PTM. Proses Transfer dilakukan pada periode 13 (*Unaudited*). Terdapat 15 satuan kerja dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang melakukan transaksi transfer keluar untuk dibukukan pada Laporan Persediaan dan Laporan Neraca satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 128. Transfer Persediaan
Per 31 Desember 2024**

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
1	01804	069077	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	58,997,600	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	58,997,600	-
2	01804	079025	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	12,600,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	12,600,000	-
3	01804	079025	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	76,500,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	76,500,000	-
4	01804	089009	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	50,732,960	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	50,732,960	-
5	01804	089009	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	359,231,520	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	359,231,520	-
6	01804	099033	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	32,799,981	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	32,799,981	-
7	01804	099033	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	130,313,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	130,313,000	-

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
8	01804	109005	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	9,591,834	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	9,591,834	-
9	01804	119000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	80,250,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	80,250,000	-
10	01804	139030	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	116,975,267	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	116,975,267	-
11	01804	149000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	11,344,320	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	11,344,320	-
12	01804	189016	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	94,007,400	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	94,007,400	-
13	01804	199026	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	16,650,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	16,650,000	-
14	01804	199026	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	8,600,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	8,600,000	-
15	01804	209065	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	34,796,500	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	34,796,500	-
16	01804	209065	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat -	19,696,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	19,696,000	-

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
					Dalam Proses						
17	01804	239009	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	5,597,500	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	5,597,500	-
18	01804	249030	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	93,129,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	93,129,000	-
19	01804	309032	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	8,189,307	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	8,189,307	-
20	01804	329026	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	13,395,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	13,395,000	-

C. ASET TETAP

Transaksi transfer atas aset tetap berupa Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; serta Jalan, Irigasi dan Jaringan; dalam rangka menunjang tugas dan fungsi satuan kerja penerima serta dalam rangka proses likuidasi satuan kerja inaktif lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

- Transaksi transfer aset tetap dalam rangka menunjang tugas dan fungsi satuan kerja penerima dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 129. Transfer Aset Tetap dalam rangka Menunjang Tugas dan Fungsi
31 Desember 2024**

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
1	01801	451005	Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	131111	Tanah	154,376,791,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	154,376,791,000	-
2	01801	451005	Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	132111	Peralatan dan Mesin	69,765,750	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	69,765,750	-

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
3	01801	451005	Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	133111	Gedung dan Bangunan	4,167,518,805	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	4,167,518,805	-
4	01801	451005	Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(69,765,750)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(69,765,750)	-
5	01801	451005	Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(605,406,250)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(605,406,250)	-
6	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	132111	Peralatan dan Mesin	56,388,000	01810	239654	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Malang - Jatim	56,388,000	-
7	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	133111	Gedung dan Bangunan	151,770,000	01810	239654	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Malang - Jatim	151,770,000	-
8	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	134113	Jaringan	39,500,400	01810	239654	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Malang - Jatim	39,500,400	-

- Transaksi transfer aset tetap dalam rangka proses likuidasi satuan kerja dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 130. Transfer Aset Tetap dalam rangka Proses Likuidasi
31 Desember 2024**

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
1	01804	039012	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	133111	Gedung dan Bangunan	5,891,602,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	5,891,602,000	-
2	01804	039012	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,031,030,350)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(1,031,030,350)	-
3	01804	049025	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Diy	134112	Irigasi	573,689,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	573,689,000	-
4	01804	049025	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Diy	134113	Jaringan	11,500,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	11,500,000	-
5	01804	049025	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Diy	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(172,135,436)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(172,135,436)	-
6	01804	049025	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Diy	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(6,676,449)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(6,676,449)	-
7	01804	059000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	132111	Peralatan dan Mesin	417,046,648	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	417,046,648	-

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
8	01804	059000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	133111	Gedung dan Bangunan	303,893,560	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	303,893,560	-
9	01804	059000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	134112	Irigasi	497,082,115	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	497,082,115	-
10	01804	059000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	134113	Jaringan	441,468,035	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	441,468,035	-
11	01804	059000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(417,046,648)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(417,046,648)	-
12	01804	059000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(81,511,528)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(81,511,528)	-
13	01804	059000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(129,934,794)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(129,934,794)	-
14	01804	059000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(188,827,673)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(188,827,673)	-
15	01804	069077	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	132111	Peralatan dan Mesin	482,042,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	482,042,000	-
16	01804	069077	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	133111	Gedung dan Bangunan	324,050,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	324,050,000	-
17	01804	069077	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(482,042,000)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(482,042,000)	-
18	01804	069077	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(112,209,906)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(112,209,906)	-
19	01804	089009	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	132111	Peralatan dan Mesin	185,200,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	185,200,000	-
20	01804	089009	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(185,200,000)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(185,200,000)	-

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
21	01804	169113	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	132111	Peralatan dan Mesin	195,944,375	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	195,944,375	-
22	01804	169113	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(195,944,375)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(195,944,375)	-
23	01804	189016	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	132111	Peralatan dan Mesin	289,052,375	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	289,052,375	-
24	01804	189016	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	133111	Gedung dan Bangunan	74,532,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	74,532,000	-
25	01804	189016	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	134112	Irigasi	193,481,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	193,481,000	-
26	01804	189016	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	134113	Jaringan	6,400,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	6,400,000	-
27	01804	189016	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(289,052,375)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(289,052,375)	-
28	01804	189016	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(11,466,459)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(11,466,459)	-
29	01804	189016	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(69,329,563)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(69,329,563)	-
30	01804	189016	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(3,839,997)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(3,839,997)	-
31	01804	209065	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	132111	Peralatan dan Mesin	68,031,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	68,031,000	-
32	01804	209065	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(68,031,000)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(68,031,000)	-

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
33	01804	289034	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	132111	Peralatan dan Mesin	26,500,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	26,500,000	-
34	01804	289034	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(26,500,000)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(26,500,000)	-

D. PIUTANG JANGKA PANJANG

Transaksi transfer atas Piutang Jangka Panjang berupa Piutang Jangka Panjang TP/TGR serta Piutang Jangka Panjang Lainnya dalam rangka proses likuidasi satuan kerja inaktif lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Terdapat 18 satuan kerja dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang melakukan transaksi transfer keluar untuk dibukukan pada Laporan Neraca satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 131. Transfer Piutang Jangka Panjang dalam rangka Proses Likuidasi
31 Desember 2024**

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
1	01804	069077	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	18,346,414	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	18,346,414	-
2	01804	069077	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(1,834,642)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(1,834,642)	-
3	01804	069133	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	102,876,854	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	102,876,854	-
4	01804	069133	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(10,287,685)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	-	(10,287,685)
5	01804	099315	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	15,200,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	15,200,000	-
6	01804	099315	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(15,200,000)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(15,200,000)	-
7	01804	119130	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	33,296,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	33,296,000	-
8	01804	119130	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(166,480)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	-	(166,480)
9	01804	179104	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	5,986,995	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	5,986,995	-

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
10	01804	179104	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(44,935)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(44,935)	-
11	01804	209065	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	5,000,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	5,000,000	-
12	01804	209065	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(5,000,000)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(5,000,000)	-
13	01804	209108	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	102,473,561	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	102,473,561	-
14	01804	209108	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(14,519,917)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(14,448,883)	(71,034)
15	01804	219000	Dinas Pertanian Provinsi Maluku	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	64,425,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	64,425,000	-
16	01804	219000	Dinas Pertanian Provinsi Maluku	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(66,425,000)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(66,425,000)	-
17	01804	239009	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	4,491,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	4,491,000	-
18	01804	239009	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(24,955)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(24,955)	-
19	01804	249030	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	6,980,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	6,980,000	-
20	01804	249030	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(38,500)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	-	(38,500)
21	01804	249159	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	35,754,113	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	35,754,113	-
22	01804	249159	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(1,315,369)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(1,315,369)	-
23	01804	269000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	771,575,450	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	771,575,450	-
24	01804	269000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(14,385,542)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	-	(14,385,542)

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
25	01804	289034	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	43,310,181	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	43,310,181	-
26	01804	289034	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(43,310,181)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	-	(43,310,181)
27	01804	299005	Dinas Pertanian Provinsi Banten	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	15,500,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	15,500,000	-
28	01804	299005	Dinas Pertanian Provinsi Banten	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(15,500,000)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	-	(15,500,000)
29	01804	299381	Dinas Pertanian Provinsi Banten	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	26,371,250	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	26,371,250	-
30	01804	299381	Dinas Pertanian Provinsi Banten	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(26,371,250)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	-	(26,371,250)
31	01804	319002	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	30,985,675	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	30,985,675	-
32	01804	319002	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(30,985,675)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(30,985,675)	-
33	01804	319089	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	166,346,753	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	166,346,753	-
34	01804	319089	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(171,346,753)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(171,346,753)	-
35	01804	339156	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	777,286,000	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	777,286,000	-
36	01804	339156	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(394,786,000)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(394,786,000)	-

Proses transfer nilai Piutang Jangka Panjang dilakukan pada periode 12 bersamaan dengan perbaikan Aplikasi SAKTI dan MonSAKTI. Proses transfer masuk nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya tidak sempurna. Selisih nilai transfer keluar dan masuk pada Monitoring Transfer Keluar/Transfer Masuk dari Aplikasi Monsakti baru terbentuk setelah dilakukan proses tutup permanen periode 13 (*Unaudited*). Sehingga perbaikan atas transaksi tersebut baru dapat dilakukan pada periode Laporan Keuangan Audited 2024.

E. ASET LAIN – LAIN

Transaksi transfer atas aset lain - lain berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dalam rangka proses likuidasi satuan kerja inaktif lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 132. Transfer Aset Lain - Lain
31 Desember 2024**

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
1	01804	019031	Dinas Kelautan Dan Pertanian Provinsi Dki Jakarta	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	683,480,642	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	683,480,642	-
2	01804	019031	Dinas Kelautan Dan Pertanian Provinsi Dki Jakarta	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(238,445,933)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(238,445,933)	-
3	01804	059000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,710,050,199	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	3,710,050,199	-
4	01804	059000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(2,794,140,650)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(2,794,140,650)	-
5	01804	089009	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	75,114,700	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	75,114,700	-
6	01804	089009	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(27,792,439)	01804	625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	(27,792,439)	-

F.2.4. HIBAH LUAR NEGERI

Sampai dengan 31 Desember 2024, Hibah Luar Negeri yang diterima oleh Direktorat Jenderal Hortikultura sebanyak 5 program hibah dengan rincian di bawah ini. Adapun satuan kerja pelaksana kegiatan dari Hibah Luar Negeri yaitu Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP).

Tabel 133. Hibah Luar Negeri

NO	DONOR NAME	PROJECT NAME	REGISTER NO	CUR	AMOUNT	LOCATION	SIGNED DATE	PROJECT PERIOD	EXTENDED PERIOD	STATUS
1	JICA	THE PUBLIC - PRIVATE - PARTNERSHIP PROJECT FOR THE IMPROVEMENT OF THE AGRICULTURE PRODUCT MARKETING AND DISTRIBUTION	2G98B91A	JPY	357,000,000	1. KAB BOGOR 2. KOTA SUKABUMI 3. KAB CIANJUR 4. KAB GARUT 5. KAB BANDUNG 6. KAB BANDUNG BARAT 7. KAB. SUKABUMI	30-Mar-21	JUNE 2021 - JUNE 2025	-	ON GOING

Laporan Keuangan Semester II Audited Tahun Anggaran 2024

NO	DONOR NAME	PROJECT NAME	REGISTER NO	CUR	AMOUNT	LOCATION	SIGNED DATE	PROJECT PERIOD	EXTENDED PERIOD	STATUS
		SYSTEM (PHASE II)								
2	JICA	Agriculture Promotion Through Agritourism Utilizing The Knowledge Of Roadside Stations Michi No Eki	2RT4RZUA	JPY	56,404,080	KOTA TOMOHON	28-Jun-18	SEPTEMBER 2018 – FEB 2023	16 Oktober 2024	SELESAI
3	FAO	Technical Support on Exploring Bottlenecks and Pay-Offs Along the Value Chain in Reducing Food Loss and Waste in Perishable Commodities	2493MSCA	USD	90,000	KAB. BANYUWANGI, KAB. CIANJUR, KAB. BREBES	25-Apr-22	2 JANUARI 2022 - 30 JUNI 2023	4 Oktober 2024	SELESAI
4	FAO	Technical support to promote policy coherence for safe, reliable and resilient urban food systems in post-COVID environment	21N957AA	USD	115,000	KOTA BOGOR, KOTA TANGERANG SELATAN	25-Apr-22	1 SEPTEMBER 2021 - 31 AGUSTUS 2023	4 Oktober 2024	SELESAI
5	FAO	Advancing Sustainable Banana Production and Market Access: Modernizing GAP and GHP and Promoting International Market Engagement	2P9K9R5A	USD	247,000	Kab Lumajang, Jawa Timur	10 Sept 2024	10 Sept 2024 - 15 Agust 2026	-	ON GOING

Pengesahan Hibah Langsung yang tersaji pada Laporan Neraca Percobaan AkruaI per 31 Desember 2024 periode 14 sebesar Rp20,414,687,170.00 berasal dari 4 (empat) program Hibah Luar Negeri dalam bentuk barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut :

1. THE PUBLIC - PRIVATE - PARTNERSHIP PROJECT FOR THE IMPROVEMENT OF THE AGRICULTURE PRODUCT MARKETING AND DISTRIBUTION SYSTEM (PHASE II)

Donor untuk pelaksanaan program ini adalah *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Pada Program ini, nilai Pengesahan Hibah Luar Negeri pada TA 2024 sebesar Rp13.200.000.000,00 berupa belanja jasa dalam rangka pelatihan ke petani antara lain

pelatihan tentang identifikasi kelainan unsur hara pada tanaman, lokakarya Proyek Percontohan Konsep Bukti (Proof of Concept/PoC), Counterpart Training, Pelatihan cara pengemasan, Pelatihan pembuatan Bioaktivator, Pendampingan pembuatan pupuk AB mix, dan lain - lain

2. TECHNICAL SUPPORT TO PROMOTE POLICY COHERENCE FOR SAFE, RELIABLE AND RESILIENT URBAN FOOD SYSTEMS IN POST-COVID ENVIRONMENT

Donor untuk pelaksanaan program ini adalah *Food and Agriculture Organization* (FAO). Pada program ini, nilai Pengesahan Hibah Luar Negeri pada TA 2024 sebesar Rp1.652.917.520,00 berupa belanja jasa dalam bentuk dukungan teknis promosi kebijakan pangan perkotaan.

3. TECHNICAL SUPPORT ON EXPLORING BOTTLENECKS AND PAY-OFFS ALONG THE VALUE CHAIN IN REDUCING FOOD LOSS AND WASTE IN PERISHABLE COMMODITIES

Donor untuk pelaksanaan program ini adalah *Food and Agriculture Organization* (FAO). Pada program ini, nilai Pengesahan Hibah Luar Negeri pada TA 2024 sebesar Rp1.340.525.645,00 berupa belanja jasa dalam bentuk pelaksanaan studi (kajian) pada proyek ini.

4. AGRICULTURE PROMOTION THROUGH AGRITOURISM UTILIZING THE KNOWLEDGE OF ROADSIDE STATIONS MICHINO EKI

Donor untuk pelaksanaan program ini adalah *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Pada Program ini, nilai Pengesahan Hibah Luar Negeri pada TA 2024 sebesar Rp2.735.860.005,00 berupa belanja jasa pelaksanaan proyek Pembangunan gedung Michino Eki di Kota Tomohon.

5. AGRICULTURE PROMOTION THROUGH AGRITOURISM UTILIZING THE KNOWLEDGE OF ROADSIDE STATIONS MICHINO EKI

Donor untuk pelaksanaan program ini adalah *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Pada Program ini, nilai Pengesahan Hibah Luar Negeri pada TA 2024 sebesar Rp1.485.384.000,00 berupa belanja barang persediaan dalam rangka pelaksanaan proyek Pembangunan gedung Michino Eki di Kota Tomohon. Sampai periode penyusunan Laporan Keuangan *Unaudited* 2024, barang persediaan tersebut masih tersaji dalam Laporan Persediaan satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) dan akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota Tomohon pada tahun 2025.

F.2.5. PINJAMAN LUAR NEGERI

Pada TA 2024, Direktorat Jenderal Hortikultura menerima dana Pinjaman Luar Negeri untuk mendukung kegiatan *HORTICULTURE DEVELOPMENT IN DRYLAND AREAS PROJECT* (HDDAP). Kegiatan ini terdapat pada DIPA satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (018.04.625875KP) dan dilaksanakan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Adapun rincian atas Pinjaman Luar Negeri sebagai berikut :

Tabel 134. Rincian Atas Pinjaman Luar Negeri

NO	LENDER	PROJECT NAME	REGISTER NO	CUR	AMOUNT	LOAN EFFECTIVE	PROJECT PERIOD	STATUS	INITIAL DEPOSIT (IDR)	Satker Pelaksana
1	IFAD	HORTICULTURE DEVELOPMENT IN DRYLAND AREAS PROJECT (HDDAP)	1M39CTKA	EUR	36,934,440	15-Nov-23	NOVEMBER 2023 – JUNE 2029	ON GOING	5.000.000.000	Direktorat PPHH
2	ADB	HORTICULTURE DEVELOPMENT IN DRYLAND AREAS PROJECT (HDDAP)	IV665EPA	EUR	78,486,000	4-Dec-23	DECEMBER 2023 – JUNE 2029	ON GOING		

Sedangkan rincian alokasi dana Pinjaman Luar Negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 135. Rincian Alokasi Dana Pinjaman Luar Negeri

No	Item / Category	Total Amount Allocated in EUR		TOTAL
		For ADB Financing	For IFAD Financing	
1	Civil Works, Goods, Mechanical and Equipment, Matching Grant Fund	50,139,000	23,594,000	73,733.00
2	Consulting Services, Project Management Cost, Study, Survey, Piloting, Trainings, Seminars and Workshops	28,347,000	13,340,440	41,687,440
TOTAL		78,486,000	36 934,440	115,420,440

Pada DIPA satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2024, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan *HORTICULTURE DEVELOPMENT IN DRYLAND AREAS PROJECT* (HDDAP) terdapat pada kode kegiatan : 5887.RAI.010 dengan pagu dalam rupiah sebesar Rp5.000.000.000,00. Pada perjanjian pinjaman ADB 4338-INO dan IFAD 2000004715, tidak ada alokasi belanja pegawai, hanya ada alokasi Belanja Barang dan Belanja Modal. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dijabarkan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp4.058.079.718,00 atau 98,43% dari anggaran Belanja Barang senilai Rp4.122.545.000,00. Adapun realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp832.061.900,00 atau 94,82% dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp877.455.000,00.

Sehingga realisasi total Belanja Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah Rp4.890.141.618,00 atau mencapai 97,80% dari anggaran total Belanja Negara sebesar Rp5.000.000.000,00.



LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

SEMESTER II TA 2024
AUDITED





LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN MONSAKTI



KEMENTERIAN
PERTANIAN



NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN HORTIKULTURA

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM
Tgl Cetak : 09/05/25 10:20 AM
Halaman : 1
lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	650,500	(650,500)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	17,957,672	(17,957,672)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	757,451,057	772,951,057	(15,500,000)	(2.01)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(237,667,328)	(243,120,621)	5,453,293	(2.24)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	519,783,729	529,830,436	(10,046,707)	(1.90)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	4,554,768,024	4,636,951,194	(82,183,170)	(1.77)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(1,873,276,848)	(1,783,436,803)	(89,840,045)	5.04
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	2,681,491,176	2,853,514,391	(172,023,215)	(6.03)
Persediaan	16,036,125,276	7,812,579,206	8,223,546,070	105.26
JUMLAH ASET LANCAR	19,237,400,181	11,214,532,205	8,022,867,976	71.54
ASET TETAP				
Tanah	462,052,652,000	307,675,861,000	154,376,791,000	50.18
Peralatan dan Mesin	94,296,555,296	103,568,051,864	(9,271,496,568)	(8.95)
Gedung dan Bangunan	122,100,621,945	120,521,908,440	1,578,713,505	1.31
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5,509,746,350	6,982,215,729	(1,472,469,379)	(21.09)
Aset Tetap Lainnya	15,191,850	52,169,850	(36,978,000)	(70.88)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(107,113,992,545)	(112,279,364,032)	5,165,371,487	(4.60)
JUMLAH ASET TETAP	576,860,774,896	426,520,842,851	150,339,932,045	35.25
Properti Investasi				
Properti Investasi	2,153,825,283	2,153,825,283	0	0.00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(452,041,500)	(401,241,984)	(50,799,516)	12.66
JUMLAH Properti Investasi	1,701,783,783	1,752,583,299	(50,799,516)	(2.90)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	4,353,140,125	4,353,140,125	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	771,806,733	1,286,012,000	(514,205,267)	(39.98)
Aset Lain-lain	4,743,936,239	8,678,274,487	(3,934,338,248)	(45.34)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(6,937,330,416)	(10,138,107,070)	3,200,776,654	(31.57)
JUMLAH ASET LAINNYA	2,931,552,681	4,179,319,542	(1,247,766,861)	(29.86)
JUMLAH ASET	600,731,511,541	443,667,277,897	157,064,233,644	35.40
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	6,130,079,078	1,084,384,448	5,045,694,630	465.30
Pendapatan Diterima Dimuka	159,343,999	87,243,334	72,100,665	82.64
Uang Muka dari KPPN	0	650,500	(650,500)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6,289,423,077	1,172,278,282	5,117,144,795	436.51

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN HORTIKULTURA

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM
Tgl Cetak : 09/05/25 10:20 AM
Halaman : 2
lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN	6,289,423,077	1,172,278,282	5,117,144,795	436.51
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	594,442,088,464	442,494,999,615	151,947,088,849	34.34
JUMLAH EKUITAS	594,442,088,464	442,494,999,615	151,947,088,849	34.34
JUMLAH EKUITAS	594,442,088,464	442,494,999,615	151,947,088,849	34.34
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	600,731,511,541	443,667,277,897	157,064,233,644	35.40

Keterangan :
FINAL

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN HORTIKULTURA

Tgl. Cetak 09/05/2025
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	650,500	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	17,957,672	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	772,951,057	0
0.0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	67,425,000	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	4,569,526,194	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	243,120,621
0.0	116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	67,425,000
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	1,716,011,803
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,502,754,487	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	15,893,390	0
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2,070,609,980	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	76,300,000	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	4,116,946,349	0
0.0	117131	Bahan Baku	30,075,000	0
0.0	131111	Tanah	307,675,861,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	103,568,051,864	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	120,521,908,440	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	307,780,000	0
0.0	134112	Irigasi	3,825,723,464	0
0.0	134113	Jaringan	2,848,712,265	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	52,169,850	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	89,775,321,526
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	18,430,061,959
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	296,240,154
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	1,450,027,943
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,327,712,450
0.0	138311	Properti Investasi	2,153,825,283	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	401,241,984
0.0	162151	Software	4,353,140,125	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	1,286,012,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	8,010,974,487	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	667,300,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	6,311,273,135
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	3,159,533,935
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	667,300,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN HORTIKULTURA

Tgl. Cetak 09/05/2025
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	153,372,448
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	931,012,000
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	87,243,334
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	650,500
0.0	391111	Ekuitas	0	442,494,999,615
JUMLAH			568,512,548,407	568,512,548,407

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN HORTIKULTURA

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 10:21 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	514,901,057	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	242,550,000	0
0.0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	64,425,000	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	4,490,343,024	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	213,412,328
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	24,255,000
0.0	116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	64,425,000
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	1,808,851,848
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,052,881,903	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	13,533,460	0
0.0	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1,198,000,000	0
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	10,160,895,330	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	362,883,000	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	3,247,931,583	0
0.0	131111	Tanah	462,052,652,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	94,296,555,296	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	122,100,621,945	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	150,018,000	0
0.0	134112	Irigasi	2,585,189,115	0
0.0	134113	Jaringan	2,774,539,235	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	15,191,850	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	83,490,176,332
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	20,278,915,181
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	150,018,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	831,941,228
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,362,941,804
0.0	138311	Properti Investasi	2,153,825,283	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	452,041,500
0.0	162151	Software	4,353,140,125	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	771,806,733	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	4,743,936,239	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	3,198,243,909
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	3,739,086,507
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	5,371,972,345
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	758,106,733
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	159,343,999

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN HORTIKULTURA

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 10:21 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	382,133,111,712
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,664,099,977	0
0.0	313211	Transfer Keluar	11,070,772,516	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	168,762,017,671
0.0	391111	Ekuitas	0	442,494,999,615
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	2,960,427,677	0
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	95,928,775
0.0	391119	Koreksi Lainnya	390,525,533	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	20,414,687,170
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	34,215,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	881,008,805
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	167,334,758
3.0	425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	0	7,800,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	63,739,000
3.0	425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	255,502,675
3.0	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	52,533,009
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	23,449,552
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	36,391,050
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,094,764,508
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	135,945,500
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	5,106
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	17,526,796,662	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	233,541	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,251,162,340	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	406,319,696	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	400,830,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,679,975,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	224,563,501	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	917,561,400	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,511,186,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	407,050,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1,322,177,100	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	25,945	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	65,793,340	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	16,554,484	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	203,560,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	64,671,060	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN HORTIKULTURA

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 10:21 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	175,565,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	10,990,775,723	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	500,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	5,233,338,200	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	469,124,851	0
3.0	521211	Beban Bahan	20,717,717,605	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	3,703,308,320	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,236,030,599	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,715,046,677	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	238,129,355	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	118,776,106	0
3.0	522141	Beban Sewa	3,613,295,069	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	2,930,369,510	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	24,018,062,929	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,939,085,684	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,612,807,497	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	46,166,280,249	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,918,728,494	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23,482,572,084	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11,276,731,577	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	706,337,855	0
3.0	526122	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	9,904,897,000	0
3.0	526123	Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	41,672,576,000	0
3.0	526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	15,075,500,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5,315,099,574	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,385,573,236	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	11,539,846	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	67,972,100	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	79,733,168	0
3.0	591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	50,799,516	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	579,552,572	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	63,213,952	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,740,339,775	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	31,107,630	0
3.0	593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1,141,813,650	0
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	14,499,000,404	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	22,386,918,050	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN HORTIKULTURA

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 10:21 AM

Halaman : 4

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	112,497,000	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	91,918,438,559	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	12,750,000	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	17,624,806	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	5,505,391
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	3,000,000
3.0	594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya	40,099,034	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	96,535,442	0
3.0	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	400,000	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	5,412,707,863	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	256,292,500	0
JUMLAH			1,139,565,671,011	1,139,565,671,011

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN HORTIKULTURA

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 10:21 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	382,133,111,712
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,664,099,977	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	34,215,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	881,008,805
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	100,055,536
3.0	425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	0	7,800,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	63,739,000
3.0	425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	255,502,675
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	3,000,000
3.0	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	130,716,179
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	38,949,552
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	36,391,050
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,112,722,180
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	17,530,912,500	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	242,439	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,251,162,340	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	406,319,696	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	400,830,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,682,775,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	224,592,984	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	917,633,820	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,511,186,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	407,050,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,322,177,100	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	25,945	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	65,793,340	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	16,554,484	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	203,560,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	64,671,060	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	175,565,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	10,990,775,723	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	500,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	5,216,157,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	469,124,851	0
3.0	521211	Belanja Bahan	20,717,781,355	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,794,198,320	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,236,030,599	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN HORTIKULTURA

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 10:21 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,000,221,446	0
3.0	521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	14,340,916,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,731,438,007	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	239,247,617	0
3.0	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	118,776,106	0
3.0	522141	Belanja Sewa	3,613,493,069	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	2,931,299,510	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	5,088,759,759	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,945,576,484	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,612,807,497	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46,139,368,260	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,908,678,494	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23,483,906,084	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11,271,841,577	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	706,337,855	0
3.0	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	20,382,493,550	0
3.0	526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	3,421,663,650	0
3.0	526122	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	9,959,697,000	0
3.0	526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	41,672,726,000	0
3.0	526212	Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah	7,320,000	0
3.0	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	97,292,174,799	0
3.0	526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	15,075,500,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,429,861,600	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,121,322,500	0
3.0	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	218,084,000	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	4,115,838
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	8,898
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	2,800,000
3.1	511125	Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS	0	29,483
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	72,420
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	44,818,800
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	63,750
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	35,890,000
3.1	521822	Pengembalian Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	16,000,000
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	198,000
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	930,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN HORTIKULTURA

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 10:21 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	6,490,800
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	18,166,719
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	1,334,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	150,000
3.1	526122	Pengembalian Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	54,800,000
3.1	526123	Pengembalian Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	150,000
JUMLAH			384,983,230,397	384,983,230,397

Keterangan :

FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : DITJEN HORTIKULTURA 04

Tgl Data : 09/05/25 2:10 AM
Tgl Cetak : 09/05/25 10:21 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	839,797,000	2,664,099,977	1,824,302,977	317.23	719,016,000	2,182,382,035	1,463,366,035	303.52
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	839,797,000	2,664,099,977	1,824,302,977	317.23	719,016,000	2,182,382,035	1,463,366,035	303.52
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	839,797,000	2,664,099,977	1,824,302,977	317.23	719,016,000	2,182,382,035	1,463,366,035	303.52
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	433,499,771,000	382,133,111,712	(51,366,659,288)	88.15	907,157,955,000	882,455,520,310	(24,702,434,690)	97.28
1. Belanja Pegawai	26,231,736,000	26,174,025,069	(57,710,931)	99.78	23,327,399,000	23,316,874,440	(10,524,560)	99.95
2. Belanja Barang	397,390,580,000	350,189,818,543	(47,200,761,457)	88.12	875,965,781,000	851,566,868,217	(24,398,912,783)	97.21
3. Belanja Modal	9,877,455,000	5,769,268,100	(4,108,186,900)	58.41	7,864,775,000	7,571,777,653	(292,997,347)	96.27
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : DITJEN HORTIKULTURA 04

Tgl Data : 09/05/25 2:10 AM
Tgl Cetak : 09/05/25 10:21 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	433,499,771,000	382,133,111,712	(51,366,659,288)	88.15	907,157,955,000	882,455,520,310	(24,702,434,690)	97.28
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (04) DITJEN HORTIKULTURA

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 10:21 AM

Halaman : 1

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	552,040,985	1,042,738,685	(490,697,700)	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	552,040,985	1,042,738,685	(490,697,700)	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	552,040,985	1,042,738,685	(490,697,700)	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	26,174,025,069	23,316,874,440	2,857,150,629	-
Beban Persediaan	1,753,089,775	8,192,896,371	(6,439,806,596)	-
Beban Barang dan Jasa	76,081,010,386	107,602,240,030	(31,521,229,644)	-
Beban Pemeliharaan	3,583,400,811	3,298,674,674	284,726,137	-
Beban Perjalanan Dinas	85,550,650,259	123,569,233,657	(38,018,583,398)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	196,711,640,663	643,777,418,621	(447,065,777,958)	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 ESELON I : (04) DITJEN HORTIKULTURA

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 10:21 AM

Halaman : 2

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	9,553,483,964	10,279,703,610	(726,219,646)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	31,593,643	(217,166,327)	248,759,970	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	399,438,894,570	919,819,875,076	(520,380,980,506)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(398,886,853,585)	(918,777,136,391)	519,890,282,806	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(4,531,699,058)	(3,983,368,906)	(548,330,152)	-
Pendapatan Pelepasan Aset	881,008,805	85,835,999	795,172,806	-
Beban Pelepasan Aset	5,412,707,863	4,069,204,905	1,343,502,958	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,045,721,867	612,318,762	433,403,105	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,319,639,173	880,441,767	439,197,406	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	273,917,306	268,123,005	5,794,301	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(3,485,977,191)	(3,371,050,144)	(114,927,047)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(402,372,830,776)	(922,148,186,535)	519,775,355,759	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(402,372,830,776)	(922,148,186,535)	519,775,355,759	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN HORTIKULTURA

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM
Tgl Cetak : 09/05/25 10:21 AM
Halaman : 1
lap_lpe_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	442,494,999,615	484,148,170,978	(41,653,171,363)	(8.6)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(402,372,830,776)	(922,148,186,535)	519,775,355,759	(56.37)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(3,255,024,435)	221,876,897	(3,476,901,332)	(1,567.04)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(2,960,427,677)	456,811,089	(3,417,238,766)	(748.06)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	95,928,775	(224,043,750)	319,972,525	(142.82)
LAIN-LAIN	(390,525,533)	(10,890,442)	(379,635,091)	3,485.95
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	557,574,944,060	880,273,138,275	(322,698,194,215)	(36.66)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	151,947,088,849	(41,653,171,363)	193,600,260,212	(464.79)
EKUITAS AKHIR	594,442,088,464	442,494,999,615	151,947,088,849	34.34

Keterangan :
FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/05/25 10:24 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	18,013,960,000	17,536,000,000	17,530,912,500	4,115,838	17,526,796,662	99.95	9,203,338
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	255,000	246,000	242,439	8,898	233,541	94.94	12,459
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,306,545,000	1,252,071,000	1,251,162,340	0	1,251,162,340	99.93	908,660
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	409,132,000	408,437,000	406,319,696	0	406,319,696	99.48	2,117,304
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	405,440,000	400,920,000	400,830,000	0	400,830,000	99.98	90,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,580,743,000	1,683,314,000	1,682,775,000	2,800,000	1,679,975,000	99.8	3,339,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	105,036,000	224,645,000	224,592,984	29,483	224,563,501	99.96	81,499
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	957,826,000	918,000,000	917,633,820	72,420	917,561,400	99.95	438,600
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,500,000,000	1,541,719,000	1,511,186,000	0	1,511,186,000	98.02	30,533,000
511147	Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan	100,000,000	0	0	0	0	0	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	506,683,000	407,915,000	407,050,000	0	407,050,000	99.79	865,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	24,885,620,000	24,373,267,000	24,332,704,779	7,026,639	24,325,678,140	99.8	47,588,860
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	238,371,000	1,322,584,000	1,322,177,100	0	1,322,177,100	99.97	406,900
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	280,000	280,000	25,945	0	25,945	9.27	254,055
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	23,835,000	65,904,000	65,793,340	0	65,793,340	99.83	110,660
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,766,000	16,556,000	16,554,484	0	16,554,484	99.99	1,516
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	203,560,000	203,560,000	0	203,560,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	33,796,000	64,700,000	64,671,060	0	64,671,060	99.96	28,940
511628	Belanja Uang Makan PPPK	25,000,000	175,565,000	175,565,000	0	175,565,000	100	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	18,499,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	344,547,000	1,849,149,000	1,848,346,929	0	1,848,346,929	99.96	802,071
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	140,519,000	9,320,000	0	0	0	0	9,320,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	140,519,000	9,320,000	0	0	0	0	9,320,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	25,370,686,000	26,231,736,000	26,181,051,708	7,026,639	26,174,025,069	99.78	57710931
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	10,728,562,000	11,000,994,000	10,990,775,723	0	10,990,775,723	99.91	10,218,277
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,160,000	500,000	500,000	0	500,000	100	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	10,743,190,000	5,278,454,000	5,216,157,000	44,818,800	5,171,338,200	97.97	107,115,800
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	369,400,000	476,615,000	469,124,851	0	469,124,851	98.43	7,490,149
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	21,849,312,000	16,756,563,000	16,676,557,574	44,818,800	16,631,738,774	99.26	124,824,226
5212	Belanja Barang Non Operasional							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/05/25 10:24 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
521211	Belanja Bahan	39,699,484,000	23,190,613,000	20,717,781,355	63,750	20,717,717,605	89.34	2,472,895,395
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	22,111,780,000	3,877,842,000	3,794,198,320	35,890,000	3,758,308,320	96.92	119,533,680
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	547,660,000	2,534,373,000	2,236,030,599	0	2,236,030,599	88.23	298,342,401
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	62,358,924,000	29,602,828,000	26,748,010,274	35,953,750	26,712,056,524	90.23	2,890,771,476
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,868,413,000	2,223,350,000	2,000,221,446	0	2,000,221,446	89.96	223,128,554
521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	40,018,193,000	14,340,919,000	14,340,916,000	16,000,000	14,324,916,000	99.89	16,003,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	43,886,606,000	16,564,269,000	16,341,137,446	16,000,000	16,325,137,446	98.56	239,131,554
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,952,000,000	1,732,951,000	1,731,438,007	0	1,731,438,007	99.91	1,512,993
522112	Belanja Langganan Telepon	281,691,000	239,614,000	239,247,617	0	239,247,617	99.85	366,383
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,500,000	0	0	0	0	0	0
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	162,877,000	121,096,000	118,776,106	0	118,776,106	98.08	2,319,894
522141	Belanja Sewa	3,775,027,000	3,670,531,000	3,613,493,069	198,000	3,613,295,069	98.44	57,235,931
522151	Belanja Jasa Profesi	5,320,200,000	3,176,195,000	2,931,299,510	930,000	2,930,369,510	92.26	245,825,490
522191	Belanja Jasa Lainnya	15,221,186,000	7,780,243,000	5,088,759,759	0	5,088,759,759	65.41	2,691,483,241
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	26,714,481,000	16,720,630,000	13,723,014,068	1,128,000	13,721,886,068	82.07	2,998,743,932
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,426,283,000	1,947,382,000	1,945,576,484	6,490,800	1,939,085,684	99.57	8,296,316
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,604,610,000	1,645,409,000	1,612,807,497	0	1,612,807,497	98.02	32,601,503
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas	16,454,000	6,454,000	0	0	0	0	6,454,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	4,047,347,000	3,599,245,000	3,558,383,981	6,490,800	3,551,893,181	98.68	47,351,819
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80,802,270,000	72,063,968,000	46,139,368,260	18,166,719	46,121,201,541	64	25,942,766,459
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,463,590,000	4,200,534,000	3,908,678,494	0	3,908,678,494	93.05	291,855,506
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,095,795,000	24,779,216,000	23,483,906,084	1,334,000	23,482,572,084	94.77	1,296,643,916
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37,824,186,000	13,066,882,000	11,271,841,577	150,000	11,271,691,577	86.26	1,795,190,423
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	140,185,841,000	114,110,600,000	84,803,794,415	19,650,719	84,784,143,696	74.3	29,326,456,304
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	1,030,620,000	1,706,503,000	706,337,855	0	706,337,855	41.39	1,000,165,145
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	1,030,620,000	1,706,503,000	706,337,855	0	706,337,855	41.39	1,000,165,145
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526111	Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	126,000,000	0	0	0	0	0	0
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	36,484,663,000	30,545,113,000	20,382,493,550	0	20,382,493,550	66.73	10,162,619,450
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada	6,682,800,000	3,421,670,000	3,421,663,650	0	3,421,663,650	100	6,350
526122	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	9,617,870,000	10,015,570,000	9,959,697,000	54,800,000	9,904,897,000	98.89	110,673,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/05/25 10:24 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	51,064,850,000	41,919,750,000	41,672,726,000	150,000	41,672,576,000	99.41	247,174,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	103,976,183,000	85,902,103,000	75,436,580,200	54,950,000	75,381,630,200	87.75	10,520,472,800
5262	Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan							
526212	Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk	0	7,500,000	7,320,000	0	7,320,000	97.6	180,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5262	0	7,500,000	7,320,000	0	7,320,000	97.6	180,000
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada	465,408,586,000	97,344,839,000	97,292,174,799	0	97,292,174,799	99.95	52,664,201
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	102,505,000,000	15,075,500,000	15,075,500,000	0	15,075,500,000	100	0
526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan	157,500,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	568,071,086,000	112,420,339,000	112,367,674,799	0	112,367,674,799	99.95	52,664,201
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	972,120,400,000	397,390,580,000	350,368,810,612	178,992,069	350,189,818,543	88.12	47200761457
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,000,000,000	3,234,600,000	2,429,861,600	0	2,429,861,600	75.12	804,738,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	2,000,000,000	3,234,600,000	2,429,861,600	0	2,429,861,600	75.12	804,738,400
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6,006,004,000	5,997,385,000	3,121,322,500	0	3,121,322,500	52.04	2,876,062,500
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	993,996,000	645,470,000	218,084,000	0	218,084,000	33.79	427,386,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	7,000,000,000	6,642,855,000	3,339,406,500	0	3,339,406,500	50.27	3,303,448,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	9,000,000,000	9,877,455,000	5,769,268,100	0	5,769,268,100	58.41	4108186900
	JUMLAH BELANJA	1,006,491,086,000	433,499,771,000	382,319,130,420	186,018,708	382,133,111,712	88.15	51,366,659,288

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/05/25 10:22 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	18,013,960,000	17,536,000,000	17,530,912,500	4,115,838	17,526,796,662	99.95	9,203,338
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	255,000	246,000	242,439	8,898	233,541	94.94	12,459
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,306,545,000	1,252,071,000	1,251,162,340	0	1,251,162,340	99.93	908,660
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	409,132,000	408,437,000	406,319,696	0	406,319,696	99.48	2,117,304
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	405,440,000	400,920,000	400,830,000	0	400,830,000	99.98	90,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,580,743,000	1,683,314,000	1,682,775,000	2,800,000	1,679,975,000	99.8	3,339,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	105,036,000	224,645,000	224,592,984	29,483	224,563,501	99.96	81,499
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	957,826,000	918,000,000	917,633,820	72,420	917,561,400	99.95	438,600
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,500,000,000	1,541,719,000	1,511,186,000	0	1,511,186,000	98.02	30,533,000
511147	Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan	100,000,000	0	0	0	0	0	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	506,683,000	407,915,000	407,050,000	0	407,050,000	99.79	865,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	24,885,620,000	24,373,267,000	24,332,704,779	7,026,639	24,325,678,140	99.8	47,588,860
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	238,371,000	1,322,584,000	1,322,177,100	0	1,322,177,100	99.97	406,900
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	280,000	280,000	25,945	0	25,945	9.27	254,055
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	23,835,000	65,904,000	65,793,340	0	65,793,340	99.83	110,660
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,766,000	16,556,000	16,554,484	0	16,554,484	99.99	1,516
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	203,560,000	203,560,000	0	203,560,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	33,796,000	64,700,000	64,671,060	0	64,671,060	99.96	28,940
511628	Belanja Uang Makan PPPK	25,000,000	175,565,000	175,565,000	0	175,565,000	100	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	18,499,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	344,547,000	1,849,149,000	1,848,346,929	0	1,848,346,929	99.96	802,071
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	140,519,000	9,320,000	0	0	0	0	9,320,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	140,519,000	9,320,000	0	0	0	0	9,320,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	25,370,686,000	26,231,736,000	26,181,051,708	7,026,639	26,174,025,069	99.78	57710931
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	10,728,562,000	11,000,994,000	10,990,775,723	0	10,990,775,723	99.91	10,218,277
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,160,000	500,000	500,000	0	500,000	100	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	10,743,190,000	5,278,454,000	5,216,157,000	44,818,800	5,171,338,200	97.97	107,115,800
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	369,400,000	476,615,000	469,124,851	0	469,124,851	98.43	7,490,149
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	21,849,312,000	16,756,563,000	16,676,557,574	44,818,800	16,631,738,774	99.26	124,824,226
5212	Belanja Barang Non Operasional							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/05/25 10:22 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
521211	Belanja Bahan	39,699,484,000	23,190,613,000	20,717,781,355	63,750	20,717,717,605	89.34	2,472,895,395
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	22,111,780,000	3,877,842,000	3,794,198,320	35,890,000	3,758,308,320	96.92	119,533,680
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	547,660,000	2,534,373,000	2,236,030,599	0	2,236,030,599	88.23	298,342,401
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	62,358,924,000	29,602,828,000	26,748,010,274	35,953,750	26,712,056,524	90.23	2,890,771,476
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,868,413,000	2,223,350,000	2,000,221,446	0	2,000,221,446	89.96	223,128,554
521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	40,018,193,000	14,340,919,000	14,340,916,000	16,000,000	14,324,916,000	99.89	16,003,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	43,886,606,000	16,564,269,000	16,341,137,446	16,000,000	16,325,137,446	98.56	239,131,554
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,952,000,000	1,732,951,000	1,731,438,007	0	1,731,438,007	99.91	1,512,993
522112	Belanja Langganan Telepon	281,691,000	239,614,000	239,247,617	0	239,247,617	99.85	366,383
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,500,000	0	0	0	0	0	0
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	162,877,000	121,096,000	118,776,106	0	118,776,106	98.08	2,319,894
522141	Belanja Sewa	3,775,027,000	3,670,531,000	3,613,493,069	198,000	3,613,295,069	98.44	57,235,931
522151	Belanja Jasa Profesi	5,320,200,000	3,176,195,000	2,931,299,510	930,000	2,930,369,510	92.26	245,825,490
522191	Belanja Jasa Lainnya	15,221,186,000	7,780,243,000	5,088,759,759	0	5,088,759,759	65.41	2,691,483,241
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	26,714,481,000	16,720,630,000	13,723,014,068	1,128,000	13,721,886,068	82.07	2,998,743,932
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,426,283,000	1,947,382,000	1,945,576,484	6,490,800	1,939,085,684	99.57	8,296,316
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,604,610,000	1,645,409,000	1,612,807,497	0	1,612,807,497	98.02	32,601,503
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas	16,454,000	6,454,000	0	0	0	0	6,454,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	4,047,347,000	3,599,245,000	3,558,383,981	6,490,800	3,551,893,181	98.68	47,351,819
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80,802,270,000	72,063,968,000	46,139,368,260	18,166,719	46,121,201,541	64	25,942,766,459
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,463,590,000	4,200,534,000	3,908,678,494	0	3,908,678,494	93.05	291,855,506
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,095,795,000	24,779,216,000	23,483,906,084	1,334,000	23,482,572,084	94.77	1,296,643,916
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37,824,186,000	13,066,882,000	11,271,841,577	150,000	11,271,691,577	86.26	1,795,190,423
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	140,185,841,000	114,110,600,000	84,803,794,415	19,650,719	84,784,143,696	74.3	29,326,456,304
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	1,030,620,000	1,706,503,000	706,337,855	0	706,337,855	41.39	1,000,165,145
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	1,030,620,000	1,706,503,000	706,337,855	0	706,337,855	41.39	1,000,165,145
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526111	Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	126,000,000	0	0	0	0	0	0
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	36,484,663,000	30,545,113,000	20,382,493,550	0	20,382,493,550	66.73	10,162,619,450
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada	6,682,800,000	3,421,670,000	3,421,663,650	0	3,421,663,650	100	6,350
526122	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	9,617,870,000	10,015,570,000	9,959,697,000	54,800,000	9,904,897,000	98.89	110,673,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/05/25 10:22 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	51,064,850,000	41,919,750,000	41,672,726,000	150,000	41,672,576,000	99.41	247,174,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	103,976,183,000	85,902,103,000	75,436,580,200	54,950,000	75,381,630,200	87.75	10,520,472,800
5262	Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan							
526212	Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk	0	7,500,000	7,320,000	0	7,320,000	97.6	180,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5262	0	7,500,000	7,320,000	0	7,320,000	97.6	180,000
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada	465,408,586,000	97,344,839,000	97,292,174,799	0	97,292,174,799	99.95	52,664,201
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	102,505,000,000	15,075,500,000	15,075,500,000	0	15,075,500,000	100	0
526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan	157,500,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	568,071,086,000	112,420,339,000	112,367,674,799	0	112,367,674,799	99.95	52,664,201
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	972,120,400,000	397,390,580,000	350,368,810,612	178,992,069	350,189,818,543	88.12	47200761457
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,000,000,000	3,234,600,000	2,429,861,600	0	2,429,861,600	75.12	804,738,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	2,000,000,000	3,234,600,000	2,429,861,600	0	2,429,861,600	75.12	804,738,400
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6,006,004,000	5,997,385,000	3,121,322,500	0	3,121,322,500	52.04	2,876,062,500
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	993,996,000	645,470,000	218,084,000	0	218,084,000	33.79	427,386,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	7,000,000,000	6,642,855,000	3,339,406,500	0	3,339,406,500	50.27	3,303,448,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	9,000,000,000	9,877,455,000	5,769,268,100	0	5,769,268,100	58.41	4108186900
	JUMLAH BELANJA	1,006,491,086,000	433,499,771,000	382,319,130,420	186,018,708	382,133,111,712	88.15	51,366,659,288

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / JENIS BELANJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : 04 DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.B.E1.3
Tanggal : 09/05/25 10:22 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
null	null							
51	BELANJA PEGAWAI	25,370,686,000	26,231,736,000	26,181,051,708	7,026,639	26,174,025,069	99.78	57,710,931
52	BELANJA BARANG	972,120,400,000	397,390,580,000	350,368,810,612	178,992,069	350,189,818,543	88.12	47,200,761,457
53	BELANJA MODAL	9,000,000,000	9,877,455,000	5,769,268,100	0	5,769,268,100	58.41	4,108,186,900
	JUMLAH BELANJA WILAYAH null	1,006,491,086,000	433,499,771,000	382,319,130,420	186,018,708	382,133,111,712	88.19	51,366,659,288
	JUMLAH BELANJA	1,006,491,086,000	433,499,771,000	382,319,130,420	186,018,708	382,133,111,712	88.19	51,366,659,288

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I

: 018
: 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 09/05/25 10:22 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
0100	DKI JAKARTA							
019031	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	868,156,000	182,716,000	181,657,381	150,000	181,507,381	99.34	1,208,619
625875	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	670,800,479,000	365,745,586,000	315,969,000,060	94,578,708	315,874,421,352	86.36	49,871,164,648
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0100	671,668,635,000	365,928,302,000	316,150,657,441	94,728,708	316,055,928,733	86.4	49,872,373,267
0200	JAWA BARAT							
029027	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA	6,495,838,000	1,126,866,000	1,065,405,250	0	1,065,405,250	94.55	61,460,750
029036	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN	3,554,200,000	455,000,000	454,997,000	0	454,997,000	100	3,000
029160	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA	5,688,080,000	3,375,000,000	3,008,346,000	0	3,008,346,000	89.14	366,654,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0200	15,738,118,000	4,956,866,000	4,528,748,250	0	4,528,748,250	91.36	428,117,750
0300	JAWA TENGAH							
030649	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BATANG	2,003,080,000	0	0	0	0	0	0
039012	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	9,419,820,000	1,239,351,000	1,200,213,100	0	1,200,213,100	96.84	39,137,900
039152	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	11,109,240,000	5,525,000,000	5,522,603,400	0	5,522,603,400	99.96	2,396,600
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0300	22,532,140,000	6,764,351,000	6,722,816,500	0	6,722,816,500	99.39	41,534,500
0400	DI YOGYAKARTA							
049025	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	3,970,001,000	441,289,000	440,892,943	0	440,892,943	99.91	396,057
049088	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	6,130,400,000	1,523,880,000	1,522,761,846	0	1,522,761,846	99.93	1,118,154
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0400	10,100,401,000	1,965,169,000	1,963,654,789	0	1,963,654,789	99.92	1,514,211
0500	JAWA TIMUR							
059000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA	6,642,894,000	1,509,266,000	1,490,544,913	0	1,490,544,913	98.76	18,721,087
059056	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BANYUWANGI	3,171,620,000	455,000,000	452,517,179	0	452,517,179	99.45	2,482,821
059179	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA	11,200,400,000	4,080,000,000	4,018,204,672	100,000	4,018,104,672	98.48	61,895,328
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0500	21,014,914,000	6,044,266,000	5,961,266,764	100,000	5,961,166,764	98.63	83,099,236
0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
069077	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	3,178,168,000	747,272,000	704,187,000	0	704,187,000	94.23	43,085,000
069133	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	7,020,200,000	1,170,000,000	1,163,201,600	0	1,163,201,600	99.42	6,798,400
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0600	10,198,368,000	1,917,272,000	1,867,388,600	0	1,867,388,600	97.4	49,883,400
0700	SUMATERA UTARA							
079025	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN	4,588,985,000	1,159,197,000	1,149,729,301	0	1,149,729,301	99.18	9,467,699
079125	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN	14,652,560,000	1,550,000,000	1,545,661,529	0	1,545,661,529	99.72	4,338,471
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0700	19,241,545,000	2,709,197,000	2,695,390,830	0	2,695,390,830	99.49	13,806,170
0800	SUMATERA BARAT							
089009	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	3,068,178,000	1,183,238,000	1,177,024,165	0	1,177,024,165	99.47	6,213,835
089131	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	11,026,090,000	1,175,000,000	1,161,676,626	0	1,161,676,626	98.87	13,323,374
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0800	14,094,268,000	2,358,238,000	2,338,700,791	0	2,338,700,791	99.17	19,537,209
0900	RIAU							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : 04 DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 09/05/25 10:22 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099033	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	2,935,453,000	986,146,000	1,014,189,000	35,890,000	978,299,000	99.2	7,847,000
099315	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	7,694,280,000	1,520,000,000	1,515,604,000	0	1,515,604,000	99.71	4,396,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0900	10,629,733,000	2,506,146,000	2,529,793,000	35,890,000	2,493,903,000	100.94	12,243,000
1000	JAMBI							
109005	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	2,690,652,000	1,007,250,000	1,007,203,400	0	1,007,203,400	100	46,600
109905	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	8,810,320,000	1,150,000,000	1,149,580,000	0	1,149,580,000	99.96	420,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1000	11,500,972,000	2,157,250,000	2,156,783,400	0	2,156,783,400	99.98	466,600
1100	SUMATERA SELATAN							
119000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	2,995,642,000	710,016,000	590,171,596	0	590,171,596	83.12	119,844,404
119130	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	5,579,080,000	1,200,000,000	1,163,262,828	0	1,163,262,828	96.94	36,737,172
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1100	8,574,722,000	1,910,016,000	1,753,434,424	0	1,753,434,424	91.8	156,581,576
1200	LAMPUNG							
129000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN	3,674,642,000	773,049,000	768,717,820	0	768,717,820	99.44	4,331,180
129113	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN	12,282,360,000	1,580,000,000	1,579,704,000	0	1,579,704,000	99.98	296,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1200	15,957,002,000	2,353,049,000	2,348,421,820	0	2,348,421,820	99.8	4,627,180
1300	KALIMANTAN BARAT							
139030	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI	3,063,880,000	563,848,000	559,633,156	0	559,633,156	99.25	4,214,844
139126	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI	6,909,500,000	1,220,000,000	1,218,292,400	0	1,218,292,400	99.86	1,707,600
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1300	9,973,380,000	1,783,848,000	1,777,925,556	0	1,777,925,556	99.67	5,922,444
1400	KALIMANTAN TENGAH							
149000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	2,212,546,000	445,697,000	419,619,600	0	419,619,600	94.15	26,077,400
149115	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	5,822,450,000	800,000,000	790,850,000	0	790,850,000	98.86	9,150,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1400	8,034,996,000	1,245,697,000	1,210,469,600	0	1,210,469,600	97.17	35,227,400
1500	KALIMANTAN SELATAN							
159000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI	2,203,997,000	518,582,000	504,673,300	0	504,673,300	97.32	13,908,700
159108	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI	7,374,240,000	1,170,000,000	1,121,536,600	0	1,121,536,600	95.86	48,463,400
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1500	9,578,237,000	1,688,582,000	1,626,209,900	0	1,626,209,900	96.31	62,372,100
1600	KALIMANTAN TIMUR							
169025	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA	1,934,135,000	371,655,000	176,409,500	0	176,409,500	47.47	195,245,500
169113	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA	6,123,280,000	820,000,000	817,695,000	0	817,695,000	99.72	2,305,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1600	8,057,415,000	1,191,655,000	994,104,500	0	994,104,500	83.42	197,550,500
1700	SULAWESI UTARA							
179021	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI	2,510,379,000	676,518,000	631,792,875	0	631,792,875	93.39	44,725,125
179104	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI	5,780,760,000	435,000,000	433,327,500	0	433,327,500	99.62	1,672,500
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1700	8,291,139,000	1,111,518,000	1,065,120,375	0	1,065,120,375	95.83	46,397,625
1800	SULAWESI TENGAH							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I

: 018
: 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 09/05/25 10:22 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
189016	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI	2,596,197,000	532,790,000	516,506,000	0	516,506,000	96.94	16,284,000
189916	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI	7,921,360,000	1,170,000,000	1,169,990,000	0	1,169,990,000	100	10,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1800	10,517,557,000	1,702,790,000	1,686,496,000	0	1,686,496,000	99.04	16,294,000
1900	SULAWESI SELATAN							
192135	DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	1,854,040,000	455,000,000	454,989,620	0	454,989,620	100	10,380
199026	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	4,702,651,000	785,520,000	745,758,470	0	745,758,470	94.94	39,761,530
199092	DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANTAENG	695,000,000	455,000,000	455,000,000	0	455,000,000	100	0
199126	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	14,087,780,000	1,975,000,000	1,957,909,443	0	1,957,909,443	99.13	17,090,557
419022	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	3,273,080,000	455,000,000	454,470,000	0	454,470,000	99.88	530,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1900	24,612,551,000	4,125,520,000	4,068,127,533	0	4,068,127,533	98.61	57,392,467
2000	SULAWESI TENGGARA							
209065	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI	2,855,263,000	675,888,000	675,509,000	0	675,509,000	99.94	379,000
209108	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI	7,124,030,000	1,170,000,000	1,169,850,000	0	1,169,850,000	99.99	150,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2000	9,979,293,000	1,845,888,000	1,845,359,000	0	1,845,359,000	99.97	529,000
2100	MALUKU							
219000	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	2,031,370,000	391,060,000	390,940,000	0	390,940,000	99.97	120,000
219091	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	5,268,280,000	800,000,000	800,000,000	50,000	799,950,000	99.99	50,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2100	7,299,650,000	1,191,060,000	1,190,940,000	50,000	1,190,890,000	99.99	170,000
2200	BALI							
229027	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	3,028,427,000	645,370,000	624,691,914	0	624,691,914	96.8	20,678,086
229049	DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABANAN	3,113,290,000	455,000,000	450,893,154	0	450,893,154	99.1	4,106,846
229100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	6,983,300,000	820,000,000	813,458,418	0	813,458,418	99.2	6,541,582
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2200	13,125,017,000	1,920,370,000	1,889,043,486	0	1,889,043,486	98.37	31,326,514
2300	NUSA TENGGARA BARAT							
239009	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA	3,414,599,000	826,890,000	782,107,000	0	782,107,000	94.58	44,783,000
239127	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA	3,805,000,000	1,540,000,000	1,517,596,400	0	1,517,596,400	98.55	22,403,600
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2300	7,219,599,000	2,366,890,000	2,299,703,400	0	2,299,703,400	97.16	67,186,600
2400	NUSA TENGGARA TIMUR							
249030	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA	3,560,593,000	704,976,000	704,945,400	0	704,945,400	100	30,600
249159	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA	8,826,160,000	1,200,000,000	1,199,997,700	0	1,199,997,700	100	2,300
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2400	12,386,753,000	1,904,976,000	1,904,943,100	0	1,904,943,100	100	32,900
2500	PAPUA							
259018	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PANGAN	1,622,210,000	334,536,000	332,387,000	0	332,387,000	99.36	2,149,000
259098	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PANGAN	1,284,040,000	435,000,000	434,886,600	0	434,886,600	99.97	113,400
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2500	2,906,250,000	769,536,000	767,273,600	0	767,273,600	99.71	2,262,400
2600	BENGKULU							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 09/05/25 10:22 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
269000	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	2,323,553,000	533,983,000	533,983,000	0	533,983,000	100	0
269057	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KAB KEPAHANG	2,678,080,000	455,000,000	450,345,850	0	450,345,850	98.98	4,654,150
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2600	5,001,633,000	988,983,000	984,328,850	0	984,328,850	99.53	4,654,150
2800	MALUKU UTARA							
280151	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	4,670,200,000	800,000,000	770,237,000	0	770,237,000	96.28	29,763,000
289034	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	1,889,089,000	324,461,000	303,783,000	0	303,783,000	93.63	20,678,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2800	6,559,289,000	1,124,461,000	1,074,020,000	0	1,074,020,000	95.51	50,441,000
2900	BANTEN							
299005	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	2,042,386,000	433,227,000	408,000,000	0	408,000,000	94.18	25,227,000
299381	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	3,607,120,000	1,520,000,000	1,510,932,000	0	1,510,932,000	99.4	9,068,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2900	5,649,506,000	1,953,227,000	1,918,932,000	0	1,918,932,000	98.24	34,295,000
3000	BANGKA BELITUNG							
309032	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI	1,672,575,000	360,996,000	359,084,200	0	359,084,200	99.47	1,911,800
309901	DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2,718,080,000	800,000,000	799,425,000	0	799,425,000	99.93	575,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3000	4,390,655,000	1,160,996,000	1,158,509,200	0	1,158,509,200	99.79	2,486,800
3100	GORONTALO							
319002	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	2,110,330,000	384,125,000	383,792,900	0	383,792,900	99.91	332,100
319089	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	6,261,820,000	1,170,000,000	1,169,617,300	0	1,169,617,300	99.97	382,700
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3100	8,372,150,000	1,554,125,000	1,553,410,200	0	1,553,410,200	99.95	714,800
3200	KEPULAUAN RIAU							
320088	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN	978,080,000	0	0	0	0	0	0
329026	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN	789,222,000	235,136,000	234,941,190	450,000	234,491,190	99.73	644,810
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3200	1,767,302,000	235,136,000	234,941,190	450,000	234,491,190	99.92	644,810
3300	PAPUA BARAT							
339156	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	1,582,656,000	283,586,000	283,586,000	0	283,586,000	100	0
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3300	1,582,656,000	283,586,000	283,586,000	0	283,586,000	100	0
3400	SULAWESI BARAT							
340056	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	1,534,240,000	291,690,000	290,324,100	0	290,324,100	99.53	1,365,900
340142	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	5,239,240,000	435,000,000	434,260,000	54,800,000	379,460,000	87.23	55,540,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3400	6,773,480,000	726,690,000	724,584,100	54,800,000	669,784,100	99.71	56,905,900
3500	KALIMANTAN UTARA							
417673	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI	713,680,000	254,115,000	247,340,721	0	247,340,721	97.33	6,774,279
417674	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI	2,448,080,000	800,000,000	796,705,500	0	796,705,500	99.59	3,294,500
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3500	3,161,760,000	1,054,115,000	1,044,046,221	0	1,044,046,221	99.04	10,068,779
	JUMLAH BELANJA	1,006,491,086,000	433,499,771,000	382,319,130,420	186,018,708	382,133,111,712	88.19	51,366,659,288

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
UNIT ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/25 10:22 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sd_jb_akun_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	18,013,960,000	17,536,000,000	17,530,912,500	4,115,838	17,526,796,662	99.95	9,203,338
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	255,000	246,000	242,439	8,898	233,541	94.94	12,459
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,306,545,000	1,252,071,000	1,251,162,340	0	1,251,162,340	99.93	908,660
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	409,132,000	408,437,000	406,319,696	0	406,319,696	99.48	2,117,304
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	405,440,000	400,920,000	400,830,000	0	400,830,000	99.98	90,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,580,743,000	1,683,314,000	1,682,775,000	2,800,000	1,679,975,000	99.8	3,339,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	105,036,000	224,645,000	224,592,984	29,483	224,563,501	99.96	81,499
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	957,826,000	918,000,000	917,633,820	72,420	917,561,400	99.95	438,600
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,500,000,000	1,541,719,000	1,511,186,000	0	1,511,186,000	98.02	30,533,000
511147	Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	100,000,000	0	0	0	0	0	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	506,683,000	407,915,000	407,050,000	0	407,050,000	99.79	865,000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	238,371,000	1,322,584,000	1,322,177,100	0	1,322,177,100	99.97	406,900
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	280,000	280,000	25,945	0	25,945	9.27	254,055
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	23,835,000	65,904,000	65,793,340	0	65,793,340	99.83	110,660
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,766,000	16,556,000	16,554,484	0	16,554,484	99.99	1,516
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	203,560,000	203,560,000	0	203,560,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	33,796,000	64,700,000	64,671,060	0	64,671,060	99.96	28,940
511628	Belanja Uang Makan PPPK	25,000,000	175,565,000	175,565,000	0	175,565,000	100	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	18,499,000	0	0	0	0	0	0
512211	Belanja Uang Lembur	140,519,000	9,320,000	0	0	0	0	9,320,000
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	25,370,686,000	26,231,736,000	26,181,051,708	7,026,639	26,174,025,069	99.81	43,657,653
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	10,728,562,000	11,000,994,000	10,990,775,723	0	10,990,775,723	99.91	10,218,277
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,160,000	500,000	500,000	0	500,000	100	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	10,743,190,000	5,278,454,000	5,216,157,000	44,818,800	5,171,338,200	97.97	107,115,800
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	369,400,000	476,485,000	469,124,851	0	469,124,851	98.46	7,360,149
521211	Belanja Bahan	39,659,709,000	22,887,897,000	20,430,237,155	63,750	20,430,173,405	89.26	2,457,723,595
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	22,111,780,000	3,431,720,000	3,357,224,320	35,890,000	3,321,334,320	96.78	110,385,680
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	547,660,000	2,534,373,000	2,236,030,599	0	2,236,030,599	88.23	298,342,401
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,868,413,000	2,223,350,000	2,000,221,446	0	2,000,221,446	89.96	223,128,554
521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	40,018,193,000	14,340,919,000	14,340,916,000	16,000,000	14,324,916,000	99.89	16,003,000
522111	Belanja Langganan Listrik	1,952,000,000	1,732,951,000	1,731,438,007	0	1,731,438,007	99.91	1,512,993
522112	Belanja Langganan Telepon	281,691,000	239,614,000	239,247,617	0	239,247,617	99.85	366,383
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,500,000	0	0	0	0	0	0
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	162,877,000	121,096,000	118,776,106	0	118,776,106	98.08	2,319,894
522141	Belanja Sewa	3,775,027,000	3,497,587,000	3,449,873,069	198,000	3,449,675,069	98.63	47,911,931
522151	Belanja Jasa Profesi	5,299,200,000	3,110,695,000	2,868,199,510	930,000	2,867,269,510	92.17	243,425,490
522191	Belanja Jasa Lainnya	12,994,823,000	7,584,943,000	4,893,959,759	0	4,893,959,759	64.52	2,690,983,241

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
UNIT ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/25 10:22 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sd_jb_akun_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,426,283,000	1,947,382,000	1,945,576,484	6,490,800	1,939,085,684	99.57	8,296,316
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,604,610,000	1,645,409,000	1,612,807,497	0	1,612,807,497	98.02	32,601,503
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	16,454,000	6,454,000	0	0	0	0	6,454,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80,612,714,000	70,719,573,000	44,812,495,460	9,924,126	44,802,571,334	63.35	25,917,001,666
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,432,718,000	4,140,984,000	3,855,018,494	0	3,855,018,494	93.09	285,965,506
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12,862,450,000	24,413,504,000	23,139,672,084	950,000	23,138,722,084	94.78	1,274,781,916
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37,824,186,000	11,896,706,000	10,108,102,363	150,000	10,107,952,363	84.96	1,788,753,637
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	1,030,620,000	1,706,503,000	706,337,855	0	706,337,855	41.39	1,000,165,145
526111	Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	126,000,000	0	0	0	0	0	0
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	34,302,845,000	30,545,113,000	20,382,493,550	0	20,382,493,550	66.73	10,162,619,450
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	6,682,800,000	3,421,670,000	3,421,663,650	0	3,421,663,650	100	6,350
526122	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	9,617,870,000	10,015,570,000	9,959,697,000	54,800,000	9,904,897,000	98.89	110,673,000
526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	51,064,850,000	41,919,750,000	41,672,726,000	150,000	41,672,576,000	99.41	247,174,000
526212	Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah	0	7,500,000	7,320,000	0	7,320,000	97.6	180,000
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	465,331,315,000	97,344,839,000	97,292,174,799	0	97,292,174,799	99.95	52,664,201
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	102,505,000,000	15,075,500,000	15,075,500,000	0	15,075,500,000	100	0
526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang - Penanganan Pandemi COVID-19	157,500,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	967,120,400,000	393,268,035,000	346,334,266,398	170,365,476	346,163,900,922	88.07	46,763,403,126
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,000,000,000	2,925,145,000	2,125,154,400	0	2,125,154,400	72.65	799,990,600
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6,006,004,000	5,429,385,000	2,593,967,900	0	2,593,967,900	47.78	2,835,417,100
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	993,996,000	645,470,000	218,084,000	0	218,084,000	33.79	427,386,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	9,000,000,000	9,000,000,000	4,937,206,300	0	4,937,206,300	54.86	4,062,793,700
	JUMLAH RUPIAH MURNI	1,001,491,086,000	428,499,771,000	377,452,524,406	177,392,115	377,275,132,291	88.09	50,869,854,479
02	PINJAMAN LUAR NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	130,000	0	0	0	0	130,000
521211	Belanja Bahan	39,775,000	302,716,000	287,544,200	0	287,544,200	94.99	15,171,800
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	446,122,000	436,974,000	0	436,974,000	97.95	9,148,000
522141	Belanja Sewa	0	172,944,000	163,620,000	0	163,620,000	94.61	9,324,000
522151	Belanja Jasa Profesi	21,000,000	65,500,000	63,100,000	0	63,100,000	96.34	2,400,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
UNIT ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/25 10:22 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sd_jb_akun_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522191	Belanja Jasa Lainnya	2,226,363,000	195,300,000	194,800,000	0	194,800,000	99.74	500,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	189,556,000	1,344,395,000	1,326,872,800	8,242,593	1,318,630,207	98.08	25,764,793
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30,872,000	59,550,000	53,660,000	0	53,660,000	90.11	5,890,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	233,345,000	365,712,000	344,234,000	384,000	343,850,000	94.02	21,862,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	1,170,176,000	1,163,739,214	0	1,163,739,214	99.45	6,436,786
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2,181,818,000	0	0	0	0	0	0
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	77,271,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	5,000,000,000	4,122,545,000	4,034,544,214	8,626,593	4,025,917,621	97.87	79,374,193
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	309,455,000	304,707,200	0	304,707,200	98.47	4,747,800
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	568,000,000	527,354,600	0	527,354,600	92.84	40,645,400
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	877,455,000	832,061,800	0	832,061,800	94.83	45,393,200
	JUMLAH PINJAMAN LUAR NEGERI	5,000,000,000	5,000,000,000	4,866,606,014	8,626,593	4,857,979,421	97.33	124,767,393
	TOTAL	1,006,491,086,000	433,499,771,000	382,319,130,420	186,018,708	382,133,111,712	88.19	50,994,621,872

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
UNIT ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/25 10:23 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri							
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	120,811,622,000	120,811,622,000	102,921,217,468	55,748,105	102,865,469,363	85.15	17,946,152,637
	JUMLAH BELANJA PROGRAM EC	120,811,622,000	120,811,622,000	102,921,217,468	55,748,105	102,865,469,363	85.15	17,946,152,637
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas							
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	504,631,500,000	106,975,000,000	106,532,933,447	0	106,532,933,447	99.59	442,066,553
1773	Perlindungan Hortikultura	64,875,000,000	25,000,000,000	23,489,704,795	2,080,750	23,487,624,045	93.95	1,512,375,955
4581	Perbenihan Hortikultura	84,235,098,000	24,025,003,000	23,786,156,069	16,000,000	23,770,156,069	98.94	254,846,931
5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	101,015,270,000	24,904,500,000	24,796,791,054	2,936,567	24,793,854,487	99.56	110,645,513
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HA	754,756,868,000	180,904,503,000	178,605,585,365	21,017,317	178,584,568,048	98.01	2,319,934,952
WA	Program Dukungan Manajemen							
1774	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	125,922,596,000	126,783,646,000	95,925,721,573	100,626,693	95,825,094,880	75.58	30,958,551,120
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	125,922,596,000	126,783,646,000	95,925,721,573	100,626,693	95,825,094,880	75.58	30,958,551,120
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	1,001,491,086,000	428,499,771,000	377,452,524,406	177,392,115	377,275,132,291	92.128	51,224,638,709
02	PINJAMAN LUAR NEGERI							
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri							
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	5,000,000,000	5,000,000,000	4,866,606,014	8,626,593	4,857,979,421	97.16	142,020,579
	JUMLAH BELANJA PROGRAM EC	5,000,000,000	5,000,000,000	4,866,606,014	8,626,593	4,857,979,421	97.16	142,020,579
	JUMLAH BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI	5,000,000,000	5,000,000,000	4,866,606,014	8,626,593	4,857,979,421	97.16	142,020,579
	JUMLAH	1,006,491,086,000	433,499,771,000	382,319,130,420	186,018,708	382,133,111,712	92.85	51,366,659,288

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 018

KEMENTERIAN PERTANIAN

ESELON I

: 04

DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.P.E1.1

Tanggal : 09/05/25 10:23 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	387,750,000	34,215,000	0	34,215,000	8.82
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	25,000,000	881,008,805	0	881,008,805	3524.04
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	106,900,000	100,055,536	0	100,055,536	93.6
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	519,650,000	1,015,279,341	0	1,015,279,341	195.38
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	0	7,800,000	0	7,800,000	0
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	147,620,000	63,739,000	0	63,739,000	43.18
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	147,620,000	71,539,000	0	71,539,000	48.46
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	172,527,000	255,502,675	0	255,502,675	148.09
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	172,527,000	255,502,675	0	255,502,675	148.09
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	3,000,000	0	3,000,000	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0	130,716,179	0	130,716,179	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	133,716,179	0	133,716,179	
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	38,949,552	0	38,949,552	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	38,949,552	0	38,949,552	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	36,391,050	0	36,391,050	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,112,722,180	0	1,112,722,180	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	1,149,113,230	0	1,149,113,230	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 09/05/25 10:23 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	839,797,000	2,664,099,977	0	2,664,099,977	317.23
	JUMLAH PENDAPATAN	839,797,000	2,664,099,977	0	2,664,099,977	317.23

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 09/05/25 10:23 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
0100	DKI JAKARTA					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	25,000,000	881,008,805	0	881,008,805	3524.04
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	106,900,000	100,055,536	0	100,055,536	93.6
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	0	1,550,000	0	1,550,000	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	47,404,050	0	47,404,050	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	15,672,521	0	15,672,521	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	36,391,050	0	36,391,050	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	837,638,235	0	837,638,235	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0100) - DKI JAKARTA	131,900,000	1,919,720,197	0	1,919,720,197	516.81
0200	JAWA BARAT					
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	0	250,000	0	250,000	0
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	36,050,000	22,570,000	0	22,570,000	62.61
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	8,325,000	58,202,095	0	58,202,095	699.12
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	25,127,800	0	25,127,800	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0200) - JAWA BARAT	44,375,000	106,149,895	0	106,149,895	190.43
0300	JAWA TENGAH					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	28,813,000	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 09/05/25 10:23 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	117,188,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0300) - JAWA TENGAH	146,001,000	0	0	0	0
0400	DI YOGYAKARTA					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	16,017,000	1,821,000	0	1,821,000	11.37
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	16,236,870	0	16,236,870	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	18,180,000	0	18,180,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0400) - DI YOGYAKARTA	16,017,000	36,237,870	0	36,237,870	3.79
0500	JAWA TIMUR					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	20,500,000	0	0	0	0
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	6,524,750	0	6,524,750	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	9,975,000	0	9,975,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0500) - JAWA TIMUR	20,500,000	16,499,750	0	16,499,750	0
0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	500,000	0	500,000	0
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	1,615,380	0	1,615,380	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	6,825,000	0	6,825,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0600) - NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0	8,940,380	0	8,940,380	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 09/05/25 10:23 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
0700	SUMATERA UTARA					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	12,770,000	9,912,500	0	9,912,500	77.62
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	8,230,000	58,107,540	0	58,107,540	706.05
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	102,697,835	0	102,697,835	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0700) - SUMATERA UTARA	21,000,000	170,717,875	0	170,717,875	261.22
0800	SUMATERA BARAT					
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	0	4,400,000	0	4,400,000	0
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	5,000,000	2,259,500	0	2,259,500	45.19
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	5,000,000	6,891,715	0	6,891,715	137.83
	JUMLAH PENDAPATAN (0800) - SUMATERA BARAT	10,000,000	13,551,215	0	13,551,215	61.01
0900	RIAU					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	8,500,000	0	0	0	0
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	4,020,000	1,450,000	0	1,450,000	36.07
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	539,080	0	539,080	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	8,172,673	0	8,172,673	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,029,750	0	4,029,750	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0900) - RIAU	12,520,000	14,191,503	0	14,191,503	7.21

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : 04 DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 09/05/25 10:23 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
1000	JAMBI					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	2,500,000	2,200,000	0	2,200,000	88
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	2,750,000	2,971,510	0	2,971,510	108.05
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,660,000	0	4,660,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1000) - JAMBI	5,250,000	9,831,510	0	9,831,510	65.35
1100	SUMATERA SELATAN					
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	0	550,000	0	550,000	0
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	450,000	0	450,000	0
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	5,240,000	0	5,240,000	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	1,250,000	0	1,250,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	31,081,696	0	31,081,696	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1100) - SUMATERA SELATAN	0	38,571,696	0	38,571,696	0
1200	LAMPUNG					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	2,000,000	0	0	0	0
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	3,000,000	2,030,000	0	2,030,000	67.67
	JUMLAH PENDAPATAN (1200) - LAMPUNG	5,000,000	2,030,000	0	2,030,000	33.84
1300	KALIMANTAN BARAT					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 09/05/25 10:23 AM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	1,192,800	0	1,192,800	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,475,000	0	4,475,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1300) - KALIMANTAN BARAT	0	5,667,800	0	5,667,800	0
1400	KALIMANTAN TENGAH					
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	0	350,000	0	350,000	0
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	100,000	0	100,000	0
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	589,000	0	589,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1400) - KALIMANTAN TENGAH	0	1,039,000	0	1,039,000	0
1500	KALIMANTAN SELATAN					
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	0	50,000	0	50,000	0
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	50,000	0	50,000	0
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	99,000	0	99,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1500) - KALIMANTAN SELATAN	0	199,000	0	199,000	0
1600	KALIMANTAN TIMUR					
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	32,206,003	0	32,206,003	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,370,000	0	8,370,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1600) - KALIMANTAN TIMUR	0	40,576,003	0	40,576,003	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : 04 DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 09/05/25 10:23 AM
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
1700	SULAWESI UTARA					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	12,050,000	1,350,000	0	1,350,000	11.2
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	820,000	471,250	0	471,250	57.47
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	3,000,000	0	3,000,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,526,000	0	4,526,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1700) - SULAWESI UTARA	12,870,000	9,347,250	0	9,347,250	17.17
1800	SULAWESI TENGAH					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	10,850,000	0	10,850,000	0
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	20,457,185	0	20,457,185	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1800) - SULAWESI TENGAH	0	31,307,185	0	31,307,185	0
1900	SULAWESI SELATAN					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	10,000,000	2,600,000	0	2,600,000	26
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	15,000,000	48,194,740	0	48,194,740	321.3
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,500,000	0	2,500,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	40,230,000	0	40,230,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1900) - SULAWESI SELATAN	25,000,000	93,524,740	0	93,524,740	86.82
2000	SULAWESI TENGGARA					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 09/05/25 10:23 AM
Halaman : 7
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	3,000,000	0	0	0	0
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	4,750,000	1,150,000	0	1,150,000	24.21
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	750,000	1,420,480	0	1,420,480	189.4
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	4,000,000	0	4,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2000) - SULAWESI TENGGARA	8,500,000	6,570,480	0	6,570,480	53.4
2100	MALUKU					
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	10,000,000	0	10,000,000	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	3,000,000	0	3,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2100) - MALUKU	0	13,000,000	0	13,000,000	0
2200	BALI					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	68,750,000	0	0	0	0
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	3,900,000	3,200,000	0	3,200,000	82.05
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	1,700,000	266,830	0	266,830	15.7
	JUMLAH PENDAPATAN (2200) - BALI	74,350,000	3,466,830	0	3,466,830	32.58
2300	NUSA TENGGARA BARAT					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	1,900,000	900,000	0	900,000	47.37
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	7,600,000	13,424,950	0	13,424,950	176.64

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 09/05/25 10:23 AM
Halaman : 8
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	500,000	0	500,000	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,500,000	0	4,500,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10,950,000	0	10,950,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2300) - NUSA TENGGARA BARAT	9,500,000	30,274,950	0	30,274,950	44.8
2400	NUSA TENGGARA TIMUR					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	194,000,000	34,215,000	0	34,215,000	17.64
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	2,500,000	300,000	0	300,000	12
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	1,125,000	0	0	0	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	720,000	0	720,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,000,000	0	5,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2400) - NUSA TENGGARA TIMUR	197,625,000	40,235,000	0	40,235,000	5.93
2600	BENGKULU					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	2,500,000	0	0	0	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	16,000,000	0	16,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2600) - BENGKULU	2,500,000	16,000,000	0	16,000,000	0
2800	MALUKU UTARA					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	5,277,031	0	5,277,031	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 09/05/25 10:23 AM
Halaman : 9
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN (2800) - MALUKU UTARA	0	5,277,031	0	5,277,031	0
2900	BANTEN					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	1,020,000	0	1,020,000	0
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	120,000	0	120,000	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	5,638,453	0	5,638,453	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,000,000	0	1,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2900) - BANTEN	0	7,778,453	0	7,778,453	0
3100	GORONTALO					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	93,000,000	0	0	0	0
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	2,850,000	1,056,000	0	1,056,000	37.05
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	1,039,000	247,260	0	247,260	23.8
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	5,000,000	0	5,000,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,780,864	0	5,780,864	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3100) - GORONTALO	96,889,000	12,084,124	0	12,084,124	12.17
3300	PAPUA BARAT					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	10,000,000	0	10,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3300) - PAPUA BARAT	0	10,000,000	0	10,000,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 09/05/25 10:23 AM
Halaman : 10
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
3400	SULAWESI BARAT					
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	0	650,000	0	650,000	0
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	660,240	0	660,240	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3400) - SULAWESI BARAT	0	1,310,240	0	1,310,240	0
	JUMLAH PENDAPATAN	839,797,000	2,664,099,977	0	2,664,099,977	69.06

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 09/05/25 10:23 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
0100	DKI JAKARTA					
019031	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0	1,550,000	0	1,550,000	0
625875	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	131,900,000	1,918,170,197	0	1,918,170,197	1454.26
	JUMLAH PENDAPATAN (0100) - DKI JAKARTA	131,900,000	1,919,720,197	0	1,919,720,197	727.13
0200	JAWA BARAT					
029027	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT	44,375,000	106,149,895	0	106,149,895	239.21
	JUMLAH PENDAPATAN (0200) - JAWA BARAT	44,375,000	106,149,895	0	106,149,895	239.21
0300	JAWA TENGAH					
039012	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	146,001,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0300) - JAWA TENGAH	146,001,000	0	0	0	0
0400	DI YOGYAKARTA					
049025	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	16,017,000	36,237,870	0	36,237,870	226.25
	JUMLAH PENDAPATAN (0400) - DI YOGYAKARTA	16,017,000	36,237,870	0	36,237,870	226.25
0500	JAWA TIMUR					
059000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	20,500,000	11,939,750	0	11,939,750	58.24
059179	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	0	4,560,000	0	4,560,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0500) - JAWA TIMUR	20,500,000	16,499,750	0	16,499,750	29.12

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 09/05/25 10:23 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
069077	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	0	2,115,380	0	2,115,380	0
069133	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	0	6,825,000	0	6,825,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0600) - NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0	8,940,380	0	8,940,380	0
0700	SUMATERA UTARA					
079025	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	21,000,000	137,757,540	0	137,757,540	655.99
079125	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	0	32,960,335	0	32,960,335	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0700) - SUMATERA UTARA	21,000,000	170,717,875	0	170,717,875	328
0800	SUMATERA BARAT					
089009	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT	10,000,000	13,551,215	0	13,551,215	135.51
	JUMLAH PENDAPATAN (0800) - SUMATERA BARAT	10,000,000	13,551,215	0	13,551,215	135.51
0900	RIAU					
099033	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	12,520,000	13,882,383	0	13,882,383	110.88
099315	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	0	309,120	0	309,120	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0900) - RIAU	12,520,000	14,191,503	0	14,191,503	55.44
1000	JAMBI					
109005	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	5,250,000	9,831,510	0	9,831,510	187.27

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 09/05/25 10:23 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN (1000) - JAMBI	5,250,000	9,831,510	0	9,831,510	187.27
1100	SUMATERA SELATAN					
119000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN	0	8,905,000	0	8,905,000	0
119130	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN	0	29,666,696	0	29,666,696	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1100) - SUMATERA SELATAN	0	38,571,696	0	38,571,696	0
1200	LAMPUNG					
129000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	5,000,000	2,030,000	0	2,030,000	40.6
	JUMLAH PENDAPATAN (1200) - LAMPUNG	5,000,000	2,030,000	0	2,030,000	40.6
1300	KALIMANTAN BARAT					
139030	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0	5,667,800	0	5,667,800	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1300) - KALIMANTAN BARAT	0	5,667,800	0	5,667,800	0
1400	KALIMANTAN TENGAH					
149000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0	1,039,000	0	1,039,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1400) - KALIMANTAN TENGAH	0	1,039,000	0	1,039,000	0
1500	KALIMANTAN SELATAN					
159000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0	199,000	0	199,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1500) - KALIMANTAN SELATAN	0	199,000	0	199,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 09/05/25 10:23 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
1600	KALIMANTAN TIMUR					
169025	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0	5,870,000	0	5,870,000	0
169113	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0	34,706,003	0	34,706,003	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1600) - KALIMANTAN TIMUR	0	40,576,003	0	40,576,003	0
1700	SULAWESI UTARA					
179021	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	12,870,000	6,347,250	0	6,347,250	49.32
179104	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0	3,000,000	0	3,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1700) - SULAWESI UTARA	12,870,000	9,347,250	0	9,347,250	24.66
1800	SULAWESI TENGAH					
189016	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	0	31,307,185	0	31,307,185	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1800) - SULAWESI TENGAH	0	31,307,185	0	31,307,185	0
1900	SULAWESI SELATAN					
199026	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	25,000,000	62,744,740	0	62,744,740	250.98
199126	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0	30,780,000	0	30,780,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1900) - SULAWESI SELATAN	25,000,000	93,524,740	0	93,524,740	125.49
2000	SULAWESI TENGGARA					
209065	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	8,500,000	2,570,480	0	2,570,480	30.24

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 **KEMENTERIAN PERTANIAN**
ESELON I : 04 **DITJEN HORTIKULTURA**

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 09/05/25 10:23 AM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
209108	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	0	4,000,000	0	4,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2000) - SULAWESI TENGGARA	8,500,000	6,570,480	0	6,570,480	15.12
2100	MALUKU					
219000	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	0	13,000,000	0	13,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2100) - MALUKU	0	13,000,000	0	13,000,000	0
2200	BALI					
229027	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	74,350,000	3,466,830	0	3,466,830	4.66
	JUMLAH PENDAPATAN (2200) - BALI	74,350,000	3,466,830	0	3,466,830	4.66
2300	NUSA TENGGARA BARAT					
239009	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	9,500,000	14,824,950	0	14,824,950	156.05
239127	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0	15,450,000	0	15,450,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2300) - NUSA TENGGARA BARAT	9,500,000	30,274,950	0	30,274,950	78.02
2400	NUSA TENGGARA TIMUR					
249030	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	197,625,000	35,235,000	0	35,235,000	17.83
249159	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0	5,000,000	0	5,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2400) - NUSA TENGGARA TIMUR	197,625,000	40,235,000	0	40,235,000	8.92
2600	BENGKULU					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 09/05/25 10:23 AM
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
269000	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	2,500,000	16,000,000	0	16,000,000	640
	JUMLAH PENDAPATAN (2600) - BENGKULU	2,500,000	16,000,000	0	16,000,000	640
2800	MALUKU UTARA					
280151	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	0	5,277,031	0	5,277,031	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2800) - MALUKU UTARA	0	5,277,031	0	5,277,031	0
2900	BANTEN					
299005	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	0	4,330,000	0	4,330,000	0
299381	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	0	3,448,453	0	3,448,453	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2900) - BANTEN	0	7,778,453	0	7,778,453	0
3100	GORONTALO					
319002	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	96,889,000	2,013,580	0	2,013,580	2.08
319089	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	0	10,070,544	0	10,070,544	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3100) - GORONTALO	96,889,000	12,084,124	0	12,084,124	1.04
3300	PAPUA BARAT					
339156	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	0	10,000,000	0	10,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3300) - PAPUA BARAT	0	10,000,000	0	10,000,000	0
3400	SULAWESI BARAT					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : 04 DITJEN HORTIKULTURA

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 09/05/25 10:23 AM
Halaman : 7
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
340056	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0	1,310,240	0	1,310,240	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3400) - SULAWESI BARAT	0	1,310,240	0	1,310,240	0
	JUMLAH PENDAPATAN	839,797,000	2,664,099,977	0	2,664,099,977	96.804



LAMPIRAN

AKRUAL LISTRIK DAN TELEPON



KEMENTERIAN
PERTANIAN





DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 251391301000204

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Mata Uang	Rate	Tanggal Rate	Nilai SP2D Ekuivalen	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	251391301000204	15-01-2025	17-01-2025	3,697,361.00	IDR	1	17-01-2025	3,697,361	NON GAJI	00022T/625875/2025	15-01-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang berupa tagihan telepon bulan Januari 2025 untuk 12 invoice	Cek Akun	☐

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00022A

Tanggal 15-Jan-2025

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta V (139)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 3.697.361,00

**** TIGA JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH SATU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2025
Dasar Pembayaran
DIPA No. : DIPA-018.04.1.625875/2025
Tanggal : 02-Dec-2024
UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG
APBN 2025

Jenis Tagihan : NON GAJI
Jatuh Tempo : 17-Jan-2025
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

625875.139.522112.01804WA.1774EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000

3.697.361,00

Jumlah Pengeluaran

3.697.361,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

3.697.361,00

Kepada:

Nomor : 2536

Nama Supplier : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK

NPWP1 : 0010000131093000

NPWP2 : 0000148700017000

NOP :

Uraian : Pembayaran belanja barang berupa tagihan telepon bulan Januari 2025 untuk 12 invoice

Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA

Rekening : 120101000014303

Nama Pemilik : PT TELKOM INDONESIA ENTERPRISE

Alamat : JL. KEBUN SIRIH NO. 10 - 12

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|NTg00DE3NzU=

JAKARTA SELATAN, 15 Januari 2025

a.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



JUDIANTORO. SE, M.SI

NIP 197609142002121002

DAFTAR RINCIAN TAGIHAN

Nomor : 00022A

Tanggal : 15-Jan-2025

Halaman 2 dari 2

No	No Meter / No Telepon Nama Pelanggan	Periode Tagihan	Nilai Tagihan
1	122220330727 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	2025-01	366.300,00
2	122220328318 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	2025-01	876.900,00
3	122220324157 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	2025-01	876.900,00
4	0217819117 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	2025-01	36.186,00
5	02178847047 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	2025-01	75.819,00
6	02172741420 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	2025-01	44.400,00
7	122220328260 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	2025-01	876.900,00
8	02178842941 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	2025-01	57.165,00
9	0217817611 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	2025-01	36.186,00
10	122219247935 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	2025-01	327.450,00
11	0217806760 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	2025-01	80.897,00
12	0217806881 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	2025-01	42.258,00
JUMLAH			3.697.361,00

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00022A

Tanggal : 15-Januari-2025

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
625875.139.522112.01804WA.1774EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000		
1	994.002.0A.001091-Langganan telepon	3.697.361,00
	Jumlah	3.697.361,00
Jumlah		3.697.361,00

JAKARTA SELATAN
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

JUDIANTORO. SE, M.SI
NIP 197609142002121002



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 251391303000212

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Mata Uang	Rate	Tanggal Rate	Nilai SP2D Ekuivalen	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	251391303000212	15-01-2025	17-01-2025	124,686,926.00	IDR	1	17-01-2025	124,686,926	NON GAJI	00023T/625875/2025	15-01-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang berupa tagihan listrik bulan Januari 2025 untuk 11 invoice	Cek Akun	☐

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00023A

Tanggal 15-Jan-2025

Halaman 1 dari 2

Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta V (139)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 124.686.926,00

**** SERATUS DUA PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2025
Dasar Pembayaran
DIPA No. : DIPA-018.04.1.625875/2025
Tanggal : 02-Dec-2024
UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG
APBN 2025

Jenis Tagihan : NON GAJI
Jatuh Tempo : 17-Jan-2025
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

625875.139.522111.01804WA.1774EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000

124.686.926,00

Jumlah Pengeluaran

124.686.926,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

124.686.926,00

Kepada:

Nomor : 1134742

Nama Supplier : PT. PLN PERSERO

NPWP1 : 0100162930510000

NPWP2 : 0000148700017000

NOP :

Uraian : Pembayaran belanja barang berupa tagihan listrik bulan Januari 2025 untuk 11 invoice

Bank / Pos : BPD DKI

Rekening : 9901235400000000

Nama Pemilik : PT PLN PERSERO INTERKONEKSI SAKTI

Alamat : JL. TRUNOJOYO BLOK M 1/135 MELAWAI
KEBAYORAN BARU

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|NTg00DE3Nzg=

JAKARTA SELATAN, 15 Januari 2025

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



JUDIANTORO. SE, M.SI
NIP 197609142002121002

DAFTAR RINCIAN TAGIHAN

Nomor : 00023A

Tanggal : 15-Jan-2025

Halaman 2 dari 2

No	No Meter / No Telepon Nama Pelanggan	Periode Tagihan	Nilai Tagihan
1	547500025976 DITJEN TP & HORTIKUL	2025-01	2.821.220,00
2	547103442579 DITJEN PANGAN & HORT	2025-01	24.691.254,00
3	547102251454 DIR B PRODPADI & PAL	2025-01	35.876.541,00
4	547100013241 DITJENTAN TP/DITPROD	2025-01	24.024.359,00
5	547101049757 DITJENTAN/DININF	2025-01	3.110.480,00
6	547101049495 KPPP HORTIKULTURA	2025-01	9.940.354,00
7	547101046805 DITJENTAN/DINWAN	2025-01	5.337.602,00
8	547401767761 DIRJEN HORTIKULTURA	2025-01	996.060,00
9	547401491840 DITJEN HORTIKULTURA	2025-01	2.243.380,00
10	547400942094 PUS PROMOSI KOM PERTANIAN	2025-01	13.402.296,00
11	547401769836 DIR JEND HORTIKULTURA KMP	2025-01	2.243.380,00
JUMLAH			124.686.926,00

**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor SPM : 00023A

Tanggal : 15-Januari-2025

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
625875.139.522111.01804WA.1774EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000		
1	994.002.0A.001090-Langganan listrik	124.686.926,00
	Jumlah	124.686.926,00
Jumlah		124.686.926,00

JAKARTA SELATAN
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

JUDIANTORO. SE, M.SI
NIP 197609142002121002



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 251391301001139

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Mata Uang	Rate	Tanggal Rate	Nilai SP2D Ekuivalen	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	251391301001139	11-02-2025	12-02-2025	150,010,486.00	IDR	1	12-02-2025	150,010,486	GUP	00037T/625875/2025	11-02-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan Untuk keperluan Belanja Barang Direktorat Jenderal Hortikultura	Cek Akun	☐

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00037A

Tanggal 11-Feb-2025

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta V (139)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 150.010.486,00

**** SERATUS LIMA PULUH JUTA SEPULUH RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2025
Dasar Pembayaran
DIPA No. : DIPA-018.04.1.625875/2025
Tanggal : 02-Dec-2024
UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG
APBN 2025

Jenis Tagihan : GUP
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
625875.139.521211.01804WA.1774EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	1.633.800,00
625875.139.522111.01804WA.1774EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	2.824.220,00
625875.139.522112.01804WA.1774EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	4.660.060,00
625875.139.524111.01804WA.1774ABR.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	75.805.717,00
625875.139.524111.01804WA.1774EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	19.324.818,00
625875.139.524111.01804WA.1774EBD.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	22.356.871,00
625875.139.524114.01804WA.1774ABR.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	3.975.000,00
625875.139.524114.01804WA.1774EBD.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	19.430.000,00
Jumlah Pengeluaran	150.010.486,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	150.010.486,00

Kepada:

Nomor	: 837191	Bank / Pos	: BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier	: DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	Rekening	: 650936258751000
NPWP1	: 0000148700017000	Nama Pemilik	: BPG 139 DITJEN HORTIKULTURA
NPWP2	: 0000148700017000	Alamat	: Jl. AUP No.3 Ps. Minggu Jakarta Selatan
NOP	:		
Uraian	: Penggantian Uang Persediaan Untuk keperluan Belanja Barang Direktorat Jenderal Hortikultura		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23| NTK3MDAyMj A=

JAKARTA SELATAN, 11 Februari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



JUDIANTORO. SE, M.SI
NIP 197609142002121002

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00037A

Tanggal : 11-Februari-2025

Halaman : 1 dari 2

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
625875.139.524111.01804WA.1774ABR.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000		
1	010.051.0D.000960-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Perjalanan Pemantauan, Monitoring dan Pengawasan Rekomendasi Impor Bawang Putih	15.700.000,00
2	010.051.0D.000961-Biaya Taksi Perjalanan Dinas Perjalanan Pemantauan, Monitoring dan Pengawasan Rekomendasi Impor Bawang Putih	11.526.000,00
3	010.051.0D.000963-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III Perjalanan Pemantauan, Monitoring dan Pengawasan Rekomendasi Imp	15.227.756,00
	Jumlah	42.453.756,00
625875.139.524114.01804WA.1774ABR.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000		
1	010.051.0D.000965-Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday di Luar Kantor Pejabat Eselon III ke bawah Evaluasi Rekomendasi Impor Bawang Putih	3.975.000,00
	Jumlah	3.975.000,00
625875.139.524111.01804WA.1774ABR.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000		
1	010.051.0E.000971-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Perjalanan Pemantauan, Monitoring dan Pengawasan Rekomendasi Impor Non Bawang Putih	5.550.000,00
2	010.051.0E.000972-Biaya Taksi Perjalanan Dinas Perjalanan Pemantauan, Monitoring dan Pengawasan Rekomendasi Impor Non Bawang Putih	900.000,00
3	010.051.0E.000973-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Perjalanan Pemantauan, Monitoring dan Pengawasan Rekomendasi Impor	19.739.048,00
4	010.051.0E.000974-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III Perjalanan Pemantauan, Monitoring dan Pengawasan Rekomendasi Imp	7.162.913,00
	Jumlah	33.351.961,00
625875.139.524111.01804WA.1774EBD.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000		
1	953.051.0A.001559-Uang harian perjalanan dinas	3.010.000,00
2	953.051.0A.001560-Biaya taksi perjalanan dinas (DKI Jakarta)	789.000,00
	Jumlah	3.799.000,00
625875.139.524114.01804WA.1774EBD.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000		
1	953.051.0A.001565-Biaya paket kegiatan rapat/pertemuan fullday di luar kantor	17.840.000,00
2	953.051.0A.001567-Uang harian perjalanan dinas	570.000,00
3	953.051.0A.001568-Biaya taksi perjalanan dinas	1.020.000,00
	Jumlah	19.430.000,00
625875.139.524111.01804WA.1774EBD.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000		
1	953.051.0B.001570-Uang harian perjalanan dinas	6.880.000,00
2	953.051.0B.001571-Biaya taksi perjalanan dinas (DKI Jakarta)	831.500,00
3	953.051.0B.001574-Biaya penginapan perjalanan dinas	1.450.000,00
4	953.051.0C.001580-Uang harian perjalanan dinas	6.020.000,00
5	953.051.0C.001581-Biaya taksi perjalanan	776.371,00
6	953.051.0C.001582-Biaya penginapan perjalanan dinas	2.600.000,00
	Jumlah	18.557.871,00

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
625875.139.524111.01804WA.1774EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000		
1	956.051.0A.001004-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota	4.100.000,00
2	956.051.0A.001006-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Tujuan)	4.823.818,00
3	956.051.0A.001008-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III	2.325.000,00
	Jumlah	11.248.818,00
625875.139.521211.01804WA.1774EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000		
1	963.051.0A.001161-Konsumsi Rapat	1.633.800,00
	Jumlah	1.633.800,00
625875.139.524111.01804WA.1774EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000		
1	963.051.0A.001166-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota	5.160.000,00
2	963.051.0A.001168-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Tujuan)	636.000,00
3	963.051.0A.001170-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/ Golongan III	2.280.000,00
	Jumlah	8.076.000,00
625875.139.522111.01804WA.1774EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000		
1	994.002.0A.001090-Langgan listrik	2.824.220,00
	Jumlah	2.824.220,00
625875.139.522112.01804WA.1774EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000		
1	994.002.0A.001091-Langgan telepon	4.660.060,00
	Jumlah	4.660.060,00
Jumlah		150.010.486,00

JAKARTA SELATAN
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



JUDIANTORO. SE, M.SI
NIP 197609142002121002

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

ID Pelanggan	: 547402172135	Total Yang Harus Dibayarkan* Rp 2,821,220
Nama Pelanggan	: DIT JEN HOLTIKULTURA	Total Tagihan** Rp 2,821,220
Alamat Pelanggan	: JL JL. AUP NO.3 PASAR MINGGU - JL .AUP NO 3	Subsidi*** : Rp 0
NPWP	: 09.974.633.1-017.000	Jatuh Tempo : 20 Januari 2025
Nama Sesuai NPWP	: ISSUSILANINGTYAS U.H	Status : BELUM LUNAS - (11)
Alamat Sesuai NPWP	: JL H. UMAIDI RAWA BAMBU RT 002/007	

NIK : 3174045104740005
Golongan Tarif : P1 / 41,500 VA
Faktor Kali Meter : 1 / 1

Tunggakan Bulan Sebelumnya	Rp 0	Pembayaran dapat dilakukan melalui
Cicilan		PLN Mobile
BP (Biaya Penyambungan)	Rp 0	Mitra PLN (Bank, POS dan Mitra Lainnya)
UJL (Uang Jaminan Langganan)	Rp 0	
Angsuran Lainnya	Rp 0	

Biaya Beban / EMIN Rp 0

Rincian Tagihan Bulan Berjalan					Informasi Pengaduan
	LWBP	WBP	kVArh		Call Center 123
Stand Akhir (01-01-2025)	170.270	0	0		
Stand Awal (01-12-2024)	28.080	0	0		

kWh LWBP : 1,660 Tarif LWBP : Rp 1,699.53
kWh WBP : 0 Tarif WBP : Rp 0.00
kVArh : 0 Tarif kVArh : Rp 0.00

Rupiah TTL Terpakai Rp 2,821,220
Rupiah Kompensasi**** Rp 0
Rupiah TTL minus Kompensasi Rp 2,821,220
PPN***** (11%) Rp 310,334
PBJT-TL***** (%) Rp 0

Rupiah Jasa Layanan dan Keandalan, sewa trafo, paralel, dll Inc. Tax Rp 0
Renewable Energy Certificate (0 unit x Rp 0) Rp 0
PPN Renewable Energy Certificate) Rp 0
Total Tagihan Rp 2,821,220



Electricity For Better Life

Pastikan Instalasi Anda Memiliki Sertifikat Laik Operasi.
Demi Kenyamanan Anda Bayarlah Rekening Anda Tepat Waktu.

WBP : Waktu Beban Puncak (18:00 - 22:00)
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak
kVArh : Energi daya reaktif
P2TL : Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik
TTL : Tarif Tenaga Listrik

Perundangan & Aturan : Per ESDM No.28 tahun 2016 dengan Perubahan No.03 tahun 2020.
PMK 174/PMK.02/2019 & Per ESDM 29 tahun 2016, perubahan terakhir No.17/2019.
Informasi Tagihan Listrik ini berlaku sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2021.

Keterangan

: *) Total tagihan ditambahkan jumlah tunggakan bulan lalu.
**) Total tagihan belum termasuk bea meterai dan biaya keterlambatan pembayaran jika ada.
***) Perkiraan Subsidi/Kompensasi yang di terima di hitung berdasarkan BPP Keekonomian.
****) Kompensasi TMP.
*****) PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 49 TAHUN 2022, kecuali Pelanggan R3/diatas 6600 VA.
*****) Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL)
Rupiah TTL Terpakai sudah termasuk stimulus/relaksasi

SURAT PENGAKUAN HUTANG (SPH / L-15)
DAFTAR PERINCIAN BIAYA JASTEL ATAS NAMA : SATKER DITJEN HORTIKULTURA
BULAN : JANUARI 2025
(PEMAKAIAN BULAN : DESEMBER 2024)
JASA TELEKOMUNIKASI

02D0773

PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA
UNIT ENTERPRISE REGIONAL II JAKARTA
AREA JAKARTA

DEPARTEMEN : KEMENTERIAN
UNIT ORGANISASI : PERTANIAN
SERVIS AREA : JAKARTA
SATUAN KERJA : SATKER DITJEN HORTIKULTURA

No.C.TEL01/KU.370/DGS-B30002000/2025

NO	NO. KWIT	NO. TELP	NO. PLG	KESATUAN	ABONM	TAGIHAN	PPN	JML TAGIHAN
1	2501A687662990001	122220338964		DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	1.049.000	1.049.000	115.390	1.164.390
2	2501A689455510001	122220339521		DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	1.049.000	1.049.000	115.390	1.164.390
3	2501A689450930001	122220339988		DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	1.049.000	1.049.000	115.390	1.164.390
4	2501A689450720001	122220326432		DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	1.049.000	1.049.000	115.390	1.164.390
TOTAL					4.196.000	4.196.000	461.560	4.657.560
METERAI								0
GRAND TOTAL								4.657.560

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku :
Menyatakan bahwa jumlah uang tagihan sebesar : Rp. 4.657.560
(Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah)
Adalah benar merupakan tagihan atas jasa penggunaan telekomunikasi

JAKARTA, JANUARI 2025

Mengetahui / Menyetujui
PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk



RAHMALIA DINI PUTRANTI
SM PLANNING PERFORMANCE & SUPPORT

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
BILLING & COLLECTION DIVISI ENTERPRISE SERVICE
JL. KEBON SIRIH NO. 10 - 12
JAKARTA 10110

422025010100002T14050001

LAYANAN PEMBAYARAN PEM / TNI & POLRI

Sudah terima dari : DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
Uang sebanyak : ***empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah***
Untuk pembayaran : JASA TELEKOMUNIKASI Tagihan Bulan JANUARI 2025
(Daftar Rincian Terlampir)

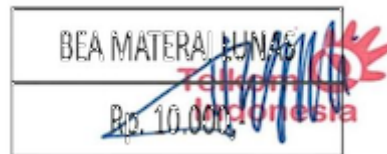
Atas Nama : DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Rp.4,657,560

Jakarta, JANUARI -2025

BANK BRI - BRI KC Jakarta Cut Mutiah
REK. NO 7711114002004814
a/n PT Telekomunikasi Indonesia Enterprise
NPWP 00.100.001.3-109.300

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk



Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas berdasarkan Penetapan Pemungut Bea Meterai sesuai
Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor S-27/PBM/PJ/2021, tanggal 21 Desember 2021

RAHMALIA DINI PUTRANTI

SM PLANNING PEFORMANCE
SUPPORT Divisi Government Service



LAMPIRAN

SK LIKUIDASI



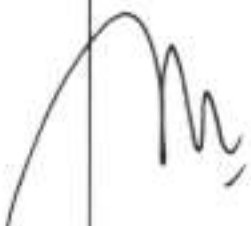
KEMENTERIAN
PERTANIAN



KARTU KENDALI

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Draft Surat Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Tim Likuidasi Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura T.A. 2024, ini telah dibaca dan disetujui substansinya oleh:

No	Nama	Jabatan	Paraf	Tgl
1.	Dr.Ir. Muhammad Taufiq Ratule.,M.Si	Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura		
2.	Judiantoro, SE, M.Si	Ketua Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara		3/14/2024
3.	Armilawaty Razak, S.Kom., M.T.I.	Ketua Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Diraktorat Jenderal Hortikultura		3/12/2024
4.	Taufik Irawan, S.H, M.H	Ketua Tim Kerja Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura		3/2024 12

Jakarta, November 2024

**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR : 549/Kpts/HK.320/D/XI/2024

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN TIM LIKUIDASI

LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

- Menimbang :
- a. bahwa entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang tidak lagi beroperasi sebagai entitas akuntansi atau entitas pelaporan, perubahan identitas entitas akuntansi atau entitas pelaporan, atau tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya, perlu dilakukan likuidasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. bahwa pengalokasian anggaran untuk Satuan Kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diintegrasikan di Direktorat Jenderal Hortikultura sehingga perlu menetapkan pemimpin entitas akuntansi sebagai penanggung jawab proses likuidasi entitas akuntansi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura
 - d. Kementerian Pertanian tentang Penetapan Penanggung Jawab dan Tim Likuidasi Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1250);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN TIM LIKUIDASI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemimpin Entitas Akuntansi pada Satuan Kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilikuidasi sebagai Penanggung Jawab proses likuidasi Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Penanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Menetapkan Entitas Akuntansi pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai entitas akuntansi yang ditunjuk dan secara struktural membawahi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.
- KETIGA : Membentuk dan menetapkan Tim Likuidasi Entitas Akuntansi pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Hortikultura yang selanjutnya disebut sebagai Tim Likuidasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura.
- KEEMPAT : Seluruh hak dan kewajiban yang berhubungan dengan pelaksanaan DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari satuan kerja entitas akuntansi yang dilikuidasi diserahkan kepada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Hortikultura.
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menatausahakan dan melaporkan penyelesaian hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab satuan kerja dilikuidasi meliputi penyelesaian:

- 1) saldo kas di bendahara pengeluaran;
 - 2) saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran;
 - 3) piutang dan utang; dan
 - 4) persediaan, aset tetap, dan aset lainnya;
- b. menyusun, menandatangani, dan menyampaikan laporan keuangan selama proses penyelesaian hak dan kewajiban sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil;
 - c. melakukan koreksi laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban, antara lain berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - d. membuat Berita Acara Serah Terima Hak/Kewajiban dalam rangka likuidasi.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas, sebagai berikut:

- I. Ketua: Bertanggung jawab atas penyelesaian pelaksanaan proses likuidasi pada Satuan Kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2024
- II. Wakil Ketua : Melakukan monitoring penyelesaian pelaksanaan proses likuidasi pada satuan kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2024
- III. Anggota :
 1. Melakukan identifikasi saldo serta kondisi fisik Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lain – lain pada entitas akuntansi yang akan dilikuidasi
 2. Melakukan identifikasi saldo Piutang pada entitas akuntansi yang akan dilikuidasi
 3. Melakukan verifikasi Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara serta dokumen pendukungnya atas entitas akuntansi yang akan dilikuidasi
 4. Menerima dan mencatat Persediaan, Aset Tetap, Aset lain – lain dan Piutang yang belum bisa diselesaikan oleh entitas akuntansi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura yang akan dilikuidasi ke dalam laporan keuangan Entitas Akuntansi pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Hortikultura.

5. Melakukan penatausahaan atas barang milik negara yang diterima dari entitas akuntansi yang dilikuidasi.
6. Menjelaskan dalam Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Hortikultura tentang rincian entitas akuntansi yang telah dilikuidasi.
7. Melakukan monitoring penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara periode Tahun 2024 yang bersaldo nihil pada entitas akuntansi yang dilikuidasi.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25
November 2024

Plt. DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



W MUHAMMAD TAUFIQ RATULE

Tembusan:

1. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
HORTIKULTURA
NOMOR 549/Kpts/HK.320/D/XI/2024
TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG
JAWAB DAN TIM LIKUIDASI LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PIMPINAN/KEPALA SATUAN KERJA ENTITAS AKUNTANSI SEBAGAI
PENANGGUNG JAWAB LIKUIDASI
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PENANGGUNG JAWAB LIKUIDASI
1	018.04.019031.DK	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA
2	018.04.029027.DK	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT
3	018.04.029160.TP	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT	
4	018.04.029036.TP	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB.CIANJUR	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB.CIANJUR
5	018.04.039012.DK	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
6	018.04.039152.TP	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	
7	018.04.049025.DK	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY
8	018.04.049088.TP	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	
9	018.04.059000.DK	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
10	018.04.059179.TP	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PENANGGUNG JAWAB LIKUIDASI
11	018.04.059056.TP	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BANYUWANGI	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BANYUWANGI
12	018.04.069077.DK	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
13	018.04.069133.TP	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	
14	018.04.079025.DK	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA
15	018.04.079125.TP	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	
16	018.04.089009.DK	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT	KEPALA DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT
17	018.04.089131.TP	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT	
18	018.04.099033.DK	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU
19	018.04.099315.TP	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	
20	018.04.109005.DK	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI
21	018.04.109905.TP	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	
22	018.04.119000.DK	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN	KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN
23	018.04.119130.TP	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN	
24	018.04.129000.DK	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
25	018.04.129113.TP	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN	

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PENANGGUNG JAWAB LIKUIDASI
		PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	
26	018.04.139030.DK	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
27	018.04.139126.TP	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
28	018.04.149000.DK	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
29	018.04.149115.TP	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
30	018.04.159000.DK	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
31	018.04.159108.TP	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	
32	018.04.169025.DK	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
33	018.04.169113.TP	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	
34	018.04.179021.DK	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA
35	018.04.179104.TP	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	
36	018.04.189016.DK	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH
37	018.04.189916.TP	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	
38	018.04.192135.TP	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN ENREKANG	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN ENREKANG
39	018.04.199026.DK	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PENANGGUNG JAWAB LIKUIDASI
		PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
40	018.04.199126.TP	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	
41	018.04.199092.TP	DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANTAENG	KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANTAENG
42	018.04.209065.DK	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	KEPALA DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA
43	018.04.209108.TP	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	
44	018.04.219000.DK	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	KEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU
45	018.04.219091.TP	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	
46	018.04.229027.DK	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI
47	018.04.229100.TP	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	
48	018.04.229049.TP	DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABANAN	KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABANAN
49	018.04.239009.DK	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
50	018.04.239127.TP	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	
51	018.04.249030.DK	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
52	018.04.249159.TP	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	
53	018.04.259018.DK	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA
54	018.04.259098.TP	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	
55	018.04.269000.DK	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU
56	018.04.269057.TP	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KAB KEPAHIANG	KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KAB KEPAHIANG
57	018.04.280151.TP	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PENANGGUNG JAWAB LIKUIDASI
58	018.04.289034.DK	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	KEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA
59	018.04.299005.DK	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	KEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN
60	018.04.299381.TP	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	
61	018.04.309032.DK	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
62	018.04.309901.TP	DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
63	018.04.319002.DK	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	KEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO
64	018.04.319089.TP	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	
65	018.04.329026.DK	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
66	018.04.339156.DK	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT
67	018.04.340056.DK	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT
68	018.04.340142.TP	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT	
69	018.04.417673.DK	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
70	018.04.417674.TP	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	
71	018.04.419022.TP	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SINJAI	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SINJAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LIKUIDASI
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2024

- | | | |
|---|---|---|
| I. KETUA | : | SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA |
| II. WAKIL KETUA | : | KETUA KELOMPOK KEUANGAN DAN BMN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA |
| III. SEKRETARIS I | : | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MADYA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA |
| IV. SEKRETARIS II | : | KETUA KELOMPOK PELAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN |
| V. ANGGOTA | : | |
| PELAKSANA LIKUIDASI ASET TETAP DAN PERSEDIAAN | | <ol style="list-style-type: none">1. KETUA TIM KERJA BMN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA2. KETUA TIM KERJA PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN3. KETUA TIM KERJA PENATAUSAHAAN, VERIFIKASI, DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN |
| PELAKSANA LIKUIDASI PIUTANG NEGARA DAN PELAPORAN KEUANGAN | | <ol style="list-style-type: none">1. KETUA TIM VERIFIKASI, AKUNTANSI DAN TLHP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA2. KETUA TIM KERJA PERBENDAHARAAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA3. KETUA TIM KERJA PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT SATKER DAN UNIT KERJA ESELON 1 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN4. KETUA TIM KERJA PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN5. KETUA TIM KERJA PIUTANG NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN |

Plt. DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

MUHAMMAD TAUFIQ RATULE



LAMPIRAN

REKAPITULASI BA TRANSFER TA 2024 DALAM RANGKA LIKUIDASI



KEMENTERIAN
PERTANIAN



REKAPITULASI TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK TA 2024

PIUTANG (TRANSFER PERIODE 12)							PERSEDIAAN (TRANSFER PERIODE 13)				ASET TETAP (TRANSFER SEBELUM PERIODE 12)				ASET TETAP (TRANSFER PERIODE 13)								
No	Kode Sather	Nama Sather	115211 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	152111 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti/ Rugi	155111 Piutang Jangka Panjang lainnya	TOTAL PIUTANG	PENGALUAN KE SITP	NOMOR DAN TANGGAL BA TRANSFER	117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	117129 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	total persediaan	NOMOR DAN TANGGAL BA TRANSFER	132111 Peralatan dan Mesin	133111 Gedung dan Bangunan	134112 Irigasi	134113 Jaringan	166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	NOMOR DAN TANGGAL BA TRANSFER	134112 Irigasi	134113 Jaringan	166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	NOMOR DAN TANGGAL BA TRANSFER	
1	019031	DK DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA									-							683,480,642					
2	039012	DK DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH									-			5,891,602,000									
3	049025	DK DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	-	-	-	-			-	-	-									573,689,000	11,500,000	-	
4	059000	DK DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR									-		417,046,648	303,893,560	497,082,115	441,468,035	3,710,050,199						
5	069077	DK DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	-	-	18,346,414	18,346,414	BUKA PERIODE 12	500.6/26/2024 BAST TP 069077-HORTI & 31 DESEMBER 2024	-	58,997,600	58,997,600	500.6/26/2024 BAST TP 069077-HORTI & 31 DESEMBER 2024	482,042,000	324,050,000				500.6/26/2024 BAST TP 069077-HORTI & 31 DESEMBER 2024	-	-	-		
6	069133	TP DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	-	-	102,876,854	102,876,854	BUKA PERIODE 12	500.6/27/2024 BAST TP 069133-HORTI & 31 DESEMBER 2024	-	-	-								-	-	-		
7	079025	DK DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	-	-	-	-			12,600,000	76,500,000	89,100,000	900/238.36/KEU/XI/2024 & 31 DESEMBER 2024							-	-	-		
8	089009	DK DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT	-	-	-	-			50,732,960	359,231,520	409,964,480	902/6887/sather 04/2024 & 31 desember 2024	185,200,000						-	-	75,114,700	902/6887/sather 04/2024 & 31 desember 2024	
9	099033	DK DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	-	-	-	-			32,799,981	130,313,000	163,112,981	500.6/DISTPTPH/S ETDIS/1411 & 31 DESEMBER 2024							-	-	-		
10	099315	TP DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	-	-	15,200,000	15,200,000	BUKA PERIODE 12	500.6/DISTPTPH/SETDIS/1410 & 31 DESEMBER 2024	-	-	-								-	-	-		
11	109005	DK DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	-	-	-	-			9,591,834	-	9,591,834	4478/DP1THP-1.2/XII/2024 & 31 DESEMBER 2024							-	-	-		
12	119000	DK DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN	-	-	-	-			-	80,250,000	80,250,000	700.1.2.6/11900 0/XII/2024 & 31 DESEMBER 2024							-	-	-		
13	119130	TP DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN	-	-	33,296,000	33,296,000	BUKA PERIODE 12 DAN BATAL SETUP LIKUIDASI	700.1.2.6/119130/XII/2024 & 31 DESEMBER 2024	-	-	-								-	-	-		
14	139030	DK DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-			-	116,975,267	116,975,267	000.2.1.1/2037/DI STPH & 31 DESEMBER 2024							-	-	-		
15	149000	DK DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	-	-	-	-			-	11,344,320	11,344,320	2459/SEKRET-150/BAST-149000DK/XII/202 4 & 31 DESEMBER 2024							-	-	-		
16	169113	DK DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR									-		195,944,375					003.2/570/BAST/OP1 PH/11 & 25 November 2024					
17	179104	TP DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	-	-	5,986,995	5,986,995	BUKA PERIODE 12	500.6/1211/SEKR.BIO.TPH & 31 DESEMBER 2024	-	-	-								-	-	-		
18	189016	DK DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	-	-	-	-			-	94,007,400	94,007,400	027/24305/C.BPH & 31 DESEMBER 2024	289,052,375	74,532,000	193,481,000	6,400,000		027/24305/C.BPH & 31 DESEMBER 2024	-	-	-		
19	199026	DK DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	-	-	-	-			16,650,000	8,600,000	25,250,000	000.7.5/9516/DTP H-BUN & 31 DESEMBER 2024							-	-	-		
20	199126	TP DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	242,550,000	-	-	242,550,000	BUKA PERIODE 12	000.7.5/9517/DTPH-BUN & 31 DESEMBER 2024	-	-	-								-	-	-		
21	209065	DK DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	-	-	5,000,000	5,000,000	BUKA PERIODE 12	41/BAST/DISBUN/XII/2024 & 31 DESEMBER 2024	34,796,500	19,696,000	54,492,500		68,031,000					41/BAST/DISBUN/XII/ 2024 & 31 DESEMBER 2024	-	-	-		
22	209108	TP DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	10,419,574	-	102,473,561	112,893,135	BUKA PERIODE 12	42/BAST/DISBUN/XII/2024 & 31 DESEMBER 2024	-	-	-								-	-	-		
23	219000	DK DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	-	64,425,000	-	64,425,000	BUKA PERIODE 12 DAN BATAL SETUP LIKUIDASI	010/3561/12/2024 & 30 DESEMBER 2024	-	-	-								-	-	-		
24	239009	DK DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	-	-	4,491,000	4,491,000	BUKA PERIODE 12 DAN BATAL SETUP LIKUIDASI	900/HORTI-TP 1835.B/DISTANBUN & 31 DESEMBER 2024	5,597,500	-	5,597,500	900/hortidk.1835/ DISTANBUN & 31 DESEMBER 2024							-	-	-		
25	239127	TP DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	23,200,000		-	23,200,000	BUKA PERIODE 12 DAN BATAL SETUP LIKUIDASI	900/HORTI-TP 1838.A/DISTANBUN & 31 DESEMBER 2024	-	-	-								-	-	-		

PIUTANG (TRANSFER PERIODE 12)										PERSEDIAAN (TRANSFER PERIODE 13)			ASET TETAP (TRANSFER SEBELUM PERIODE 12)					ASET TETAP (TRANSFER PERIODE 13)				
No	Kode Sektor	Nama Satker	115211 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	152111 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	155111 Piutang jangka Panjang lainnya	TOTAL PIUTANG	PENGALUAN KE SITP	NOMOR DAN TANGGAL BA TRANSFER	117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	117129 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	total persediaan	NOMOR DAN TANGGAL BA TRANSFER	132111 Peralatan dan Mesin	133111 Gedung dan Bangunan	134112 Irigasi	134113 Jaringan	166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	NOMOR DAN TANGGAL BA TRANSFER	134112 Irigasi	134113 Jaringan	166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	NOMOR DAN TANGGAL BA TRANSFER
26	249030	DK DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	6,980,000	6,980,000	BUKA PERIODE 12	900.1/3401/DKPI & 31 DESEMBER 2024	-	93,129,000	93,129,000								-	-	-	
27	249159	TP DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	10,423,124	-	35,754,113	46,177,237	BUKA PERIODE 12	900.1/3402/DKPI & 31 DESEMBER 2024	-	-	-								-	-	-	
28	269000	DK DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	-	-	771,575,450	771,575,450	BUKA PERIODE 12	BLM ADA	-	-	-								-	-	-	
29	289034	DK DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	16,279,000	-	43,310,181	59,589,181	BUKA PERIODE 12		-	-	-		26,500,000					500.6.1/1220/2024 & 23 desember 2024	-	-	-	
30	299005	DK DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	29,875,000	-	15,500,000	45,375,000	BUKA PERIODE 12	524/2602-DISTAN/2024 & 31 DESEMBER 2024	-	-	-								-	-	-	
31	299381	TP DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	-	-	26,371,250	26,371,250	BUKA PERIODE 12	524/2602-a-DISTAN/2024 & 31 DESEMBER 2024	-	-	-								-	-	-	
32	309032	DK DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	-	-	-			-	8,189,307	8,189,307	094/01/BAST/DPK P-V/APBN-DK/XII/2024 & 31 DESEMBER 2024							-	-	-	
33	319002	DK DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	-	-	30,985,675	30,985,675	BUKA PERIODE 12	500.7/DISTAN-HORTI/1982/XII/2024 & 4 NOVEMBER 2024	-	-	-								-	-	-	
34	319089	TP DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	21,701,052	-	166,346,753	188,047,805	BUKA PERIODE 12	500.6/DISTAN-HORTI/1981/XII/2024 & 4 NOVEMBER 2024	-	-	-								-	-	-	
35	329026	DK DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-			13,395,000	-	13,395,000	521/880/BAST-BAN/123026DK/D KPPKH/KEPRI XII/2024 & 30 DESEMBER 2024							-	-	-	
36	339156	DK DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	19,700,500	-	777,286,000	796,986,500	BUKA PERIODE 12	500.6/1545/OTPHBUN-PB/11/2024 4 NOVEMBER 2024	-	-	-								-	-	-	
37	625875	KP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	383,302,807	-	2,328,562,778	2,711,865,585	BUKA PERIODE 12		9,984,731,555	2,190,698,169	12,175,429,724								2,011,500,115	2,703,039,235	4,442,128,841	
Jumlah			757,451,057	64,425,000	4,490,343,024	5,312,219,081			10,160,895,330	3,247,931,583			1,663,816,398	6,594,077,560	690,563,115	447,868,035	4,393,530,841		2,585,189,115	2,714,539,235	4,517,243,541	

LAMPIRAN

HIBAH



**KEMENTERIAN
PERTANIAN**



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

**PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK
BARANG / JASA / SURAT BERHARGA**

Nomor : 01176T
Tanggal : 03-12-2024
Satker : 625875 - DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

KPPN : 139 - JAKARTA V
Tanggal : 03-12-2024
Nomor : 820983378968545455
Tahun Anggaran : 2024

Telah disetujui pencatatan pendapatan hibah dan belanja pencatatan hibah sejumlah :

Saldo awal	: Rp	0
Pendapatan	: Rp	13.200.000.000
Belanja	: Rp	13.200.000.000
Saldo Akhir	: Rp	0

Yaitu : Pengesahan Hibah Langsung bentuk Jasa dari JICA dalam bentuk jasa Peningkatan (pelatihan) Petani, sesuai BAST No.B-1438/KL.230/D.1/10/2024 tgl.16/10/2024 dan Surat Perjanjian No.ROD tgl.30/03/2021

Jakarta, 05-11-2024
Kuasa Bendahara Umum Negara
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



Ditandatangani secara elektronik
Agustina Suswardani Kanti Astuti
NIP. 197108291992012001



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA		
Nomor 01176A	Tanggal 03-Des-2024	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Negara, Jakarta V (139) Agar melakukan pencatatan atas penerimaan hibah langsung sejumlah bentuk barang/jasa/surat sejumlah 0,00		
**** NIHIL ****		
Tahun Anggaran: 2024 Dasar PP NO.10/2011 Nomor SP3HL-BJS: B- 1439/KL.230/D.1/10/2024 Tanggal SP3HL-BJS: 16-10-2024 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024		Jenis Tagihan : MEMO PENC HIBAH LNGSNG BRG JASA SURAT BERHRGA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : Pengesahan No. Register : 2G98B91A
Barang/Jasa/Surat Berharga		JUMLAH UANG
625875.139.522191.01804EC.5887AEH.O02G98B91A.00000.1.0154.9.000000.000000		13.200.000.000,00
Barang/Jasa/Surat Berharga		13.200.000.000,00
PENDAPATAN		JUMLAH UANG
977263.140.431222.99902EC.5887AEH.O02G98B91A.00000.1.0154.9.000000.000000		13.200.000.000,00
Jumlah Pendapatan		13.200.000.000,00
TOTAL PEMBAYARAN		**** NIHIL ****
Kepada: Nomor Supplier : Nama Supplier : Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya Yaitu : Pengesahan Hibah Langsung bentuk Jasa dari JICA dalam bentuk jasa Peningkatan (pelatihan) Petani, sesuai BAST No.B-1438/KL.230/D.1/10/2024 tgl.16/10/2024 dan Surat Perjanjian No.ROD tgl.30/03/2021		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM		
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. @23 NTM10TU2Mzk=		
Jakarta Selatan, 03 Desember 2024 Kuasa Pengguna Anggaran		 MUHAMMAD TAUFIQ RATULE NIP 196809181993031002

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 01176A

Tanggal : 03-Desember-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
625875.139.522191.01804EC.5887AEH.O02G98B91A.00000.1.0154.9.000000.000000		
1	000.000.00.000000-	13.200.000.000,00
	Jumlah	13.200.000.000,00
Jumlah		13.200.000.000,00

Jakarta Selatan
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

MUHAMMAD TAUFIQ RATULE
NIP 196809181993031002



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id / sekdhorti@pertanian.go.id

**SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG
BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA**

NOMOR : B-1439/KL.230/D.1/10/2024

TANGGAL : 16 Oktober 2024

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V

Bersama ini disampaikan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan hibah yang diterima berupa Barang/Jasa/Surat Berharga dengan rincian sebagai berikut :

Penerima Hibah

Bagian Anggaran/ Eselon I : Direktorat Jenderal Hortikultura
Kode dan Nama Satker : 625875 / Satker Direktorat Jenderal Hortikultura

Pemberi Hibah

Negara Donor : Jepang
Nama Donor : Japan International Cooperation Agency (JICA)
Nama Proyek : The Public Private Partnership Project for the Improvement of the Agriculture Product Marketing and Distribution System Phase 2
Nomor & Tgl Perjanjian Hibah : ROD, 30 Maret 2021
Nilai Hibah : JPY 323,130,000 / IDR 37.989.311.614
unit rate 1 JPY = IDR 117,56665 (BI middle transaction rate as of December 30, 2022)

Rencana Pendapatan Hibah

Nomor Register : 2G98B91A
Nilai Realisasi Hibah : JPY 112.273.000 sehingga jumlah total untuk hibah jasa sebesar IDR 13.200.000.000,-

Bentuk Hibah : ☐ Barang ☒ Jasa ☐ Surat Berharga
Akun : 431222

Jakarta, 16 Oktober 2024
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
NIP 196809181993031002







KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdhorti@pertanian.go.id

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG (SPTMHL)

Nomor : B-1440/KL.230/D.1/10/2024

Tanggal : 16 Oktober 2024

Menyatakan bahwa saya atas nama :

Kementerian Negara/Lembaga : (018) Kementerian Pertanian
Eselon I : (04) Direktorat Jenderal Hortikultura
Satker : (625875) Direktorat Jenderal Hortikultura
Nomor dan Tanggal DIPA : Tidak Ada DIPA
Nomor dan Tanggal SP Pengesahan : Tidak Ada SP Pengesahan

Bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa jasa yang diterima langsung dari:

Pemberi Hibah : Japan International Cooperation Agency (JICA)
Nilai Hibah / Komitmen Hibah : JPY 323,130,000 / IDR 37.989.311.614
unit rate 1 JPY = IDR 117,56665 (BI middle transaction rate as of December 30, 2022)

Digunakan dalam rangka bantuan jasa berupa tenaga ahli (*expert*) Jepang, peningkatan kapabilitas (Pelatihan) petani, proyek percobaan penanaman buah dan sayur untuk meningkatkan kualitas produk pertanian tanpa melalui KPPN dengan rincian sebagai berikut:

No	Pendapatan		Belanja	
1	431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri- Langsung Bentuk Jasa	522191	Belanja Jasa Lainnya

Bukti-bukti / BAST *) terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Oktober 2024
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
NIP. 196809181993031002

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : B-1438/KL.230/D.1/10/2024

Tanggal : 16 Oktober 2024

Pada hari ini, Rabu, 16 Oktober
bertanda tangan dibawah ini:

Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang

- 1 OKAMURA Kenji : Senior Representative Japan International
Cooperation Agency Indonesian Office
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 Dr.Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si : Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa **PIHAK PERTAMA** telah melakukan pengeluaran biaya untuk pelaksanaan proyek meliputi:

- Penyusunan rencana kerja bagi satuan tugas dari tim Dinas dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
- Mengadakan survei dasar dan survei akhir untuk menentukan kelompok tani.
- Menyelenggarakan lokakarya/pelatihan untuk membantu kelompok tani sasaran dalam merencanakan kegiatan demo plot dan kegiatan lain sesuai kebutuhan kelompok tani.
- Membimbing Kelompok tani sasaran melakukan negosiasi bisnis/temu usaha, menyusun Rencana Usaha dan Rencana Aksi Tani berorientasi pasar.
- Mengadakan pembekalan tambahan bagi pemangang dan peserta pelatihan ke Jepang.
- Melaksanakan kegiatan demo plot budidaya dengan pengadaan sarana yang diperlukan.
- Biaya tenaga ahli dan staf proyek.
- Pemenuhan kebutuhan operasional harian selama pelaksanaan proyek.

senilai IDR 13.200.000.000,- (JPY 112,273,000) untuk bantuan hibah "The Public Private Partnership Project for the Improvement of the Agriculture Product Marketing and Distribution System Phase 2", sedangkan **PIHAK KEDUA** sebagai pemberi persetujuan pelaksanaan kegiatan.

Angka ini merupakan bagian dari total *actual disbursement* untuk jasa bantuan hibah "The Public Private Partnership Project for the Improvement of the Agriculture Product Marketing and Distribution System Phase 2" periode Juni 2021 s/d Desember 2022 (JPY 112,273,000 dan setara dengan IDR 13.200.000.000,-) unit rate 1 JPY = IDR 117,56665 (*BI middle transaction rate as of December 30, 2022*), sesuai dengan surat JICA Nomor 1115/PRJ/02/23 tanggal 3 Februari 2023.

Semua bukti/kwitansi terkait pengadaan jasa disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
Senior Representative Japan International
Cooperation Agency Indonesian Office

OKAMURA Kenji

PIHAK KEDUA
Sekretaris Eksekutif Direktorat Jenderal
Hortikultura

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
NIP. 196809181993031002



Japan International Cooperation Agency

JICA Indonesia
Sentral Senayan II, 14th Floor
Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270, INDONESIA
Tel: (62-21) 5795-2112 (hunting) Fax: (62-21) 5795-2604

No. : 1115/PRJ/02/2023

Jakarta, February 3, 2023

To:

- the list as attached -

Dear Sir/Madam,

Disbursement Data under JICA's Technical Cooperation from January to December 2022

Following up our previous communication on disbursement data of JICA's Technical Cooperation, we are pleased to forward the information as of December 2022. Please utilize it in preparing BAST (Berita Acara Serah Terima: Handover Delivery Certificate), for the further process of authorization with Ministry of Finance, after obtaining our confirmation.

In utilizing the information, please note the following points:

- Disbursement of Services is total expenditure of experts, trainings and missions during 12 months for the data as of December 2022.
- Disbursement of Goods is total expenditure of equipment delivered/handed over during the 12 months for the data as of December 2022.
- The list contains projects which have disbursement between January 1, 2022 and December 30, 2022, in some cases:
 - On-going projects have disbursement before the projects are started for some reasons such as expenses for preparatory survey to formulate the project.
 - Non on-going projects have disbursement for some reasons, such as expenses for preparatory survey and final payment to consultants after the project completion.
- The assistance amount of each project is the estimation amount calculated when the project was formulated, in most cases the actual disbursement will be different based on the current/actual activities.

Thank you for your kind cooperation and understanding.

Yours sincerely,

 岡村健司
OKAMURA Kenji
Senior Representative
JICA Indonesia Office

Enclosure: Disbursement Data of JICA Technical Cooperation as of December 30, 2022



Japan International Cooperation Agency

JICA Indonesia
Sentral Senayan II, 14th Floor
Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270, INDONESIA
Tel: (62-21) 5795-2112 (hunting) Fax: (62-21) 5795-2604

Attn. to:

Partner Ministries/Institutions, as below:

Supreme Court	-Deputy Chief, Justice and Resource Development
State Ministry of National Development Planning/BAPPENAS	-Director, Directorate for Bilateral Foreign Funding
Ministry of Finance	-Head, Center for Regional and Bilateral Policy
Ministry of Agriculture	-Head, Center for International Cooperation
Ministry of Marine and Fisheries	-Head, Bureau of Cooperation and Public Relation
Ministry of Environment and Forestry	-Head, Bureau of International Cooperation
Ministry of Public Works and Housing	-Head, Bureau of Budgeting Planning and International Cooperation
	-Director, Directorate of Engineering Affairs for Human Settlements and Housing, DGHS
Ministry of Education, Culture, Research and Technology	-Head, Bureau of Cooperation and Public Communication
Ministry of Communication and Information Technology	-Head, Center for International Institutional
Ministry of Transportation	-Head, Bureau of Legal and International Cooperation
Ministry of Health	-Head, Bureau for International Cooperation
Ministry of Law and Human Rights	-Head, Bureau of Planning
Ministry of Energy and Mineral Resources	-Head, Bureau of Communication, Public Information Service, and Cooperation
Ministry of Industry	-Secretary, Secretariat of Directorate General of Industrial Resilience and International Access Development
Ministry of Agrarian and Spatial Planning	-Head, Bureau of Planning and Cooperation
Indonesian National Police	-Head, Division of International Relation
Investment Coordinating Board (BKPM)	-Head, Bureau of Program and Budgeting Planning
National Agency for Research and Innovation (BRIN)	-Head, Bureau for Legal and Cooperation
National Agency of Drug and Food Control (BPOM)	-Head, Bureau for International Cooperation
National Disaster Management Agency (BNPB)	-Head, Bureau of Planning
National Disaster Management Agency (BNPB)	-Head, Bureau of Law and Cooperation
National Security Council (DJSN)	-Secretary
CC.:	
Bandung Institute of Technology	-Rector
Bogor Agricultural University	-Rector

Disbursement Data of JICA Technical Cooperation as of December 2022

JICA ID	Date Signed	Project Period		Project Title	Services				Equipment	Ministries/Institutions	Actual Disbursement (services)			Actual Disbursement (Goods) - BAST*				Total Disbursement goods + services (in 000 JPY)*	Total Disbursement goods + services (in 000000 IDR)*
		Start	End		Assistant Amount/Initial Estimation (in 000 JPY)	Donor Expenses Jan to Dec 2022 (In 000 JPY)	Cumulative Donor Expenses up to Dec 2022 (in 000 JPY)*	BAST (In 000 JPY)	BAST (In 000 JPY)*		Year	Amount (In 000 JPY)	Amount to Converted to IDR (in 000,000)	Amount (In 000 JPY)	Amount (in 000 USD)	Amount (In 000,000 IDR)	Amount to Converted to IDR (in 000,000)		
Ministry of Agriculture																			
202006920		2022/04/07	2024/04/06	Agriculture Policy Advisor	33,708	8,066	8,066			Ministry of Agriculture	2022	8,066	948						
202006920 Total												8,066	948					8,066	948
201903835		6/23/2021	6/30/2025	Public-Private Partnerships Project for the Improvement of the Agriculture Product Marketing and Distribution System Phase 2	323,130	65,473	112,273			Ministry of Agriculture	2021	46,800							
201903835 Total											2022	65,473	7,697					112,273	13,200



Japan International Cooperation Agency

JICA Indonesia
Sentral Senayan II, 14th Floor
Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270, INDONESIA
Tel: (62-21) 5795-2112 (hunting) Fax: (62-21) 5795-2116

No.: 135 /PRJ/06/2021

Jakarta, 11 June 2021

Dr. Ir. Prihasto Setyanto
Director General
Directorate General of Horticulture
Ministry of Agriculture

Budget Information (Plan)

The Public Private Partnership Project for The Improvement of the Agricultural Marketing and Distribution System Phase 2

Dear Sir,

With regard to the above mentioned subject and the Record of Discussion signed on 30 March 2021, we hereby inform you of the project budget estimation. However, please note that the figures are only estimated amount and subject to changes in the future.

Project Title	The Public Private Partnership Project for The Improvement of the Agricultural Marketing and Distribution System Phase 2
Duration	4 years from the date of the first activity initiated
Scheme	Technical Cooperation
Counterpart	Ministry of Agriculture
Budget Plan (Total)	JPY 357 million

Thank you very much for your kind attention and cooperation.

Sincerely yours,


TAKATOL Shunsuke
Senior Representative
JICA Indonesia Office





KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/ 78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-mail : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdihorti@pertanian.go.id

Nomor : S-897/PL.130/D.1/6/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Registrasi Hibah JICA Phase 2

30 Juni 2021

Yth. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat dari JICA Indonesia Office, Nomor 135/PRJ/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 perihal *Budget Information (Plan) The Public Private Partnership Project for The Improvement of the Agricultural Marketing and Distribution System Phase 2*, bersama ini kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Hortikultura bermaksud mengajukan registrasi hibah barang dan jasa untuk *The Public Private Partnership Project for The Improvement of the Agricultural Marketing and Distribution System Phase 2*. Adapun masa berlaku proyek selama 4 (empat) tahun (2021-2024).

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat memproses lebih lanjut usulan tersebut kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengolahan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan RI.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Dr. Ir. Retno Sri Hartati Mulyandari, M.Si
NIP. 19691203 199303 2 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Hortikultura (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200 PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7806131 - 7804116, FAKSIMILI (021) 7806305
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : B. 1254 /KL.230/A.6/7/2021
Lampiran : Tiga lembar
Perihal : Penerbitan Nomor Register Hibah
Proyek JICA Phase 2

21 Juli 2021

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Kementerian Keuangan Nomor: S-559/PR.8/2021 tanggal 19 Juli 2021 perihal penerbitan nomor register hibah untuk Direktorat Jenderal Hortikultura, bersama ini kami informasikan bahwa Kementerian Keuangan telah menerbitkan nomor register hibah luar negeri sebagai berikut:

Judul Proyek	Nama Donor	Nomor Register	Waktu
<i>The Public Private Partnership Project for the Improvement of the Agricultural Marketing and Distribution System Phase 2</i>	<i>Japan International Cooperation Agency (JICA)</i>	2G98B91A	Batas akhir penarikan 23 Juni 2025

Selanjutnya diharapkan Satker pengelola proyek tersebut pada unit Saudara dapat melaporkan data perkembangan kegiatan fisik dan keuangan proyek setiap triwulan kedalam aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (SIPOR PHLN) Kementerian Pertanian dengan mengakses alamat web: **siporphln.pertanian.go.id**.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri



Dr. Ade Candradijaya
NIP. 196906031999031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELMEN**

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI VII JALAN DR.WAHIDIN RAYA NO. 1, JAKARTA 10710

Nama Satker : DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
No. Surat Permintaan : B.1208/KL.230/A.6/07/2021
Perihal : Permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah Proyek JICA Phase 2
Tanggal : 08-07-2021

Penetapan Nomor Register

No.	Referensi	Tanggal Perjanjian	MTU	Nilai	Register
1	RoD-30.03.2021	30-03-2021	JPY	357,000,000.00	2G98B91A

RECORD OF DISCUSSIONS

FOR

**THE PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP PROJECT FOR THE
IMPROVEMENT OF THE AGRICULTURAL MARKETING AND
DISTRIBUTION SYSTEM PHASE 2**

AGREED UPON BETWEEN

MINISTRY OF AGRICULTURE

OF

THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

Dated 30 March 2021

Based on the minutes of meetings on the Detailed Planning Survey for the Public-Private Partnership Project for the Improvement of the Agriculture Product Marketing and Distribution System Phase 2 (hereinafter referred to as "the Project") signed on 15 December 2020 between the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "MOA") and the Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA"), JICA held a series of discussions with MOA and relevant organizations to develop a detailed plan of the Project.

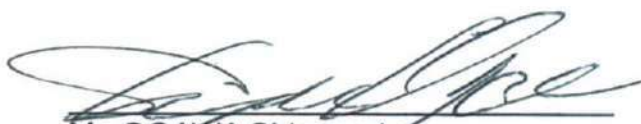
The purpose of this record of discussions (hereinafter referred to as "the R/D") is to establish a mutual agreement for its implementation by both parties and to agree on the detailed plan of the Project as described in the followings and the Annexes, which will be implemented within the framework of the Note Verbales to be exchanged between the Government of Japan and the Government of Indonesia.

MOA will be responsible for the implementation of the Project in cooperation with JICA, coordinate with other relevant organizations and ensure that the self-reliant operation of the Project is sustained during and after the implementation period in order to contribute toward social and economic development of the Republic of Indonesia.

Both parties also agreed that the Project will be implemented in accordance with the "Basic Principles for Technical Cooperation" published in December 2016 (hereinafter referred to as "the BP"), unless other arrangements are agreed in the R/D.

The parties acknowledge and agree that this R/D may be executed by electronic signature, which is considered as an original signature for all purposes and has the same force and effect as an original signature. "Electronic signature" includes faxed versions of an original signature or electronically scanned and transmitted versions (e.g., via pdf) of an original signature.

The R/D is delivered at Jakarta as of the day and year first above written. The R/D may be amended by a minutes of meetings between both parties, except the plan of operation to be modified in monitoring sheets. The minutes of meetings will be signed by authorized persons of each side who may be different from the signers of the R/D.



Mr. OGAWA Shigenori
Chief Representative
JICA Indonesia Office
Japan International Cooperation Agency



Dr. Ir. Prihasto Setyanto
Director General
Directorate General of Horticulture
Ministry of Agriculture
The Republic of Indonesia

Witness



Ir. Bustanul Arifin Caya, M.D.M
Head
Indonesian Center for Agricultural
Training
Ministry of Agriculture
The Republic of Indonesia



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT.

Ir. Dadan Hidayat, M.Si.
Pembina Tingkat I



Ir. DADAN HIDAYAT, M Si.
Head of Food Crops and Horticulture
Agency
West Java Province
The Republic of Indonesia

Mamad Nano, SP.,MP
Head of Agriculture, Plantation,
Food Crops, and Horticulture Agency
Cianjur District
The Republic of Indonesia



Ir. Beni Yoga Gunasantika, MP
Head of Agriculture Agency
Garut District
The Republic of Indonesia



Ir. Siti Nurianty, MM
Head of Food Crops, Horticulture
and Plantation Agency
Bogor District
The Republic of Indonesia



Drs. H Andri Setiawan, M.M
Head of Food Security, Agriculture and
Fisheries Agency
Sukabumi City
The Republic of Indonesia



Ir. H. Sudrajat, MM
Head of Agriculture Agency
Sukabumi District
The Republic of Indonesia



Ir. H.A. Tisna Umaran, MP
Head of Agriculture Agency
Bandung District
The Republic of Indonesia



H. Heru Budi Purnomo, S.Sos., M.Si
Head of Agriculture and Food
Security Agency
West Bandung District
The Republic of Indonesia

- Annex 1 Main Points Discussed
- Annex 2 Project Design Matrix (PDM)
- Annex 3 Plan of Operation (PO)
- Annex 4 Implementation Structure
- Annex 5 List of Proposed Members of Joint Coordinating Committee

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a combination of letters and a flourish.

MAIN POINTS DISCUSSED

1. Concept of the Project

Both parties confirmed the successful outcomes of the Public-Private Partnership Project for the Improvement of the Agriculture Product Marketing and Distribution System, which has been implemented since 2016. In this project, various activities have been undertaken to improve the productive capacities of the target farmer groups. As a result, the target farmer groups have increased their capacities in producing high-quality horticultural products, including new varieties. They have also started business transactions with new trading partners. During the terminal evaluation of this project, both parties agreed that both farming techniques and business skills are required to ensure the sustainable prosperity of horticultural farmers. Given the diverse variety of the horticultural crops, farmers require wide range of cultivation techniques. Market conditions and prices of the horticultural products are traditionally more unstable compared to staple food crops. There have also been changes in food preferences following the rapid economic growth in Indonesia. Potential of ICT and smart agricultural techniques are expanding but not yet fully captured by small scale farmers. In order to accommodate these changes, it is required for Indonesian horticultural farmers to improve both their production and business skills and have strategic sales plans based on market researches. It is also essential for horticultural farmers to adjust their productions and improve postharvest handling based on the market demands. Capacities to collect market information and build business linkages are also required in this regard.

In light of this, the Project will support target farmer groups to increase their competitiveness in both production and marketing of horticultural products, and aims to increase their agricultural profits.

2. Outline of the Project

Details of the Project are described in the Project Design Matrix (PDM) (Annex 2) and the tentative Plan of Operation (Annex 3).



(1) Project Sites and Implementing Institutions

Both sides agreed that the project sites would be Jakarta and West Java Province (Cianjur District, Garut District, Bogor District, Sukabumi City, Sukabumi District, Bandung District and West Bandung District).

Both sides agreed on the Implementation Structure of the Project as shown in Annex 4.

(2) Duration of the Project

The duration of the Project will be four (4) years starting from the date of the first activity initiated.

(3) Target Beneficiaries

The target beneficiaries of the Project is the farmer groups in the project sites in West Java Province. The farmer groups who will participate in the Project will be selected in the beginning of the Project jointly by the Indonesian Counterparts and JICA expert team. The target beneficiaries also include the technical interns who will be going/coming back from the technical training in Japan. Activities related to the capacity building of the technical interns will be conducted in close coordination with the Indonesian Center for Agricultural Training. When selecting the target beneficiaries, due consideration will be given to ensure the participation of young farmers, in order to revitalize the agricultural sector in the project sites.

3. Setting up of the Taskforce

In the Project, the public and private sectors will work together to support horticultural farmers. For this purpose, a taskforce will be formed in each target City/District, in close coordination with DINAS. Roles and responsibilities of the taskforce include, but not limited to, selecting target farmer groups for the Project, supporting the production and marketing of the target farmers groups, and disseminating good practices. The taskforces will work closely with the JICA expert team to support target farmer groups.

4. Trainings for Technical Interns

The Project will conduct trainings for the Indonesian technical interns who are going to or came back from Japan to enhance their capacities in the farm management. Returned Indonesian technical interns have potential to be leaders of other horticultural farmers in their respective areas in Indonesia, by utilizing

techniques obtained through the internship in Japan. Trainings for the technical interns will be conducted in close cooperation with the Indonesian Center for the Agricultural Training, Ministry of Agriculture. The planned activities for the Indonesian technical interns include the following:

1) Pre-trainings for technical interns

The Project will conduct supplemental pre-departure trainings for the technical interns who are going to Japan to learn about agriculture. The Trainings will provide opportunity to design the future agricultural business plans after coming back to Indonesia.

2) Post-trainings for technical interns

The Project will encourage the participation of the selected technical interns who came back from Japan and reside in the project sites in West Java Province to join the project activities to extent possible, in order for them to improve their farm management and business skills.

5. Emphasis on the participation of the young farmers

The Project put emphasis on the participation of young farmers (under 40 years old) when selecting the target farmer groups, since the active participation of young farmers is critical to revitalize the agricultural sector. Furthermore, the Project will collect information on the participation rate of young farmers when conducting the baseline survey and monitor it throughout the Project implementation period.

6. Promotion of smart agriculture

Following the Government of Indonesia's policy on promoting ICT in agriculture, the Project will encourage farmer groups to explore the use of smart agricultural technologies by introducing related services and techniques in trainings/seminars conducted under the Project.

7. Roles and Responsibilities of the relevant organizations

The Project organization chart is shown in Annex 4. The roles and responsibilities of the relevant organizations are as follows:

1) Ministry of Agriculture

The Directorate General of Horticulture will be the main implementing agency of the Project and assigns the following project team members;

(a) Project Director

Director General of Horticulture, MOA will be responsible for overall administration and implementation of the Project.

(b) Project Coordinator

Executive Secretary of the Directorate General of Horticulture, MOA will act on behalf of the Project Director whenever necessary.

(c) Project Manager

Director of Processing and Marketing of Horticultural Product will be responsible for management and implementation of the Project.

(d) Operational Manager

Head of Cooperation Sub-division of Directorate General of Horticulture will act on behalf of the Project Manager whenever necessary.

2) Indonesian Center for Agricultural Training

Head of Indonesian Center for Agricultural Training will be responsible for supporting the Project in developing the training materials and implementing the trainings. It is also responsible for selecting the technical interns for participating in the pre-departure and/or post trainings.

3) Representatives of DINAS West Java Province

Representatives of DINAS West Java Province will be responsible in coordinating and supporting City/Districts in the project sites in implementing regional activities. DINAS West Java Province is also responsible for facilitating sharing of good practices and lessons learnt, as well as information of market information in the Province, including prices, to City/Districts in the project sites.

4) Representatives of DINAS of City/District

Representatives of DINAS Cianjur District, Garut District, Bogor District, Sukabumi City and Sukabumi District, Bandung District and West Bandung

District will be responsible for the managerial and technical matters of the Project at their respective areas and jointly conduct the Project activities. They will also lead the taskforce to be organized at each district/city to manage the Project activities.

5) JICA Experts

The JICA experts will give necessary technical guidance, advice and recommendations to MOA and DINAS on any matters pertaining to the implementation of the Project.

8. Project Office

Both sides agreed to set up the Project Office in MOA.

9. Undertakings of the Ministry of Agriculture

MOA will take necessary measures to:

- (1) ensure that the technologies and knowledge acquired by the Indonesian nationals as a result of Japanese technical cooperation contributes to the economic and social development of Indonesia, and that the knowledge and experience acquired by the personnel of Indonesia from technical training as well as the equipment provided by JICA will be utilized effectively in the implementation of the Project;
- (2) grant privileges, exemptions and benefits to the JICA experts referred and their families, which are no less favorable than those granted to experts and members of the missions and their families of third countries or international organizations performing similar missions in Indonesia under the Colombo Plan Technical Cooperation Scheme.
- (3) provide security-related information as well as measures to ensure the safety of the JICA experts;
- (4) permit the JICA experts to enter, leave and sojourn in the Republic of Indonesia for the duration of their assignments therein and exempt them from foreign registration requirements and consular fees.
- (5) exempt the JICA experts from taxes and any other charges on the equipment, machinery and other material necessary for the implementation of the Project;
- (6) exempt the JICA experts from income tax and charges of any kind imposed

on or in connection with any emoluments or allowances paid to them and/or remitted to them from abroad for their services in connection with the implementation of the Project; and

- (7) meet taxes and any other charges on the equipment, machinery and other material necessary for the implementation of the Project.

MOA will bear claims, if any arises, against the JICA experts resulting from, occurring in the course of, or otherwise connected with, the discharge of their duties in the implementation of the Project, except when such claims arise from gross negligence or willful misconduct on the part of the JICA experts.

10. Environmental and Social Considerations

With regard to the Section 10.1 of the BP, the Project is likely to have minimal adverse impact on the environment and society under the 'JICA Guidelines for Environmental and Social Considerations (April 2010)'.

11. Categorization of the Project

Both sides confirmed that the Project is categorized as "Goods / Services" stipulated in Article 42 (1) c of Government Regulation No. 10/2011.

In accordance with Regulation of Minister of Finance No. 191 / PMK.05/2011, the executing agency shall submit BAST (handover delivery certificate of goods/services) to the Ministry of Finance (MOF) of Indonesia. In order to secure the accuracy of BAST, JICA Indonesia Office will provide MOA with data on semester basis as follows:

- Goods: name and price (in effective currency) per item of equipment handed over during last six months
- Services: total expenditure (in Japanese currency) of last six months for experts, training, and mission

MOA will make and sign BAST based on the data provided by JICA, and after obtaining JICA's confirmation, submit it to MOF.

12. Amendments of the R/D

R/D may be amended by the minutes of meetings between JICA and MOA. The



Minutes of Meetings will be signed by authorized persons of each side who may be different from the signers of the R/D.

ASD



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK
BARANG / JASA / SURAT BERHARGA

Nomor : 01190T
Tanggal : 03-12-2024
Satker : 625875 - DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

KPPN : 139 - JAKARTA V
Tanggal : 03-12-2024
Nomor : 820947404968545453
Tahun Anggaran : 2024

Telah disetujui pencatatan pendapatan hibah dan belanja pencatatan hibah sejumlah :

Saldo awal	: Rp	0
Pendapatan	: Rp	1.652.917.520
Belanja	: Rp	1.652.917.520
Saldo Akhir	: Rp	0

Yaitu : Pengesahan Hibah Langsung bentuk Jasa dari FAO dukungan teknis mempromosikan kebijakan pangan perkotaan pasca-COVID (TCP/RAS/3807) sesuai BAST No. B-1458/KL.210/D.1.10/2024 Tgl 4/10/2024 dan surat perjanjian No. S-268/KL.220/D/08/2022 Tgl 25/04/2022

Jakarta, 05-11-2024
Kuasa Bendahara Umum Negara
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



Ditandatangani secara elektronik
Agustina Suswardani Kanti Astuti
NIP. 197108291992012001

KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA		
Nomor 01190A	Tanggal 03-Des-2024	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Negara, Jakarta V (139) Agar melakukan pencatatan atas penerimaan hibah langsung sejumlah bentuk barang/jasa/surat sejumlah 0,00		
**** NIHIL ****		
Tahun Anggaran: 2024 Dasar PP NO.10/2011 Nomor SP3HL-BJS: 379/PL.130/D/10/2024 Tanggal SP3HL-BJS: 22-10-2024 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024		Jenis Tagihan : MEMO PENC HIBAH LNGSNG BRG JASA SURAT BERHRGA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : Pengesahan No. Register : 21N957AA
Barang/Jasa/Surat Berharga		JUMLAH UANG
625875.139.522191.01804WA.1774EBD.O021N957AA.00000.1.0154.9.000000.000000		1.652.917.520,00
Barang/Jasa/Surat Berharga		1.652.917.520,00
PENDAPATAN		JUMLAH UANG
977263.140.431222.99902WA.1774EBD.O021N957AA.00000.1.0154.9.000000.000000		1.652.917.520,00
Jumlah Pendapatan		1.652.917.520,00
TOTAL PEMBAYARAN		**** NIHIL ****
Kepada: Nomor Supplier : Nama Supplier : Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya Yaitu : Pengesahan Hibah Langsung bentuk Jasa dari FAO dukungan teknis mempromosikan kebijakan pangan perkotaan pasca- COVID (TCP/RAS/3807) sesuai BAST No. B-1458/KL.210/D.1.10/2024 Tgl 4/10/2024 dan surat perjanjian No. S- 268/KL.220/D/08/2022 Tgl 25/04/2022		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM		
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.		
Jakarta Selatan, 03 Desember 2024 Kuasa Pengguna Anggaran		
		
MUHAMMAD TAUFIQ RATULE NIP 196809181993031002		

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 01190A
Tanggal : 03-Desember-2024
Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
625875.139.522191.01804WA.1774EBD.O021N957AA.00000.1.0154.9.000000.000000		
1	000.000.00.000000-	1.652.917.520,00
	Jumlah	1.652.917.520,00
Jumlah		1.652.917.520,00

Jakarta Selatan
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

MUHAMMAD TAUFIQ RATULE
NIP 196809181993031002



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id / sekidthorti@pertanian.go.id

SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA

NOMOR : 379/PL.130/D/10/2024

TANGGAL : 22 Oktober 2024

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V

Bersama ini disampaikan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan hibah yang diterima berupa Barang/Jasa/Surat Berharga dengan rincian sebagai berikut :

Penerima Hibah

Bagian Anggaran/ Eselon I : Direktorat Jenderal Hortikultura
Kode dan Nama Satker : 625875 / Satker Direktorat Jenderal Hortikultura

Pemberi Hibah

Negara Donor : Indonesia
Nama Donor : Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Nama Proyek : Technical support to promote policy coherence for safe, reliable and resilient urban food systems in post-COVID environment (TCP/RAS/3807)

Nomor & Tgl Perjanjian Hibah : S-268/KL.220/D/08/2022, 25 April 2022
Nilai Hibah : USD 115.000 / IDR 1.800.325.000,-
unit rate 1 USD = IDR 15.655 (BI middle transaction rate as of October 2023)

Rencana Pendapatan Hibah

Nomor Register : 21N957AA
Nilai Realisasi Hibah : USD 105.584 sehingga jumlah total untuk hibah jasa sebesar IDR 1.652.917.520,-
Bentuk Hibah : ☐ Barang ☒ Jasa ☐ Surat Berharga
Akun : 431222

Jakarta, 22 Oktober 2024
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
NIP. 19680918 199303 1 002



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdhorti@pertanian.go.id

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG (SPTMHL)

Nomor : 380/PL.130/D/10/2024

Tanggal : 22 Oktober 2024

Menyatakan bahwa saya atas nama :

Kementerian Negara/Lembaga : (018) Kementerian Pertanian
Eselon I : (04) Direktorat Jenderal Hortikultura
Satker : (625875) Direktorat Jenderal Hortikultura
Nomor dan Tanggal DIPA : Tidak Ada DIPA
Nomor dan Tanggal SP Pengesahan : Tidak Ada SP Pengesahan

Bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa jasa yang diterima langsung dari:

Pemberi Hibah : Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Nilai Hibah / Komitmen Hibah : USD 115.000 / IDR 1.800.325.000,-
unit rate 1 USD = IDR 15.655 (BI middle transaction rate as of October 2023)

Digunakan dalam rangka pelaksanaan studi (kajian) pada proyek "Technical support to promote policy coherence for safe, reliable and resilient urban food systems in post-COVID environment (TCP/RAS/3807) tanpa melalui KPPN dengan rincian sebagai berikut:

No	Pendapatan		Belanja	
1	431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri- Langsung Bentuk Jasa	522191	Belanja Jasa Lainnya

Bukti-bukti / BAST *) terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Oktober 2024

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
NIP. 19680918 199303 1 002



BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
GRANT HANDOVER STATEMENT
Nomor: B-1458/KL.210/D.1.10/2024
Tanggal: 04 Oktober 2024



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
**Technical support to promote policy coherence for safe,
reliable and resilient urban food systems in post-COVID
environment (TCP/RAS/3807)**

Pada hari ini, 4 October 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Rajendra Aryal
Jabatan : FAO Representative in Indonesia
Alamat : Menara Thamrin Building, 7th floor
Jl. M.H.Thamrin Kav. 3
Jakarta 10250

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Hortikultura
Alamat : Jl. Aup No.3, RT.9/RW.10, Ps. Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12520

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa PIHAK PERTAMA telah melakukan pengeluaran berupa biaya jasa pelaksanaan studi pada proyek "Technical support to promote policy coherence for safe, reliable and resilient urban food systems in post-COVID environment (TCP/RAS/3807)" senilai IDR Rp.1.652.917.520,- atau USD 105,584 (92% dari total komitmen awal dana proyek sebesar USD 115.000) sebagaimana Lampiran 2 (Nilai tukar UN operational rate saat akhir proyek/December 2023, 1 USD = Rp.15.655) selama periode 25 April 2022 s/d 31 Desember 2023 sesuai dengan nomor surat perjanjian S-268/KL.220/D/08/2022, sedangkan PIHAK KEDUA sebagai pemberi persetujuan pelaksanaan kegiatan.

Semua bukti/kwitansi terkait pengadaan jasa disimpan oleh PIHAK PERTAMA. Dokumen dan laporan hasil kegiatan yang telah diserahkan sebagaimana Lampiran 1 menjadi hak sepenuhnya PIHAK KEDUA untuk menyimpan, menggunakan, menggandakan, dan menyebarkan sesuai keperluan. BAST ini adalah jaminan bahwa proyek telah dilaksanakan hingga selesai oleh PIHAK PERTAMA.

GRANT HANDOVER STATEMENT
**Technical support to promote policy coherence for safe,
reliable and resilient urban food systems in post-COVID
environment (TCP/RAS/3807)**

On this day, 4 October 2024, the undersigned below:

1. Name : Rajendra Aryal
Title : FAO Representative in Indonesia
Address : Menara Thamrin Building, 7th floor
Jl. M.H.Thamrin Kav. 3
Jakarta 10250

hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**.

2. Name : Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
Title : Director General of Horticulture
Address : Jl. Aup No.3, RT.9/RW.10, Ps. Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12520

hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.

Explain that the FIRST PARTY has incurred costs for services carrying out studies on the project "Technical support to promote policy coherence for safe, reliable and resilient urban food systems in post-COVID environment (TCP/RAS/3807)" with total amount of IDR Rp.1.652.917.520 or equal to USD 105,584 (92% of the total initial project funding commitment of USD 115.000) as in Appendix 2 (UN operational rate exchange rate at the end of the project/December 2023, 1 USD = Rp. 15.655) for the period 25 April 2022 to 31 December 2023 in accordance with the grant letter number S-268/KL.220/D/08/2022, while the SECOND PARTY is the party who provide approval for the implementation of the activity.

All expenses receipts related to the procurement of services are kept by the FIRST PARTY. Documents and reports on the results of the activities that have been submitted as in Annex 1 become the full right of the SECOND PARTY to store, use, reproduce and disseminate as needed. This BAST is a guarantee that the project has been implemented to completion by the FIRST PARTY.

This handover statement is part of the grant extension process if there is any administrative process for grant approval

Berita Acara Serah Terima ini adalah bagian dari proses perpanjangan hibah apabila ada proses administrasi kepengurusan pengesahan hibah melebihi tanggal penutupan. Proyek hibah ini akan dianggap selesai/ditutup setelah proses pengesahan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kementerian Keuangan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam Bahasa Indonesia dan Inggris serta ditandatangani kedua belah pihak.

beyond the closing date. This grant project will be considered complete/closed after the approval process at the National Treasury Services Office (KPPN), Ministry of Finance.

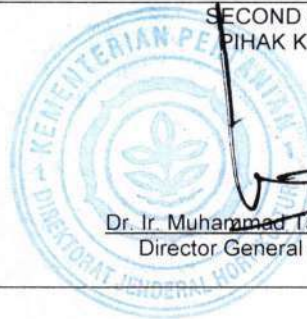
Thus, this handover statement is prepared in English and Indonesian, and signed by both parties.

FIRST PARTY
PIHAK PERTAMA



Rajendra Aryat
FAO Representative in Indonesia

SECOND PARTY
PIHAK KEDUA



Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
Director General of Horticulture

Lampiran 1/Annex 1.

Daftar Dokumen dan Materi Publikasi / List of Documents and Publication Materials

No	Jenis Dokumen/Publikasi (Document/Publication)	Tautan Materi (Link for material)
Laporan Akhir/Final Report		
1	Food Loss Reduction in Chili, Eggs, Chicken, and Rice Fresh Market in Jakarta: An-In Depth Value Chain Analysis TCP/RAS/3807	https://docs.google.com/document/d/1hNhwTRK1qVeNLGGBt1R1oBL5jiYR9em/edit?usp=drive_link&ouid=102446984288831046890&rtpof=true&sd=true
Factsheet		
1	Food loss analysis: causes and solutions chicken meat supply chain in DKI Jakarta Province	https://drive.google.com/file/d/1wYfySGR_R26iDxVxhiNnonzUevR9kynEj/view?usp=drive_link
2	Food loss analysis: causes and solutions chili supply chain in DKI Jakarta Province	
3	Food loss analysis: causes and solutions eggs supply chain in DKI Jakarta Province	
4	Food loss analysis: causes and solutions rice supply chain in DKI Jakarta Province	
Posters		
1	Chicken commodity	https://drive.google.com/drive/folders/1z5MtFQwoheGYhhMkB68kC31W2lcCcAd2?usp=sharing
2	Chili commodity	
3	Eggs commodity	
4	Rice commodity	
Video		
1	Food loss reduction in fresh market	https://drive.google.com/file/d/1FznLMikSHQg6buH0PHQpww9LpjmZ3iFs/view?usp=drive_link

Lampiran 2/Annex 2.**Realisasi Penggunaan Dana Proyek/Actual Expenses**

No	Jenis pembiayaan	Total Akhir Pembelanjaan (USD)	Total Alokasi Budget Awal (USD)
1	Konsultan	0	15,000
2	Kontrak	97,790	60,000
3	Biaya Perjalanan/Travel cost	0	10,700
4	Barang tidak habis pakai	0	2,000
5	Pelatihan dan pertemuan/Workshop and Meeting	809	13,000
6	Technical Support Service	0	11,560
7	General Operating Expenses	77	
8	Support cost	6,907	2,740
TOTAL		105,584	115,000



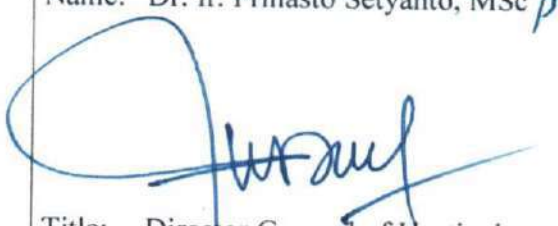
**Food and Agriculture Organization
of the United Nations**

PROJECT DOCUMENT

Upon request from the Government of the Republic of Indonesia, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) will provide technical assistance for the following Project:

Project Title:	Technical support to promote policy coherence for safe, reliable and resilient urban food systems in post-COVID environment
Project Symbol:	TCP/RAS/3807

Upon signature of this project document by the duly authorized representatives of both parties, the project will be implemented in accordance with the background, rationale and management arrangements described herein.

On behalf of the Government:	On behalf of:
	The Food and Agriculture Organization of the United Nations
Name: Dr. Ir. Prihasto Setyanto, MSc <i>β</i>	Name: Mr. Rajendra Aryal
	
Title: Director General of Horticulture Ministry of Agriculture Indonesia	Title: FAO Representative in Indonesia
Date: 25 April 2022	Date: 25 April 2022
Nomor : S-268/KL.220/D/08/2022	

**Description of the assistance provided through
FAO's Technical Cooperation Programme (TCP)**

Title:	Technical support to promote policy coherence for safe, reliable and resilient urban food systems in post-COVID environment
TCP symbol:	TCP/RAS/3807
Recipient Country/ies:	Indonesia
Government counterpart(s):	Ministry of Agriculture
Expected EOD (Starting Date):	September 2021
Expected NTE (End Date):	August 2023
Contribution to Government priorities:	Regional Initiative/ Priority Areas: A) Strengthening food and nutritional security; B) Rebuilding resilient and inclusive food systems; C) strengthening sustainable and green cities; The project will contribute to the following Program Priority Areas for the new Strategic Framework: BL3: <i>Achieving sustainable urban food systems</i> BN1: <i>Healthy diets for all</i> BN2: <i>Nutrition for the most vulnerable</i> Country Programming Framework Outcome: Indonesia: CPF 2016-2020; Priority Area 4: Improvement of the policy environment and strengthened partnerships in agriculture, fisheries and forestry for food security and nutrition.
Total Budget:	USD 115 000

1. RATIONALE

The COVID-19 and future similar pandemics are forcing an urgent rethinking of food supply chains, food provision from production centers (rural or peri-urban) to consumption centers in urban centers. In much of Asia, the COVID-19 pandemic has raised issues of supply chains, food safety and standards in urban food provision, and raised the policy imperative to secure food access to urban residents, especially the poor and the vulnerable. The COVID-19 pandemic has also raised the issues of food regulations, standards, and food market infrastructure adjustments as new policy priorities to prepare for and prevent future pandemics. As a result urban food governance and policy coordination has taken on increased significance to address a host of interconnected challenges from food access, provision of diverse diets to the poor and the vulnerable population, to safety and health and sustainable urban planning and green city development.

Strengthening urban agriculture, local food production, and short value chains to improve nutrition and access to food among the urban poor has emerged as one of the top policy priorities to respond to COVID and similar pandemics in the future. The role of governments is critical to local food and shorter food chains governance and to integrating this issue into urban planning. Many countries in the region have moved to promote urban food gardening, especially following COVID-19 pandemic. The role of local government in regulating and providing incentives is critical, including facilitating access to underutilized lots for urban gardening. Urban food governance require policies, regulations and infrastructure support for sustainable urban food development protective of the environment and human health.

In **Indonesia**, the growing urban areas and the revealed vulnerabilities of food systems to COVID-19 pandemic shocks has pushed to high priority the need to promote urban farming and gardening. At the same time several policy and governance coordination issues have risen owing to the interlinkages of sustainability issues including food security, land-use change, environmental quality, and the well-being of the urban population. Indonesia growing urban areas and the revealed vulnerabilities of food systems to COVID-19 pandemic shocks has pushed to high priority the need to promote urban farming and gardening.

This TCP focuses on urban food governance at urban and municipal level, and complements the TCP/INS/3802 which seeks to support the development of new policy roadmap for food systems to ensure food security and build more resilient food system robust to COVID-like pandemics and natural disaster in Indonesia. Unlike the TCP/INS/3802, the present TCP focuses on strengthening capacity for improved governance of urban food at municipal level and focusing on 2 or 3 specific urban municipalities building on new or on-going urban food initiatives on urban and peri-urban food related issues from production (urban food production, including home gardening, peri-urban agriculture) to distribution (including promoting short value chains and direct producer-consumer linkages) supported by innovative digitalization processes on marketing and logistics. This TCP will also focus on price stability along the food supply chain as well. The program will be implemented in Bogor, West Java Province, and South Tangerang, Banten Province.

Project Objectives:

1. Support and facilitate inter-ministerial coordination (for target cities or urban centers) to promote urban food production, urban gardening and food distribution fully integrated

within the new food systems road map Indonesia is developing to strengthen the food environment, improve food access through e-commerce, on-line marketing and informal urban food distribution channels.

2. Support local or municipal urban initiatives backed by food policies and supply chain strategies focusing on critical value chains, perishable locally produced goods and market transactions leveraging digital innovations, including e-commerce, and digitalization of food marketing, storage, logistics, and food retail services, focusing among other issues on price stability and shortening value chains by promoting direct producer-consumer linkages.
3. Facilitate coordination between Ministry of Agriculture, Ministry of Health and municipal governments in integrating urban and peri-urban agriculture with nutritional programs including enhancing urban food environment and access, especially among the poor and vulnerable groups such as pregnant/lactating women, adolescents, and children.
4. Support capacity to diagnose, plan and implement multi-stakeholder plans for improved food distributions infrastructure, including accessible and safer open markets that minimize health hazards to urban consumers including through regulations, administrative and investment incentives.
5. Promote policy dialogue and promote policy coherence among local, municipal and national government decision-makers and food industry actors, cooperatives, and representatives of food industry associations to secure safe, accessible, and affordable food for urban consumers, especially lower-income and the poor.

Comparative Advantages and implementation strategy:

Within FAO Urban food agenda program, FAO has successfully completed a major regional study on urban food systems in Asia jointly with the World Bank completed before the onset of COVID-19 pandemic. The FAO-WB study covered a general survey of 177 cities in 20 Asian countries and in-depth analysis of 6 cities in six countries from South and South East Asia.¹ The field data collected under the study and the stakeholder roundtables carried in focal cities were completed just before the onset of the COVID-19 pandemic and hence offer a valuable pre-COVID baseline (covering urban food policies, initiatives, challenges and opportunities in surveyed cities). The study concluded with a recommendation for greater policy integration and inter-ministry coordination across different urban planning programs, city sustainability initiatives. The study also offered evidence on critical gaps and possible entry points for urban support food governance in Indonesia covered under the present TCP project.

FAO has extensive expertise in food systems including urban food issues under its flagship program on urban food agenda. FAO has supported Indonesia in a range of food system related projects including urban food issues. FAO continue to support member countries on issues related to food provision, smart farming, urban food gardening, nutrition programs, food safety and standards and food policy support. FAO has developed frameworks to analyse urban food ecosystems and food environments and acquired extensive experience in urban consumers' surveys on food related issues.

¹ The cities analysed in depth included Surabaya (Indonesia), Colombo (Sri Lanka), Davao (Philippines), Khon Kaen (Thailand), Karachi (Pakistan) and Hulumale (Maldives).

FAO regional office in Bangkok and in Headquarters Rome have specialized expertise on food systems capable of providing technical support to member countries in food value chains, urban food production and rural-urban linkages and food waste and loss among other areas.

2. EXPECTED RESULTS

IMPACT	Sustainable food systems, food security and healthy diets for urban residents including women, children and most vulnerable are strengthened through coordinated policies and urban food governance mechanisms			
OUTCOME	Strengthened urban food governance processes at national and metropolitan levels for improved urban agriculture, food and nutrition programs, initiatives for enhanced food security, safe and healthy diets in post COVID-environment			
Indicator	Baseline	Target	Means of Verification	Assumptions
# of initiatives and commitments to improve urban food systems in relation to COVID response	0	3	Sectoral Annual Plans	Political willingness of the involved institutions, private actors, urban consumer associations, and relevant CSOs
OUTPUT 1	Data, analysis and evidence gathering for policy analysis and program development among urban planners, municipal government, private actors, producer groups and households			
Indicator	Baseline	Target	Means of Verification	Assumptions
# of analyses and assessments for urban food program development developed	0	3	- Project progress report - Sectoral reports	- Minimum delay in contacting and interviewing all partners (public, private, producer groups, households)
ACTIVITIES for achieving output 1				
Title	Description			
1.1 Diagnosis and formulation of action plan for short supply chains linking producers to urban consumers	Indonesia: Activity 1. Hire a consultant/ service provider to diagnose, analyse and formulate a multi-stakeholder action plan to promote short supply chains linking peri-urban food producers to urban consumers using digital data platforms, on-line marketing and e-commerce for the target urban city (ies). The diagnosis will include analyzing both existing and new initiatives and programs, using existing documents, carrying out consultations with key stakeholders and focus group discussions with stakeholders, especially private actors among producers, distributors and third service providers, including through qualitative surveys.			

OUTPUT 2	Action plans for urban agriculture, home gardening and nutrition programs for vulnerable urban residents developed			
Indicator	Baseline	Target	Means of Verification	Assumptions
# of action plans, programs and initiatives on urban food, nutrition, land and resource management developed	0	3	- Project progress report - Stakeholder meetings reports and validation workshops	- Minimum delay in multi-stakeholder consultations. - Efficient and constant communication and coordination with national partners. - All stakeholders across government agents and private actors fully collaborate and participate in the projects.
ACTIVITIES for achieving output 2				
Title	Description			
2.1 Technical support to multi-stakeholder working group to develop an action plan for urban food initiatives	Indonesia: Activity 2. Provide technical support and guidance to a multi-stakeholder working group made up of public and private actors including urban planners, local and municipal authorities, ministerial staff and private sector actors all supported to develop a guide or tool to collect, monitor and analyse price data and provide policy advice for maintaining price stability along the food supply chain, related to urban and peri-urban, building on existing initiatives.			
OUTPUT 3	Multi-stakeholder initiatives for coordinated programs for urban agriculture development, food marketing and distribution, food safety regulation, food waste reduction, land use management and city greening programs are developed			
Indicator	Baseline	Target	Means of Verification	Assumptions
# of multi-stakeholder initiatives on urban food inter-agency governance developed	0	3-6	- Project progress report - Stakeholder workshop reports	- Efficient and constant communication and coordination with national and private partners.
ACTIVITIES for achieving output 3				
Title	Description			
3.1 Carry out coordination meetings and consultations with stakeholders	Indonesia: Activity 3. Coordinate and facilitate multi-stakeholder consultations to develop an action plan for short value chain development, producer – consumer linkages, including through e-commerce and digital data information systems focusing on urban context.			

OUTPUT 4	Capacity development for local/urban councils, urban planners, municipal authorities and government staff in data and evidence collection and interpretation, planning, and policy coordination			
Indicator	Baseline	Target	Means of Verification	Assumptions
# of training, decision tools and guidelines for urban food policies, programs and initiatives completed	0	3-6	- Project progress report - Field mission report	- Efficient and constant communication and coordination with national and private partners. - All end users and recipients of training and skill building fully collaborate.
ACTIVITIES for achieving output 4				
Title	Description			
4.1 Develop a policy guide on urban food governance pursuant to developed initiatives and programs	Indonesia: Activity 4. Develop a policy guide for use by urban councils, urban planners and municipal authorities related to program design, planning and promotion of investment incentives to promote peri-urban based short value chains and logistics platforms to link producers to final consumers through private businesses and private-public partnerships. The policy guide will be validated through coordination between local/urban councils, urban planners, municipal authorities and ministerial staff.			

3. IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT ARRANGEMENTS

The project Budget Holder (BH) will be based at FAO Regional Office for Asia and the Pacific (FAO-RAP). The Lead Technical Officer (LTO) is the Senior Economist/Senior Policy Officer in FAO-RAP. The project will be supervised and implemented by a project task force team (RAP and HQ) and work closely with **Ministry of Agriculture in Indonesia** to implement the project activity. The project also seeks to work with service providers, including Universities (via LoA), consultants and with development partners such as the World Bank, ADB and private partners to coordinate overlapping and complementary activities related to urban food planning, initiatives and investment plans in the countries. Key indicators will be developed to monitor the project performance through letters of agreements with partners to develop to implement this project activity. The proposed project will seek to work closely with ongoing projects (TCP and TF) and initiatives to create synergies and ensure the relevance and sustainability of this project.

In Indonesia, an inter-ministerial task force involving the Ministry of Agriculture, Ministry of Health and the Municipal governments of the selected cities will provide the guidance and oversight of the project activities in Indonesia.

The implementation of the project is subject to the TCP General Provisions. The government shall deal with any claim which may be brought by third parties against FAO or its staff, or against any person performing services on behalf of FAO, and shall hold them harmless in respect of any claim

or liability arising in connection with the activities, unless the government and FAO should agree that the claim or liability arises from gross negligence or willful misconduct on the part of the individuals mentioned above.

Activities funded by FAO are subject to FAO's Environmental and Social Standards. Should a stakeholder experience grievances resulting directly or indirectly from the implementation of the activities funded by FAO, they should get in contact with the closest responsible FAO office. If good faith attempts to resolve a concern or grievance with FAO's office were unsuccessful, or if a complainant has demonstrated a good reason for not approaching the project management (e.g., reasonable fears about their safety), a request for Compliance Review may be filed with the Office of the Inspector General of FAO at Investigations-hotline@fao.org.

4. GOVERNMENT INPUTS

As part of the contribution to this TCP, the governments of participating countries, through their Agriculture sector ministries, shall agree to make available the requisite number of qualified national personnel and the office space, training facilities, equipment, transport and other local services necessary for the implementation of the activities. The government(s) shall assign authority for the TCP within the country to the Agriculture sector ministry and designate a National Project Coordinator (at no cost to the project), which shall constitute the focal point for cooperation with FAO in the execution of the activities, and which shall exercise the government's responsibility in this regard.

5. FAO CONTRIBUTION

Budget allocation

Personnel services

Type/Titles	No. of days	Fee/Day	Budget (USD)
National Expert on Food, Value Chains and Nutrition Policy (Indonesia)	100	150	15 000
FAO Technical Support Services (TSS) – Senior Policy Officer, RAP (Lead Technical Officer)	10	578	5780
FAO Technical Support Services (TSS) – HQ Technical Officer, NSP-HQ (<i>specific TSS</i>)	10	578	5 780

Travel	No. of Days	DSA/ Day	Travel Costs	Budget (USD)
FAO Technical Support Services (TSS) – Senior Policy Officer, RAP (LTO)	4	225	900	4 700
National Experts on Food, Value Chains and Nutrition Policy (<i>USD 2 000 per country</i>)				2 000
Duty travel (FAO staff only) (<i>in country USD 1 000</i>)				1 000
Non-staff travel (e.g. counterparts)				3 000

Contracts or letters of agreements

Category	Short description	Budget (USD)
Letter of Agreement	One LOA with SP – Indonesia to deliver outputs 1, 2, 4	60 000

Materials, supplies and equipment

Category	Type of materials/equipment and cost estimates	Budget (USD)
Non-expendable equipment	Up to 5 tablets per country for testing digital applications	2 000

Training

Category	Title and duration of event	Budget (USD)
In-country training (workshops and seminars)	Project Inception Workshop	2 000
	Project Training on urban food governance and action plans	8 000
	Final workshop to assess the results of all the activities conducted	3 000

Other Costs	Budget (USD)
Standard Reporting Costs and others	2 740
Total Budget (USD)	115 000

6. SUSTAINABILITY OF RESULTS

The Assistance provided under this regional TCP will generate policy guidelines for inclusive policies and governance structures dealing with urban food objectives and drawn from existing or emerging programs and actions expanding food systems resilience from rural to urban ecosystems. As the project will build on existing initiatives, the key contributions are to provide robust institutional and cross-agencies coordinating mechanisms that can be replicated or scaled up across many more urban centers, small towns, and secondary urban centers. Lessons drawn from urban pilot cases can be replicated within urban planning, green cities development. They would contribute to achieving SDG 11 (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable).

The regional TCP will support the creation and empowerment of several coordination bodies involving several line ministries (agriculture, health, territorial development) and national versus municipal governments in coordinating urban food development initiatives in line with promoting resilient food systems and robust food supply chains linking rural (production centers, including peri-urban) with urban consumers, including the poor and most vulnerable groups. Inter-ministerial and inter-government platforms will be formed and supported. They will provide continuity beyond the project period, including replicating and expanding lessons learned from the case studies analyzed and supported under the project to other urban centers, cities, and metropolitan areas. This is ensured through expanding supported programs and initiatives in target municipalities and local governments, and engagement of development partners (WB, ADB, JICA). The lessons learned will also likely be picked up by existing urban governance structures such as chamber of commerce, urban planning commissions and local governments (like Mayor's office for example).

The proposed activities under this TCP can be replicated through the inter-agency platforms within existing programs specific to urban food or as part of sustainable food systems and initiatives falling under COVID-19 response actions to rebuild resilient food systems following the COVID pandemic. Such activities would cover supporting urban food production, shortening value chains, rebuilding stronger monitoring of supply chains through digital innovations, and promoting stronger linkages between producers (urban and rural) and urban consumers).

Annex 1 - Work plan

Work Plan for Indonesia TCP/RAS/3807	Responsibilities	Year 1				Year 2			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Output 1: Data, analysis and evidence gathering for policy analysis and program development among urban planners, municipal government, private actors, producer groups and households									
1.1 Diagnosis and formulation of action plan for short supply chains linking producers to urban consumers (Indonesia)	FAO								
Output 2: Action plans for urban agriculture, home gardening and nutrition programs for vulnerable urban residents developed									
2.1 Technical support to multi-stakeholder working group to develop an action plan for urban food initiatives (Indonesia)	FAO								
Output 3: Multi-stakeholder initiatives for coordinated programs for urban agriculture development, food marketing and distribution, food safety regulation, food waste reduction, land use management and city greening programs are developed									
3.1 Carry out coordination meetings and consultations with stakeholders (Indonesia)	FAO								
Output 4: Capacity development for local/urban councils, urban planners, municipal authorities and government staff in data and evidence collection and interpretation, planning, and policy coordination									
4.1 Develop a policy guide on urban food governance pursuant to developed initiatives and programs (Indonesia)	FAO								
Operational Activities									
Procurement	FAO								
Recruitment	FAO								
LoA	FAO								



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdhorti@pertanian.go.id

NOTA DINAS

Nomor: 78/D.1/Can/11/2024

Yth. : Koordinator Keuangan dan BMN
Dari : Koordinator Perencanaan
Perihal : Permintaan Pengesahan Hibah Luar Negeri ke KPPN
Tanggal : 18 November 2024

Bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen hibah luar negeri untuk pengajuan pengesahan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kementerian Keuangan serta untuk menutup proyek hibah sebagai berikut :

1. *Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations Michi-No-Eki* berlokasi di Kota Tomohon, Sulawesi Utara:
 - a) Proyek ini berupa hibah barang senilai Rp 1.485.384.000, meliputi pembangunan gedung *Michi-No-Eki* beserta peralatan dan perabotan Stasiun Jalan, komputer, printer, televisi, *wi-fi router* dan TV stand. Kemudian hibah jasa senilai Rp 2.735.860.005,-
 - b) Proyek berakhir 16 Oktober 2024, telah dilakukan pemutakhiran data.
2. *The Public Private Partnership Project for the Improvement of the Agriculture Product Marketing and Distribution System Phase 2 :*
 - a) Realisasi anggaran proyek berupa hibah jasa senilai Rp 13.200.000.000,- (35% dari nilai proyek) untuk masa periode Juni 2021 – Desember 2022, dari total hibah JPY323.130.000,- / Rp37.989.311.614,-
 - b) Sebagaimana kesepakatan pada *Record of Discussion* (RoD) bahwa BAST dilaksanakan setiap tahun pelaksanaan proyek.
 - c) Proyek akan berakhir Juni 2025.
3. *Technical Support on Exploring Bottlenecks and Pay-off Along the Value Chain in Reducing Food Loss and Waste in Perishable Commodities* (TCP/INS/3807/C5) :
 - a) Proyek ini berupa hibah jasa pelaksanaan studi (kajian) bekerjasama dengan *Center of System* (IPB) berlokasi di Kab. Cianjur (kubis), Kab. Banyuwangi (cabe), Kab. Brebes (bawang merah);
 - b) Realisasi anggaran senilai Rp 1.340.525.645,- (95% dari total komitmen proyek).
 - c) Proyek berakhir 4 Oktober 2024, telah dilakukan pemutakhiran data.
4. *Technical Support to Promote Policy Coherence for Safe, Reliable and Resilient Urban Food Systems in Post-COVID Environment* (TCP/RAS/3807) :
 - a) Proyek ini berupa hibah jasa pelaksanaan studi (kajian) bekerjasama dengan Fakultas

- Ekonomi Universitas Indonesia berlokasi di kota Bogor dan Kota Tangerang Selatan.
- b) Realisasi anggaran senilai Rp 1.652.917.520,- (92% dari total komitmen proyek).
 - c) Proyek berakhir 4 Oktober 2024, telah dilakukan pemutakhiran data.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat memproses dokumen dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Susilawaty



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdhorti@pertanian.go.id

Nomor : B-1466/KL.210/D.1/10/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rencana Perpanjangan Proyek Hibah FAO

22 Oktober 2024

Yth. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
di
Jakarta

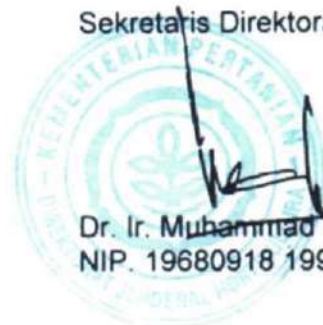
Merujuk Berita Acara Serah Terima (BAST) dari FAO dan Direktorat Jenderal Hortikultura Nomor B-1458/KL.210/D.1/10/2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal Berita Acara Serah Terima Hibah *Technical support to promote policy coherence for safe, reliable and resilient urban food systems in post-COVID environment (TCP/RAS/3807)*, bersama ini kami sampaikan rencana perpanjangan hibah FAO "*Technical support to promote policy coherence for safe, reliable and resilient urban food systems in post-COVID environment*" yang semula proyek berakhir pada 17 November 2023 diperpanjang menjadi tanggal 4 Oktober 2024 karena diperlukan untuk proses penyelesaian administrasi penutupan proyek hibah dengan nomor register "21N957AA".

Perpanjangan proyek ini dilakukan dalam rangka pemutakhiran data hibah untuk dilakukan pengesahan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon bantuan Saudara untuk dapat memproses lebih lanjut usulan perpanjangan proyek dimaksud kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
NIP. 19680918 199303 1 002

Tembusan:

1. Plt Direktur Jenderal Hortikultura (sebagai laporan)
2. Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 – 7806131, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <https://pertanian.go.id>

Nomor : B-2214/KL.230/A.6/11/2024

14 November
2024

Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penetapan Pemutakhiran Hibah FAO
TCP/RAS/3807

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Kementerian Keuangan Nomor:S-706/PR.8/2024 tanggal 7 November 2024 perihal perubahan data register hibah, bersama ini kami informasikan bahwa Kementerian Keuangan telah melakukan pemutakhiran data hibah luar negeri sebagai berikut:

Nama Hibah : *Technical support to promote policy coherence for safe, reliable and resilient urban food systems in post-COVID environment*
(TCP/RAS/3807)
Donor : FAO
Periode : 25 April 2022 – 4 Oktober 2024
Nilai Hibah : USD 115.000.
Bentuk hibah : Barang dan Jasa
Nomor Register : 21N9557AA

Selanjutnya diharapkan satker hibah tersebut secara aktif melaporkan perkembangan pelaksanaan hibah (kegiatan fisik, keuangan maupun permasalahan) setiap triwulan melalui aplikasi SIPOR PHLN) dengan mengakses alamat web: siporphln.pertanian.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri,



Dr. Ade Candradijaya
NIP 196906031999031001

Tembusan:
1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELMEN
GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 7 JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230
PSW 2702, (021) 3864778 ; FAKSIMILE (021) 3843712 ; LAMAN www.djppr.kemenkeu.go.id

Nomor : S-706/PR.8/2024 7 November 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu lembar
Hal : Perubahan Data Register Hibah Nomor 21N957AA untuk Kementerian Pertanian

Yth. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
Jalan Harsono RM Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Sehubungan dengan surat Saudara nomor B-2101/KL.230/A.6/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 hal Permohonan Pemutakhiran Hibah FAO TCP/RAS/3807 yang diterima secara lengkap tanggal 07 November 2024, dengan ini kami sampaikan bahwa kami telah melakukan perubahan tanggal batas penarikan semula tanggal 17 November 2023 menjadi 04 Oktober 2024 serta tetap menggunakan nomor register 21N957AA sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Evaluasi, Akuntansi dan
Setelmen



Ditandatangani secara elektronik
Endah Martiningrum

Tembusan:

1. Direktur Sistem Penganggaran
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Layanan kami biaya nihil
Terima kasih telah memberikan dukungan untuk gerakan anti korupsi
dengan tidak memberikan gratifikasi.



Lampiran Surat Penetapan
Nomor : S- /PR.8/2024
Tanggal : 07 November 2024

Perubahan Data Hibah

No	No Register	Keterangan	Semula	Menjadi
1	21N957AA	Tgl. Batas Penarikan	17-11-2023	04-10-2024

Disclaimer

- Kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan nomor register hibah menjadi tanggungjawab pemohon registrasi hibah
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya





KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 – 7806131, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <https://pertanian.go.id>

Nomor : B-2103/KL.230/A.6/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pemutakhiran Hibah FAO
TCP/INS/3807/C5

30 Oktober 2024

Yth.
Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Ditjen. Hortikultura Nomor: B-1465/KL.210/D.1/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 perihal rencana perpanjangan hibah FAO, bersama ini kami sampaikan permohonan pemutakhiran hibah FAO: *Technical Support on Exploring Bottlenecks and Pay-Offs Along the Value Chain Reducing Food Loss and Waste in Perishable Commodities* (TCP/INS/3807/C5), dengan nomor register 2493MSCA. Pemutakhiran yang dilakukan adalah periode hibah yang semula berakhir tanggal 31 Oktober 2023 diperpanjang menjadi tanggal 4 Oktober 2024 dengan tujuan untuk penyelesaian proses pengesahan ke KPPN dan penutupan nomor register hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara dalam proses pemutakhiran data hibah dimaksud. Sebagai dokumen pendukung, kami sampaikan Ringkasan Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) sekaligus sebagai amandemen perpanjangan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri,



Dr. Ade Candradijaya
NIP 196906031999031001

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Direktur Jenderal Hortikultura.



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

**PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK
BARANG / JASA / SURAT BERHARGA**

Nomor : 01194T
Tanggal : 03-12-2024
Satker : 625875 - DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

KPPN : 139 - JAKARTA V
Tanggal : 03-12-2024
Nomor : 820953518968545451
Tahun Anggaran : 2024

Telah disetujui pencatatan pendapatan hibah dan belanja pencatatan hibah sejumlah :

Saldo awal	: Rp	0
Pendapatan	: Rp	1.340.525.645
Belanja	: Rp	1.340.525.645
Saldo Akhir	: Rp	0

Yaitu : Pengesahan Hibah Langsung bentuk Jasa dari FAO dalam rangka pelaksanaan studi (kajian) pada proyek TPCF, sesuai BAST No.B-1457/KL.210/D.1/10/2024 tgl.04/10/2024 dan Surat Perjanjian No.B-155/KL.220/D/04/2022 tgl.25/04/2022

Jakarta, 05-11-2024
Kuasa Bendahara Umum Negara
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



Ditandatangani secara elektronik
Agustina Suswardani Kanti Astuti
NIP. 197108291992012001

KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA		
Nomor 01194A	Tanggal 03-Des-2024	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Negara, Jakarta V (139) Agar melakukan pencatatan atas penerimaan hibah langsung sejumlah bentuk barang/jasa/surat sejumlah 0,00		
**** NIHIL ****		
Tahun Anggaran: 2024 Dasar PP NO.10/2011 Nomor SP3HL-BJS: 377/PL.130/D/10/2024 Tanggal SP3HL-BJS: 22-10-2024 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024		Jenis Tagihan : MEMO PENC HIBAH LNGSNG BRG JASA SURAT BERHRGA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : Pengesahan No. Register : 2493MSCA
Barang/Jasa/Surat Berharga		JUMLAH UANG
625875.139.522191.01804EC.5887AEH.O02493MSCA.00000.1.0154.9.000000.000000		1.340.525.645,00
Barang/Jasa/Surat Berharga		1.340.525.645,00
PENDAPATAN		JUMLAH UANG
977263.140.431222.99902EC.5887AEH.O02493MSCA.00000.1.0154.9.000000.000000		1.340.525.645,00
Jumlah Pendapatan		1.340.525.645,00
TOTAL PEMBAYARAN		**** NIHIL ****
Kepada: Nomor Supplier : Nama Supplier : Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya Yaitu : Pengesahan Hibah Langsung bentuk Jasa dari FAO dalam rangka pelaksanaan studi (kajian) pada proyek TPCF, sesuai BAST No.B-1457/KL.210/D.1/10/2024 tgl.04/10/2024 dan Surat Perjanjian No.B-155/KL.220/D/04/2022 tgl.25/04/2022		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM		
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.		
Jakarta Selatan, 03 Desember 2024 Kuasa Pengguna Anggaran		
		
MUHAMMAD TAUFIQ RATULE NIP 196809181993031002		

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 01194A
Tanggal : 03-Desember-2024
Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
625875.139.522191.01804EC.5887AEH.O02493MSCA.00000.1.0154.9.000000.000000		
1	000.000.00.000000-	1.340.525.645,00
	Jumlah	1.340.525.645,00
Jumlah		1.340.525.645,00

Jakarta Selatan
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

MUHAMMAD TAUFIQ RATULE
NIP 196809181993031002



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id / sekidthorti@pertanian.go.id

SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA

NOMOR : 377/PL.130/D/10/2024

TANGGAL : 22 Oktober 2024

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V

Bersama ini disampaikan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan hibah yang diterima berupa Barang/Jasa/Surat Berharga dengan rincian sebagai berikut :

Penerima Hibah

Bagian Anggaran/ Eselon I : Direktorat Jenderal Hortikultura
Kode dan Nama Satker : 625875 / Satker Direktorat Jenderal Hortikultura

Pemberi Hibah

Negara Donor : Indonesia
Nama Donor : *Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)*
Nama Proyek : *TCPF: Technical Support on Exploring Bottlenecks and Pay-Offs Along the Value Chain in Reducing Food Loss and Waste in Perishable Commodities (TCP/INS/3807/C5)*

Nomor & Tgl Perjanjian Hibah : B-155/KL.220/D/04/2022, 25 April 2022
Nilai Hibah : USD 90.000 / IDR 1.412.550.000,-
unit rate 1 USD = IDR 15.695 (BI middle transaction rate as of October 2023)

Rencana Pendapatan Hibah

Nomor Register : 2493MSCA
Nilai Realisasi Hibah : USD 85,411 sehingga jumlah total untuk hibah jasa sebesar IDR 1.340.525.645,-
Bentuk Hibah : ☐ Barang ☒ Jasa ☐ Surat Berharga
Akun : 431222

Jakarta, 22 Oktober 2024
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
NIP. 19680918 199303 1 002





KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdhorti@pertanian.go.id

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG (SPTMHL)

Nomor : 378/PL.130/D/10/2024

Tanggal : 22 Oktober 2024

Menyatakan bahwa saya atas nama :

Kementerian Negara/Lembaga : (018) Kementerian Pertanian
Eselon I : (04) Direktorat Jenderal Hortikultura
Satker : (625875) Direktorat Jenderal Hortikultura
Nomor dan Tanggal DIPA : Tidak Ada DIPA
Nomor dan Tanggal SP Pengesahan : Tidak Ada SP Pengesahan

Bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa jasa yang diterima langsung dari:

Pemberi Hibah : *Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)*

Nilai Hibah / Komitmen Hibah : USD 90.000 / IDR 1.412.550.000,-
unit rate 1 USD = IDR 15.695 (BI middle transaction rate as of October 2023)

Digunakan dalam rangka pelaksanaan studi (kajian) pada proyek "TCPF: *Technical Support on Exploring Bottlenecks and Pay-Offs Along the Value Chain in Reducing Food Loss and Waste in Perishable Commodities*" (TCP/INS/3807/C5)" tanpa melalui KPPN dengan rincian sebagai berikut:

No	Pendapatan		Belanja	
1	431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa	522191	Belanja Jasa Lainnya

Bukti-bukti / BAST *) terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Oktober 2024
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
NIP. 19680918 199303 1 002



BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
GRANT HANDOVER STATEMENT
Nomor : B-1457/KL.210/D.1/10/2024
Tanggal : 04 Oktober 2024



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
TCPF: Technical Support on Exploring Bottlenecks and
Pay-Offs Along the Value Chain in Reducing Food Loss
and Waste in Perishable Commodities (TCP/INS/3807/C5)

Pada hari ini, 4 Oktober, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Rajendra Aryal
Jabatan : FAO Representative in Indonesia
Alamat : Menara Thamrin Building, 7th floor
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3
Jakarta 10250

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr.Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Hortikultura
Alamat : Jl. Aup No.3, RT.9/RW.10, Ps. Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12520

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa PIHAK PERTAMA telah melakukan pengeluaran berupa biaya jasa pelaksanaan studi pada proyek "TCPF: Technical Support on Exploring Bottlenecks and Pay-Offs Along the Value Chain in Reducing Food Loss and Waste in Perishable Commodities" (TCP/INS/3807/C5)" senilai IDR Rp.1.340.525.645,- atau USD 85,411 (95% dari total komitmen awal dana proyek sebesar USD 90.000) sebagaimana Lampiran 2 (Nilai tukar UN operational rate saat akhir proyek/Oktober 2023, 1 USD = Rp.15.695) selama periode 25 April 2022 s/d 31 Oktober 2023 sesuai dengan nomor surat perjanjian B-155/KL.220/D/04/2022, sedangkan PIHAK KEDUA sebagai pemberi persetujuan pelaksanaan kegiatan.

Semua bukti/kwitansi terkait pengadaan jasa disimpan oleh PIHAK PERTAMA. Dokumen dan laporan hasil kegiatan yang telah diserahkan sebagaimana Lampiran 1 menjadi hak sepenuhnya PIHAK KEDUA untuk menyimpan, menggunakan, menggandakan, dan menyebarkan sesuai keperluan. BAST ini adalah jaminan bahwa proyek telah dilaksanakan hingga selesai oleh PIHAK PERTAMA.

GRANT HANDOVER STATEMENT
TCPF: Technical Support on Exploring Bottlenecks and
Pay-Offs Along the Value Chain in Reducing Food Loss
and Waste in Perishable Commodities (TCP/INS/3807/C5)

On this day, 4 October 2024, the undersigned below:

1. Name : Rajendra Aryal
Title : FAO Representative in Indonesia
Address : Menara Thamrin Building, 7th floor
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3
Jakarta 10250

hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**.

2. Name : Dr.Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
Title : Director General of Horticulture (OiC)
Address : Jl. Aup No.3, RT.9/RW.10, Ps. Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12520

hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.

Explain that the FIRST PARTY has incurred costs for services carrying out studies on the project TCPF: Technical Support on Exploring Bottlenecks and Pay-Offs Along the Value Chain in Reducing Food Loss and Waste in Perishable Commodities" (TCP/INS/3807/C5)" with total amount of IDR Rp.1.340.525.645,- or equal to USD 85,411 (95% of the total initial project funding commitment of USD 90.000) as in Appendix 2 (UN operational rate exchange rate at the end of the project/October 2023, 1 USD = Rp. 15,695) for the period 25 April 2022 to 31 October 2023 in accordance with the grant letter number 155/KL.220/D/04/2022, while the SECOND PARTY is the party who provide approval for the implementation of the activity.

All expenses receipts related to the procurement of services are kept by the FIRST PARTY. Documents and reports on the results of the activities that have been submitted as in Annex 1 become the full right of the SECOND PARTY to store, use, reproduce and disseminate as needed. This BAST is a guarantee that the project has been implemented to completion by the FIRST PARTY.

This handover statement is part of the grant extension process if there is any administrative process for grant approval

Berita Acara Serah Terima ini adalah bagian dari proses perpanjangan hibah apabila ada proses administrasi kepengurusan pengesahan hibah melebihi tanggal penutupan. Proyek hibah ini akan dianggap selesai/ditutup setelah proses pengesahan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kementerian Keuangan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam Bahasa Indonesia dan Inggris serta ditandatangani kedua belah pihak.

beyond the closing date. This grant project will be considered complete/closed after the approval process at the National Treasury Services Office (KPPN), Ministry of Finance.

Thus, this handover statement is prepared in English and Indonesian, and signed by both parties.

FIRST PARTY
PIHAK PERTAMA




Rajendra Aryal
FAO Representative in Indonesia

SECOND PARTY
PIHAK KEDUA




Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
Director General of Horticulture

Lampiran 1/Annex 1.

Daftar Dokumen dan Materi Publikasi / List of Documents and Publication Materials

No	Jenis Dokumen/Publikasi (Document/Publication)	Tautan Materi (Link for material)
Laporan Akhir/Final Report		
1	Eriyatno, E., Larasati., Herianto, A., Fatmaningrum, D., Bucatariu, C. & Galvez-Nogales, E. 2024. Food Loss Prevention and Reduction Analysis in Indonesia – A Case Study on Chili, Cabbage, and Shallot. Jakarta, FAO. https://doi.org/10.4060/cc8935en	https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc8935en
Factsheet		
1	Food Loss Analysis: causes and solutions. Chili supply chain in Banyuwangi, East Java.	https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc7577en
2	Food Loss Analysis: causes and solutions. Cabbage supply chain in Cianjur, West Java.	https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc7684en
3	Food Loss Analysis: causes and solutions. Shallot supply chain in Brebes, Central Java.	https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc7683en
Posters		
1	Unlock the potential (Eng)	https://www.fao.org/3/cc7217en/cc7217en.pdf
	Unlock the potential (Ind)	https://www.fao.org/3/cc7217id/cc7217id.pdf
2	Combat cabbage loss (Eng)	https://www.fao.org/3/cc7218en/cc7218en.pdf
	Combat cabbage loss (Ind)	https://www.fao.org/3/cc7218id/cc7218id.pdf
3	Handle shallot with care (Eng)	https://www.fao.org/3/cc7196en/cc7196en.pdf
	Handle shallot with care (Ind)	https://www.fao.org/3/cc7196id/cc7196id.pdf
4	Don't let shallot losses (Eng)	https://www.fao.org/3/cc7201en/cc7201en.pdf
	Don't let shallot losses (Ind)	https://www.fao.org/3/cc7201id/cc7201id.pdf
5	Preserve the spice (Eng)	https://www.fao.org/3/cc7205en/cc7205en.pdf
	Preserve the spice (Ind)	https://www.fao.org/3/cc7205id/cc7205id.pdf
6	Spice up efficiency (Eng)	https://www.fao.org/3/cc7202en/cc7202en.pdf
	Spice up efficiency (Ind)	https://www.fao.org/3/cc7202id/cc7202id.pdf
Videos		
1	Save Food – Reducing Food Losses in Indonesia	https://www.youtube.com/watch?v=sCwGE4iPI4U
2	Food Loss and Waste (Solution)	https://www.youtube.com/watch?v=9X2LtvAwOxQ

Lampiran 2/Annex 2.**Realisasi Penggunaan Dana Proyek/Actual Expenses**

No	Jenis pembiayaan	Total Akhir Pembelanjaan (USD)	Total Alokasi Budget Awal (USD)
1	Honor konsultan/Consultant Fee	12,271	20,780
2	Kontrak/Service Fee	55,259	50,000
3	Casual Labour	1,630	
4	Biaya Perjalanan/Travel cost	4,598	4,688
5	Pelatihan dan pertemuan/Workshop and Meeting	0	6,000
6	Barang Habis Pakai (bahan promosi kegiatan)/Consumable goods (promotion tools)	0	2,000
7	Technical Support Service	5,860	
8	General Operating Expenses	206	645
9	Support cost	5,588	5,887
TOTAL		85,411	90,000



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdhorti@pertanian.go.id

Nomor : B-1465/KL.210/D.1/10/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rencana Perpanjangan Proyek Hibah FAO

22 Oktober 2024

Yth. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
di
Jakarta

Merujuk Berita Acara Serah Terima (BAST) dari FAO dan Direktorat Jenderal Hortikultura Nomor B-1457/KL.210/D.1/10/2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal Berita Acara Serah Terima Hibah *Technical Support on Exploring Bottlenecks and Pay-Offs Along the Value Chain Reducing Food Loss and Waste in Perishable Commodities* (TCP/INS/3807/C5), bersama ini kami sampaikan rencana perpanjangan hibah FAO "*Technical Support on Exploring Bottlenecks and Pay-Offs Along the Value Chain Reducing Food Loss and Waste in Perishable Commodities*" yang semula proyek berakhir pada 31 Oktober 2023 diperpanjang menjadi tanggal 4 Oktober 2024 karena diperlukan untuk proses penyelesaian administrasi penutupan proyek hibah dengan nomor register "2493MSCA".

Perpanjangan proyek ini dilakukan dalam rangka pemutakhiran data hibah untuk dilakukan pengesahan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon bantuan dan kerjasama Saudara untuk dapat memproses lebih lanjut usulan perpanjangan proyek dimaksud kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
NIP. 19680918 199303 1 002

Tembusan:

1. Plt Direktur Jenderal Hortikultura (sebagai laporan)
2. Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASARMINGGU
TELEPON (021) 7804116 – 7806131, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <https://pertanian.go.id>

Nomor : B-2215/KL.230/A.6/11/2024

14 November
2024

Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penetapan Pemutakhiran Hibah FAO
TCP/INS/3807/C5

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Kementerian Keuangan Nomor:S-707/PR.8/2024 tanggal 7 November 2024 perihal perubahan data register hibah, bersama ini kami informasikan bahwa Kementerian Keuangan telah melakukan pemutakhiran data hibah luar negeri sebagai berikut:

Nama Hibah : *Technical Support on Exploring Bottlenecks and Pay-Offs Along the Value Chain Reducing Food Loss and Waste in Perishable Commodities* (TCP/INS/3807/C5)
Donor : FAO
Periode : 25 April 2022 – 4 Oktober 2024
Nilai Hibah : USD 90.000.
Bentuk hibah : Barang dan Jasa
Nomor Register : 2493MSCA

Selanjutnya diharapkan satker hibah tersebut secara aktif melaporkan perkembangan pelaksanaan hibah (kegiatan fisik, keuangan maupun permasalahan) setiap triwulan melalui aplikasi SIPOR PHLN) dengan mengakses alamat web: siporphln.pertanian.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri,



Dr. Ade Candradijaya
NIP 196906031999031001

Tembusan:
1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELMEN

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 7 JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230
PSW 2702, (021) 3864778 ; FAKSIMILE (021) 3843712 ; LAMAN WWW.DJPPR.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-707/PR.8/2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Perubahan Data Register Hibah Nomor 2493MSCA untuk Kementerian Pertanian

7 November 2024

Yth. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
Jalan Harsono RM Nomor 3 Pasar Minggu
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan surat Saudara nomor B-2103/KL.230/A.6/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 hal Permohonan Pemutakhiran Hibah FAO TCP/INS/3807/C5 yang diterima secara lengkap tanggal 07 November 2024, dengan ini kami sampaikan bahwa kami telah melakukan perubahan tanggal batas penarikan semula tanggal 31 Oktober 2023 menjadi 04 Oktober 2024 serta tetap menggunakan nomor register 2493MSCA sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Evaluasi, Akuntansi dan
Setelmen



Ditandatangani secara elektronik
Endah Martiningrum

Tembusan:

1. Direktur Sistem Penganggaran, Ditjen Anggaran, Kemenkeu;
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu.

Layanan kami biaya nihil
Terima kasih telah memberikan dukungan untuk gerakan anti korupsi
dengan tidak memberikan gratifikasi.



Lampiran Surat Penetapan
Nomor : S- /PR.8/2024
Tanggal : 07 November 2024

Perubahan Data Hibah

No	No Register	Keterangan	Semula	Menjadi
1	2493MSCA	Tgl. Batas Penarikan	31-10-2023	04-10-2024

Disclaimer

- Kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan nomor register hibah menjadi tanggungjawab pemohon registrasi hibah
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya





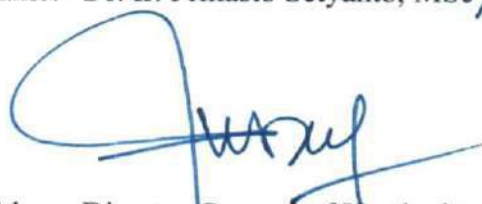
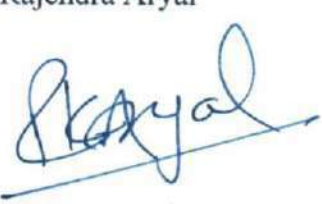
Food and Agriculture Organization of the United Nations

PROJECT DOCUMENT

Upon request from the Government of the Republic of Indonesia, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) will provide technical assistance for the following Project:

Project Title:	TCPF: Technical Support on Exploring Bottlenecks and Pay-Offs Along the Value Chain in Reducing Food Loss and Waste in Perishable Commodities
Project Symbol:	TCP/INS/3807/C5

Upon signature of this project document by the duly authorized representatives of both parties, the project will be implemented in accordance with the background, rationale and management arrangements described herein.

On behalf of the Government:	On behalf of: The Food and Agriculture Organization of the United Nations
Name: Dr. Ir. Prihasto Setyanto, MSc <i>BS</i>	Name: Mr. Rajendra Aryal
	
Title: Director General of Horticulture Ministry of Agriculture Indonesia	Title: FAO Representative in Indonesia
Date: 25 April 2022	Date: 25 April 2022
Nomor : B-155/KL.220/D/04/2022	

**Description of the assistance provided through
FAO's Technical Cooperation Programme (TCP)**

Title:	TCPF: Technical Support on Exploring Bottlenecks and Pay-Offs Along the Value Chain in Reducing Food Loss and Waste in Perishable Commodities
TCP symbol:	TCP/INS/3807/C5
Recipient Country:	Indonesia
Government counterpart(s):	Ministry of Agriculture
Expected EOD (Starting Date):	January 2022
Expected NTE (End Date):	June 2023
Contribution to Government priorities:	Indonesia's Mid Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024 on Food Loss and Waste priority <u>UNSDCF 2021-2025</u> Outcome 2: Institutions and people contribute more effectively to advance a higher value-added and inclusive economic transformation (Output 2.3: National counterparts have increased capacity to analyse, design, and implement policies and plans on inclusive and efficient agriculture and food systems development along with adoption of new technology and innovative practices) <u>FAO Country Programming Framework 2021-2025</u> CPF Output 2.3.2. Value Chain Development: Increased capacity of national and sub-national-level horticultural and estate crops', livestock, capture fisheries' and aquaculture value chain actors to analyse, design and implement plans on sustainable forest product management, inclusive and efficient agricultural systems that reduce food loss and food waste and improve the nutrition of rural households, the quality and safety of the country's domestic food supplies and the competitiveness of its exports, including the development of public-private partnerships (e.g. contract farming arrangements), equitable participation in produce marketing and improved market transparency <u>Global SDGs</u>: Goal 12 on sustainable production and consumption with specific target 12.3 on Food loss and waste
Total Budget:	USD 90 000

1. RATIONALE

Indonesia is the second largest food waster in the world with almost 300 kg per person per year or around 13 million tons of food are wasted every year (according to a study from the Economist Intelligence Unit) in which this food could feed roughly 28 million people. This problem is particularly sensitive in Indonesia, where millions of people still suffer from malnutrition and poverty. Not to mention on food loss, 42% of fruits and vegetables and up to 30% of grains produced across Asia and the Pacific region are wasted or lost even before it reaches consumers' plates (FAO, 2011).

According to the recent report from BAPPENAS (2021), food loss and waste in Indonesia in 2000-2019 reached 115-184 kg per capita per year with the biggest generation occurs at the consumption stage. Further, the report mentioned that based on the food sector and types, the biggest generation is found in crops, particularly cereals. Meanwhile, the most inefficient food sector and category is horticulture plants, especially vegetables. The economic loss due to the food loss and waste generation in Indonesia in 2000 - 2019 is approximately IDR 213-551 trillion per year or equals 4-5% of Indonesia's GDP (BAPPENAS, 2021).

Food loss results from wide-ranging managerial and technical limitations in harvesting techniques, storage, transportation, processing, cooling facilities, infrastructure, packaging and marketing systems (FAO, 2015). One of the main sectors of concern in agricultural sectors are small- and medium-scale agricultural production and processing. Meanwhile, the causes of food waste relate mainly to consumer behaviour and the policies and regulations put in place to address other sectorial priorities. Improved knowledge on critical loss points and direct and indirect causes of losses and waste would support the improvement of options for Government strategies to reduce the food loss and waste in Indonesia.

Thus, it is very important to understand the bottlenecks and pay-offs in the whole value chain (from farm to table) in reducing food loss and waste in selected specific perishable commodities, such as fruits and vegetables –as mentioned above that fruits and vegetables are the nutritious commodities that are lost and wasted the most.

The TCP aim to provide the technical assistance to explore the bottlenecks and pay-offs in reducing food loss and waste in specific perishable commodities, such as fruits and vegetables as well provide recommendations on the evidence-based policies/ strategies to reduce food loss and waste in a specific commodity.

2. EXPECTED RESULTS

IMPACT	Reduction in Food Loss and Waste, both quantity and quality losses, leading on the improvement of food security and nutrition and making production and consumption systems more sustainable
OUTCOME	Providing recommendations on the evidence-based strategies to reduce food loss and waste in perishable commodities
OUTPUT 1	Collaborative study to explore the bottlenecks and pay-offs in reducing food loss and waste in perishable commodities conducted

Indicator	Baseline	Target	Means of Verification	Assumptions
# of collaborative study conducted	0	1	Collaborative study report	Good collaboration and political willingness of the involved institutions
# of multi-stakeholders engaged	0	2	Meeting reports indicating at least 100 stakeholders engaged	
ACTIVITIES for achieving output 1				
Title	Description			
Activity 1.1	Meeting with key MOA officials to discuss the collaborative study for food loss and waste in perishable commodities.			
Activity 1.2	Selection process for the national service provider to conduct the collaborative study.			
Activity 1.3	Multi-stakeholder (government, universities, consumer groups, private sector, etc.) consultation on the draft collaborative study on food loss and waste.			
Activity 1.4	Validation workshop of the result of the collaborative study with the involvement from government, universities, NGOs, and relevant actors for their inputs.			
Activity 1.5	Finalization of the collaborative study for Government consideration.			
OUTPUT 2	Recommendations on the evidence-based policies/ strategies to reduce food loss and waste in perishable commodities formulated and agreed			
Indicator	Baseline	Target	Means of Verification	Assumptions
# of multi-stakeholder discussion conducted	0	2	Meeting report	Political willingness of the involved institutions
Document of multi-stakeholder feedbacks	0	1	Document feedbacks in loss assessments	
ACTIVITIES for achieving output 2				
Title	Description			
Activity 2.1	Meeting with key MOA and other relevant officials (BAPPENAS) to discuss mechanism of the multi-stakeholder consultation.			
Activity 2.2	Organize a national Multi-stakeholder consultation/roundtable to raise awareness and discuss the draft recommendations to reduce food loss and waste in selected perishable commodities.			

Activity 2.3	Revise and finalize the recommendations according to the feedbacks from the multi-stakeholder consultation.			
OUTPUT 3	Communication materials on the conducted study and its recommendations disseminated to the wider audience/ public			
Indicator	Baseline	Target	Means of Verification	Assumptions
Number of communication materials produced to be disseminated	No promotion materials produced for the study and its recommendations	Produce and promote food loss and waste study and its recommendations communication materials	Communication materials produce	Good collaboration with key stakeholders; Political willingness of the involved institutions
ACTIVITIES for achieving output 3				
Title	Description			
Activity 3.1	Meeting with key MOA officials to discuss the communication materials (e-report, video, booklet, and others) to support the food loss and waste study and its recommendations.			
Activity 3.2	Produce the agreed communication (e-book, video, booklet, and others) materials in related to the food loss and waste study and its recommendations.			
Activity 3.3	Dissemination event as part of promotional activity on publishing the communication material of the food loss and waste study and its recommendations.			

3. IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT ARRANGEMENTS

The Project Task Force (PTF) will ensure full technical, operational and administrative support for the project. The PTF has the overall responsibility for project's management, implementation and coordination, including technical advice and backstopping to the project and contracted consultants on specific policy, legal, and/or technical issues. The budget holder will be FAO Indonesia and Lead Technical Officer (LTO) will be Senior Food Systems Officer (Regional Module Leader for Value Chains and for Food Loss and Waste), RAP and the HQ Technical Officer will be Senior Enterprise Development Officer, ESN. The LTO, HQ Technical Officer, and the Programme team in FAO-Indonesia will closely work with Budget holder office to provide technical expertise and guidance for the implementation of the project. Gender mainstreaming and youth involvement issues will be envisaged in all activities during implementation of the project.

The implementation of the project is subject to the TCP General Provisions. The government shall deal with any claim which may be brought by third parties against FAO or its staff, or against any person performing services on behalf of FAO, and shall hold them harmless in respect of any claim or liability arising in connection with the activities, unless the government and FAO should agree that the claim or liability arises from gross negligence or willful misconduct on the part of the individuals mentioned above.

Activities funded by FAO are subject to FAO's Environmental and Social Standards. Should a stakeholder experience grievances resulting directly or indirectly from the implementation of the activities funded by FAO, they should get in contact with the closest responsible FAO office. If good faith attempts to resolve a concern or grievance with the FAO's office were unsuccessful, or if a complainant has demonstrated a good reason for not approaching the project management (e.g., reasonable fears about their safety), a request for Compliance Review may be filed with the Office of the Inspector General of FAO at Investigations-hotline@fao.org.

4. GOVERNMENT INPUTS

The Ministry of Agriculture will provide the following:

- Needful coordination support and facilities, including (virtual or off line) meeting and release staff for discussion and meetings and will play a leadership role for wider stakeholders participation;
- Logistic arrangements and organization of periodic meetings with the relevant Government counterparts' and other stakeholders;
- Ensure participation in meetings, consultative, and capacity building activities of relevant staff from involved institutions;
- Facilitate coordination of activities among ministries and institutions at national level;
- Facilitate coordination of activities among ministries and institutions at sub-national level;
- Facilitate access of project personnel to official documents, data and products and meetings with Government officials, local chief executives, and other stakeholders/partners and relevant institutions and personnel as required.

- Participation in meetings of national and sub-national stakeholders from involved institutions are intended as in-kind contributions of the respective institutions and of the GoI as a whole.

5. FAO CONTRIBUTION

Personnel services

Type/Titles	No. of days	Fee/Day	Budget (USD)
National Consultant on Food Loss and Waste (FLW)	150	100	15 000
FAO Technical Support Services (TSS) – TSS Specific – Senior Food Systems Officer, RAP (Lead Technical Officer)	10	578	5 780

Travel	No. of Days	DSA/Day	Travel Costs	Budget (USD)
FAO Technical Support Services (TSS) - Senior Food Systems Officer, RAP (LTO) (2 technical backstopping missions)	8	211	3 000	4 688

Contracts or letters of agreements

Category	Short description	Budget (USD)
Letter of Agreement	Collaborative study to explore the bottlenecks and pay-offs in reducing food loss and waste in specific perishable commodities	50 000

Materials, supplies and equipment

Category	Type of materials/equipment and cost estimates	Budget (USD)
Expendable materials	E-book and other reports, booklets/ leaflets/ brochures	2 000

Training: Multi-stakeholder/ Public Consultation Workshop

Category	Title and duration of event	Budget (USD)
In-country workshops/discussions	Two hybrid events of one day National Consultation Workshops to discuss the draft recommendations (about 30-50 participants) held in Jakarta. <i>Estimated Cost: USD 40/day/person</i>	4 000
	One hybrid events of one day dissemination on the study and its recommendations (about 30-50 participants) held in Jakarta. <i>Estimated Cost: USD 40/day/person</i>	2 000

Other Costs	Budget (USD)
General operating costs directly attributable to implementation	645
Servicing Costs (7%)	5 887

Total Budget (USD)	90 000
---------------------------	---------------

6. SUSTAINABILITY OF RESULTS

As previously indicated, a number of coordination bodies have been established composed by representatives from different institutions. They will constitute the platforms to discuss priority areas for intervention, identify commitments, planning and implement concrete actions to overcome the identified challenges, promote ad hoc policies and reporting progress and results. The creation of these platforms will ensure full appropriation of option and interventions, concepts, decisions and results by all involved institutions and by GoI as a whole.

Consultative workshops, intended for members of national and local coordinating bodies, will be organized from the beginning of this project to develop capacities of national and local institutions and to create positive dynamics that will foster dialogue and mutual support all along the project and create a solid base for continuity beyond the pandemic response. In particular in the medium and long term, and with the support with the cooperation program under discussion within this TCP, GoI bodies are expected to apply special allocations under the National Budget.

Annex 1 – Work Plan

WORK PLAN TCP/INS/3807/C5	Responsibility	Year 1 (2022)				Year 2 (2023)	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Output 1: Collaborative study to explore the bottlenecks and pay-offs in reducing food loss and waste in perishable commodities conducted							
Activity 1.1	FAO & MOA	X					
Activity 1.2	FAO & MOA	X					
Activity 1.3	FAO & MOA		X				
Activity 1.4	FAO & MOA		X	X			
Activity 1.5	FAO & MOA				X		
Output 2: Recommendations on the evidence-based policies/ strategies to reduce food loss and waste in perishable commodities formulated and agreed							
Activity 2.1	FAO & MOA				X		
Activity 2.2	FAO & MOA				X	X	
Activity 2.3	FAO & MOA					X	
Output 3: Communication materials on the conducted study and its recommendations disseminated to the wider audience/ public							
Activity 3.1	FAO & MOA					X	
Activity 3.2	FAO & MOA					X	X
Activity 3.3	FAO & MOA					X	X
Operational activity							
Recruitment	FAO	X					
LoA	FAO	X	X				
Procurement	FAO	X					



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

**PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK
BARANG / JASA / SURAT BERHARGA**

Nomor : 01204T
Tanggal : 03-12-2024
Satker : 625875 - DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

KPPN : 139 - JAKARTA V
Tanggal : 03-12-2024
Nomor : 820983935968545452
Tahun Anggaran : 2024

Telah disetujui pencatatan pendapatan hibah dan belanja pencatatan hibah sejumlah :

Saldo awal	: Rp	0
Pendapatan	: Rp	2.735.860.005
Belanja	: Rp	2.735.860.005
Saldo Akhir	: Rp	0

Yaitu : Hibah Luar Negeri dalam bentuk jasa berupa biaya jasa pelaksanaan proyek pembangunan gedung Michi No Eki di Tomohon, sesuai BAST No.B-1436/KL.230/D.1/10/2024 tgl.16/10/2024 dan Surat Perjanjian MM tgl.28/06/20218

Jakarta, 05-11-2024
Kuasa Bendahara Umum Negara
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



Ditandatangani secara elektronik
Agustina Suswardani Kanti Astuti
NIP. 197108291992012001



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA		
Nomor 01204A	Tanggal 03-Des-2024	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Negara, Jakarta V (139) Agar melakukan pencatatan atas penerimaan hibah langsung sejumlah bentuk barang/jasa/surat sejumlah 0,00		
**** NIHIL ****		
Tahun Anggaran: 2024 Dasar PP NO.10/2011 Nomor SP3HL-BJS: B-1437/KL.230/D.1/10/2024 Tanggal SP3HL-BJS: 16-10-2024 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024		Jenis Tagihan : MEMO PENC HIBAH LNCSNG BRG JASA SURAT BERHRGA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : Pengesahan No. Register : 2RT4RZUA
Barang/Jasa/Surat Berharga		JUMLAH UANG
625875.139.522191.01804EC.5887AEH.O02RT4RZUA.00000.1.0154.9.000000.000000		2.735.860.005,00
Barang/Jasa/Surat Berharga		2.735.860.005,00
PENDAPATAN		JUMLAH UANG
977263.140.431222.99902EC.5887AEH.O02RT4RZUA.00000.1.0154.9.000000.000000		2.735.860.005,00
Jumlah Pendapatan		2.735.860.005,00
TOTAL PEMBAYARAN		**** NIHIL ****
Kepada: Nomor Supplier : Nama Supplier : Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya Yaitu : Hibah Luar Negeri dalam bentuk jasa berupa biaya jasa pelaksanaan proyek pembangunan gedung Michi No Eki di Tomohon, sesuai BAST No.B-1436/KL.230/D.1/10/2024 tgl.16/10/2024 dan Surat Perjanjian MM tgl.28/06/20218		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM		
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. @23 NTM10TU2MzU=		
Jakarta Selatan, 03 Desember 2024 Kuasa Pengguna Anggaran		 MUHAMMAD TAUFIQ RATULE NIP 196809181993031002

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 01204A
Tanggal : 03-Desember-2024
Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
625875.139.522191.01804EC.5887AEH.O02RT4RZUA.00000.1.0154.9.000000.000000		
1	000.000.00.000000-	2.735.860.005,00
	Jumlah	2.735.860.005,00
Jumlah		2.735.860.005,00

Jakarta Selatan
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

MUHAMMAD TAUFIQ RATULE
NIP 196809181993031002



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id / sekdhorti@pertanian.go.id

SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA

NOMOR : B-1437/KL.230/D.1/10/2024

TANGGAL : 16 Oktober 2024

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V

Bersama ini disampaikan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan hibah yang diterima berupa Barang/Jasa/Surat Berharga dengan rincian sebagai berikut :

Penerima Hibah

Bagian Anggaran/ Eselon I : Direktorat Jenderal Hortikultura
Kode dan Nama Satker : 625875 / Satker Direktorat Jenderal Hortikultura

Pemberi Hibah

Negara Donor : Jepang
Nama Donor : Japan International Cooperation Agency (JICA)
Nama Proyek : *Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations Michi no Eki*
Nomor & Tgl Perjanjian Hibah : MM, 28 Juni 2018
Nilai Hibah : JPY 56,404,080 / IDR 6.601.482.759
1 JPY = IDR 117,0391 (24 Maret 2023)

Rencana Pendapatan Hibah

Nomor Register : 2RT4RZUA
Nilai Realisasi Hibah : JPY 23,375,607 sehingga jumlah total untuk hibah jasa sebesar IDR 2.735.860.005,-

Bentuk Hibah : ☐ Barang ☒ Jasa ☐ Surat Berharga
Akun : 431222

Jakarta, 16 Oktober 2024
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Ir. Muhammad Fauzi Ratule, M.Si
NIP. 19680918 199303 1 002



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdhorti@pertanian.go.id

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG (SPTMHL)

Nomor : B-1437/KL.230/D.1/10/2024

Tanggal: 16 Oktober 2024

Menyatakan bahwa saya atas nama :

Kementerian Negara/Lembaga : (018) Kementerian Pertanian
Eselon I : (04) Direktorat Jenderal Hortikultura
Satker : (625875) Direktorat Jenderal Hortikultura
Nomor dan Tanggal DIPA : Tidak Ada DIPA
Nomor dan Tanggal SP Pengesahan : Tidak Ada SP Pengesahan

Bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa jasa yang diterima langsung dari:

Pemberi Hibah : Japan International Cooperation Agency

Nilai Hibah / Komitmen Hibah : JPY 56,404,080 / IDR 6.601.482.759

1 JPY = IDR 117,0391 (24 Maret 2023)

Digunakan dalam rangka bantuan jasa berupa tenaga ahli (*expert*) Jepang, peningkatan kapabilitas (Pelatihan) Petugas Pemerintah Kota Tomohon ke Jepang, jasa pelaksanaan proyek pembangunan gedung Michi no Eki di Kota Tomohon, desain fasilitas secara keseluruhan dan pengembangan konsep Michi No Eki, pembuatan sistem operasi, pengembangan pusat informasi wisata/tempat istirahat, pengembangan peralatan pencegahan bencana, tanpa melalui KPPN dengan rincian sebagai berikut:

No	Pendapatan		Belanja	
1	431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Jasa	522191	Belanja Jasa Lainnya

Bukti-bukti / BAST *) terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Oktober 2024
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
NIP. 19680918 199303 1 002

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : B-1436/KL.230/D.1/10/2024

Tanggal : 16 Oktober 2024

Pada hari ini , Rabu, 16 Okt Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 OKAMURA Kenji : Senior Representative Japan International Cooperation Agency Indonesian Office
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 Dr.Ir.Muhammad Taufiq Ratule, M.Si : Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa **PIHAK PERTAMA** telah melakukan pengeluaran berupa biaya jasa pelaksanaan proyek pembangunan gedung Michi no Eki di Kota Tomohon, kegiatan pelatihan petani, pelatihan pejabat Pemerintah Kota Tomohon ke Jepang, desain fasilitas secara keseluruhan dan pengembangan konsep Michi No Eki, pembuatan sistem operasi, pengembangan pusat informasi wisata/tempat peristirahatan, pengembangan peralatan pencegahan bencana senilai IDR 2,735,860,005,- (JPY23,375,607) periode Januari 2020 s/d Februari 2023 untuk bantuan hibah "*Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations Michi no Eki*" di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan **PIHAK KEDUA** sebagai pemberi persetujuan pelaksanaan kegiatan.

Angka ini merupakan bagian dari total *actual disbursement* dari Januari 2020 s/d Februari 2023 untuk jasa bantuan hibah "*Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations Michi no Eki*" per 24 Maret 2023 (JPY 37,434,150 dan setara dengan IDR 4.381.259.225,- unit rate 1 JPY = IDR 117,0391 (BI middle transaction rate - as of March. 24, 2023) sesuai dengan surat JICA Nomor 1270/PRJ/03/2023 tanggal 24 Maret 2023.

Semua buku/kwitansi terkait pengadaan jasa disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Berita Acara Serah Terima ini adalah bagian dari proses perpanjangan hibah apabila ada proses administrasi kepengurusan pengesahan hibah melebihi tanggal penutupan. Proyek hibah ini akan dianggap selesai/ditutup setelah proses pengesahan ke KPPN, Kementerian Keuangan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Senior Representative Japan International
Cooperation Agency Indonesian Office


OKAMURA Kenji

PIHAK KEDUA

Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura


Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
NIP 196809181993031002

MEETING MINUTES
BETWEEN
THE JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY
AND
DIRECTORATE GENERAL OF HORTICULTURE,
MINISTRY OF AGRICULTURE, REPUBLIC OF INDONESIA
ON
JAPANESE TECHNICAL COOPERATION
UNDER
THE JICA PARTNERSHIP PROGRAM BETWEEN CHIBAMINAMIBOSO INC AND
TOMOHON CITY
FOR
AGRICULTURE PROMOTION THROUGH AGRITOURISM UTILIZING THE
KNOWLEDGE OF ROADSIDE STATIONS '*michi-no-eki*'

The Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA") exchanged views and had a series of discussions through the JICA Indonesia Office with Directorate General of Horticulture, Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia for the purpose of working out the details of activities and measures to be taken by Chibaminamiboso Inc. and Tomohon City concerning "Agriculture Promotion Through Agro-tourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations '*michi-no-eki*'" (hereinafter referred to as "the project"), which will be implemented under the JICA Partnership Program.

As a result of the discussions, both sides agreed to implement the project based on the conditions referred to in the document attached hereto.

Jakarta June 28, 2018



Mr. YAMANAKA Shinichi
Chief Representative
JICA Indonesia Office
Japan International Cooperation Agency



Dr. Ir. Suwandi, M.Si
Director General of Horticulture
Ministry of Agriculture
The Republic of Indonesia

ATTACHED DOCUMENTS

I. Project Implementation

1. JICA, the executing agency for technical cooperation of the Government of Japan, will implement the Project under the JICA Partnership Program in collaboration with CHIBAMINAMIBOSO INC.
2. Ministry of Agriculture of the Government of Indonesia will appoint the authorities of Tomohon City to implement the Project.
3. The Project will be implemented in accordance with the Project Outline, which is attached in the appendix.

II. Measures to be taken by JICA as follows

1. To implement the project efficiently and effectively, JICA will supervise the overall implementation of the Project. Based on a contract to be signed by JICA and CHIBAMINAMIBOSO INC., JICA will entrust the actual implementation of the Project to CHIBAMINAMIBOSO INC.
2. JICA will bear only those expenses it considers necessary for the implementation of the Project.
3. JICA will maintain ownership of the equipment to be procured through its funding for the implementation of the project in accordance with the Project Outline in the appendix throughout the project implementation period.

III. Measures to be taken by Tomohon City as follows

1. The authorities of Tomohon City will cooperate with CHIBAMINAMIBOSO INC to assure the successful implementation of the project.
2. The authorities of Tomohon City will provide CHIBAMINAMIBOSO INC and JICA with all necessary information such as data, maps, and documents that will allow the project to be implemented efficiently and effectively
3. Will build agriculture retailing shop for vegetables and floriculture farmers and rehabilitate organic farmer markets
4. Will build the tourism center and build disaster emergency shelter in road station area
5. Will operate power generator and maintenance as well.
6. Will operate water storage and maintenance as well.
7. Will support competitive bidding and/or other application procedures as needed.
8. The authorities of Tomohon City will provide CHIBAMINAMIBOSO INC and JICA

with all of the necessary information and details on security conditions

9. When the equipment mentioned in II. 3 is deemed necessary for the sustained and effective continuation of the project by Tomohon City, the ownership of the equipment after the completion of the project will be determined through consultation among the parties involved before the completion of the project.

IV. Measures to be taken by Chibaminamiboso City as follows

1. CHIBAMINAMIBOSO INC and Tomohon City will be responsible for the maintenance of the equipment during the project implementation period.
2. Designing, compiling and multiplying digital maps for tourism in multi language, with the step as follow;
 - a. To conduct survey of tourism potency in Tomohon City
 - b. To Provide digital mapping expert
3. Undertaking tour guide seminar for farmers who will be engaged in agritourism,
4. Providing the architect and store designer and merchandising expert. They have task to organize household farmers in managing for selling products.
5. Providing advices about extension of the shelf life of agricultural products in the farmers shop.
6. Providing the facilities of tourism information and information desk as well as the maintenance advices for promoting the tourism of Tomohon city, creating the tourism networking and etc.
7. Providing the facilities of disaster mitigation information, by compiling disaster management guidelines book. Providing advices for preparing an emergency manual for the roadside station.
8. Providing power generator and installing as well, as supportive facilities in roadside station area
9. Preparing and installing water storage and tap for emergency preparedness in roadside station

IV. Mutual Consultations

Any major issues that may arise from or in connection with this attached document shall be resolved through mutual consultations by all parties concerned.

APPENDIX:

• The Project Outline	All types of JICA Partnership Program
• Outline of Project (Expert)	Community Proposal Type of JICA
• Outline of (name of training course)	Partnership Program only (when necessary)

APPENDIX: PROJECT OUTLINE

1. Country: Republic of Indonesia

2. Project Title: Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations '*michi-no-eki*'

3. Background and Necessity of the Project:

Despite the fact that 65% of residents in Tomohon City are engaged in agriculture, the average area of cultivated land is less than 0.3 hectares per a farming household. The low income and lack of successors to take on the agricultural business is a serious problem, and the city is promoting value added farming such as organic farming in order to increase the income of farming households. The income for flower farming households is similarly low as well, as their sales outlets are limited. Therefore, the vegetable and flower farming community has large expectations for the chance to increase their income through diversification of sales outlets of local products such as establishment of farmers' shops, where those farmers will sell their products directly, and promotion of agritourism for increasing tourists inbound and creating sales chances.

Additionally, Tomohon City has been developing its tourism industry over the past ten years, while the majority of tourists coming on a day trip from Manado. It is considered that there are some issues; limited tourism information on internet, no tourist information center, and tourist information is handled separately by few travel agency and each hotels. If the tourists visiting coastal resort regions like Manado and/or Bitung make a side trip to Tomohon City, it would become a chance to send tourists to the current less popular tourism destinations in the mountainous regions in the southern part of North Sulawesi Province. To gain tourists from the coastal resort area, collection and dissemination of extensive tourism information, installation of tourist information centers, and creation of various sightseeing tours conducting by organized tourism operators are required.

Furthermore, Tomohon City is located in an active volcanic region. Since Mount Lokon, which is located close to the city's downtown area, erupts approximately once every ten years, it is crucial to prepare evacuation shelters for tourists and residents in the case of disaster.

It is expected that the knowledge of '*michi-no-eki*' will be utilized for the local situations mentioned above.

4. Project Objective: Improve income of households engaged in agriculture and/or tourism in Tomohon City through development of collaboration among region, agricultural products, and tourism as well as creating new sales outlets of regional products by utilizing knowledge of roadside stations '*michi-no-eki*'

5. Target Area: Tomohon City, North Sulawesi Province

6. Target Group: Organic farmers (30 households) and Tourism companies (153 companies). For disaster preparedness, tourists passing through Tomohon city (500 people/day) and residents (5000)

7. Expected Outcomes and Indicators:

Outcomes:

1. Sales of agricultural products are increased as tourists are increasing through promoting agritourism.
2. Tourism association is formulated as well as dissemination of tourism information and create of extensive sightseeing routes are promoted.
3. Organic and/or low pesticide vegetables and flowers cultivation area is expanded with the increase in sale of those products by creating new sales outlet such as the farmers shop which will be prepared at the roadside station.
4. Local residents and tourists safety is ensured by utilizing roadside station as an evacuation center at the time of disaster.

Indicators:

1. Organic vegetable farming households will increase from 30 households to 50 households, and the cultivated area will increase from five to seven hectares. Income will increase by about fifteen percent.
 2. The income of 153 tourism enterprises in Tomohon City increases by three percent.
 3. The number of tourists passing through Tomohon City increases by about 10% from 500 people per day, and evacuation places for 5,000 peoples are secured at the time of disaster.
8. Project Term: Three years from the contract date between CHIBAMINAMIBOSO INC and JICA.

9. Implementing Organization:

Japan side: CHIBAMINAMIBOSO INC

Indonesia side: Tomohon City, Indonesia

10. Main Activities of CHIBAMINAMIBOSO INC:

- 1-1 To organize households engaged in agriculture and/or tourism for accepting tourists that participate in hands-on activities, and provide hospitality training.
- 1-2 To conduct a survey on potential agricultural tourism sites and existing tourism resources in Tomohon city for creating a network of appealing spots for tourists
- 1-3 To raise awareness of local residents for ensuring cleanliness and safety at the tourism resources.
- 1-4 To promote organized tourism through organizing tourism-related businesses.
- 2-1 To provide tourist information desk and rest facilities at the roadside station which will be prepared in this project using existing facility with a cooperation between Tomohon city and CHIBAMINAMIBOSO INC., as well as provide tourist guide training for staffs, and bring tourists to agritourism areas.
- 2-2 To provide regional/extensive tourist information at the information desk at the road side station.
- 2-3 To create and diversify sightseeing route through conducting monitor tours.
- 2-4 To create a multi-language digital tourism map and updates it regularly to achieve continuous tourists inbound.
- 3-1 To organize farming households who sell their products at the farmers' shop and support them to manage the shop.

- 3-2 To provide advices about extension of the shelf life of agricultural products in the farmers shop.
- 3-3 To provide advices in store design and merchandising for the farmers' shop to increase sale of agricultural products.
- 4-1 To support for preparing emergency manuals for the roadside station.
- 4-2 To install backup power generators which are available for daily use as well as emergency use.
- 4-3 To install water storage tanks with faucets for emergency preparedness in roadside station.

11. Past Activities and Achievements in the Target Country of CHIBAMINAMIBOSO INC:
Minamiboso City participated in JICA's "Indonesian Government Public-Private Partnership Agricultural Promotion Information Collection Project" in 2016. Representatives of the city visited Tomohon City in August and September 2016 as well as representatives from Tomohon City visited Minamiboso City in September 2016. We had several meetings and consultations, visited target area including roadside stations, and collected information on target area.

12. Monitoring and Evaluation

Monitoring and evaluation of the Project will be undertaken by all parties concerned on a mutually arranged basis.

13. Budget Information

The total estimated budget of the project is to be shared in a separate document.

The detail activities shall be discussed and agreed further between Minamiboso City, Chibaminamiboso Inc. and Tomohon City.



Japan International Cooperation Agency

JICA Indonesia
Sentral Senayan II, 14th Floor
Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270, INDONESIA
Tel: (62-21) 5795-2112 (handling) Fax: (62-21) 5795-2116

No.: 296/PPJ/07/2018

Jakarta, 9 July, 2018

Dr.Ir. Suwandi, M.Si
Director General of Horticulture
Ministry of Agriculture

**Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside
Stations 'Michi-No-Eki'
Budget Information (Plan)**

Dear Sir,

With regard to the above mentioned subject and the Minutes of Meeting signed on June 28, 2018, we hereby inform you of the project budget estimation. However, please note that the figures are only estimated amount and subject to changes in the future.

Project Title	Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations 'Michi-No-Eki'
Duration	Aug. 2018 – Jul. 2021
Scheme	JICA Partnership Program
Counterpart	Director General of Horticulture, Ministry of Agriculture
Budget Plan (Total)	JPY 56,404,080

Thank you very much for your kind attention and cooperation.

Sincerely yours,


Shunsuke TAKATOI
Senior Representative
JICA Indonesia Office



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdhorti@pertanian.go.id

Nomor : B-1467/KL.210/D.1/10/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rencana Perpanjangan Proyek Hibah
"Michi No Eki" JICA

22 Oktober 2024

Yth. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
di
Jakarta

Merujuk Berita Acara Serah Terima (BAST) dari JICA dan Direktorat Jenderal Hortikultura Nomor B-1436/KL.230/D.1/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal Berita Acara Serah Terima proyek "*Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations Michi no Eki*", bersama ini kami sampaikan rencana perpanjangan hibah JICA "*Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations Michi no Eki*" yang semula proyek berakhir pada 28 Februari 2023 diperpanjang menjadi tanggal 16 Oktober 2024 karena diperlukan untuk proses penyelesaian administrasi penutupan proyek hibah dengan nomor register "2RT4RZUA".

Perpanjangan proyek ini dilakukan dalam rangka pemutakhiran data hibah untuk dilakukan pengesahan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon bantuan dan kerjasama Saudara untuk dapat memproses lebih lanjut usulan perpanjangan proyek dimaksud kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
NIP. 19680918 199303 1 002

Tembusan:

1. Plt Direktur Jenderal Hortikultura (sebagai laporan)
2. Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASARMINGGU
TELEPON (021) 7804116 – 7806131, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <https://pertanian.go.id>

Nomor : B-2217/KL.230/A.6/11/2024

14 November
2024

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penetapan Pemutakhiran Hibah JICA *Michi-No-Eki*

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Kementerian Keuangan Nomor:S-709/PR.8/2024 tanggal 8 November 2024 perihal perubahan data register hibah, bersama ini kami informasikan bahwa Kementerian Keuangan telah melakukan pemutakhiran data hibah luar negeri sebagai berikut:

Nama Hibah : *Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations Michi-No-Eki*

Donor : JICA

Periode : 28 Juni 2018 – 16 Oktober 2024

Nilai Hibah : JPY 56.404.080.

Bentuk hibah : Barang dan Jasa

Nomor Register : 2RT4RZUA

Selanjutnya diharapkan satker hibah tersebut secara aktif melaporkan perkembangan pelaksanaan hibah (kegiatan fisik, keuangan maupun permasalahan) setiap triwulan melalui aplikasi SIPOR PHLN) dengan mengakses alamat web: siporphln.pertanian.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri,



Dr. Ade Candradijaya
NIP 196906031999031001

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Direktur Jenderal Hortikultura.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELMEN

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 7 JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230 PSW 2702,
(021) 3864778 ; FAKSIMILE (021) 3843712 ; LAMAN www.djppr.kemenkeu.go.id

Nomor : S-709/PR.8/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Perubahan Data Hibah Nomor Register 2RT4RZUA

8 November 2024

Yth. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian
Jalan Harsono RM Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta 12550

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: B-2102/KL.230/A.6/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 hal Permohonan Pemutakhiran Hibah JICA Michi-No-Eki, yang kami terima pada tanggal 8 November 2024, dengan ini kami sampaikan bahwa kami telah melakukan penetapan perubahan tanggal batas penarikan hibah sebagaimana terlampir dan tetap menggunakan nomor register 2RT4RZUA.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Direktur Evaluasi, Akuntansi dan
Setelmen



Ditandatangani secara elektronik
Endah Martiningrum

Tembusan:

1. Direktur Sistem Penganggaran, DJA, Kementerian Keuangan.
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, DJPb, Kementerian Keuangan.

Layanan kami biaya nihil.
Terima kasih telah memberikan dukungan untuk gerakan anti korupsi
dengan tidak memberikan gratifikasi



Lampiran Surat Penetapan
Nomor : S- /PR.8/2024
Tanggal : 8 November 2024

Perubahan Data Hibah

No	No Register	Keterangan	Semula	Menjadi
1	2RT4RZUA	Tgl. Batas Penarikan	28-02-2023	16-10-2024

Disclaimer:

- Kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan perubahan data hibah menjadi tanggungjawab pemohon perubahan data hibah
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya





Japan International Cooperation Agency

JICA Indonesia
Sentral Senayan II, 14th Floor
Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270, INDONESIA
Tel: (62-21) 5795-2112 (hunting) Fax: (62-21) 5795-2116

No. 1270/PRJ/03/2023

Jakarta, March 24, 2023

Attention to:

Dr.Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc
Director General of Horticulture
Ministry of Agriculture

Completion Administration Letter:
The JICA Partnership Program for Agriculture Promotion through Agrotourism
Utilizing the Knowledge of Roadside Stations "Michi-no-Eki"

Dear Sir,

On behalf of Japan International Cooperation Agency (JICA), we would like to express our sincere appreciation for your continuous cooperation you have extended to our activities in Indonesia.

We would like to inform you that JICA Partnership Program for Agriculture Promotion through Agrotourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations "Michi-no-Eki" has been completed on February 28, 2023.

The disbursement data is described in the following table:

The disbursement data is described in the following table.						
JICA ID	Project Title	Duration		Assistance Amount Plan (in JPY)	Actual Disbursement	
		From	To		Period	Amount (in JPY)
201707333	Agriculture Promotion through Agrotourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations "Michi-no-Eki"	28/06/2018	28/02/2023	56,404,080	June 2018 – December 2019	16,016,130
201702167					January 2020 – February 2023	37,434,150
Total						53,450,280

Thank you very much for your attention and collaboration.

Yours sincerely,


Kenji OKAMURA
Sector Representative
JICA Indonesia Office

Attachment:

- Summary Report
- Purchase List



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASARMINGGU
TELEPON (021) 7804116 – 7806131, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <https://pertanian.go.id>

Nomor : B-2102/KL.230/A.6/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pemutakhiran Hibah JICA
Michi-No-Eki

30 Oktober 2024

Yth.
Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Ditjen. Hortikultura Nomor:B-1467/KL.210/D.1/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 perihal rencana perpanjangan hibah JICA, bersama ini kami sampaikan permohonan pemutakhiran hibah JICA: *Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations Michi-No-Eki*, dengan nomor register 2RT4RZUA. Pemutakhiran yang dilakukan adalah periode hibah yang semula berakhir tanggal 28 Februari 2023 diperpanjang menjadi tanggal 16 Oktober 2024 dengan tujuan untuk penyelesaian proses pengesahan ke KPPN dan penutupan nomor register hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara dalam proses pemutakhiran data hibah dimaksud. Sebagai dokumen pendukung, kami sampaikan Ringkasan Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) sekaligus sebagai amandemen perpanjangan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri,



Dr. Ade Candradijaya
NIP 196906031999031001

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Direktur Jenderal Hortikultura.



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

**PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK
BARANG / JASA / SURAT BERHARGA**

Nomor : 01205T
Tanggal : 03-12-2024
Satker : 625875 - DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

KPPN : 139 - JAKARTA V
Tanggal : 03-12-2024
Nomor : 820984361968545454
Tahun Anggaran : 2024

Telah disetujui pencatatan pendapatan hibah dan belanja pencatatan hibah sejumlah :

Saldo awal	: Rp	0
Pendapatan	: Rp	1.485.384.000
Belanja	: Rp	1.485.384.000
Saldo Akhir	: Rp	0

Yaitu : Hibah langsung luar negeri dalam rangka bantuan pelaksanaan proyek pembangunan gedung Michi No Eki, sesuai BAST No.B-1437/KL.230/D.1/10/2024 tgl.16/10/2024 dan Surat Perjanjian No.MM tgl.28/06/2018

Jakarta, 05-11-2024
Kuasa Bendahara Umum Negara
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



Ditandatangani secara elektronik
Agustina Suswardani Kanti Astuti
NIP. 197108291992012001



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA		
Nomor 01205A	Tanggal 03-Des-2024	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Negara, Jakarta V (139) Agar melakukan pencatatan atas penerimaan hibah langsung sejumlah bentuk barang/jasa/surat sejumlah 0,00		
**** NIHIL ****		
Tahun Anggaran: 2024 Dasar PP NO.10/2011 Nomor SP3HL-BJS: B- 1437/KL.230/D.1/10/2024 Tanggal SP3HL-BJS: 16-10-2024 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024		Jenis Tagihan : MEMO PENC HIBAH LNGSNG BRG JASA SURAT BERHRGA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : Pengesahan No. Register : 2RT4RZUA
Barang/Jasa/Surat Berharga		JUMLAH UANG
625875.139.117122.0180400.0000000.M02RT4RZUA.00000.1.0154.0.000000.000000		1.198.000.000,00
625875.139.117124.0180400.0000000.M02RT4RZUA.00000.1.0154.0.000000.000000		287.384.000,00
Barang/Jasa/Surat Berharga		1.485.384.000,00
PENDAPATAN		JUMLAH UANG
977263.140.431221.9990200.0000000.M02RT4RZUA.00000.1.0154.0.000000.000000		1.485.384.000,00
Jumlah Pendapatan		1.485.384.000,00
TOTAL PEMBAYARAN		**** NIHIL ****
Kepada: Nomor Supplier : Nama Supplier : Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya Yaitu : Hibah langsung luar negeri dalam rangka bantuan pelaksanaan proyek pembangunan gedung Michi No Eki, sesuai BAST No.B-1437/KL.230/D.1/10/2024 tgl.16/10/2024 dan Surat Perjanjian No.MM tgl.28/06/2018		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM		
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.		
Jakarta Selatan, 03 Desember 2024 Kuasa Pengguna Anggaran		
		
MUHAMMAD TAUFIQ RATULE NIP 196809181993031002		

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 01205A
Tanggal : 03-Desember-2024
Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
625875.139.117124.0180400.0000000.M02RT4RZUA.00000.1.0154.0.000000.000000		
1	000.000.00.0000000-	287.384.000,00
	Jumlah	287.384.000,00
625875.139.117122.0180400.0000000.M02RT4RZUA.00000.1.0154.0.000000.000000		
1	000.000.00.0000000-	1.198.000.000,00
	Jumlah	1.198.000.000,00
Jumlah		1.485.384.000,00

Jakarta Selatan
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

MUHAMMAD TAUFIQ RATULE
NIP 196809181993031002



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdhorti@pertanian.go.id

**SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG
BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERTAGIH**

NOMOR : B-1437/KL.230/D.1/10/2024

TANGGAL : 16 Oktober 2024

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V

Bersama ini disampaikan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Bertagih sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan hibah yang diterima berupa Barang/Jasa/Surat Bertagih dengan rincian sebagai berikut :

Penerima Hibah

Bagian Anggaran/ Eselon I : Direktorat Jenderal Hortikultura
Kode dan Nama Satker : 625875 / Satker Direktorat Jenderal Hortikultura

Pemberi Hibah

Negara Donor : Jepang
Nama Donor : Japan International Cooperation Agency (JICA)
Nama Proyek : *Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations Michi no Eki*
Nomor & Tgl Perjanjian Hibah : MM, 28 Juni 2018
Nilai Hibah : JPY 56,404,080 / IDR 6.601.482.759
1 JPY = IDR 117,0391 (24 Maret 2023)

Rencana Pendapatan Hibah

Nomor Register : 2RT4RZUA
Nilai Realisasi Hibah : JPY 14,058,543 sehingga jumlah total untuk hibah barang dan bangunan sebesar IDR 1.485.384.000,-

Bentuk Hibah : ☒ Barang ☐ Jasa ☐ Surat Bertagih
Akun : 431221

Jakarta, 16 Oktober 2024
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
NIP. 19680918 199303 1 002



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id / sekdhorti@pertanian.go.id

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG (SPTMHL)

Nomor : B-1437/KL.230/D.1/10/2024

Tanggal: 16 Oktober 2024

Menyatakan bahwa saya atas nama :

Kementerian Negara/Lembaga : (018) Kementerian Pertanian
Eselon I : (04) Direktorat Jenderal Hortikultura
Satker : (625875) Direktorat Jenderal Hortikultura
Nomor dan Tanggal DIPA : Tidak Ada DIPA
Nomor dan Tanggal SP Pengesahan : Tidak Ada SP Pengesahan

Bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa jasa yang diterima langsung dari:

Pemberi Hibah : Japan International Cooperation Agency
Nilai Hibah / Komitmen Hibah : JPY 56,404,080 / IDR 6.601.482.759
1 JPY = IDR 117,0391 (24 Maret 2023)

Digunakan dalam rangka bantuan pelaksanaan proyek pembangunan gedung Michi no Eki (berupa toko pertanian, tempat pengungsian untuk penanggulangan bencana, tempat parkir, eksterior, tempat informasi pariwisata dan fasilitas istirahat) dan bantuan barang (furniture dan peralatan, komputer, printer, televisi, stand televisi, *wi-fi router*) yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, tanpa melalui KPPN dengan rincian sebagai berikut:

No	Pendapatan		Hibah	
1	431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
			117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

Bukti-bukti / BAST *) terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



Jakarta, 16 Oktober 2024
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
NIP. 19680918 199303 1 002

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG & BANGUNAN

Nomor : B-1435/KL.230/D.1/10/2024

Tanggal : 16 Oktober 2024

Pada hari ini Rabu, Enam Belas Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 OKAMURA Kenji : Senior Representative Japan International Cooperation Agency Indonesian Office
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 Dr.Ir.Muhammad Taufiq Ratule, M.Si : Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan barang dan bangunan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima barang tersebut dari **PIHAK PERTAMA**. Jenis dan jumlah barang terlampir, barang tersebut diterima dalam keadaan baik, utuh dan lengkap.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa **PIHAK PERTAMA** telah melakukan pengeluaran berupa biaya pelaksanaan proyek pembangunan gedung Michi no Eki (berupa toko pertanian, gedung pengungsian untuk penanggulangan bencana, tempat parkir, eksterior, tempat informasi pariwisata dan fasilitas istirahat) di Kota Tomohon dan bantuan barang (furniture dan peralatan, komputer, printer, televisi, stand televisi, *wi-fi router*) senilai IDR1.485.384.000,- (JPY14,058,543) periode Juni 2018 s/d Februari 2023 untuk bantuan hibah "*Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations Michi no Eki*" di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara kepada **PIHAK KEDUA**.

Angka ini merupakan bagian dari total *actual disbursement* dari Januari 2020 s/d Februari 2023 untuk bantuan barang dan bangunan gedung "*Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations Michi no Eki*" per 24 Maret 2023 (JPY 37,434,150 dan setara dengan IDR 4.381.259.225,- unit rate 1 JPY = IDR 117,0391 (BI middle transaction rate - as of March. 24, 2023) sesuai dengan surat JICA Nomor 1270/PRJ/03/2023 tanggal 24 Maret 2023.

Semua buku/kwitansi terkait pengadaan barang dan bangunan disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Berita Acara Serah Terima ini adalah bagian dari proses perpanjangan hibah apabila ada proses administrasi kepengurusan pengesahan hibah melebihi tanggal penutupan. Proyek hibah ini akan dianggap selesai/ditutup setelah proses pengesahan ke KPPN, Kementerian Keuangan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
Senior Representative Japan International
Cooperation Agency Indonesian Office



OKAMURA Kenji

PIHAK KEDUA
Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura



Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
NIP. 196809181993031002

List Barang

Jenis Barang	Standard/ Product No.	Qty	Harga		Tanggal Pembelian	(*) Rate JPY
			Harga (IDR)	Harga JPY(*)		
Gedung Stasiun Jalan "Michi No Eki" Pakewa Tomohon	Bangunan kayu 2 lantai dengan atap seng (Luas bangunan: 453.3 m2)	1 gedung	1,198,000,000	11.369.020	11.11.2022	JICA Rate 1JPY= 0.009490
Peralatan dan Perabotan Stasiun Jalan	(1) Perabotan untuk Pusat Informasi (2) Perabotan untuk meja souvenir (3) Perabotan untuk barang jualan	1 pcs	186,350,000	1.774.155	11.11.2022	JICA Rate 1JPY= 0.009490
Komputer	AIO DELL INSPIRON 5400 Intel Core i3-1115G4 8GB DDR4/256GB SSD/23.8"/DVD RW Win10+OHS	3 pcs	41,166,728	372.971	22.8.2022	JICA Rate 1JPY= 0.009060
Printer	EPSON L5290 A4 WiFi All-in-One Ink Tank Printer with ADF L5190	1 pcs	7,020,682	63.607	22.8.2022	JICA Rate 1JPY= 0.009060
Televisi	Sony Bravia OLED A80J Smart TV 55 inch	1 pcs	43,400,581	393.209	22.8.2022	JICA Rate 1JPY= 0.009060
Wi-Fi Router	Ubiquiti Unifi AP AC PRO (UAP-AC-PRO) UBNT Dual Band Access Point	1 pcs	7,212,155	65.342	22.8.2022	JICA Rate 1JPY= 0.009060
TV Stand	Stand Bracket Roda 80, 75, 70, 60, 55 inch	1 pcs	2,233,854	20.239	22.8.2022	JICA Rate 1JPY= 0.009060
Total			1.485.384.000	14.058.543		

PIHAK PERTAMA
Senior Representative Japan International
Cooperation Agency Indonesian Office

岡村 健司

OKAMURA Kenji

PIHAK KEDUA
Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura



Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
NIP 196809181993031002

MEETING MINUTES
BETWEEN
THE JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY
AND
DIRECTORATE GENERAL OF HORTICULTURE,
MINISTRY OF AGRICULTURE, REPUBLIC OF INDONESIA
ON
JAPANESE TECHNICAL COOPERATION
UNDER
THE JICA PARTNERSHIP PROGRAM BETWEEN CHIBAMINAMIBOSO INC AND
TOMOHOH CITY
FOR
AGRICULTURE PROMOTION THROUGH AGRITOURISM UTILIZING THE
KNOWLEDGE OF ROADSIDE STATIONS '*michi-no-eki*'

The Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA") exchanged views and had a series of discussions through the JICA Indonesia Office with Directorate General of Horticulture, Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia for the purpose of working out the details of activities and measures to be taken by Chibaminamiboso Inc. and Tomohon City concerning "Agriculture Promotion Through Agro-tourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations '*michi-no-eki*'" (hereinafter referred to as "the project"), which will be implemented under the JICA Partnership Program.

As a result of the discussions, both sides agreed to implement the project based on the conditions referred to in the document attached hereto.

Jakarta June 28 , 2018



Mr. YAMANAKA Shinichi

Chief Representative

JICA Indonesia Office

Japan International Cooperation Agency



Dr. Ir. Suwandi, M.Si

Director General of Horticulture

Ministry of Agriculture

The Republic of Indonesia

ATTACHED DOCUMENTS

I. Project Implementation

1. JICA, the executing agency for technical cooperation of the Government of Japan, will implement the Project under the JICA Partnership Program in collaboration with CHIBAMINAMIBOSO INC.
2. Ministry of Agriculture of the Government of Indonesia will appoint the authorities of Tomohon City to implement the Project.
3. The Project will be implemented in accordance with the Project Outline, which is attached in the appendix.

II. Measures to be taken by JICA as follows

1. To implement the project efficiently and effectively, JICA will supervise the overall implementation of the Project. Based on a contract to be signed by JICA and CHIBAMINAMIBOSO INC., JICA will entrust the actual implementation of the Project to CHIBAMINAMIBOSO INC.
2. JICA will bear only those expenses it considers necessary for the implementation of the Project.
3. JICA will maintain ownership of the equipment to be procured through its funding for the implementation of the project in accordance with the Project Outline in the appendix throughout the project implementation period.

III. Measures to be taken by Tomohon City as follows

1. The authorities of Tomohon City will cooperate with CHIBAMINAMIBOSO INC to assure the successful implementation of the project.
2. The authorities of Tomohon City will provide CHIBAMINAMIBOSO INC and JICA with all necessary information such as data, maps, and documents that will allow the project to be implemented efficiently and effectively
3. Will build agriculture retailing shop for vegetables and floriculture farmers and rehabilitate organic farmer markets
4. Will build the tourism center and build disaster emergency shelter in road station area
5. Will operate power generator and maintenance as well.
6. Will operate water storage and maintenance as well.
7. Will support competitive bidding and/or other application procedures as needed.
8. The authorities of Tomohon City will provide CHIBAMINAMIBOSO INC and JICA

with all of the necessary information and details on security conditions

9. When the equipment mentioned in II. 3 is deemed necessary for the sustained and effective continuation of the project by Tomohon City, the ownership of the equipment after the completion of the project will be determined through consultation among the parties involved before the completion of the project.

IV. Measures to be taken by Chibaminamiboso City as follows

1. CHIBAMINAMIBOSO INC and Tomohon City will be responsible for the maintenance of the equipment during the project implementation period.
2. Designing, compiling and multiplying digital maps for tourism in multi language, with the step as follow;
 - a. To conduct survey of tourism potency in Tomohon City
 - b. To Provide digital mapping expert
3. Undertaking tour guide seminar for farmers who will be engaged in agritourism,
4. Providing the architect and store designer and merchandising expert. They have task to organize household farmers in managing for selling products.
5. Providing advices about extension of the shelf life of agricultural products in the farmers shop.
6. Providing the facilities of tourism information and information desk as well as the maintenance advices for promoting the tourism of Tomohon city, creating the tourism networking and etc.
7. Providing the facilities of disaster mitigation information, by compiling disaster management guidelines book. Providing advices for preparing an emergency manual for the roadside station.
8. Providing power generator and installing as well, as supportive facilities in roadside station area
9. Preparing and installing water storage and tap for emergency preparedness in roadside station

IV. Mutual Consultations

Any major issues that may arise from or in connection with this attached document shall be resolved through mutual consultations by all parties concerned.

APPENDIX:

• The Project Outline	All types of JICA Partnership Program
• Outline of Project (Expert)	Community Proposal Type of JICA
• Outline of (name of training course)	Partnership Program only (when necessary)

APPENDIX: PROJECT OUTLINE

1. Country: Republic of Indonesia

2. Project Title: Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations '*michi-no-eki*'

3. Background and Necessity of the Project:

Despite the fact that 65% of residents in Tomohon City are engaged in agriculture, the average area of cultivated land is less than 0.3 hectares per a farming household. The low income and lack of successors to take on the agricultural business is a serious problem, and the city is promoting value added farming such as organic farming in order to increase the income of farming households. The income for flower farming households is similarly low as well, as their sales outlets are limited. Therefore, the vegetable and flower farming community has large expectations for the chance to increase their income through diversification of sales outlets of local products such as establishment of farmers' shops, where those farmers will sell their products directly, and promotion of agritourism for increasing tourists inbound and creating sales chances.

Additionally, Tomohon City has been developing its tourism industry over the past ten years, while the majority of tourists coming on a day trip from Manado. It is considered that there are some issues; limited tourism information on internet, no tourist information center, and tourist information is handled separately by few travel agency and each hotels. If the tourists visiting coastal resort regions like Manado and/or Bitung make a side trip to Tomohon City, it would become a chance to send tourists to the current less popular tourism destinations in the mountainous regions in the southern part of North Sulawesi Province. To gain tourists from the coastal resort area, collection and dissemination of extensive tourism information, installation of tourist information centers, and creation of various sightseeing tours conducting by organized tourism operators are required.

Furthermore, Tomohon City is located in an active volcanic region. Since Mount Lokon, which is located close to the city's downtown area, erupts approximately once every ten years, it is crucial to prepare evacuation shelters for tourists and residents in the case of disaster.

It is expected that the knowledge of '*michi-no-eki*' will be utilized for the local situations mentioned above.

4. Project Objective: Improve income of households engaged in agriculture and/or tourism in Tomohon City through development of collaboration among region, agricultural products, and tourism as well as creating new sales outlets of regional products by utilizing knowledge of roadside stations '*michi-no-eki*'

5. Target Area: Tomohon City, North Sulawesi Province

6. Target Group: Organic farmers (30 households) and Tourism companies (153 companies). For disaster preparedness, tourists passing through Tomohon city (500 people/day) and residents (5000)

7. Expected Outcomes and Indicators:

Outcomes:

1. Sales of agricultural products are increased as tourists are increasing through promoting agritourism.
2. Tourism association is formulated as well as dissemination of tourism information and create of extensive sightseeing routes are promoted.
3. Organic and/or low pesticide vegetables and flowers cultivation area is expanded with the increase in sale of those products by creating new sales outlet such as the farmers shop which will be prepared at the roadside station.
4. Local residents and tourists safety is ensured by utilizing roadside station as an evacuation center at the time of disaster.

Indicators:

1. Organic vegetable farming households will increase from 30 households to 50 households, and the cultivated area will increase from five to seven hectares. Income will increase by about fifteen percent.
2. The income of 153 tourism enterprises in Tomohon City increases by three percent.
3. The number of tourists passing through Tomohon City increases by about 10% from 500 people per day, and evacuation places for 5,000 peoples are secured at the time of disaster.

8. Project Term: Three years from the contract date between CHIBAMINAMIBOSO INC and JICA.

9. Implementing Organization:

Japan side: CHIBAMINAMIBOSO INC

Indonesia side: Tomohon City, Indonesia

10. Main Activities of CHIBAMINAMIBOSO INC:

- 1-1 To organize households engaged in agriculture and/or tourism for accepting tourists that participate in hands-on activities, and provide hospitality training.
- 1-2 To conduct a survey on potential agricultural tourism sites and existing tourism resources in Tomohon city for creating a network of appealing spots for tourists
- 1-3 To raise awareness of local residents for ensuring cleanliness and safety at the tourism resources.
- 1-4 To promote organized tourism through organizing tourism-related businesses.
- 2-1 To provide tourist information desk and rest facilities at the roadside station which will be prepared in this project using existing facility with a cooperation between Tomohon city and CHIBAMINAMIBOSO INC., as well as provide tourist guide training for staffs, and bring tourists to agritourism areas.
- 2-2 To provide regional/extensive tourist information at the information desk at the road side station.
- 2-3 To create and diversify sightseeing route through conducting monitor tours.
- 2-4 To create a multi-language digital tourism map and updates it regularly to achieve continuous tourists inbound.
- 3-1 To organize farming households who sell their products at the farmers' shop and support them to manage the shop.

- 3-2 To provide advices about extension of the shelf life of agricultural products in the farmers shop.
- 3-3 To provide advices in store design and merchandising for the farmers' shop to increase sale of agricultural products.
- 4-1 To support for preparing emergency manuals for the roadside station.
- 4-2 To install backup power generators which are available for daily use as well as emergency use.
- 4-3 To install water storage tanks with faucets for emergency preparedness in roadside station.

11. Past Activities and Achievements in the Target Country of CHIBAMINAMIBOSO INC:
Minamiboso City participated in JICA's "Indonesian Government Public-Private Partnership Agricultural Promotion Information Collection Project" in 2016. Representatives of the city visited Tomohon City in August and September 2016 as well as representatives from Tomohon City visited Minamiboso City in September 2016. We had several meetings and consultations, visited target area including roadside stations, and collected information on target area.

12. Monitoring and Evaluation

Monitoring and evaluation of the Project will be undertaken by all parties concerned on a mutually arranged basis.

13. Budget Information

The total estimated budget of the project is to be shared in a separate document.

The detail activities shall be discussed and agreed further between Minamiboso City, Chibaminamiboso Inc. and Tomohon City.



Japan International Cooperation Agency

JICA Indonesia
Sentral Senayan II, 14th Floor
Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270, INDONESIA
Tel: (62-21) 5795-2112 (hunting) Fax: (62-21) 5795-2116

No.: 296/PRJ/07/2018

Jakarta, 9 July, 2018

Dr.Ir. Suwandi, M.Si
Director General of Horticulture
Ministry of Agriculture

**Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside
Stations 'Michi-No-Eki'
Budget Information (Plan)**

Dear Sir,

With regard to the above mentioned subject and the Minutes of Meeting signed on June 28, 2018, we hereby inform you of the project budget estimation. However, please note that the figures are only estimated amount and subject to changes in the future.

Project Title	Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations 'Michi-No-Eki'
Duration	Aug. 2018 – Jul. 2021
Scheme	JICA Partnership Program
Counterpart	Director General of Horticulture, Ministry of Agriculture
Budget Plan (Total)	JPY 56,404,080

Thank you very much for your kind attention and cooperation.

Sincerely yours,


Shunsuke TAKATOI
Senior Representative
JICA Indonesia Office



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id / sekdihorti@pertanian.go.id

Nomor : B-1467/KL.210/D.1/10/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rencana Perpanjangan Proyek Hibah
"Michi No Eki" JICA

22 Oktober 2024

Yth. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
di
Jakarta

Merujuk Berita Acara Serah Terima (BAST) dari JICA dan Direktorat Jenderal Hortikultura Nomor B-1436/KL.230/D.1/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal Berita Acara Serah Terima proyek "*Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations Michi no Eki*", bersama ini kami sampaikan rencana perpanjangan hibah JICA "*Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations Michi no Eki*" yang semula proyek berakhir pada 28 Februari 2023 diperpanjang menjadi tanggal 16 Oktober 2024 karena diperlukan untuk proses penyelesaian administrasi penutupan proyek hibah dengan nomor register "2RT4RZUA".

Perpanjangan proyek ini dilakukan dalam rangka pemutakhiran data hibah untuk dilakukan pengesahan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon bantuan dan kerjasama Saudara untuk dapat memproses lebih lanjut usulan perpanjangan proyek dimaksud kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
NIP. 19680918 199303 1 002

Tembusan:

1. Plt Direktur Jenderal Hortikultura (sebagai laporan)
2. Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASARMINGGU
TELEPON (021) 7804116 – 7806131, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <https://pertanian.go.id>

Nomor : B-2217/KL.230/A.6/11/2024

14 November
2024

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penetapan Pemutakhiran Hibah JICA *Michi-No-Eki*

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Kementerian Keuangan Nomor:S-709/PR.8/2024 tanggal 8 November 2024 perihal perubahan data register hibah, bersama ini kami informasikan bahwa Kementerian Keuangan telah melakukan pemutakhiran data hibah luar negeri sebagai berikut:

Nama Hibah : *Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations Michi-No-Eki*

Donor : JICA

Periode : 28 Juni 2018 – 16 Oktober 2024

Nilai Hibah : JPY 56.404.080.

Bentuk hibah : Barang dan Jasa

Nomor Register : 2RT4RZUA

Selanjutnya diharapkan satker hibah tersebut secara aktif melaporkan perkembangan pelaksanaan hibah (kegiatan fisik, keuangan maupun permasalahan) setiap triwulan melalui aplikasi SIPOR PHLN) dengan mengakses alamat web: siporphln.pertanian.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri,



Dr. Ade Candradijaya
NIP 196906031999031001

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Direktur Jenderal Hortikultura.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELMEN

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 7 JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230 PSW 2702,
(021) 3864778 ; FAKSIMILE (021) 3843712 ; LAMAN www.djppr.kemenkeu.go.id

Nomor : S-709/PR.8/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Perubahan Data Hibah Nomor Register 2RT4RZUA

8 November 2024

Yth. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian
Jalan Harsono RM Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta 12550

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: B-2102/KL.230/A.6/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 hal Permohonan Pemutakhiran Hibah JICA Michi-No-Eki, yang kami terima pada tanggal 8 November 2024, dengan ini kami sampaikan bahwa kami telah melakukan penetapan perubahan tanggal batas penarikan hibah sebagaimana terlampir dan tetap menggunakan nomor register 2RT4RZUA.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Direktur Evaluasi, Akuntansi dan
Setelmen



Ditandatangani secara elektronik
Endah Martiningrum

Tembusan:

1. Direktur Sistem Penganggaran, DJA, Kementerian Keuangan.
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, DJPb, Kementerian Keuangan.

Layanan kami biaya nihil.
Terima kasih telah memberikan dukungan untuk gerakan anti korupsi
dengan tidak memberikan gratifikasi



Lampiran Surat Penetapan
Nomor : S- /PR.8/2024
Tanggal : 8 November 2024

Perubahan Data Hibah

No	No Register	Keterangan	Semula	Menjadi
1	2RT4RZUA	Tgl. Batas Penarikan	28-02-2023	16-10-2024

Disclaimer:

- Kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan perubahan data hibah menjadi tanggungjawab pemohon perubahan data hibah
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya





Japan International Cooperation Agency
JICA Indonesia
Sentral Senayan II, 14th Floor
Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270, INDONESIA
Tel: (62-21) 5795-2112 (hunting) Fax: (62-21) 5795-2116

No. 1270/PRJ/03/2023

Jakarta, March 24, 2023

Attention to:
Dr.Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc
Director General of Horticulture
Ministry of Agriculture

Completion Administration Letter:
The JICA Partnership Program for Agriculture Promotion through Agrotourism
Utilizing the Knowledge of Roadside Stations "Michi-no-Eki"

Dear Sir,

On behalf of Japan International Cooperation Agency (JICA), we would like to express our sincere appreciation for your continuous cooperation you have extended to our activities in Indonesia.

We would like to inform you that JICA Partnership Program for Agriculture Promotion through Agrotourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations "Michi-no-Eki" has been completed on February 28, 2023.

The disbursement data is described in the following table:

The disbursement data is described in the following table.						
JICA ID	Project Title	Duration		Assistance Amount Plan (in JPY)	Actual Disbursement	
		From	To		Period	Amount (in JPY)
201707333	Agriculture Promotion through Agrotourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations "Michi-no-Eki"	28/06/2018	28/02/2023	56,404,080	June 2018 – December 2019	16,016,130
201702167					January 2020 – February 2023	37,434,150
Total						53,450,280

Thank you very much for your attention and collaboration.

Yours sincerely,


Kenji OKAMURA
Senior Representative
JICA Indonesia Office

Attachment:

- Summary Report
- Purchase List



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASARMINGGU
TELEPON (021) 7804116 – 7806131, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <https://pertanian.go.id>

Nomor : B-2102/KL.230/A.6/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pemutakhiran Hibah JICA
Michi-No-Eki

30 Oktober 2024

Yth.
Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Ditjen. Hortikultura Nomor:B-1467/KL.210/D.1/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 perihal rencana perpanjangan hibah JICA, bersama ini kami sampaikan permohonan pemutakhiran hibah JICA: *Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations Michi-No-Eki*, dengan nomor register 2RT4RZUA. Pemutakhiran yang dilakukan adalah periode hibah yang semula berakhir tanggal 28 Februari 2023 diperpanjang menjadi tanggal 16 Oktober 2024 dengan tujuan untuk penyelesaian proses pengesahan ke KPPN dan penutupan nomor register hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara dalam proses pemutakhiran data hibah dimaksud. Sebagai dokumen pendukung, kami sampaikan Ringkasan Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) sekaligus sebagai amandemen perpanjangan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri,



Dr. Ade Candradijaya
NIP 196906031999031001

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Direktur Jenderal Hortikultura.



LAMPIRAN

REKENING PENAMPUNGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN (RPATA)



KEMENTERIAN
PERTANIAN





DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 259991302006450

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	259991302006450	18-02-2025	18-02-2025	33,498,431	00003T/280151/2025	17-02-2025	PEMBAYARAN RPATA	NON GAJI	Pembayaran Pembelian Sarana Angkutan Hortikultura Di Kabupaten Pulau Morotai sesuai BAST Nomor 074/UKM.BAST/XII/2024 Tanggal 30-12-2024	Cek Akun	☐



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 259991302006449

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	259991302006449	18-02-2025	18-02-2025	33,498,431	00004T/280151/2025	17-02-2025	PEMBAYARAN RPATA	NON GAJI	Pembayaran Sarana Angkutan Hortikultura Kabupaten Halmaher Utara Tahun 2024 sesuai BAST Nomor 075/UKM.BAST/XII/2024 Tanggal 30-12-2024	Cek Akun	☐



DAFTAR SP2D SATKER

Jenis SPM : PEMBAYARAN RPATA

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Mata Uang	Rate	Tanggal Rate	Nilai SP2D Ekuivalen	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	259991302005860	14-01-2025	14-01-2025	162,008,734.00	IDR	1	14-01-2025	162,008,734	PEMBAYARAN RPATA	00020T/625875/2025	13-01-2025	NON GAJI	Pembayaran Sarana Pemasaran Hortikultura tahap IV sesuai BAST Nomor I.PPK.6/BAST/5058/XII/2024 Tanggal 30-12-2024	Cek Akun	☐
2	259991303002779	14-01-2025	14-01-2025	12,054,054.00	IDR	1	14-01-2025	12,054,054	PEMBAYARAN RPATA	00019T/625875/2025	13-01-2025	NON GAJI	Pembayaran Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PPHH sesuai BAST Nomor I.PPK.6/BAST/SEWA-PPHH/T11/XII/2024 Tanggal 31-12-2024	Cek Akun	☐
3	259991303002678	13-01-2025	13-01-2025	16,711,712.00	IDR	1	13-01-2025	16,711,712	PEMBAYARAN RPATA	00018T/625875/2025	08-01-2025	NON GAJI	Pembayaran Sewa Mobil Operasional Direktorat Perbenihan sesuai BAST Nomor I.PPK.2/BAST/eKTG/1365/XII/2024 Tanggal 31-12-2024	Cek Akun	☐
4	259991302004889	10-01-2025	10-01-2025	45,418,438.00	IDR	1	10-01-2025	45,418,438	PEMBAYARAN RPATA	00010T/625875/2025	06-01-2025	NON GAJI	Pembayaran AC Split dalam rangka pemeliharaan peralatan dan mesin sesuai BAST Nomor I.PPK.1/BAST/PL/1739/XII/2024 Tanggal 31-12-2024	Cek Akun	☐
5	259991302004934	10-01-2025	10-01-2025	147,825,460.00	IDR	1	10-01-2025	147,825,460	PEMBAYARAN RPATA	00013T/625875/2025	06-01-2025	NON GAJI	Pembayaran Pemeliharaan kebersihan gedung kantor taman dan halaman (Clening Service) sesuai BAST Nomor I.PPK.1/BAST/PL/1737/XII/2024 Tanggal 31-12-2024	Cek Akun	☐
6	259991303002407	10-01-2025	10-01-2025	104,684,307.00	IDR	1	10-01-2025	104,684,307	PEMBAYARAN RPATA	00014T/625875/2025	06-01-2025	NON GAJI	Pembayaran Pemeliharaan Gedung Kantor Permanen Direktorat Jenderal Hortikultura sesuai BAST Nomor I.PPK.1/BAST/PL/1731/XII/2024 Tanggal 30-12-2024	Cek Akun	☐
7	259991301003024	10-01-2025	10-01-2025	142,233,405.00	IDR	1	10-01-2025	142,233,405	PEMBAYARAN RPATA	00009T/625875/2025	06-01-2025	NON GAJI	Pembayaran Fasilitas Keamanan Kantor dan Lingkungan (Jasa Security) sesuai BAST Nomor I.PPK.1/BAST/PL/1738/XII/2024 Tanggal 31-12-2024	Cek Akun	☐



DAFTAR SP2D SATKER

Jenis SPM : PENIHILAN RPATA

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Mata Uang	Rate	Tanggal Rate	Nilai SP2D Ekuivalen	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	251390301000035	13-01-2025	14-01-2025	0.00	IDR	1	14-01-2025	0	PENIHILAN RPATA	00021T/625875/2025	13-01-2025	LAINNYA	Penihilan RPATA atas Kontrak Nomor I.PPK.6/SPK/5058/XI/2024 untuk Sarana Pemasaran Hortikultura tahap IV	Cek Akun	☐



LAMPIRAN

BA TRANSFER ASET DALAM RANGKA MENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI



**KEMENTERIAN
PERTANIAN**





KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON : (021) 7806881/ 78832048 FAXIMILE (021) 7805880
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>
E-mail : hortikultura@pertanian.go.id / sekdihorti@pertanian.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PEMINDAHTANGANAN / TRANSFER BARANG MILIK NEGARA
Nomor : B – 1759/PL.130/D.1/12/2024

Pada hari ini kamis tanggal dua belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1.

Nama

:

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
- NIP

:

196809181993031002
- Jabatan

:

Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
- Kode Satker

:

018.04.0199.625875.000.KP
- Alamat

:

Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan
- Selanjutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA
2.

Nama

:

Nurul Qomariyah, S.Sos, M.Si
- NIP

:

196910232002122001
- Jabatan

:

Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan
- Kode Satker

:

018.10.0500.239654.000.KD
- Alamat

:

Jl. Ketindan No. 1 Desa Ketindan, Kec. Lawang, Kab. Malang
- Selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KEDUA

Telah melakukan serah terima Barang Milik Negara (BMN) dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara kepada PIHAK KEDUA senilai Rp247.658.400,- (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah). PIHAK KEDUA menerima transfer Barang Milik Negara dari PIHAK KESATU, dengan rincian :

No	Nama barang	Tahun perolehan	Nilai perolehan (Rp)	Keterangan
1	Peralatan dan Mesin Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Lainnya	2024	56.388.000	Baik
2	Jaringan Instalasi PLTS Kapasitas Kecil	2024	39.500.400	Baik
3	Gedung dan Bangunan Bangunan (Low Cost Smart Green House)	2024	151.770.000	Baik
	TOTAL		247.658.400	

Pasal 2

PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan Transfer Keluar dan Pihak Kedua berkewajiban melakukan transfer masuk atas semua Barang Milik Negara pada aplikasi SAKTI.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka tanggung jawab penatausahaan, penggunaan, pengelolaan dan pemeliharaan serta pengamanan atas pengurusan Barang Milik Negara sebagai mana tersebut dalam pasal 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum bagi PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA

Demikian berita acara serah terima ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
seleku Kuasa Pengguna Barang,



Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
NIP 196809181993031002

PIHAK KEDUA

Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan
seleku Kuasa Pengguna Barang,



Nurul Qomariyah, S.Sos, M.Si
NIP 196910232002122001



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7804428
WEBSITE : <https://www.pertanian.go.id>

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA
TANAH GEDUNG DAN BANGUNAN
BIRO UMUM DAN PENGADAAN SEKRETARIAT JENDERAL
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
NOMOR :1283/PL.310/A/04/2024**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-04-2024) yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc
NIP : 196908161995031001
Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II Nama : Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc
NIP : 196908161995031001
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat secara bersama-sama untuk melaksanakan serah terima Barang Milik Negara berupa Tanah, Gedung dan Bangunan dengan ketentuan :

Pasal I
Pelaksanaan Kegiatan

- (1) **PIHAK KESATU** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan dari **PIHAK KESATU**, Barang Milik Negara berupa Tanah 2010104003 NUP 2, Gedung dan Bangunan Toko Tani Indonesia (TTI) kode barang 4010112001 dengan NUP 2 Tahun perolehan 2011 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari **PIHAK KESATU** dalam kondisi baik dan jumlah yang cukup.

Pasal 2

- (1) **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dari **PIHAK KESATU** untuk selanjutnya mempergunakannya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara.
- (2) Terhitung sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini maka seluruh hak dan Kewajiban, tanggung jawab dan kepemilikan terhadap BMN beralih dari **PIHAK KESATU** Kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Penutup

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU



Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc
NIP 196908161995031001

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc
NIP 196908161995031001

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA
BIRO UMUM DAN PENGADAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Nomor : 1283/PL.310/A/04/2024
Tanggal : 29 April 2024

No	Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	NUP	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Luas (m ²)	Kondisi
1	2010104003	Tanah Bangunan Rumah Sakit	Tanah Bangunan Rumah Sakit	2	16/08/1945	154.376.791.000	154.376.791.000	6.370	Baik
2	4010112001	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	TTI	2	11/08/2011	3.579.221.805	3.065.328.417	1.100	Baik
TOTAL						157.956.012.805	157.442.119.417	7.470	

PIHAK KESATU,



Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M. Sc
NIP 196908161995031001



PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M. Sc
NIP 196908161995031001

KARTU IDENTITAS BARANG TANAH

BIDANG : TANAH (01)
 KELOMPOK : TANAH PERSIL
 SUB KELOMPOK : TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA
 SUB-SUB KELOMPOK : Tanah Bangunan Rumah Sakit

Kode UAKPB : 018010190451005005KP
 Nama UAKPB : BIRO UMUM DAN PENGADAAN

I. UNIT BARANG

- Luas tanah seluruhnya : 6.370 m²
- Luas tanah untuk bangunan : 0 m²
- Luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman, dan lain-lain) : 0 m²
- Luas tanah kosong : 6.370 m²
- Lokasi :
 - Provinsi : DKI JAKARTA
 - Kabupaten / Kota *) : KOTA JAKARTA SELATAN
 - Kecamatan : PASAR MINGGU
 - Kelurahan / Desa *) : JATI PADANG
 - Jalan : JL. RAGUNAN RAYA NO.P7
 - RT / RW / RK : RT001/03
- Tanda - tanda Batas Tanah :
 - Utara : JL. RAGUNAN RAYA
 - Timur : KOMPLEK DEPTAN
 - Selatan : JL. KARANG POLA
- Dokumen Kepemilikan : Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/Lembaga
 - Nomor : HAK PAKAI NO 337/JATIPADANG
 - Tanggal : 06/12/2022 00:00:00
 - Penerbit :
- Status SBSN : -
- Jumlah Bangunan : 0
- Nomor KIB Bangunan : -

II. UNIT PEMAKAI

- Nama Unit : BIRO UMUM DAN PENGADAAN
- Alamat : RAGUNAN RAYA

III. PENGADAAN

- Cara Perolehan : 135 (Perolehan Migrasi SIMAK)
- Dari : -
- Tgl. Perolehan : 16/08/1945
- Biaya Perolehan :
 - Harga per m² : Rp. 24.234.975
 - Harga Seluruhnya : Rp. 154.376.791.000
- Dasar Harga : Perolehan
- Sumber Dana : APBN
- No. : -
- Tgl. : -

IV. NILAI/HARGA

- Nilai Buku : Rp. 154.376.791.000
- Nilai Wajar : Rp. 0
- Nilai Penilaian : -
- Nilai NPWP : Rp. 0
- Tahun : -

V. CATATAN PENGISI

- Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
- Digunakan untuk / oleh : BIRO UMUM DAN PENGADAAN
- Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
- Catatan Lainnya : PUSAT PROMOSI PERTANIAN PASAR MINGGU

FOTO 1



FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4

Disetujui Tgl. :
 Nama Pejabat : Fandi, Ak., M.P.A.
 Jabatan Struktural : Kepala Pengguna Barang
 Tanda tangan dan Stempel :

Disisi Tgl. :
 Nama : Purnomo
 Jabatan : Pelaksana
 Tanda tangan dan Stempel :

KARTU IDENTITAS BARANG GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
 KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
 SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR
 SUB-SUB KELOMPOK : Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen

Kode UAKPB : 018010199451005005KP
 Nama UAKPB : BERO UMUM DAN PENGADAAN

I. UNIT BARANG

- Luas Bangunan : 1100 m²
- Luas Dasar Bangunan : 0 m²
- Jumlah Lantai : 0 Lt.
- Tipe : BANGUNAN PERMANEN
- Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 No. : - Tanggal : -
- Letak Bangunan :
 - Provinsi : DKI JAKARTA
 - Kabupaten / Kota *) : KOTA JAKARTA SELATAN
 - Kecamatan : PASAR MINGGU
 - Kelurahan / Desa *) : Ragunan
 - Jalan : -
 - RT / RW / RK : -
- Nomor KIB Tanah : -

III. PENGADAAN

- Cara Perolehan : 135 (Perolehan Migrasi SIMAK)
- Dari : -
- Tgl. Perolehan : 11/08/2011
- Kondisi Perolehan : Baik
- Biaya Perolehan : Rp. 3.579.221.805
- Dasar Harga : Perolehan
- Sumber Dana : -
- No. : -
 Tgl. : -

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

- Nilai Bruto : Rp. 3.579.221.805
- N. Akum. Penyusutan : Rp. 513.893.388
- Nilai Buku : Rp. 3.065.328.417
- Periode Laporan : -
- Nilai Wajar : Rp. 0
- Tanggal Penilaian : -
- Nilai NJOP : Rp. 0
- Tahun : -

II. UNIT PEMAKAI

- Nama Unit : -
- Alamat : -

V. CATATAN PENGISI

- Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
- Digunakan untuk / oleh : -
- Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
- Catatan Lainnya : TTI Centre

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4



Disetujui Tgl. :
 Nama Pejabat : Fuadi, Ak., M.P.A.
 Jabatan Struktural : Kuasa Pengguna Barang
 Tanda tangan dan Stempel : -

Disisi Tgl. :
 Nama : Purnomo
 Jabatan : Pelaksana
 Tanda tangan dan Stempel : -



LAMPIRAN

**PENDAPATAN DITERIMA DI
MUKA**



**KEMENTERIAN
PERTANIAN**





BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240627443077
Tanggal Billing : 27-06-2024 15:10:57
Tanggal Kedaluwarsa : 04-07-2024 15:10:57
Tanggal Bayar : **27-06-2024 15:53:34**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK RAKYAT INDONESIA**
Channel Bayar : **Overbooking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerima
Kementerian/Lembaga : **018 - KEMENTERIAN PERTANIAN**
Unit Eselon I : **04 - Ditjen Hortikultura**
Satuan Kerja : **625875 - DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**
Total Disetor : 55.805.000 (IDR)
Terbilang : *Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **240627410222**
NTPN : **B9C7D48VVET599C5**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran : 55.805.000 (IDR)
Keterangan : Pembayaran Sewa Tanah Gedung dan Bangunan ATM BRI Jangka Waktu 36 Bulan Terhitung Tanggal 01-01-2024 s/d 31-12-2026.



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240531779076
Tanggal Billing	: 31-05-2024 09:48:01
Tanggal Kedaluwarsa	: 07-06-2024 09:48:01
Tanggal Bayar	: 31-05-2024 13:31:08
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: <i>Mobile Banking</i>
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerima
Kementerian/Lembaga	: 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Eselon I	: 04 - Ditjen Hortikultura
Satuan Kerja	: 625875 - DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
Total Disetor	: 4.099.890 (IDR)
Terbilang	: <i>Empat Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 240531224475
NTPN	: CC42F0NA04GODRG4

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun	: 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran	: 4.099.890 (IDR)
Keterangan	: Pembayaran Sewa Ruang Koperasi Konsumen Direktorat Jenderal Hortikultura Seluas 52,20 M2 Periode 1 Juni 2024 sd 31 Agustus 2024.



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240531794702
Tanggal Billing	: 31-05-2024 10:31:52
Tanggal Kedaluwarsa	: 07-06-2024 10:31:52
Tanggal Bayar	: 31-05-2024 13:28:35
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: <i>Mobile Banking</i>
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerima
Kementerian/Lembaga	: 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Eselon I	: 04 - Ditjen Hortikultura
Satuan Kerja	: 625875 - DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
Total Disetor	: 10.179.037 (IDR)
Terbilang	: <i>Sepuluh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Tujuh (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 240531224242
NTPN	: E536448VVEQA2AOE

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun	: 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran	: 10.179.037 (IDR)
Keterangan	: Pembayaran Sewa Ruang Koperasi Konsumen Direktorat Jenderal Hortikultura Seluas 43,20 M2 Periode 1 September 2023 sd 31 Mei 2024.



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240531775588
Tanggal Billing	: 31-05-2024 09:36:57
Tanggal Kedaluwarsa	: 07-06-2024 09:36:57
Tanggal Bayar	: 31-05-2024 13:25:49
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: <i>Mobile Banking</i>
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerima
Kementerian/Lembaga	: 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Eselon I	: 04 - Ditjen Hortikultura
Satuan Kerja	: 625875 - DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
Total Disetor	: 13.572.049 (IDR)
Terbilang	: <i>Tiga Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Puluh Sembilan (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 240531223841
NTPN	: 36B4055DF9CME034

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun	: 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran	: 13.572.049 (IDR)
Keterangan	: Pembayaran Sewa Ruang Koperasi Konsumen Direktorat Jenderal Hortikultura Seluas 43,20 M2 Periode 2 September 2022 sd 31 Agustus 2023



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240531804550
Tanggal Billing	: 31-05-2024 11:02:24
Tanggal Kedaluwarsa	: 07-06-2024 11:02:24
Tanggal Bayar	: 31-05-2024 13:33:51
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerima
Kementerian/Lembaga	: 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Eselon I	: 04 - Ditjen Hortikultura
Satuan Kerja	: 625875 - DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
Total Disetor	: 16.399.560 (IDR)
Terbilang	: Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 240531224739
NTPN	: DE2262G4VPLH8KC6

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun	: 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran	: 16.399.560 (IDR)
Keterangan	: Pembayaran Sewa Ruang Koperasi Konsumen Direktorat Jenderal Hortikultura Seluas 52,20 M2 Periode 1 September 2024 sd 31 Agustus 2025.